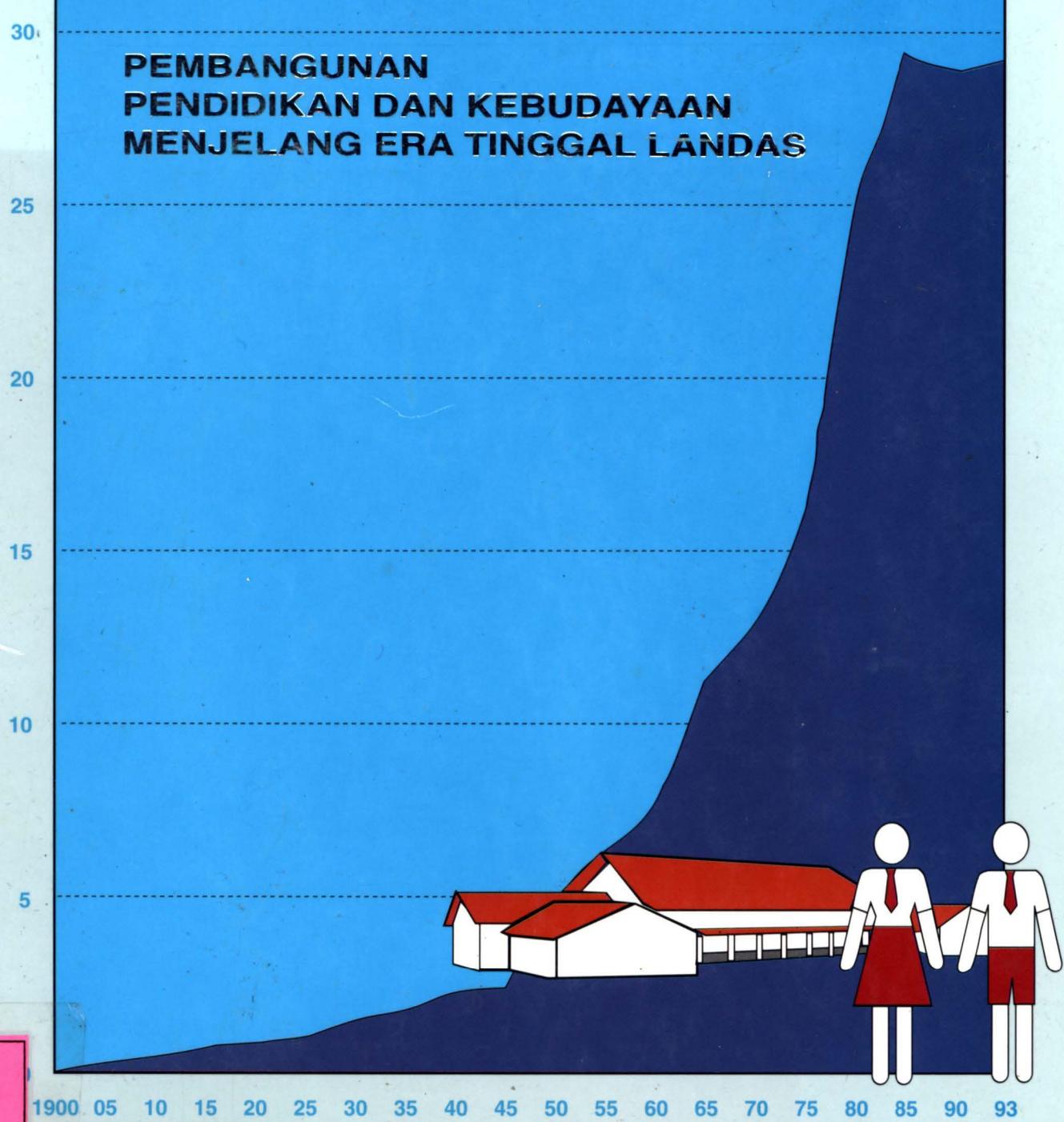
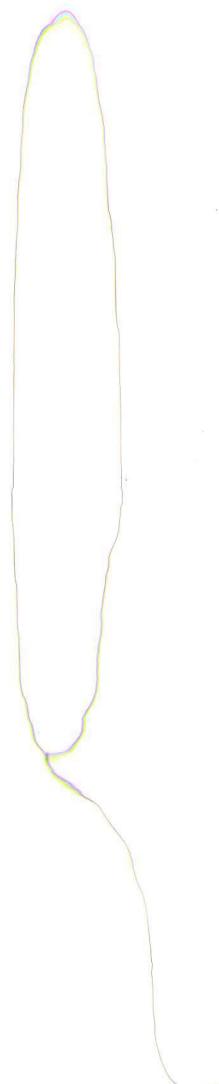


PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN MENJELANG ERA TINGGAL LANDAS



PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN MENJELANG ERA TINGGAL LANDAS



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JAKARTA, 1994

Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan
Menjelang Era Tinggal Landas

Pelindung/Penasehat

Prof. Dr. -Ing. Wardiman Djojonegoro
(Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)

Pengarah

Prof. Dr. Hassan Walinono
Prof. Dr. Ir. Sri Hardjoko Wirjomartono
Prof. Dr. Ir. Bambang Soehendro
Drs. Zaenal Arifin Achmadi, MPA
Prof. Dr. Soedijarto
Prof. Dr. Edy Sediawati
Prof. Mahmud Zaki, M.Sc.
Prof. Dr. Harsja W. Bachtiar
Brigjen TNI Drs. Soeharto
Dr. Ahmad Watik Pratiknya
Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.

Pelaksana

Dr. Ace Suryadi, M.Sc. (Ketua)
Abdullah Irvan Masduki, SH. (Wakil Ketua)
Drs. Ade Cahyana, M.Sc. (Sekretaris)
Drs. Manawi (Anggota)
Dr. Mulyani A. Nurhadi, MA. (Anggota)
Dr. Boediono (Anggota)
Drs. Jorlin Pakpahan (Anggota)
Drs. Djauzak Ahmad (Anggota)
Ir. Abdul Ajis Hosein (Anggota)
Dr. Jiyono, MA. (Anggota)
Drs. Taya Paembongan (Anggota)
Drs. Nunus Supardi (Anggota)
Ir. S.B. Mewengkang (Anggota)
Dr. Slamet Rahardjo (Anggota)
Drs. Endang Sunarya (Anggota)
Drs. Abdul Manan Ahmad, M.Sc. (Anggota)
Sukarna Syarief, SH., MA. (Anggota)

Pembantu Pelaksana

Sumarto, BA
Dra. Ida. Kintamani Dewi, MA
Drs. Ikrar Pramudya
Dasim Budimansyah
Agus Sapari
Agus Salim, SE
Perry Rumantir, S.Com
Djoko Purnomo, MA
Dra. Retno Wibowo, MA
Ir. Yenny Dahliani
Deddy Syahrizal
Budi Iswanto
Drs. Sutopo Derpoyudo
Juhendar

Desain Sampul

Drs. Ade Cahyana, M.Sc.
Agus Sapari

Rancangan Grafis

Citra Indonesia Adiparwa

Percetakan

Jayakarta Agung Offset

KATALOG DALAM TERBITAN

Indonesia : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
"Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan menjelang era tinggal
landas" oleh Tim Depdikbud. -- Jakarta: Balitbang Dikbud, 1994.
vi, 260 hal.; tab.; 29. --

ISBN 979-401-191-6

379.598

1. PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
2. KEBUDAYAAN 3. INDONESIA
- I. Judul II. Badan Penelitian dan Pengembangan
Pendidikan dan Kebudayaan
- III. Tim Depdikbud

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang.
Cetakan Pertama
Jakarta, 2 Mei 1994

© 1994 Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan

Dilarang mereproduksi sebagian atau seluruhnya dalam
bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penulis.



Presiden Soeharto
saat menerima
penghargaan
medali emas

Avicenna
dari UNESCO,
Juni 1993







MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA



KATA PENGANTAR

Dalam GBHN 1993 diamanatkan bahwa "Titik berat pembangunan Jangka Panjang Kedua diletakkan pada ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan, seiring dengan kualitas sumberdaya manusia; dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan seirama, selaras, dan serasi dengan keberhasilan pembangunan bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional". Sebagai akibat dari keterpaduan tersebut, maka pembangunan pendidikan dan kebudayaan dalam PJP II dituntut untuk semakin tanggap terhadap berbagai perkembangan yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan agar mampu memanfaatkan peluang yang ada untuk menghasilkan sumberdaya manusia Indonesia yang dapat menjadi penopang kesinambungan pembangunan nasional.

Berdasarkan amanat GBHN tersebut, maka pendidikan diarahkan kepada upaya mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang mampu menunjang peningkatan produktivitas nasional. Kualitas sumberdaya manusia yang dimaksud disini mencerminkan perpaduan antara dimensi-dimensi iman dan taqwa sebagai landasannya, kecerdasan, keterampilan, sikap dan kepribadian, sebagaimana terkandung dalam tujuan pendidikan nasional dalam GBHN 1993.

Pada awal PJP II ini, kita sudah memasuki era industrialisasi yang sarat dengan berbagai tantangan dan peluang dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu tantangan utama bangsa kita ialah meningkatkan kemampuan dalam mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam menjadi produk yang memiliki nilai tambah yang tinggi. Untuk tujuan tersebut, maka tidak ada pilihan lain kecuali dengan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang handal dalam penguasaan ilmu dan teknologi. Dengan demikian, bangsa Indonesia akan mempunyai daya saing yang tinggi dalam percaturan internasional.

Buku "Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Menjelang Era Tinggal Landas" ini menyajikan gambaran singkat tentang keadaan dan permasalahan pendidikan dan kebudayaan pada periode PJP I serta berbagai perspektif pada PJP II. Pada bagian pertama dikemukakan mengenai tantangan-tantangan masa depan, beberapa kecenderungan penting, dan landasan pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Selanjutnya dikenakan uraian mengenai sistem pendidikan nasional serta pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional, yang disusul oleh gambaran mengenai pembangunan pendidikan dan kebudayaan selama PJP I.

Pada bagian akhir dikupas mengenai perspektif PJP II yang diantaranya meliputi pergeseran ketenagakerjaan, pembangunan bidang pendidikan, dan pembangunan bidang kebudayaan. Seperti diketahui, pembangunan pendidikan dan kebudayaan bersifat multi dimensional, sehingga kebijaksanaan yang dikembangkan semestinya selalu bertolak dari kecenderungan-kecenderungan yang terjadi pada zamannya.

Mudah-mudahan buku ini dapat merangsang kita untuk melihat tantangan dan realitas pendidikan nasional secara lebih analitis.

Semoga buku ini ada manfaatnya..

Jakarta, 2 Mei 1994

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



Prof. Dr. -Ing. Wardiman Djojonegoro

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR TABEL	2
BAB I PENDAHULUAN	4
LATAR BELAKANG	4
BEBERAPA TANTANGAN MASA DEPAN	5
BEBERAPA KECENDERUNGAN PENTING	7
<i>Pergeresan Struktur Ekonomi</i>	<i>7</i>
<i>Pergeresan Struktur Kependudukan</i>	<i>11</i>
<i>Pergeresan Struktur Ketenagakerjaan</i>	<i>15</i>
LANDASAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	16
<i>Pembangunan Pendidikan</i>	<i>16</i>
<i>Pembangunan Kebudayaan</i>	<i>18</i>
SISTEMATIKA PEMBAHASAN	21
BAB II PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NASIONAL INDONESIA	22
PENDIDIKAN NASIONAL	22
<i>Pengertian dan Ruang Lingkup</i>	<i>22</i>
<i>Satuan Pendidikan</i>	<i>22</i>
<i>Jalur Pendidikan</i>	<i>23</i>
<i>Jenis Pendidikan</i>	<i>23</i>
<i>Jenjang Pendidikan</i>	<i>24</i>
• <i>Pendidikan Prasekolah</i>	<i>26</i>
• <i>Pendidikan Dasar</i>	<i>28</i>
• <i>Pendidikan Menengah</i>	<i>34</i>
• <i>Pendidikan Tinggi</i>	<i>40</i>
• <i>Pendidikan Luar Biasa</i>	<i>43</i>
• <i>Pendidikan Luar Sekolah</i>	<i>46</i>
<i>KEBUDAYAAN NASIONAL</i>	<i>46</i>
<i>Ruang Lingkup</i>	<i>46</i>
<i>Langkah-langkah Strategis</i>	<i>47</i>
<i>Memelihara dan Melindungi</i>	<i>47</i>
<i>Menggali dan Meneliti</i>	<i>48</i>
<i>Mengembangkan dan Memperkaya</i>	<i>49</i>
<i>Menyebarluaskan</i>	<i>49</i>
<i>Memanfaatkan</i>	<i>49</i>
<i>Menanggulangi Pengaruh Asing yang Negatif</i>	<i>51</i>
<i>Kerja Sama</i>	<i>51</i>

BAB III PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
SELAMA PJP I	54
PENDIDIKAN	54
Perluasan dan Pemerataan Kesempatan Belajar	54
Peningkatan Mutu Pendidikan	63
<i>Mutu Pendidikan pada Tingkat Sekolah dan LPTK</i>	63
<i>Mutu Perguruan Tinggi</i>	70
Peningkatan Relevansi pendidikan dengan kebutuhan Pembangunan	73
Efisiensi Pengelolaan Pendidikan	82
KEBUDAYAAN	88
Pembinaan dan Pengembangan Nilai-nilai Budaya	88
Pembinaan Kebahasaan, Kesastraan dan Kepustakaan	88
Pembinaan Kesenian	89
Pembinaan Tradisi, Peninggalan Sejarah dan Permuseuman	89
Pembinaan Penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	90
BAB IV PERSPEKTIF PEMBANGUNAN NASIONAL JANGKA PANJANG KEDUA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	92
PERKEMBANGAN KEBUTUHAN AKAN MUTU TENAGA KERJA	92
Jenis Pekerjaan dan Kualifikasi Jabatan	92
Jenis Pengetahuan dan Keterampilan Kerja	94
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	97
Strategi Pokok Pembangunan Pendidikan Nasional	97
Fungsi Dasar Sistem Pendidikan Nasional	98
Prioritas dalam Pembangunan Pendidikan	100
<i>Pertama : Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun</i>	101
<i>Kedua : Peningkatan Mutu pada Semua Jenis dan Jenjang Pendidikan</i>	105
<i>Ketiga : Perluasan, Peningkatan Mutu, dan relevansi Pendidikan Kejuruan dan Teknologi</i>	110
<i>Keempat : Memperkuat Kemampuan Menguasai Iptek Melalui Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi</i>	113
PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN	117
Isu dan Tantangan Pembangunan Kebudayaan	118
Strategi Pokok Pembangunan Kebudayaan dalam PJP II	121
Prioritas Pembangunan Kebudayaan Dalam PJP II	122
LAMPIRAN	132

DAFTAR TABEL

BAB I.

- Tabel 1.1 Perubahan Struktur Ekonomi dan Lapangan Kerja Tahun 1980-1990
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Usia Sekolah di Indonesia Tahun 1990 - 2020
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Menurut Umur di Indonesia Tahun 1990 - 2020
Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Umur di Indonesia Tahun 1990 - 2020
Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Umur di Indonesia Tahun 1990 - 2020
Tabel 1.6 Struktur Angkatan Kerja Indonesia Menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan (%)
Tabel 1.7 Risiko Ketergantungan di Indonesia Tahun 1990 - 2020

BAB II.

- Tabel 2.1 Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Taman Kanak-Kanak Tahun 1969—1992/93
Tabel 2.2 Jumlah Sekolah, Murid Baru Tingkat I, Murid, Lulusan, Guru dan Ruang Kelas Sekolah Dasar (SD) Tahun 1969—1992/93
Tabel 2.3 Perkembangan Sekolah, Murid, dan Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Tahun 1989/90—1992/93
Tabel 2.4 Susunan Program Pengajaran pada Kurikulum Pendidikan Dasar (SD dan SLTP)
Tabel 2.5a Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Tahun 1969—1992/93
Tabel 2.5b Perkembangan Sekolah, Murid, dan Guru Madrasah Aliyah (MA) Tahun 1989/90—1992/93
Tabel 2.6 Susunan Program Pengajaran Sekolah Menengah Umum Kelas I dan II Program Umum
Tabel 2.7 Susunan Program Pengajaran Sekolah Menengah Umum Kelas III Program Bahasa
Tabel 2.8 Susunan Program Pengajaran Sekolah Menengah Umum Kelas III Program Ilmu Pengetahuan Alam
Tabel 2.9 Susunan Program Pengajaran Sekolah Menengah Umum Kelas III Program Ilmu Pengetahuan Sosial
Tabel 2.10 Jumlah Mahasiswa dan Lulusan PT Menurut Status Perguruan Tinggi Tahun 1992/1993
Tabel 2.11 Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Sekolah Luar Biasa Tahun 1969—1992/93

BAB III.

- Tabel 3.1a Jumlah Murid SD+MI 7-12, Penduduk Usia 7-12 Tahun dan APM (Angka Partisipasi Murni)
Tabel 3.1 b Jumlah Murid SLTP, Penduduk Usia 13-15 Tahun dan APK (Angka Partisipasi Kasar)
Tabel 3.2 Jumlah Buta Huruf Penduduk Usia 10 Tahun atau Lebih dan Usia 10—44 tahun Tahun 1971, 1980, 1990
Tabel 3.3 Perkembangan Jumlah Peserta Didik Program Kejar Paket A Selama Pelita V
Tabel 3.4 Perkembangan Jumlah Murid SD dan SLTP Repelite I — V (Tahun 1969—1993/94)
Tabel 3.5 Perkembangan Jumlah Penduduk Usia 7-12 Th. dan 13-15 Th. Tahun 1968—1992
Tabel 3.6 Angka Melanjutkan dari SD ke SLTP Repelite II - V (1974/75—1993/94)
Tabel 3.7 Perkembangan Unit Gedung Baru dan Ruang Kelas Baru SD dan SMP Repelite II—V (Tahun 1974/75—1993/94)
Tabel 3.8 Perkembangan Jumlah Guru SD dan SLTP Repelite I — V (Tahun 1969—1993/94)

- Tabel 3.9 Jumlah Peserta Didik Program Kejar Paket B Selama Pelita V
- Tabel 3.10 Jumlah Murid SLTA, Penduduk Usia 16-18 Tahun dan APK (Angka Partisipasi Kasar)
- Tabel 3.11 Persentase Jumlah Peserta Didik, Pendidikan Kejuruan dan Teknologi Terhadap Jumlah Peserta Didik SLTP, SLTA, dan PT Tahun 1973—1992/93
- Tabel 3.12 Jumlah Mahasiswa PT, Penduduk Usia 19-24 Tahun dan APK (Angka Partisipasi Kasar)
- Tabel 3.13 Perbandingan Peserta Didik Perempuan Terhadap Laki-laki Untuk Jenjang SD, SLTP, SLTA, dan PT Tahun 1973, 1978/79, 1983/84, 1988/89, 1992/93
- Tabel 3.14 Jumlah Guru menurut Kewenangan Mengajar Tahun 1992/93
- Tabel 3.15 Komposisi Guru Menurut Jurusan Pendidikan dan Bidang Studi yang Diajarkan Jenis Sekolah SMP
- Tabel 3.16 Komposisi Guru Menurut Jurusan Pendidikan dan Bidang Studi yang Diajarkan Jenis Sekolah SMA
- Tabel 3.17 Tenaga Pengajar Menurut Tingkat Sekolah dan Ijazah Tertinggi Tahun 1992/93
- Tabel 3.18 Kebutuhan Guru SD dengan Alternatif Guru Merangkap di Tingkat I dan II Tahun 1992/93
- Tabel 3.19 Kebutuhan Guru SD Tahun 1992/93 Alternatif Guru Kelas = Kelas
- Tabel 3.20 Jumlah Lulusan Program Tenaga Kependidikan PT menurut Bidang Studi Tahun 1991/1992
- Tabel 3.21 Kesepadanan Antara Kebutuhan dan Persediaan Guru SLTP dan SLTA Umum Tahun 1992/93 (Berdasarkan Kurikulum 1994)
- Tabel 3.22 Kualifikasi Dosen PTN dan PTS Menurut Pendidikan Tertinggi Tahun 1992/1993
- Tabel 3.23 Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang Dilaksanakan oleh Masyarakat Selama Repelita V (1989/90—1993/94)
- Tabel 3.24 Kesepadanan Antara Persediaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja Tamatan S1 Menurut Keahlian/Fakultas (Perkiraan Selama Repelita V)
- Tabel 3.25 Kesepadanan Antara Persediaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja Tamatan S0 Menurut Keahlian/Fakultas (Perkiraan Selama Repelita V)
- Tabel 3.27 Kesepadanan Antara Persediaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja Tamatan S0 Menurut Keahlian/Fakultas (Perkiraan Selama Repelita VI)
- Tabel 3.28 Kesepadanan Antara Persediaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja Tamatan S1 Menurut Keahlian/Fakultas (Perkiraan Selama Repelita VII)
- Tabel 3.29 Kesepadanan Antara Persediaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja Tamatan S0 Menurut Keahlian/Fakultas (Perkiraan Selama Repelita VII)
- Tabel 3.30 Efisiensi Internal Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 1983/84—1984/85, 1988/89—1989/90, dan 1991/92—1992/93
- Tabel 3.31 Efisiensi Internal Berdasarkan Model Kohort Murid Jenis Sekolah SD Tahun 1991/92 – 1992/93
- Tabel 3.32 Kohort Murid SD Tahun 1991/92 – 1992/93
- Tabel 3.33 Efisiensi Internal Berdasarkan Model Kohort Murid Jenis Sekolah : SLTP Tahun 1991/92 – 1992/93
- Tabel 3.34 Kohort Murid SLTP
- Tabel 3.35 Efisiensi Internal Berdasarkan Model Kohort Murid Jenis Sekolah : SLTA Tahun 1991/92 – 1992/93
- Tabel 3.36 Kohort Murid SLTA

BAB I

PENDAHULUAN

Ptitik berat pembangunan pendidikan diletakkan pada ekonomi seiring dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia

LATAR BELAKANG

ada awal-awal Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP II), Indonesia akan memasuki suatu tahap yang paling menentukan dalam pembangunan nasional yaitu yang disebut proses tinggal landas. Ciri yang sangat penting dari PJP II adalah penekanan yang sangat kuat pada pengembangan sumberdaya manusia (PSDM). Dalam GBHN 1993 dikemukakan bahwa "Titik berat Pembangunan Jangka Panjang Kedua diletakkan pada ekonomi, yang merupakan penggerak utama pembangunan, seiring dengan kualitas sumberdaya manusia; dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan seirama, selaras, dan serasi dengan keberhasilan pembangunan bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional".

Penekanan pada PSDM yang muncul dalam semua sektor dan sub-sektor pembangunan nasional tersebut membuktikan bahwa Indonesia memiliki komitmen yang sangat besar untuk mencapai keunggulan dalam penguasaan Ilmu pengetahuan dan teknologi sejajar dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia. Disadari bahwa kualitas sumberdaya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan faktor penentu dalam mencapai keunggulan tersebut.

Pembangunan pendidikan dan kebudayaan dalam PJP II harus semakin tanggap terhadap berbagai gejolak perubahan yang terjadi dan mampu memanfaatkan berbagai peluang yang ada untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang mampu menunjang kesinambungan pembangunan nasional. Sehubungan dengan itu, tantangan yang dihadapi pembangunan pendidikan dalam PJP II adalah terutama menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, menyelenggarakan pendidikan menengah yang lebih merata dan bermutu sehingga lulusannya lebih mampu melanjutkan pendidikan ke PT, atau menjadi tenaga-tenaga kerja tingkat menengah yang lebih terkait dengan kebutuhan pembangunan, baik dari sisi pengetahuan dan keterampilan kejuruannya, maupun dari kesepadan kebutuhannya.

Dalam PJP II peranan iptek dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, industri, dan semua sektor pembangunan lainnya akan makin menonjol. Pendekatan pembangunan yang lebih banyak mengandalkan kepada sumberdaya alam sudah tidak tepat lagi karena sumberdaya alam tidak dapat diperbarui dan jumlahnya akan semakin terbatas. Pembangunan harus semakin mengandalkan SDM yang mampu memanfaatkan,

mengembangkan, dan menguasai iptek. Semua itu menuntut perlunya pengembangan SDM iptek melalui pembangunan pendidikan yang lebih terarah.



Peranan iptek dalam PJP II yang semakin menonjol, menuntut pembangunan pendidikan yang lebih relevan dan bermutu

Inti permasalahannya berada pada peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas. Tanggung jawab terbesar dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia tersebut berada pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai penanggung jawab sistem pendidikan nasional, baik melalui pendidikan persekolahan, maupun pendidikan berkelanjutan. Untuk itu, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dituntut untuk menerapkan berbagai kebijaksanaan pembangunan pendidikan yang mampu menjawab tantangan-tantangan tersebut di atas.

Pembangunan sistem pendidikan dan kebudayaan nasional tidak dapat dipisahkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berbagai studi memperlihatkan bahwa diantara faktor-faktor penting yang mempengaruhi tersebut, kependudukan dan ketenagakerjaan memiliki kaitan yang sangat erat dengan upaya pembangunan sistem pendidikan dan kebudayaan nasional.

BEBERAPA TANTANGAN MASA DEPAN

Berdasarkan kecenderungan-kecenderungan dalam pergeseran struktur ekonomi, ketenagakerjaan, serta pengetahuan dan keterampilan kerja, beberapa tantangan mendasar yang mempengaruhi sistem pendidikan akan dihadapi oleh Indonesia di masa depan*). Di antara tantangan-tantangan yang paling mendasar, ialah: (1) pentingnya orientasi nilai tambah; (2) perubahan struktur masyarakat ; dan (3) pengaruh dari proses globalisasi.

*). Wardiman Djojonegoro (1994), beberapa pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam berbagai kesempatan.

Beberapa tantangan yang mempengaruhi sistem pendidikan di masa depan : orientasi nilai tambah dalam pembangunan, transformasi masyarakat agraris ke masyarakat industri dan pengaruh proses globalisasi terhadap kehidupan

Tantangan pertama adalah makin dirasakan perlunya orientasi nilai tambah dalam rangka meningkatkan produktivitas nasional dan pertumbuhan ekonomi sebagai upaya memelihara dan meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan. Orientasi nilai tambah yang akan meningkatkan keunggulan kompetitif bangsa Indonesia hanya dapat dicapai dengan keunggulan kualitas sumberdaya manusia dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat guna.

Tantangan kedua ialah terjadinya transformasi masyarakat Indonesia dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri sebagai salah satu indikator dari terjadinya proses tinggal landas dalam pembangunan nasional kita. Transformasi tersebut berlangsung sebagai akibat dari berkembangnya sektor-sektor industri yang ditandai dengan munculnya jenis-jenis jabatan baru yang semakin beranekaragam dan yang memerlukan jenis-jenis keterampilan dan keahlian baru sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Munculnya jabatan dan keahlian yang semakin beranekaragam ini juga telah mengakibatkan timbulnya berbagai bentuk perubahan fisik, pranata sosial, dan pergeseran sistem nilai. Dengan demikian tidaklah mengherankan jika dalam masyarakat kita akan terjadi semacam benturan antara nilai-nilai tradisional yang melekat pada budaya agraris dengan nilai-nilai budaya industri yang baru berkembang. Meskipun secara alamiah setiap budaya memiliki kemampuan dan mekanisme untuk menyelesaikan konflik internalnya sendiri, benturan itu seharusnya ditangani secara terarah.

Tantangan ketiga ialah proses globalisasi yang penuh tantangan bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan persaingan. Globalisasi yang semakin masif dan ekstensif ini telah mengakibatkan batas-batas politik, ekonomi, dan sosial-budaya antar bangsa semakin kabur. Globalisasi menimbulkan persaingan antarbangsa yang semakin tajam terutama dalam bidang ekonomi serta bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hanya negara yang unggul dalam bidang ekonomi dan penguasaan iptek sajalah yang akan dapat mengambil manfaat besar bagi globalisasi. Keunggulan dalam bidang ekonomi dan teknologi dapat dicapai terutama dengan sumberdaya manusia yang berkualitas. Jika kualitas sumberdaya manusia kita lemah, maka banyak peluang yang tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal, terlewatkan atau terbuang sia-sia. Dari perspektif kebangsaan, globalisasi menumbuhkan kesadaran bahwa kita merupakan warga dari suatu masyarakat global dan dapat mengambil manfaat daripadanya. Dipihak lain makin tumbuh pula dorongan untuk lebih melestarikan dan memperkuat identitas kebangsaan. Dua arus kesadaran itu tidaklah bertentangan, bukan pula merupakan pilihan melainkan bersifat saling melengkapi (komplementer). Tidak mungkin

kita hanya memilih dan hanyut mengikuti arus, karena konsekuensinya bisa berbahaya. Hanyut dalam arus globalisasi akan mengakibatkan lunturnya nasionalisme dan patriotisme, sedangkan tenggelam dalam nasionalisme pada era globalisasi akan menjurus pada tumbuhnya sikap nasionalisme sempit dan takut kepada perubahan walaupun perubahan tersebut memiliki akibat terhadap penyempurnaan. Dari perspektif ekonomi, globalisasi merupakan tantangan untuk kita mengambil manfaat yang maksimal daripadanya. Seperti diketahui, watak dan prilaku ekonomi dimanapun adalah terbuka dan sedapat mungkin semakin meluas skalanya. Prilaku ekonomi pada dasarnya tidak dapat dipatok oleh batas-batas geografis dan politis seperti yang berlangsung dewasa ini. Agar secara ekonomi kita dapat mengambil manfaat dari globalisasi, maka kita harus meningkatkan daya saing kita dalam percaturan global.

BEBERAPA KECENDERUNGAN PENTING

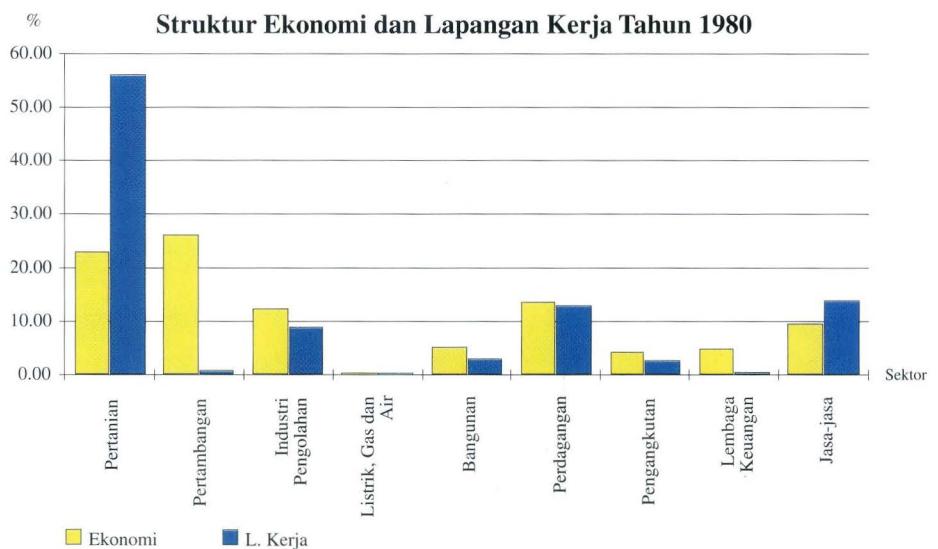
Pergeseran Struktur Ekonomi

Dalam proses industrialisasi, struktur masyarakat yang didominasi oleh kegiatan ekonomi tradisional dan informal ini akan terus berubah dan berkembang dalam bentuk perluasan sektor-sektor ekonomi industrial. Jika kegiatan ekonomi nasional didominasi oleh sektor industri, maka struktur masyarakat dapat dianggap lebih modern dengan ciri ekonomi yang lebih industrial. Secara makro perubahan ke struktur ekonomi industri ini dapat diukur dengan sumbangan sektor sekunder dan tersier, khususnya sektor industri pengolahan, yang lebih besar baik terhadap pendapatan negara atau yang dikenal dengan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun terhadap struktur angkatan kerja nasional. Perluasan sektor-sektor ekonomi industrial tersebut bisa berjalan secara perlahan dan bisa juga berjalan secara revolusioner. Di Indonesia, perubahan struktur ekonomi tersebut terlihat dari semakin besarnya peranan sektor industri pengolahan dan semakin kecilnya peranan sektor pertanian terhadap PDB dari tahun 1980 sampai dengan tahun 1990.

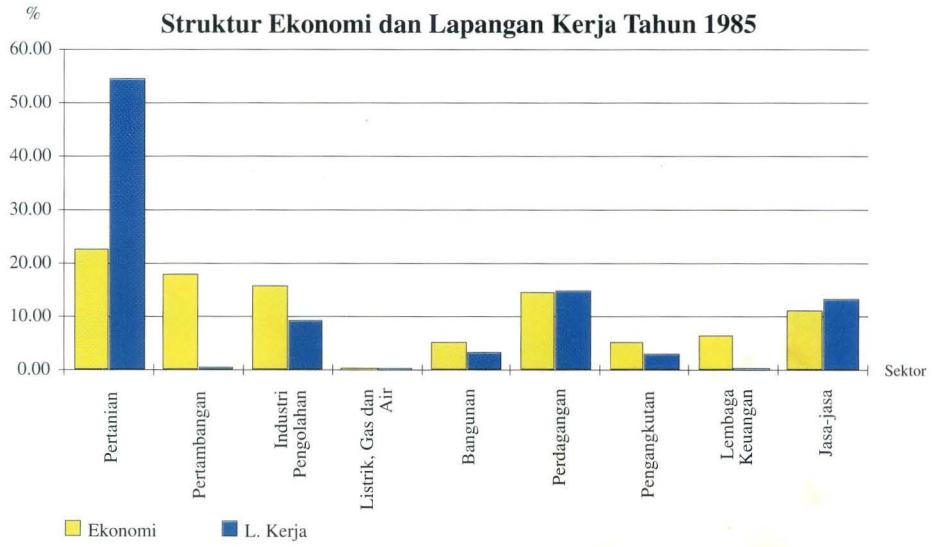
Semakin cepat perluasan sektor-sektor ekonomi industrial tersebut berlangsung, semakin cepat pula terjadinya perubahan struktur ekonomi kearah yang lebih industrial. Perubahan yang berjalan secara perlahan biasanya berlangsung di dalam suatu dinamika pasar dan biasanya merupakan suatu proses perubahan yang bersifat alamiah. Proses perubahan juga bisa berlangsung secara revolusioner dan terakselerasi. Terjadinya perubahan cepat ini umumnya dikendalikan oleh program-program pembangunan yang terarah dan terencana seperti investasi sektor-sektor

Perubahan kegiatan ekonomi tradisional ke industrial di masa depan ditandai dengan semakin besarnya peranan sektor industri pengolahan dan semakin kecilnya peranan sektor pertanian terhadap PDB

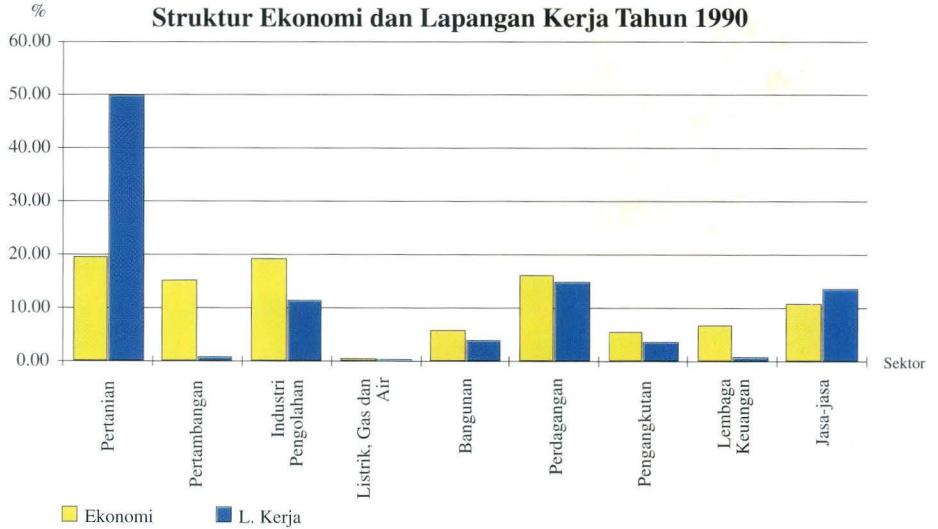
Struktur Ekonomi dan Lapangan Kerja Tahun 1980



Struktur Ekonomi dan Lapangan Kerja Tahun 1985



Struktur Ekonomi dan Lapangan Kerja Tahun 1990



Sumber : Kelompok PSDM (1992), Studi Profil Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia. Kelompok Kerja PSDM Bappenas, Depdikbud, Depnaker dan BPS

produktif dan remuneratif, migrasi tenaga kerja produktif, atau pengembangan sumberdaya manusia yang dilakukan secara menyeluruh, terarah, dan terpadu.

Pendidikan merupakan faktor pendorong dalam percepatan perubahan struktur ekonomi dan ketenagakerjaan. Program-program perluasan pendidikan yang telah mulai dilakukan sejak tahun 1970an telah berhasil meningkatkan proporsi angkatan kerja berpendidikan yang lebih tinggi, sementara itu dapat menurunkan proporsi angkatan kerja berpendidikan rendah. Dengan kesempatan pendidikan yang terus diperluas dalam waktu-waktu yang akan datang, diharapkan bahwa di kemudian hari struktur ketenagakerjaan di Indonesia didominasi oleh pekerja yang berpendidikan lebih. Pada titik inilah perubahan struktur ekonomi Indonesia mulai bergeser secara nyata kearah mencapai strukturnya yang lebih industrial. Perubahan struktur ketenagakerjaan tersebut akan semakin cepat terealisir jika sistem pendidikan di Indonesia bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan.

Mengapa pengembangan sumberdaya manusia tersebut demikian penting dalam upaya peningkatan produktivitas. Di dalam suatu sistem produksi, manusia sering disebut buruh yang dapat dianggap sebagai salah satu faktor produksi di samping modal dan faktor-faktor produksi atau sumber-sumber alam lainnya. Dalam pembangunan nasional kita, manusia sebaiknya tidak hanya dianggap sebagai buruh yang menunjang suatu sistem produksi tetapi lebih dari itu yaitu sebagai faktor inti dari produktivitas di mana modal, teknologi, dan faktor-faktor produksi lainnya hanya dianggap sebagai penunjang terhadap sumberdaya manusia dalam suatu sistem produksi. Dengan konsepsi yang kita anut ini, manusia dianggap sebagai sumber kekuatan di luar faktor-faktor produksi konvensional yang mampu menggerakan produktivitas sistem produksi secara menyeluruh.

Dalam rangka mencapai keunggulan kualitas sumberdaya manusia dalam menguasai iptek tersebut, beberapa faktor berikut yang memberikan pengaruh terhadap pengembangan SDM perlu diperhitungkan.

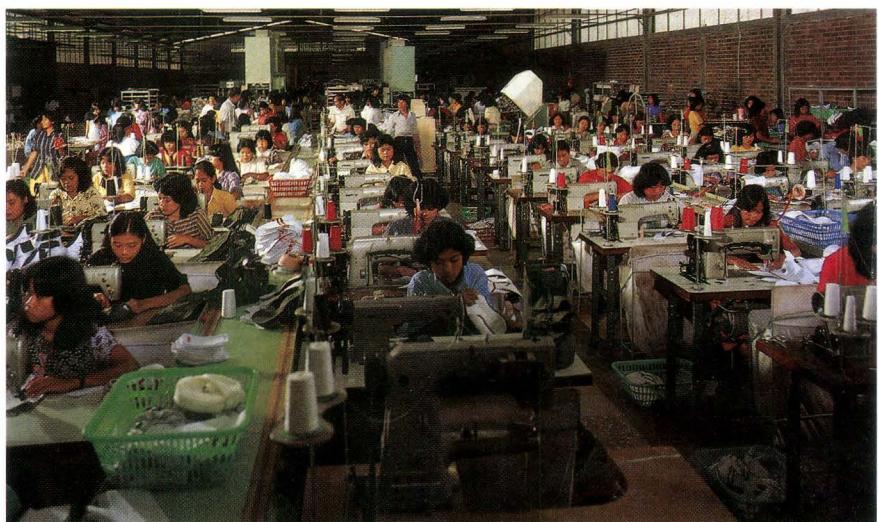
Faktor pertama ialah distribusi proses dan hasil pembangunan secara lebih merata. Pembangunan yang berkelanjutan akan dapat dicapai jika dampak positif dari pertumbuhan tersebut didistribusikan secara meluas, adil dan merata. Terjadinya perubahan dominasi sumbangan sektoral terhadap PDB belum menjamin terjadinya proses perubahan struktural dalam sistem ekonomi. Perubahan struktural akan benar-benar terjadi jika transformasi tenaga kerja ke sektor-sektor industri yang remuneratif

*Pengaruh
pendidikan terutama pada
perubahan struktur
ekonomi dan
ketenagakerjaan dalam
meningkatkan proporsi
angkatan
kerja terdidik*

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam peningkatan mutu sumberdaya manusia : pemerataan dan perluasan kesempatan berusaha, pertumbuhan kesempatan kerja non-agraris, peranan pengembangan iptek sebagai investasi modal

telah berlangsung secara meluas. Artinya ialah bahwa tenaga kerja telah melakukan partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi produktif dalam jumlah besar. Untuk itu maka pemerataan dan perluasan kesempatan berusaha perlu diciptakan, baik melalui pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan relevansi pendidikan secara lebih merata dan meluas, penciptaan iklim usaha, maupun permasalahan kesempatan berusaha dengan tekanan pada orientasi produksi dan pasar internasional, nasional, dan lokal.

Faktor kedua ialah pertumbuhan kebutuhan akan kesempatan kerja non-agraris dalam berbagai sektor ekonomi yang semakin cepat sebagai pemacu perluasan sektor industri dalam berbagai jenis lapangan usaha. Hal ini dapat dipengaruhi baik oleh faktor-faktor ekonomi maupun faktor non-ekonomi. Pengaruh faktor-faktor ekonomi seperti investasi modal, teknologi, penyediaan bahan baku, pemasaran yang semakin meluas memang cukup besar dan akan terus meningkat di kemudian hari. Faktor non-ekonomi ialah manusia itu sendiri baik sebagai tenaga kerja yang menguasai keahlian dan keterampilan maupun sebagai wiraswastawan yang berhasil sehingga dapat memacu tumbuhnya investasi.



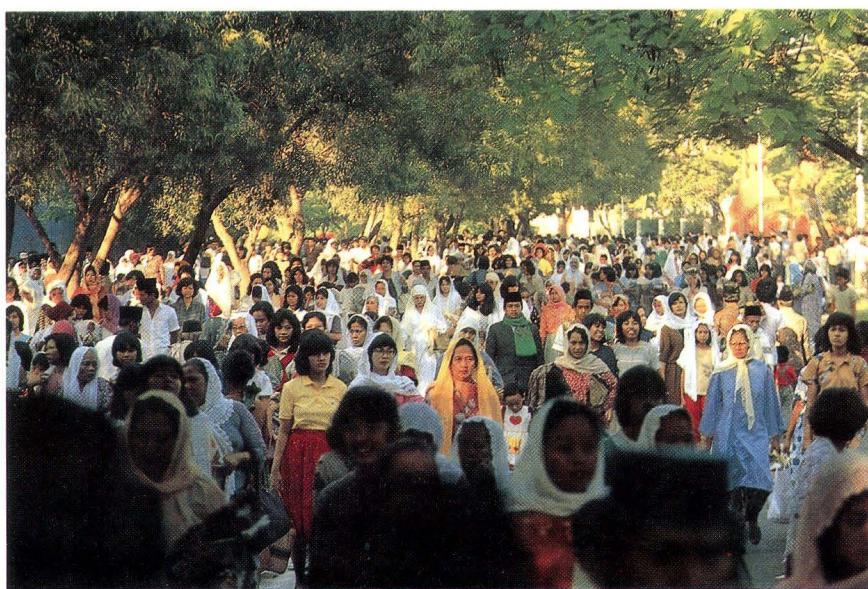
Faktor ketiga ialah perlunya pengembangan dan pendayagunaan iptek yang berbasis nasional yang cenderung lebih memungkinkan untuk menjadi sumber penggerak bagi perluasan investasi lapangan kerja. Pendayagunaan prinsip-prinsip yang diadopsi dari penelitian negara lain memang masih kita perlukan karena prinsip alih teknologi ini hanya merupakan tahap awal dari strategi pengembangan iptek di Indonesia (lihat makalah "pendidikan dan Produktivitas Industri" oleh Dr. Ing Wardiman Djojonegoro 1992). Namun yang perlu ditekankan ialah bahwa prinsip alih teknologi

ini tidak sampai memakan waktu yang lama. Berdasarkan hal tersebut maka kegiatan penelitian dan pengembangan mengenai produk-produk baru, desain dan proses produksi, pemasaran hasil produksi, termasuk penciptaan peluang usaha baru perlu digalakkan secara lebih intensif lagi, sebagai bagian dari kebijaksanaan investasi modal dalam berbagai sektor ekonomi.

Pergeseran Struktur Kependudukan

Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di kawasan Asia Tenggara, memiliki 13.667 buah pulau besar dan kecil. Wilayah Indonesia adalah: di sebelah utara berbatasan dengan Laut Andaman, Singapura, Laut Cina Selatan, Malaysia, Filipina dan Samudra Pasifik; di sebelah timur dengan Papua Nugini; di sebelah selatan dengan Samudera Hindia dan Australia; dan di sebelah barat dengan Samudera Hindia. Wilayah Indonesia terletak di antara 6 derajat Lintang Utara dan 11 derajat Lintang Selatan; serta 95 derajat Bujur Barat dan 141 derajat Bujur Timur. Sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan yang luasnya sekitar 7,9 juta km termasuk Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) atau 81 persen dari luas keseluruhan. Oleh karena itu Indonesia dijuluki negara bahari.

Dari segi jumlah penduduk, Indonesia menempati urutan keempat di dunia, setelah Republik Rakyat Cina, India, dan Amerika Serikat. Menurut hasil Sensus Penduduk 1990 penduduk Indonesia berjumlah 179,3 juta jiwa. Laju pertumbuhan penduduk per tahun selama kurun waktu 1980-1990 tercatat 1,97 persen. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan laju pertumbuhan pada dasawarsa sebelumnya (1971-1980) sebesar 2,32 persen. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh berhasilnya Program Keluarga Berencana.



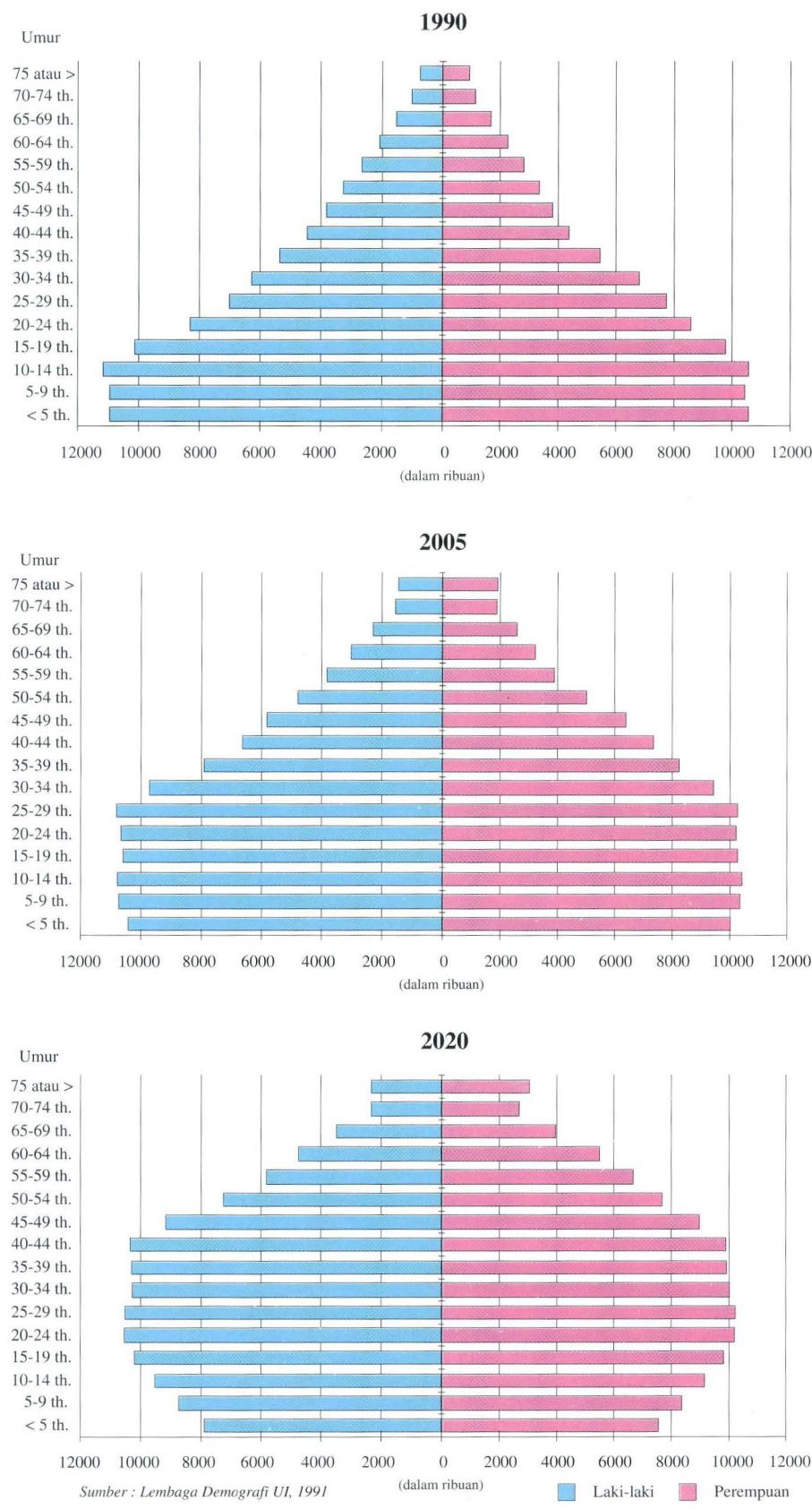
Menurunnya angka pertumbuhan penduduk menjadi 1% sampai dengan tahun 2020

Dilihat dari struktur kependudukan, Indonesia diperkirakan akan mengalami perubahan yang sangat mendasar. Dalam abad ke-21 pertumbuhan penduduk Indonesia akan terus menurun. Angka pertumbuhan penduduk selama kurun waktu 1990-1995 yang diperkirakan sekitar 1,7 persen, akan terus menurun sampai sekitar 1,0 persen pada kurun waktu 2015-2020. Perkiraan bank Dunia bahkan lebih rendah lagi, yaitu di bawah 1,0 persen. Meskipun angka pertumbuhan penduduk diperkirakan akan menurun, penduduk Indonesia akan terus meningkat jumlahnya dari 164,6 juta pada tahun 1985, menjadi sekitar 197,2 juta pada tahun 1995. Jumlah ini akan meningkat menjadi 269,9 juta pada tahun 2020 (Aris Ananta, Lembaga Demografi FE-UI, 1991).

Dalam jangka waktu yang sama, tingkat pertumbuhan penduduk akan menurun secara berarti, dalam gejala yang berbeda sama sekali dengan pola perkembangan penduduk yang ada pada saat ini. Semakin sempurnanya pelayanan kesehatan dan program Keluarga Berencana akan menurunkan tingkat kematian dan kelahiran, sehingga terjadilah apa yang disebut “transisi demografi”. Transisi demografi adalah suatu pola pergeseran perkembangan penduduk dari tingkat fertilitas tinggi dan mortalitas tinggi ke pola perkembangan penduduk yang memiliki tingkat fertilitas rendah dan mortalitas rendah.

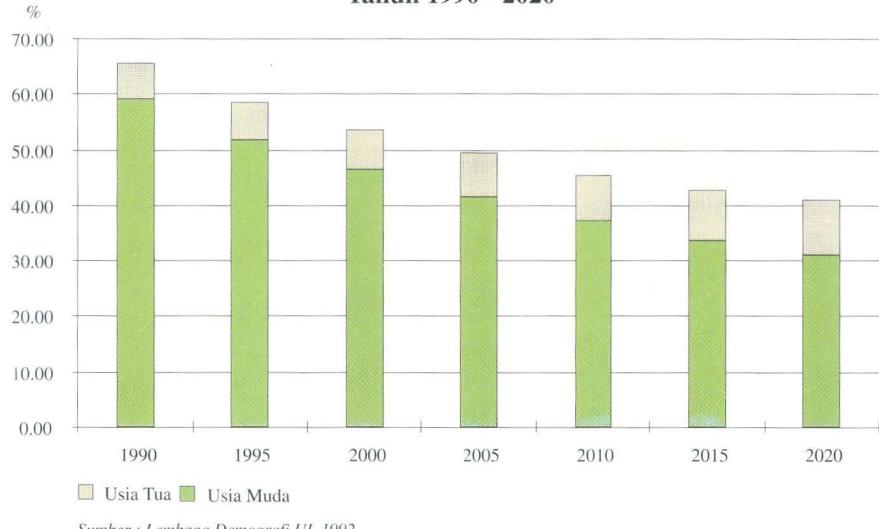
Bertolak dari pola pertumbuhan penduduk yang demikian, maka susunan umur penduduk pada awal abad ke-21 akan beralih, yaitu dari dominasi umur penduduk muda menuju ke susunan umur penduduk tua. Struktur penduduk akan berubah, dari bentuk piramida (dominasi usia muda) ke bentuk stupa (dominasi usia pertengahan). Salah satu indikator yang dapat dipakai untuk mengukur adanya perubahan adalah angka ketergantungan (dependency ratio). Ukuran ini menunjukkan ketergantungan penduduk umur muda (0-14) atau tua (65 tahun ke atas) terhadap kelompok usia produktif (usia antara 15-64 tahun). Beban ketergantungan umur tua berubah dari 6,5 pada tahun 1990 menjadi 11,2 pada tahun 2020. Sebaliknya, beban ketergantungan umur muda turun dari 60,2 pada tahun 1990 menjadi 34,6 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa susunan umur penduduk di Indonesia pada awal abad ke 21 akan beralih ke dominasi umur penduduk tua. Perbandingan penduduk tua yaitu yang berusia di atas 65 tahun terhadap 100 penduduk usia 0-14 meningkat dari 10,9 pada tahun 1990 menjadi 32,4 pada tahun 2020 mendatang.

Perubahan Struktur Penduduk di Indonesia Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin



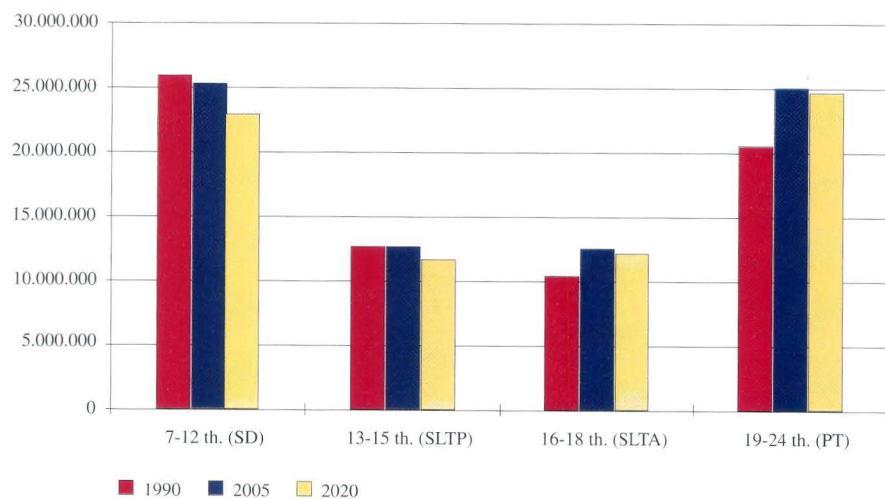
Rasio ketergantungan usia tua akan meningkat, rasio ketergantungan usia muda akan menurun

Rasio Ketergantungan di Indonesia berdasarkan Struktur usia Tahun 1990 - 2020



Pergeseran susunan umur penduduk Indonesia yang hanya memerlukan waktu sekitar 25-30 tahun tersebut mendorong beberapa penyesuaian sasaran strategis. Separuh dari kurun waktu pembangunan nasional jangka panjang kedua perlu diarahkan pada pemenuhan kebutuhan mereka yang masuk ke dalam usia produktif terutama kebutuhan mereka untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang layak. Berdasarkan klasifikasi pendidikan, komposisi penduduk kelompok usia sekolah akan mengalami perubahan. Pertumbuhan jumlah penduduk kelompok usia pendidikan 7-12 tahun akan menunjukkan tanda kejemuhan dengan menurunnya populasi untuk kelompok ini secara konsisten sampai tahun 2020. Penduduk kelompok usia pendidikan 13-15 tahun pada awalnya akan meningkat untuk kemudian berangsur-angsur menurun pada tahun 2020. Kelompok usia pendidikan 16-18 tahun dan 19-24 tahun akan meningkat secara konsisten sampai tahun 2005, untuk kemudian menurun pada tahun 2020.

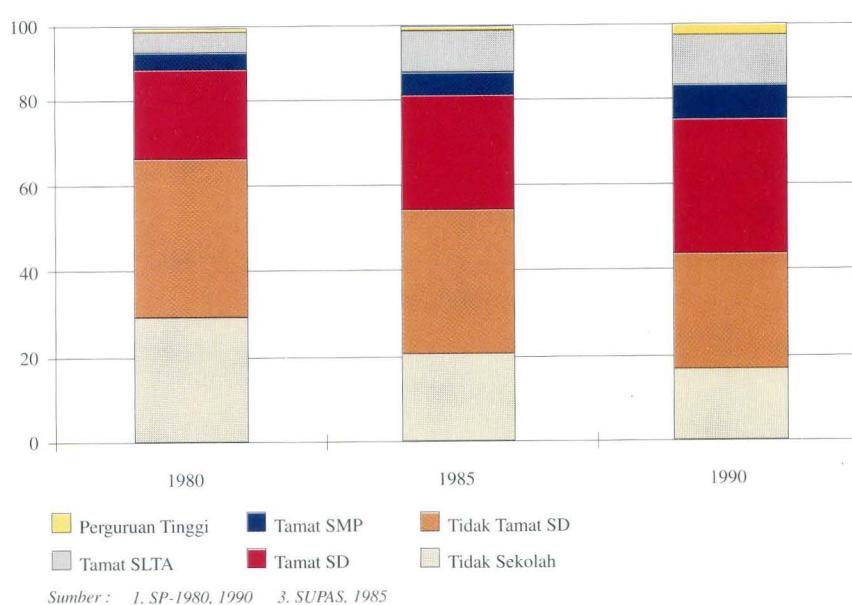
Jumlah Penduduk Usia Sekolah di Indonesia Tahun 1990 - 2020



Pergeseran Struktur Ketenagakerjaan

Dari sisi struktur angkatan kerja menurut pendidikan, proporsi lulusan pendidikan tinggi masih sangat rendah dibandingkan dengan proporsi angkatan kerja kelompok pendidikan lainnya. Persentase angkatan kerja yang berpendidikan rendah (SD kebawah) menurut SAKERNAS 1987 adalah sebesar 79,5 persen. Walaupun mengalami penurunan sejak tahun 1980 (82,2 persen), proporsi angkatan kerja berpendidikan rendah tersebut dianggap masih terlalu tinggi untuk suatu masyarakat yang menuju era modernisasi dalam berbagai bidang kehidupan. Perkiraan dari penelaahan sektor pendidikan (IEES & Balitbang Dikbud, 1985) menunjukkan bahwa separuh dari pekerjaan sektor formal dua-pertiga dari pekerja lainnya terdiri dari angkatan kerja yang berpendidikan paling tinggi sekolah dasar.

Struktur Angkatan Kerja Indonesia Menurut Jenjang Pendidikan yang ditamatkan Tahun 1980-1990



Sumber : 1. SP-1980, 1990 3. SUPAS, 1985
2. SUSENAS, 1982 4. SAKERNAS, 1986, 1987, 1992

Namun demikian, tanda-tanda perbaikan telah mulai terlihat bahwa proporsi angkatan kerja yang berpendidikan lebih tinggi cenderung mulai meningkat. Data memperlihatkan bahwa angkatan kerja berpendidikan tinggi dan pendidikan menengah yang pada tahun 1980 berturut-turut sebesar 0,81 persen, dan 10,9 persen, pada tahun 1987 angka-angka tersebut meningkat cukup berarti menjadi berturut-turut 5,9 persen dan 14,9 persen.

Proporsi angkatan kerja berpendidikan tinggi yang mulai meningkat ini antara lain disebabkan oleh: (1) pengaruh program wajib belajar SD yang telah dimulai sejak awal dasawarsa 1970-an, (2) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang diikuti oleh meningkatnya minat mereka

Proporsi angkatan kerja berdasarkan pendidikan meningkat ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi adalah sebagai indikator meningkatnya pelayagunaan tenaga profesional

untuk memasuki pendidikan tinggi, dan (3) semakin meluasnya sektor-sektor ekonomi yang lebih bersifat remuneratif.

Percentase angkatan kerja berpendidikan tinggi yang semakin meningkat ini juga merupakan suatu gejala positif, yaitu pelayagunaan tenaga profesional dan teknisi dalam berbagai kegiatan investasi modal sehingga dapat meningkatkan skala ekonomi yang sekaligus dapat menciptakan kesempatan kerja baru yang lebih beranekaragam. Dari sisi investasi nasional, meningkatnya investasi sektor pemerintah dan swasta terhadap GDP dari 21,9 persen pada tahun 1978/79 menjadi 26,7 persen pada tahun 1988/89 akan mengakibatkan naiknya kebutuhan akan tenaga ahli dan profesional yang semakin besar jumlahnya yang berarti semakin meningkatnya tuntutan terhadap tenaga-tenaga kerja yang lebih terdidik.

Jika program-program pendidikan mampu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan berbagai jenis lapangan kerja dalam sektor-sektor yang dibutuhkan, maka kenaikan persentase angkatan kerja berpendidikan lebih tinggi memiliki efek ganda terhadap pertumbuhan. Adanya efek ganda tersebut dapat dijelaskan paling tidak oleh dua alasan berikut. **Pertama**, efeknya terhadap efisiensi pekerjaan dan mutu hasil kerja karena tamatan pendidikan tinggi dianggap lebih mampu dalam mendayagunakan teknologi yang lebih maju sehingga akan berdampak positif terhadap produktivitas. **Kedua**, efeknya terhadap penciptaan jenis-jenis pekerjaan baru sehingga menimbulkan penganekaragaman kegiatan ekonomi sektoral, dengan anggapan bahwa tamatan pendidikan tinggi lebih mampu melakukan kegiatan usaha secara mandiri.

LANDASAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

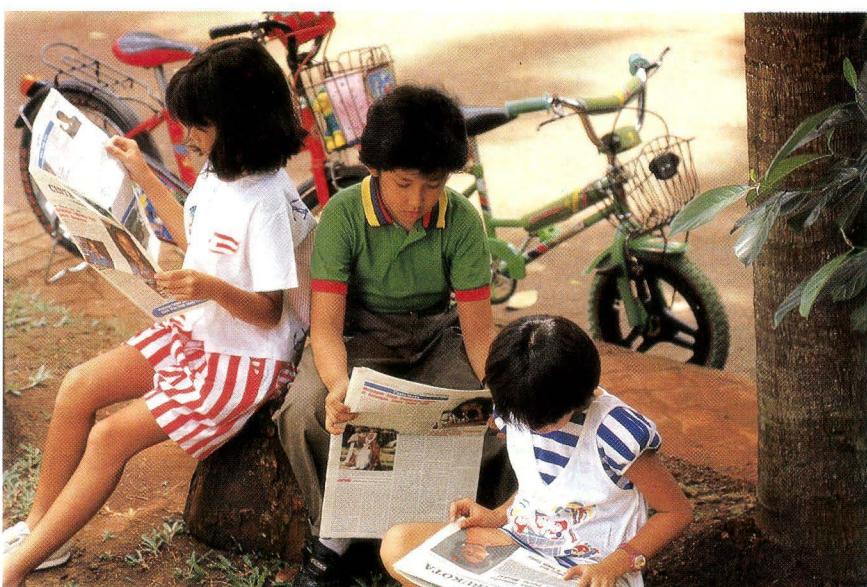
Pembangunan Pendidikan

Berdasarkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989, pembangunan pendidikan nasional mengusahakan: ***pertama***, pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya dan mampu mandiri, dan ***kedua*** pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang terwujud dalam ketahanan nasional yang tangguh yang mengandung makna terwujudnya kemampuan bangsa menangkal setiap ajaran, paham dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

Dengan landasan pemikiran tersebut, pengertian pendidikan nasional menurut UUSPN No. 2/1989 ialah usaha sadar untuk memungkinkan bangsa Indonesia mempertahankan kelangsungan hidupnya dan mengembangkan dirinya secara terus menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Sistem pendidikan nasional dilaksanakan secara semesta, menyeluruh dan terpadu. Semesta dapat diartikan, terbuka bagi seluruh rakyat dan berlaku di seluruh wilayah negara. Menyeluruh berarti mencakup semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Sedangkan terpadu memiliki arti adanya saling keterkaitan antara pendidikan nasional dengan seluruh usaha pembangunan nasional.

Sistem pendidikan nasional harus dapat memberikan pendidikan dasar bagi setiap warga negara Republik Indonesia, agar masing-masing memperoleh sekurang-kurangnya pengetahuan dan kemampuan dasar, yang meliputi kemampuan membaca, menulis dan berhitung serta menggunakan bahasa Indonesia, yang diperlakukan oleh setiap warga negara untuk dapat berperan serta dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.



Setiap warga negara diharapkan mengetahui hak dan kewajiban pokoknya sebagai warga negara serta memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, ikut serta dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat, dan memperkuat persatuan dan kesatuan serta upaya pembelaan negara. Pengetahuan dan kemampuan ini harus dapat diperoleh dari sistem pendidikan nasional. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi makna pada amanat Undang-undang Dasar 1945 Bab XIII, pasal 31, ayat (1) yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”.

Warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan pada tahap manapun dalam perjalanan hidupnya pendidikan seumur hidup, meskipun sebagai anggota masyarakat ia tidak diharapkan untuk terus menerus belajar tanpa mengabdikan kemampuan yang diperolehnya untuk

kepentingan masyarakat. Pendidikan dapat diperoleh, baik melalui jalur pendidikan sekolah maupun melalui pendidikan luar sekolah.

Sistem pendidikan nasional memberi kesempatan belajar yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara, oleh karena itu dalam penerimaan seseorang sebagai peserta didik tidak dibenarkan adanya perbedaan atas dasar jenis kelamin, agama, ras, suku, latar belakang sosial dan tingkat kemampuan ekonomi, kecuali apabila ada satuan atau kegiatan pendidikan yang memiliki kekhususan yang harus diindahkan.

Pendidikan keluarga yang termasuk jalur pendidikan luar sekolah merupakan salah satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengamalan belajar seumur hidup. Pendidikan dalam keluarga memberikan keyakinan agama, nilai budaya yang mencakup nilai moral dan aturan-aturan pergaulan serta pandangan, keterampilan dan sikap hidup yang mendukung kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kepada anggota keluarga yang bersangkutan.

Dalam rangka peningkatan peran serta keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional, maka semua pihak perlu berusaha untuk menciptakan suasana lingkungan yang mendukung terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Dalam hubungan ini, maka pengadaan dan pendayagunaan sumberdaya pendidikan, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun masyarakat perlu dipertahankan fungsi sosialnya, dan tidak mengarah pada usaha mencari keuntungan material.

Selanjutnya UUSPN Nomor 2/1989 menyatakan bahwa upaya peningkatan taraf dan mutu kehidupan bangsa dan pengembangan kebudayaan nasional, yang diharapkan menaikkan harkat dan martabat manusia Indonesia, dilakukan terus menerus, sehingga dengan sendirinya senantiasa menuntut penyesuaian pendidikan pada kenyataan yang selalu berubah. Atas dasar kenyataan itulah bahwa pembangunan pendidikan tidak bisa terlepas dari pembangunan kebudayaan. Di samping karena sistem pendidikan nasional itu sendiri harus berakar pada kebudayaan nasional, upaya pendidikan tersebut pada hakekatnya merupakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan.

Pembangunan Kebudayaan

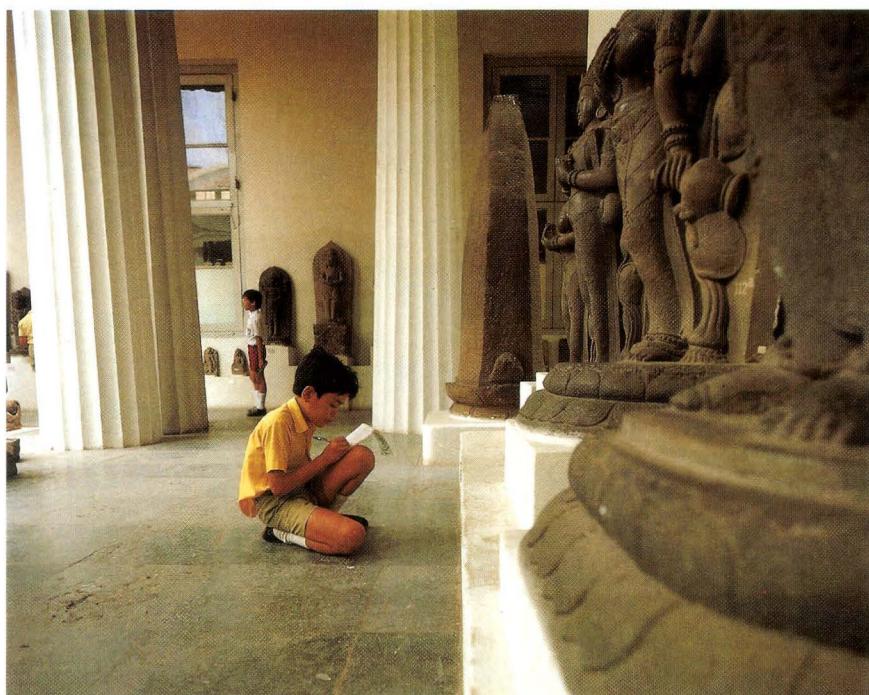
Pasal 32 UUD 1945 menyatakan bahwa: "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia". Sedangkan dalam penjelasan pasal tersebut antara lain dinyatakan bahwa:"Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa.

Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia".

Rumusan ini menunjukkan bahwa kebudayaan nasional harus dilihat sebagai sesuatu yang dinamis, berkembang terus dan dapat menuntun ke arah perkembangan sebagai peradaban. Upaya memajukan kebudayaan Indonesia yang beraneka ragam akan meningkatkan persatuan bangsa dan bukan sebaliknya akan membangun sikap kedaerahan yang sempit. Bangsa Indonesia harus bersikap terbuka tetapi juga selektif serta mampu mengadaptasikan bahan-bahan baru yang masuk dari kebudayaan lain.

Berdasarkan uraian di atas, maka sesungguhnya pasal 32 dan penjelasannya mengandung dua langkah kebijaksanaan yang mengarah pada dua sasaran yang berbeda. Arah pertama, agar pemerintah bersama-sama masyarakat berupaya memelihara dan melestarikan (bersifat preservatif) warisan budaya bangsa agar tidak punah, dirusak atau diganti dengan yang baru. Sedangkan arah sasaran kedua adalah memajukan dan mengembangkan kebudayaan bangsa (bersifat progresif). Agar kedua arah tidak terus menerus bertolak belakang, maka kebijaksanaan untuk memajukan kebudayaan nasional sebagaimana diamanatkan UUD 1945, adalah berupaya menciptakan iklim agar kedua arah langkah tersebut dapat terpadu dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat "Pembinaan dan Pengembangan".

*Upaya memajukan
kebudayaan yang
beraneka ragam akan
meningkatkan persatuan
bangsa*



Langkah yang bersifat Pembinaan dimaksudkan untuk meningkatkan mutu dan mempersiapkan masyarakat sebagai pendukung kebudayaan yang tanggap, tangguh, dan bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan zaman dengan upaya menanamkan dan mengukuhkan nilai-nilai budaya, pemikiran, gagasan sesuai perkembangan ilmu dan teknologi. Dengan demikian masyarakat bukan hanya akan bersikap dan mengembangkan pola tingkah laku sesuai dengan nilai-nilai budaya nasional yang sedang dikembangkan, akan tetapi juga menjadi pendukung kebudayaan yang aktif dan kreatif dalam memperkembangkan dan memperkaya kebudayaan bangsanya.

Sementara itu, langkah yang bersifat Pengembangan diartikan sebagai upaya yang ditujukan untuk mempertinggi mutu kebudayaan bangsa, memperkaya nilai-nilai dan memperkokoh identitas budaya bangsa sesuai dengan penjelasan pasal 32 UUD 1945, serta mengupayakan tersedianya berbagai fasilitas yang dapat mendukung upaya memajukan kebudayaan nasional.

Dalam usaha mengembangkan kebudayaan nasional, Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 menegaskan antara lain sebagai berikut.

Upaya mengembangkan kebudayaan nasional dititikberatkan pada nilai-nilai luhur bangsa, nilai-nilai sosial-budaya daerah, dan sikap budaya yang mampu menjawab tantangan pembangunan

Pertama, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa, harus terus dipelihara, dibina dan dikembangkan guna memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan nasional, memperkokoh jiwa persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu menjadi penggerak bagi perwujudan cita-cita bangsa di masa depan;

Kedua, dalam rangka upaya pengembangan kebudayaan bangsa yang berkepribadian dan berkesadaran nasional, perlu ditumbuhkan kemampuan masyarakat untuk mengangkat nilai-nilai sosial budaya daerah yang luhur serta menyerap nilai-nilai dari luar yang positif dan yang diperlukan bagi pembaruan dalam proses pembangunan;

Ketiga, dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional perlu terus diciptakan suasana yang mendorong tumbuh dan berkembangnya rasa tanggung jawab dan kesetiakawanan sosial, disiplin nasional serta sikap budaya yang mampu menjawab tantangan pembangunan seperti sikap mandiri dalam kebersamaan, tenggang rasa, musyawarah untuk mufakat, berwawasan masa depan, kerja keras jujur dan kesatria, hemat, cermat, sederhana, tertib, menghargai waktu serta penuh pengabdian.

SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Buku Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Menjelang Era Tinggal Landas ini merupakan telaahan terhadap berbagai masalah yang dihadapi dewasa ini, dan tantangan yang mungkin dihadapi di masa depan. Pembahasan Buku ini terdiri dari beberapa bagian penting, yaitu sebagai berikut.

Pembahasan dimulai dari Bab II yang membahas gambaran umum tentang sistem pendidikan dan kebudayaan nasional sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gambaran tentang sistem pendidikan nasional mencakup struktur persekolahan, satuan, jenis, jalur, dan jenjang pendidikan yang dilengkapi dengan data perkembangan pendidikan sejak tahun 1969. Pembahasan tentang kebudayaan nasional mencakup ruang lingkup dan langkah-langkah strategis yang dilakukan dalam pembinaan kebudayaan nasional.

Dalam Bab III dibahas berbagai kecenderungan empiris yang ditunjukkan dengan berbagai indikator penting dari perkembangan selama PJP I. Dari kecenderungan tersebut dapat ditelaah beberapa permasalahan dan tantangan penting yang perlu dijawab dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan di masa depan. Dalam bidang pendidikan, permasalahan empiris tersebut dibahas berdasarkan empat tema pokok pembangunan pendidikan, yaitu pemerataan dan kesempatan, relevansi pendidikan dengan pembangunan, mutu, dan efisiensi pengelolaan.

Dalam Bab terakhir dibahas mengenai beberapa tantangan masa depan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia, dengan penekanan pada: (1) Strategi Pokok Kebijaksanaan, (2) Isu dan Tantangannya di masa depan, dan (3) Rencana dan Prioritas pembangunan. Sumber utama dari pembahasan Bab IV ini ialah dari kumpulan pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam berbagai kesempatan yang dianggap paling relevan.

BAB II.

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NASIONAL INDONESIA

PENDIDIKAN NASIONAL

Pengertian dan Ruang Lingkup

S

istem Pendidikan Nasional adalah suatu sistem terpadu yang meliputi semua satuan, jalur, jenis, jenjang dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu sama lain yang ditata dalam upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-undang No.2 tahun 1989, bahwa: "Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasayarakatan dan kebangsaan .

Tujuan pendidikan nasional tersebut kemudian dijabarkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1993 dalam pembangunan pendidikan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang: beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, produktif, sehat jasmani dan rohani.

Pendidikan nasional juga harus menumbuhkan: (1) jiwa patriotik, dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan, dan kesetiakawanan sosial, dan sikap menghargai jasa para pahlawan, serta berorientasi ke masa depan; (2) iklim belajar mengajar yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri sendiri dan budaya belajar di kalangan masyarakat terus dikembangkan agar tumbuh sikap dan perilaku yang: kreatif, inovatif, dan berkeinginan untuk maju; (3) pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan UU No. 2 tahun 1989 berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.

Sebagai suatu sistem, pendidikan nasional dijabarkan ke dalam satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan.

Satuan Pendidikan

Satuan pendidikan adalah tempat penyelenggaraan kegiatan belajar di dalam dan di luar sekolah yang meliputi: sekolah, keluarga, kelompok belajar, kursus dan satuan pendidikan lainnya.



Jalur Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui 2 (dua) jalur yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan. Jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar-mengajar yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan. Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral dan keterampilan.

Jenis Pendidikan

Jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Pendidikan umum merupakan pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu. Pendidikan luar biasa merupakan pendidikan yang khusus diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental. Pendidikan profesional merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.

Jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan luar sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan keagamaan, pendidikan jabatan kerja,

*Penyelenggaraan
pendidikan dilaksanakan
melalui 2 jalur, yaitu jalur
pendidikan sekolah dan
luar sekolah*



Jenis pendidikan terdiri atas pendidikan umum, kejuruan, luar biasa, kedinasan, keagamaan, akademik, dan profesional

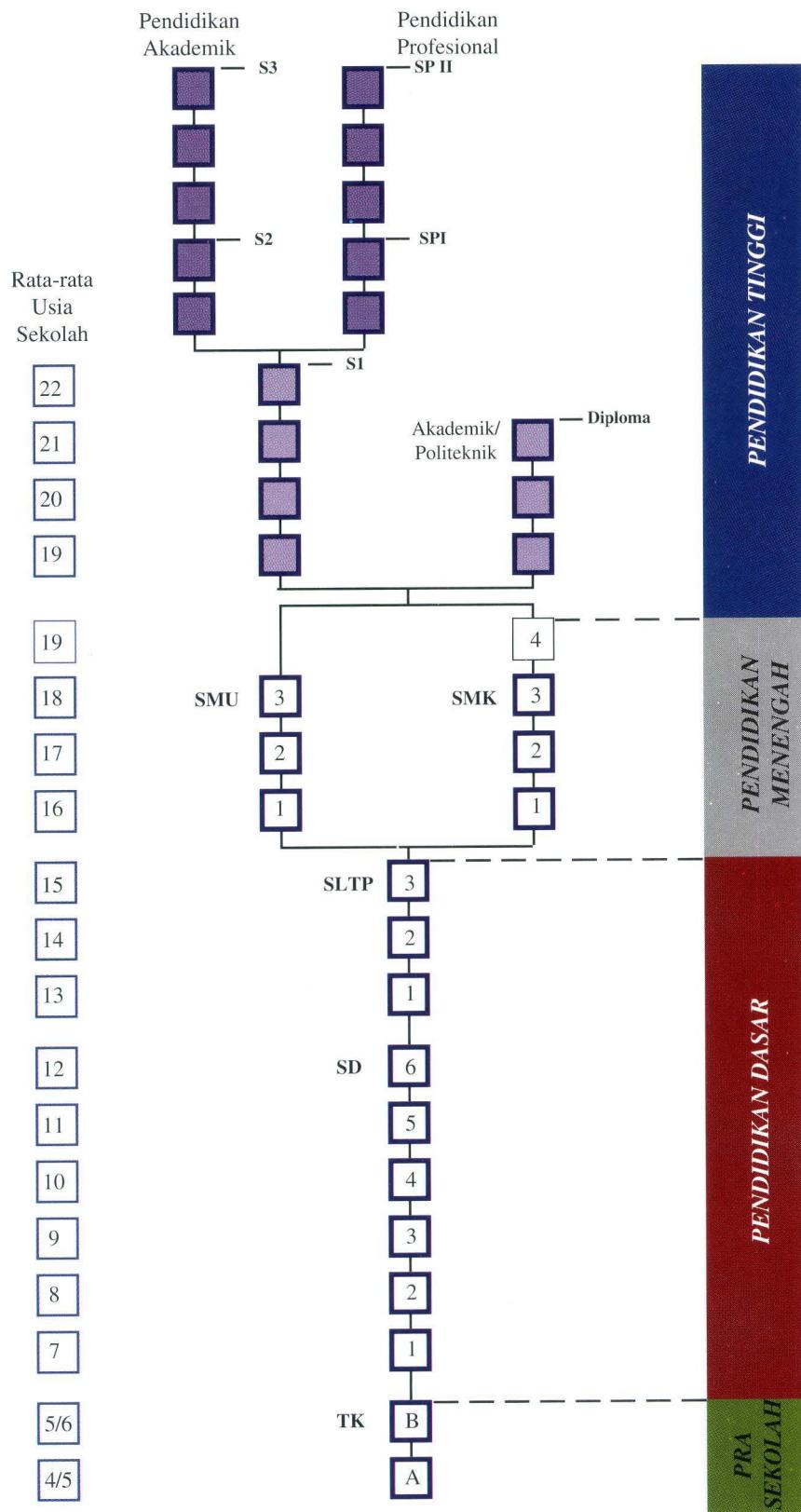
pendidikan kedinasan dan pendidikan kejuruan. Pendidikan umum (luar sekolah) merupakan pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan dan sikap warga belajar dalam bidang tertentu. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan warga belajar untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan. Pendidikan jabatan kerja merupakan pendidikan yang berusaha meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan sikap warga belajar untuk memenuhi persyaratan pekerjaan tertentu pada satuan kerja yang bersangkutan. Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan yang berusaha meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan untuk pegawai atau calon pegawai suatu Departemen atau Lembaga Pemerintah Nondepartemen. Pendidikan kejuruan (luar sekolah) merupakan pendidikan yang mempersiapkan warga belajar untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu.

Jenjang Pendidikan

Jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas: Pendidikan Dasar; Pendidikan Menengah; dan Pendidikan Tinggi. Selain jenjang pendidikan sebagaimana disebutkan di atas dapat pula diselenggarakan pendidikan prasekolah.

(BAGAN STRUKTUR PERSEKOLAHAN DI INDONESIA)

STRUKTUR PERSEKOLAHAN DI INDONESIA



Jenjang Pendidikan terdiri atas Pendidikan Dasar (SD dan SLTP); Pendidikan Menengah (SMU dan SMK); dan Pendidikan Tinggi (Akademik dan Profesional)



- *Pendidikan Prasekolah*

Pendidikan prasekolah adalah pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar, yang diselenggarakan di jalur pendidikan sekolah atau luar sekolah. Tujuan penyelenggaraan pendidikan prasekolah adalah untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya.

*Pendidikan Prasekolah
bukan merupakan prasarat
untuk memasuki sekolah
dasar*

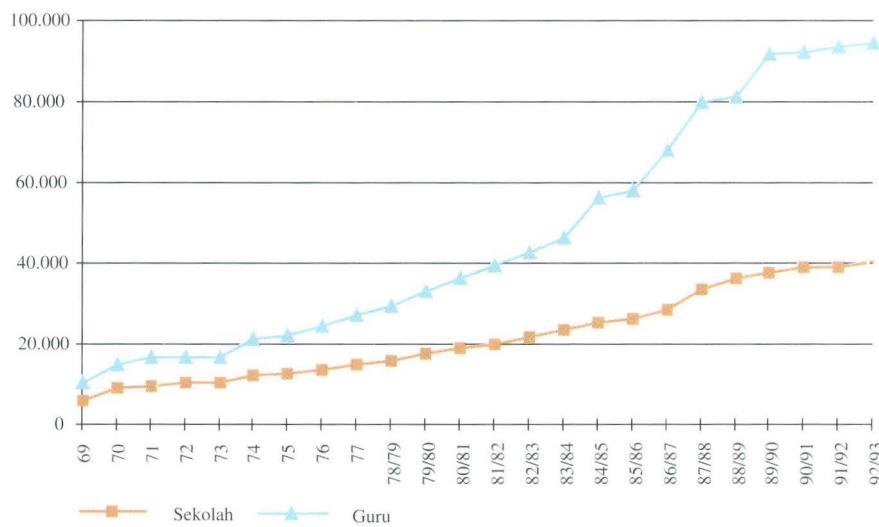
Bentuk satuan pendidikan prasekolah diantaranya adalah Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain dan Penitipan Anak. Taman Kanak-kanak terdapat di jalur pendidikan sekolah sedangkan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak terdapat di jalur pendidikan luar sekolah. Di samping bentuk satuan di atas, terdapat pula bentuk satuan pendidikan prasekolah yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama yang setingkat dengan Taman Kanak-kanak, yang disebut Bustanul Aftal.

Taman Kanak-kanak diselenggarakan untuk anak-anak berusia 4 sampai 6 tahun dengan lama pendidikan satu sampai dua tahun. Pembinaan kesejahteraan anak pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak menjadi tanggung jawab Menteri Sosial, sedangkan pembinaan pendidikannya menjadi tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (PP No.27 Tahun 1990, pasal 5).

Pendidikan prasekolah yang diselenggarakan melalui Kelompok Bermain dan Penitipan anak hanya dapat diikuti anak yang berusia kurang dari tiga tahun. Isi program pendidikan prasekolah jalur pendidikan sekolah, yaitu

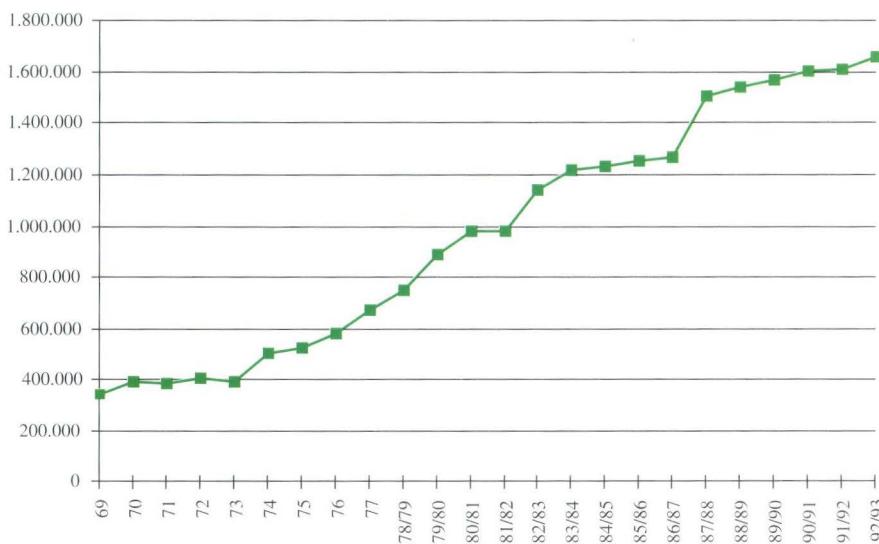
Taman Kanak-kanak, harus mengembangkan: moral Pancasila, agama, disiplin, kemampuan berbahasa, daya pikir, daya cipta, perasaan/emosi, kemampuan bermasyarakat, keterampilan, dan jasmani.

Perkembangan Jumlah Sekolah dan Guru Taman Kanak-kanak Tahun 1969 - 1992/93

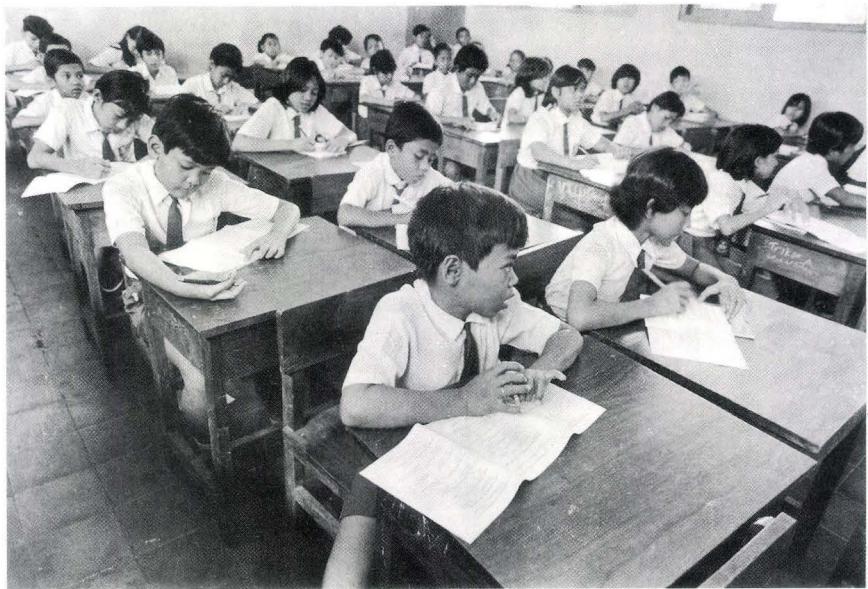


Sumber : Pusat Informatika, Balitbang Dikbud.

Perkembangan Jumlah Murid Taman Kanak-kanak Tahun 1969 - 1992/93



Sumber : Pusat Informatika, Balitbang Dikbud.



- *Pendidikan Dasar*

*Pendidikan Dasar adalah
pendidikan umum yang
lamanya 9 tahun ,
diselenggarakan 6 tahun di
SD dan 3 tahun di SLTP*

Pendidikan dasar adalah pendidikan umum yang lamanya sembilan tahun, diselenggarakan selama enam tahun di Sekolah Dasar (SD) dan tiga tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau satuan pendidikan yang sederajat. Pendidikan dasar bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah.

Bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan program 6 tahun terdiri atas : Sekolah Dasar (umum) dan Sekolah Dasar Luar Biasa. Bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan program tiga tahun sesudah program enam tahun terdiri atas : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa.

Di samping bentuk di atas terdapat pula bentuk satuan pendidikan dasar yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama yakni : Madrasah Ibtidaiyah yang setingkat sekolah dasar dan Madrasah Tsanawiyah yang setingkat sekolah lanjutan tingkat pertama.

Isi kurikulum pendidikan dasar wajib memuat sekurang-kurangnya bahan kajian dan pelajaran tentang pendidikan Pancasila, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, membaca dan menulis, matematika (termasuk berhitung), pengantar sains dan teknologi, ilmu bumi, sejarah nasional dan sejarah umum, kerajinan tangan dan kesenian, pendidikan jasmani dan kesehatan, menggambar, serta bahasa Inggris.

Sebutan-sebutan tersebut di atas bukan nama mata pelajaran melainkan sebutan yang mengacu pada sajian kajian untuk membentuk kepribadian dan unsur-unsur kemampuan yang diajarkan dan dikembangkan melalui pendidikan dasar. Lebih dari satu unsur dapat digabung dalam satu mata pelajaran atau sebaliknya, satu unsur dapat dibagi lebih dari satu mata pelajaran.

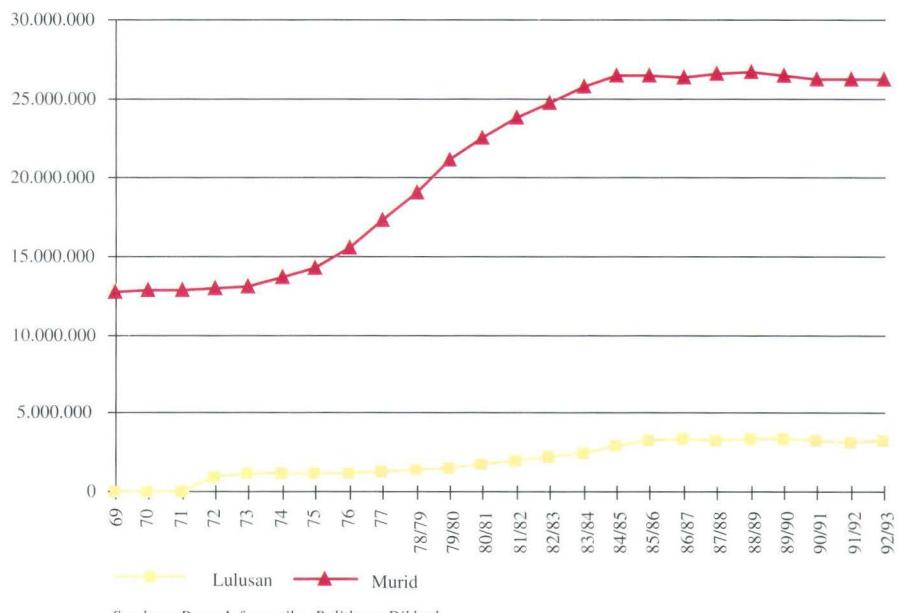
Secara rinci isi kurikulum pendidikan dasar ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/u/1993 yang memuat mata pelajaran sebagai berikut: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; Pendidikan Agama; Bahasa Indonesia (termasuk membaca dan menulis); Matematika (termasuk berhitung); Ilmu Pengetahuan Alam (pengantar sains dan teknologi); Ilmu Pengetahuan Sosial (termasuk ilmu bumi, sejarah nasional dan sejarah umum); Kerajinan Tangan dan Kesenian (termasuk menggambar); Pendidikan Jasmani dan Kesehatan; Bahasa Inggris; dan Muatan Lokal (sejumlah mata pelajaran).

Susunan Program Pengajaran pada Kurikulum Pendidikan Dasar (SD dan SLTP)

No.	Mata Pelajaran	SD						SLTP		
		I	II	III	V	V	VI	I	II	III
1.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.	Pendidikan Agama	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3.	Bahasa Indonesia	10	10	10	8	8	8	6	6	6
4.	Matematika	10	10	10	8	8	8	6	6	6
5.	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	-	-	3	6	6	6	6	6	6
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	-	-	3	5	5	5	6	6	6
7.	Kerajinan Tangan dan Kesenian	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8.	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9.	Bahasa Inggris	-	-	-	-	-	-	4	4	4
10.	Muatan Lokal (sejumlah mata pelajaran)	2	2	4	5	7	7	6	6	6
Jumlah		30	30	38	40	42	42	42	42	42

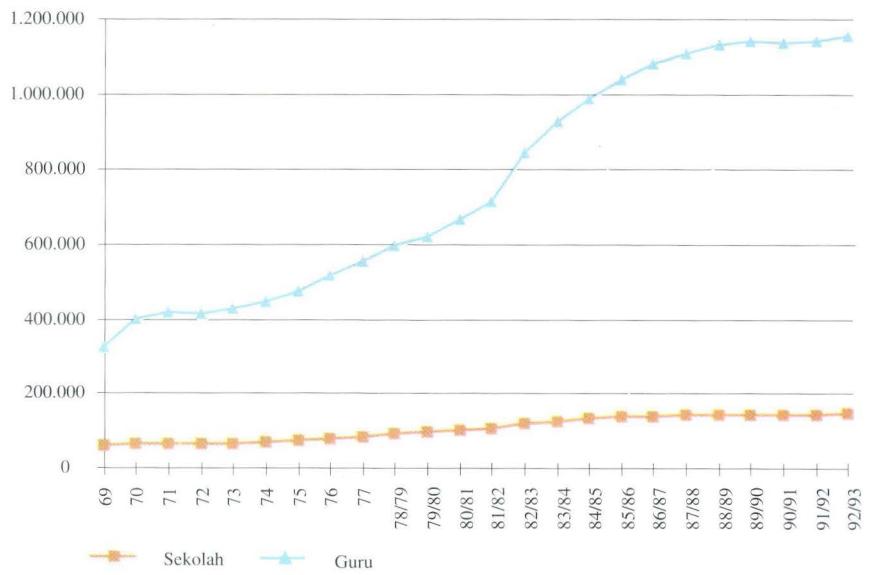
Sumber : Pusat Pengembangan Kurikulum Balitbang Dikbud

**Perkembangan Jumlah Murid dan Lulusan SD
Tahun 1969 - 1992/93**



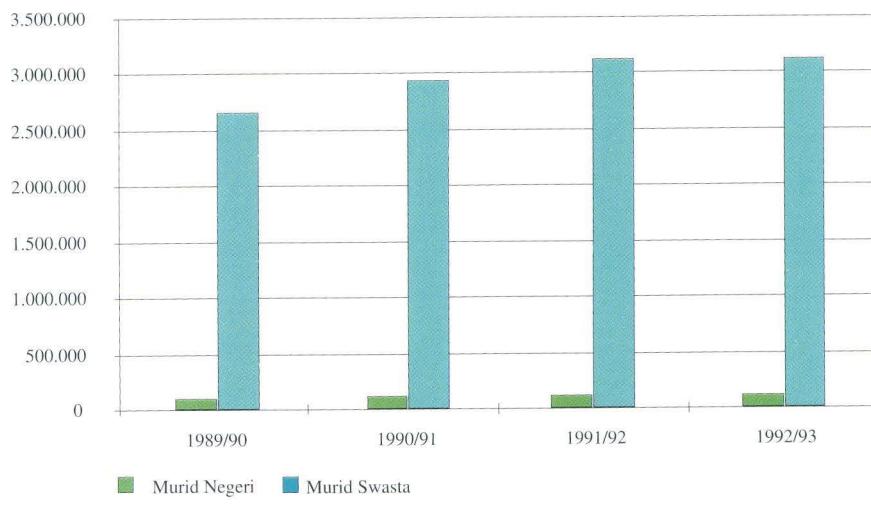
Sumber : Pusat Informatika, Balitbang Dikbud.

**Perkembangan Jumlah Sekolah dan Guru SD
Tahun 1969 - 1992/93**



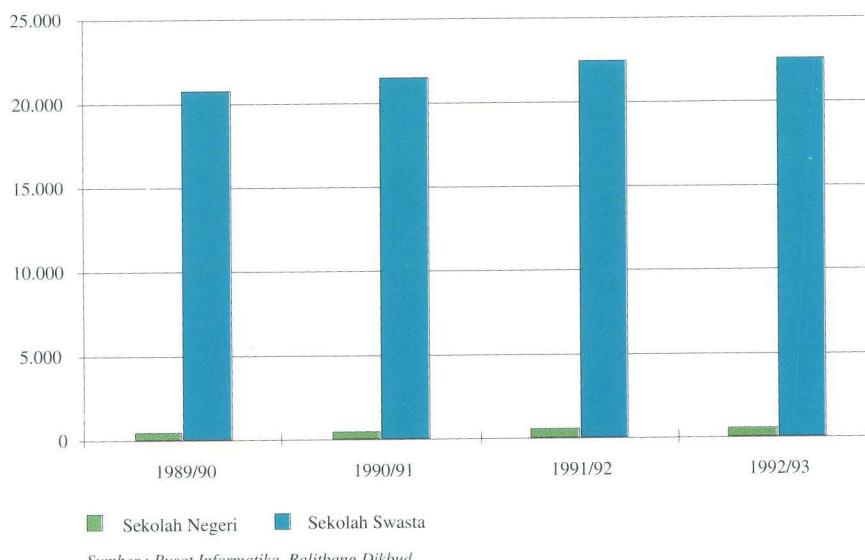
Sumber : Pusat Informatika, Balitbang Dikbud.

Perkembangan Jumlah Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI)
Tahun 1989/90 -1992/93



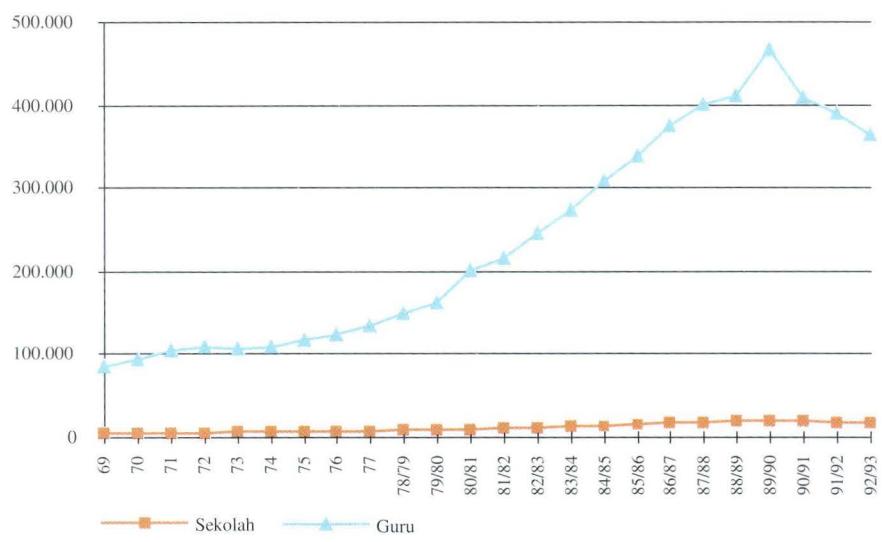
Sumber : Pusat Informatika, Balitbang Dikbud.

Perkembangan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI)
Tahun 1989/90 - 1992/93



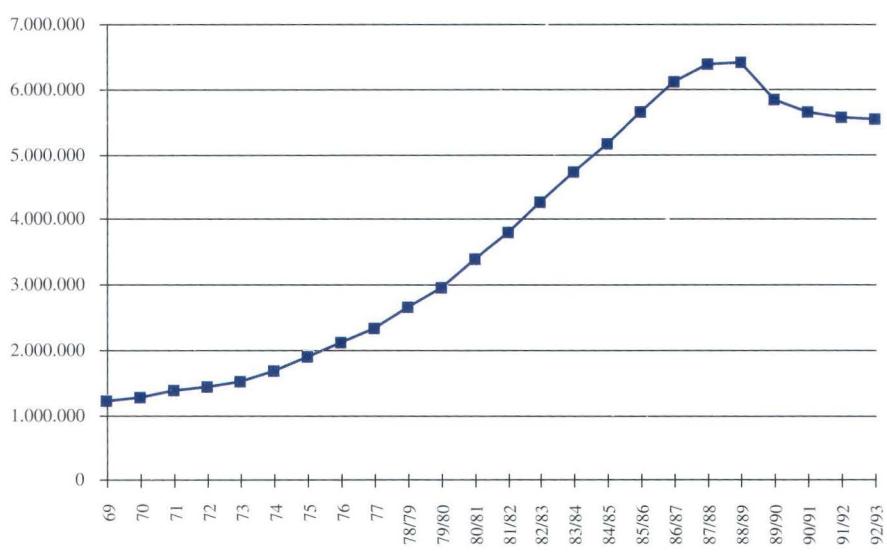
Sumber : Pusat Informatika, Balitbang Dikbud.

Perkembangan Jumlah Sekolah dan Guru Sekolah SLTP
Tahun 1969 - 1992/93



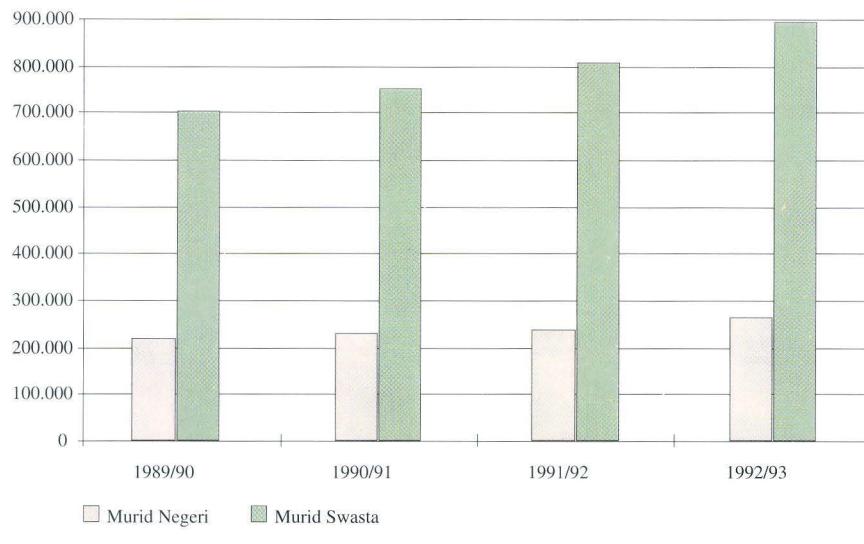
Sumber : Pusat Informatika, Balitbang Dikbud.

Perkembangan Jumlah Murid Sekolah SLTP
Tahun 1969 - 1992/93



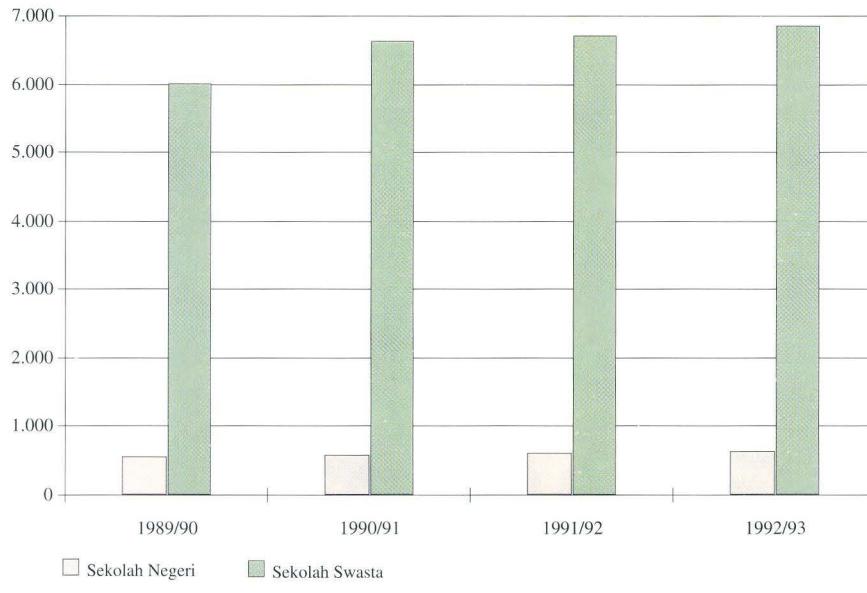
Sumber : Pusat Informatika, Balitbang Dikbud.

Perkembangan Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs)
Tahun 1989/90 - 1992/93



Sumber : Pusat Informatika, Balitbang Dikbud.

Perkembangan Sekolah Madrasah Tsanawiyah
Tahun 1989/90 - 1992/93



Sumber : Pusat Informatika, Balitbang Dikbud.



- *Pendidikan Menengah*

Yang dimaksud pendidikan menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar. Jenis jenis pendidikan menengah meliputi pendidikan menengah umum, pendidikan menengah kejuruan, pendidikan menengah keagamaan, pendidikan menengah kedinasan, dan pendidikan menengah luar biasa.

*Pendidikan Menengah
diselenggarakan bagi
lulusan pendidikan dasar,
yang terdiri dari
SMU dan SMK*

Pendidikan menengah umum mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan siswa serta menyiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi. Pendidikan menengah kejuruan mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu, menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional. Pendidikan menengah keagamaan mengutamakan penguasaan khusus siswa tentang ajaran agama yang bersangkutan. Pendidikan menengah kedinasan merupakan pendidikan yang mengutamakan peningkatan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai negeri atau calon pegawai negeri, sedangkan pendidikan menengah luar biasa khusus diselenggarakan untuk siswa yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.

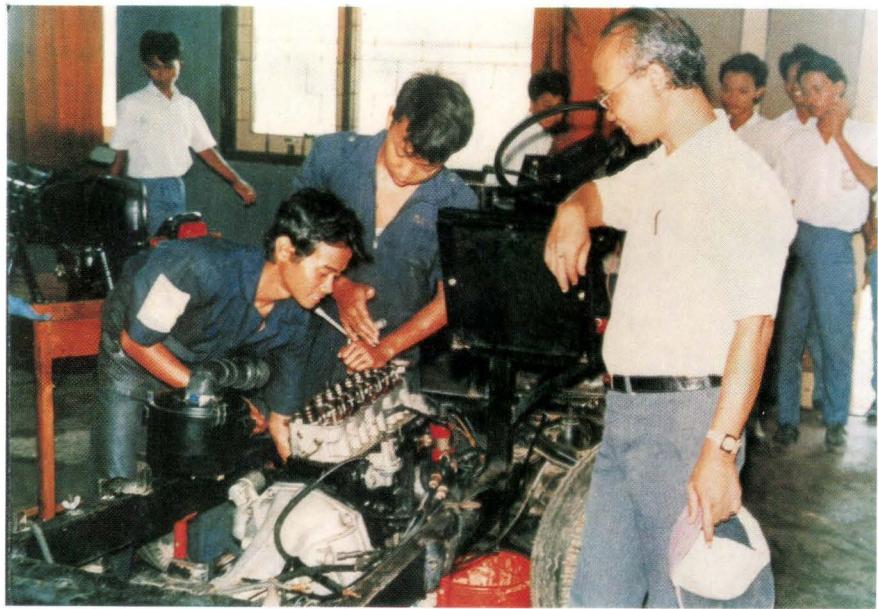
Pendidikan Menengah Umum; satuan pendidikan menengah umum terdiri atas : Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Madrasah Aliyah (MA). Tujuan diselenggarakan pendidikan menengah umum adalah: (1) meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian; dan (2) meningkatkan kemampuan

siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal-balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitarnya.

Program pengajaran pendidikan menengah umum terdiri atas program pengajaran umum dan program pengajaran khusus. Program pengajaran umum diselenggarakan di kelas I dan II, sedangkan program pengajaran khusus mulai diadakan di kelas III.

Pendidikan Menengah Kejuruan; satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan menengah kejuruan adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang menyelenggarakan program pendidikan sesuai dengan jenis-jenis jabatan dan lapangan kerja. Sehubungan dengan itu, program pendidikan





SMK dikelompokkan menjadi enam yaitu: Kelompok Pertanian dan Kehutanan; Kelompok Teknologi dan Industri; Kelompok Bisnis dan Manajemen; Kelompok Kesejahteraan Masyarakat; Kelompok Pariwisata; Kelompok Seni dan Kerajinan.

Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan didasarkan atas kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan. Kurikulum SMK diorganisasikan ke dalam program umum dan kejuruan.

Program umum yaitu sejumlah mata pelajaran yang bersifat normatif yang wajib diikuti oleh seluruh siswa yang berfungsi membentuk watak manusia Indonesia seutuhnya. Program ini terdiri dari mata-mata pelajaran: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; Pendidikan Agama; Bahasa dan Sastra Indonesia; Pendidikan Jasmani dan Kesehatan; Sejarah Nasional dan Sejarah Umum. Program kejuruan terdiri atas mata pelajaran dasar kejuruan dan keahlian kejuruan. Dasar kejuruan berfungsi membentuk kemampuan untuk berkembang dan beradaptasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian yang berkaitan dengan program studi pendidikan yang bersangkutan. Keahlian kejuruan berfungsi membentuk kemampuan produktif yang secara praktis dapat diterapkan pada lapangan kerja yang sesuai.

**Susunan Program Pengajaran
Sekolah Menengah Umum
Kelas I dan II**

Program Umum

Mata Pelajaran	Jumlah Jam Pelajaran	
	Kelas I	Kelas II
1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2
2. Pendidikan Agama	2	2
3. Bahasa dan Sastra Indonesia	5	5
4. Sejarah Nasional dan Sejarah Umum	2	2
5. Bahasa Inggris	4	4
6. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	2	
7. Matematika	6	6
8. IPA	5	5
a. Fisika	4	4
b. Biologi	3	
c. Kimia	3	
9. IPS	3	3
a. Ekonomi	3	
b. Sosiologi	-	2
c. Geografi	2	2
10. Pendidikan Seni	2	-
Jumlah	42	42

**Susunan Program Pengajaran
Sekolah Menengah Umum
Kelas III**

Program Bahasa

Mata Pelajaran	Jumlah Jam Pelajaran	
	Kelas III	
<i>Umum</i>		
1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan		2
2. Pendidikan Agama		2
3. Bahasa dan Sastra Indonesia		3
4. Sejarah Nasional dan Sejarah Umum		2
5. Bahasa Inggris		5
6. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan		2
<i>Khusus</i>		
1. Bahasa dan Sastra Inggris		8
2. Bahasa Inggris		6
3. Bahasa Asing Lain		9
4. Sejarah Budaya		5
Jumlah	42	42

**Susunan Program Pengajaran
Sekolah Menengah Umum
Kelas III**

Program Ilmu Pengetahuan Alam

Mata Pelajaran	Jumlah Jam Pelajaran	
	Kelas III	
<i>Umum</i>		
1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	
2. Pendidikan Agama	2	
3. Bahasa dan Sastra Indonesia	3	
4. Sejarah Nasional dan Sejarah Umum	2	
5. Bahasa Inggris	5	
6. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	2 *)	
<i>Khusus</i>		
1. Fisika	7	
2. Biologi	7	
3. Kimia	6	
4. Matematika	8	
Jumlah	42	

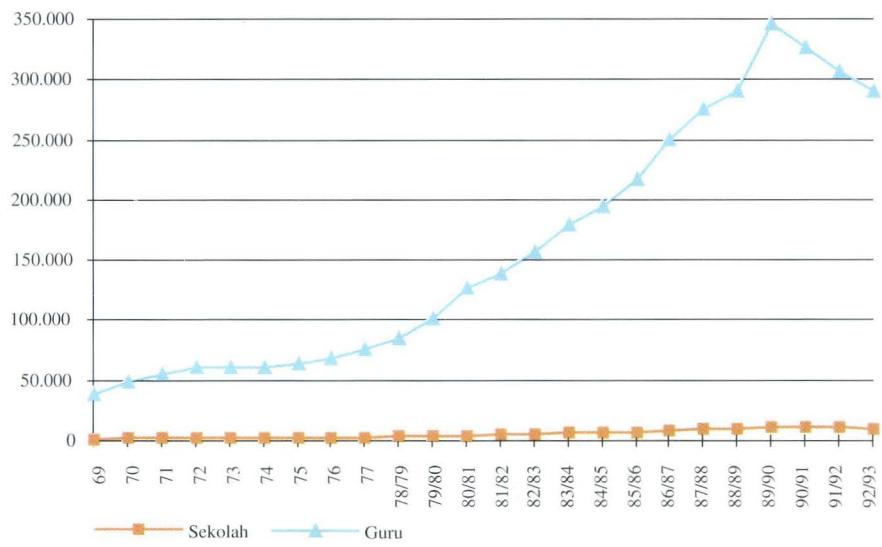
**Susunan Program Pengajaran
Sekolah Menengah Umum
Kelas III**

Program Ilmu Pengetahuan Sosial

Mata Pelajaran	Jumlah Jam Pelajaran	
	Kelas III	
<i>Umum</i>		
1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan		2
2. Pendidikan Agama		2
3. Bahasa dan Sastra Indonesia		3
4. Sejarah Nasional dan Sejarah Umum		2
5. Bahasa Inggris		5
6. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan		2 *)
<i>Khusus</i>		
1. Ekonomi		10
2. Sosiologi		6
3. Tata Negara		6
4. Antropologi		6
Jumlah	42	

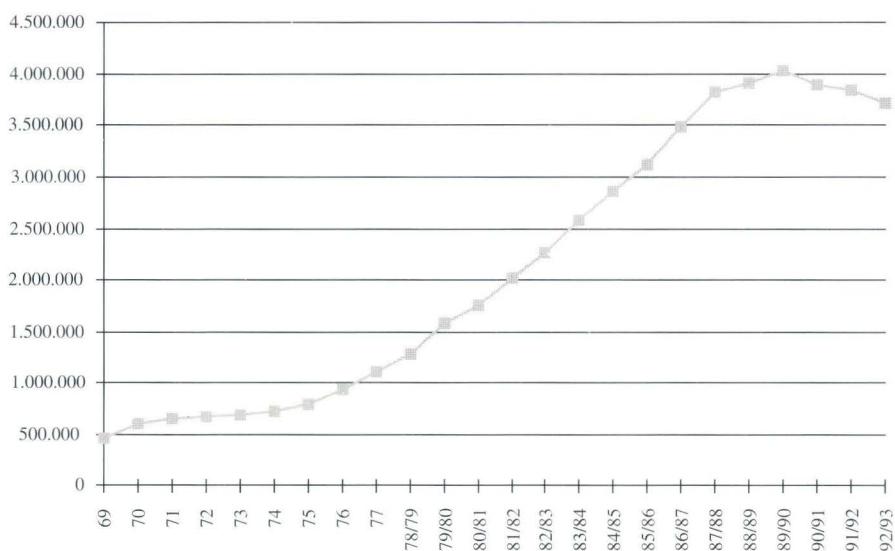
Sumber : Pusat Pengembangan Kurikulum Balitbang Dikbud

Perkembangan Sekolah dan Guru SLTA
Tahun 1969 - 1992/93



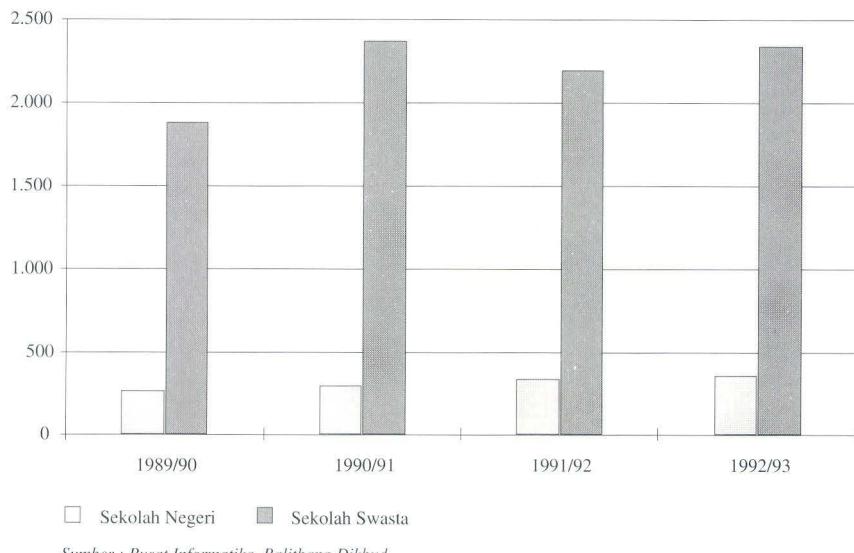
Sumber : Pusat Informatika, Balitbang Dikbud.

Perkembangan Jumlah Murid SLTA
Tahun 1969 - 1992/93



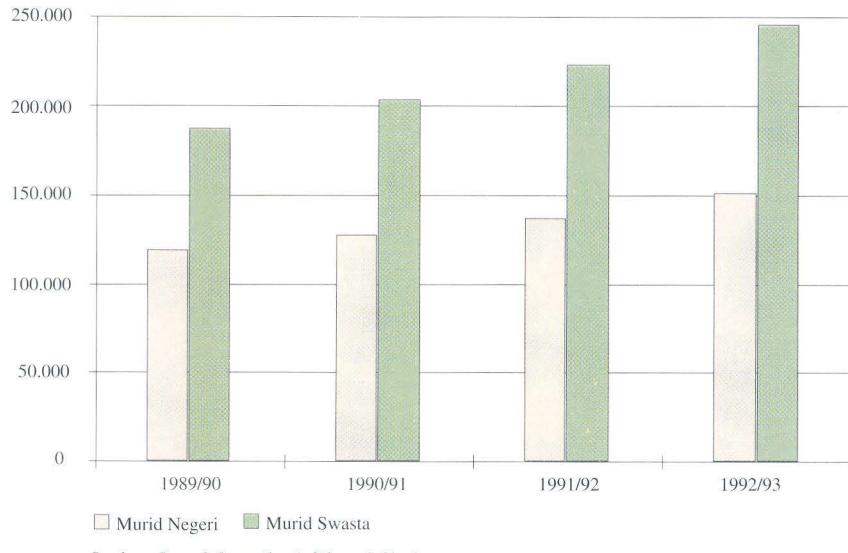
Sumber : Pusat Informatika, Balitbang Dikbud.

Perkembangan Jumlah Sekolah Madrasah Aliyah (MA)
Tahun 1989/90 - 1992/93

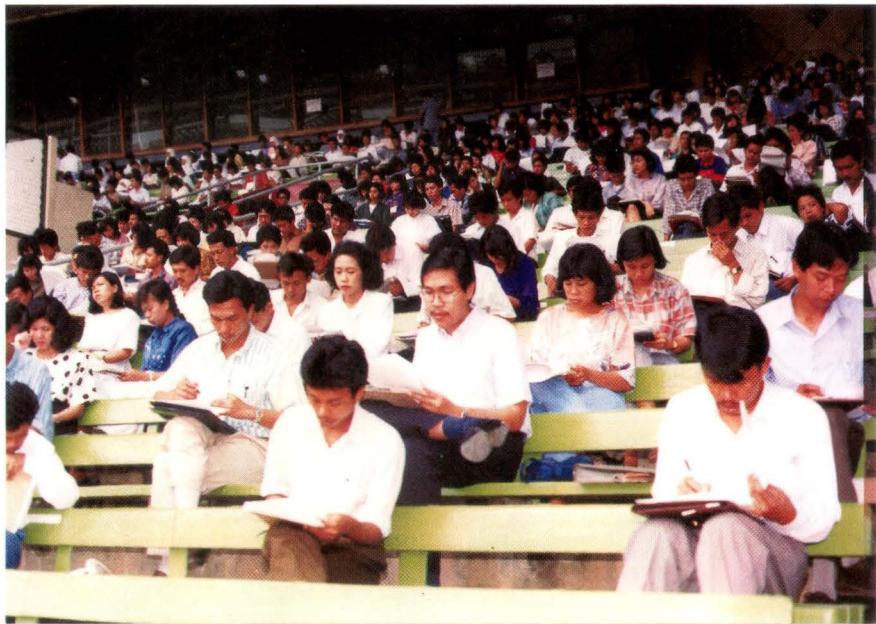


Sumber : Pusat Informatika, Balitbang Dikbud.

Perkembangan Jumlah Murid Madrasah Aliyah (MA)
Tahun 1989/90 - 1992/93



Sumber : Pusat Informatika, Balitbang Dikbud.



- *Pendidikan Tinggi*

*Orientasi
penyelenggaraan
pendidikan tinggi
diarahkahkan pada
pengembangan iptek dan
penggunaannya untuk
meningkatkan taraf
kehidupan masyarakat dan
kebudayaan nasional*

Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah, yang terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Pendidikan akademik terutama diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya, sedangkan pendidikan profesional lebih diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian.

Lembaga penyelenggara pendidikan tinggi disebut perguruan tinggi. Satuan pendidikan ini dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas.

- (1) Akademi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian tertentu.
- (2) Politeknik merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.
- (3) Sekolah Tinggi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu disiplin ilmu tertentu.
- (4) Institut merupakan perguruan tinggi yang terdiri atas fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu yang sejenis.
- (5) Universitas merupakan perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.

Satuan pendidikan yang berbentuk akademi dan politeknik melaksanakan program diploma yang merupakan sebagian dari pendidikan profesional.

Satuan pendidikan tinggi yang berbentuk institut dan universitas melaksanakan pendidikan akademik yang terdiri dari program-program pendidikan sarjana sampai dengan Doktor. Pendidikan profesional terdiri dari program Diploma dan program Spesialis.

Sejalan dengan usaha untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, penyelenggaraan pendidikan tinggi bertujuan untuk: (1) menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian; (2) mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Seperti lazimnya di negara-negara lain, penyelenggaraan pendidikan tinggi tidak saja dilakukan oleh pemerintah tetapi juga oleh lembaga dan atau yayasan swasta. Di lingkungan pemerintah, pengelolaan pendidikan tinggi terbagi dalam dua pengelola, yaitu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Departemen lain. Perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Departemen lain adalah perguruan tinggi kedinasan seperti STPDN dan AKABRI.

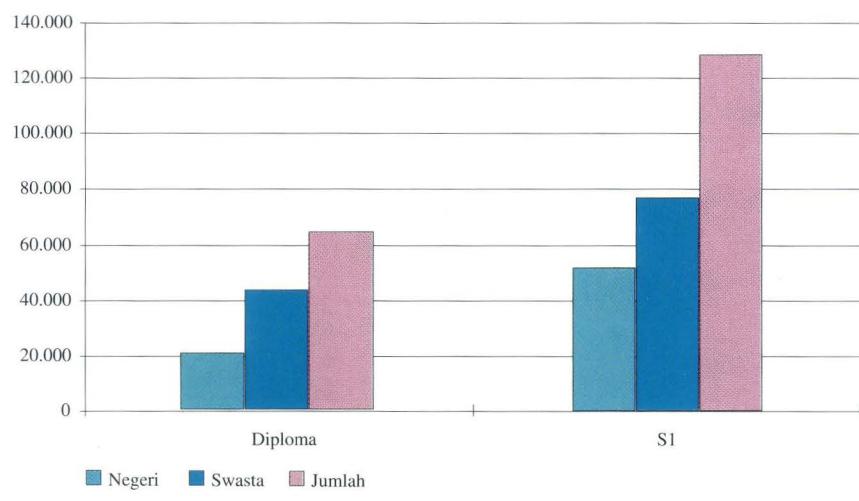
Penerimaan mahasiswa baru di lingkungan perguruan tinggi negeri dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui: (1) Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN); dan (2) Penelusuran Minat dan Kemampuan khusus (PMDK). Seleksi mahasiswa melalui UMPTN dilakukan oleh perguruan tinggi negeri masing-masing yang dikoordinasikan di dalam rayon (Rayon A, B, dan C). Seleksi mahasiswa dilakukan melalui ujian tertulis terhadap kemampuan calon mahasiswa baik potensi akademis maupun prestasi belajarnya. Seleksi mahasiswa baru melalui PMDK dilakukan tanpa melalui ujian melainkan melalui penelusuran minat dan kemampuan khusus sejak menempuh pendidikan menengah. Minat dan kemampuan khusus para calon mahasiswa dievaluasi melalui prestasi akademis semasa di sekolah menengah. Sistem seleksi ini hanya berlaku bagi perguruan tinggi negeri tertentu.

Untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, pembangunan pendidikan tinggi diarahkan kepada:

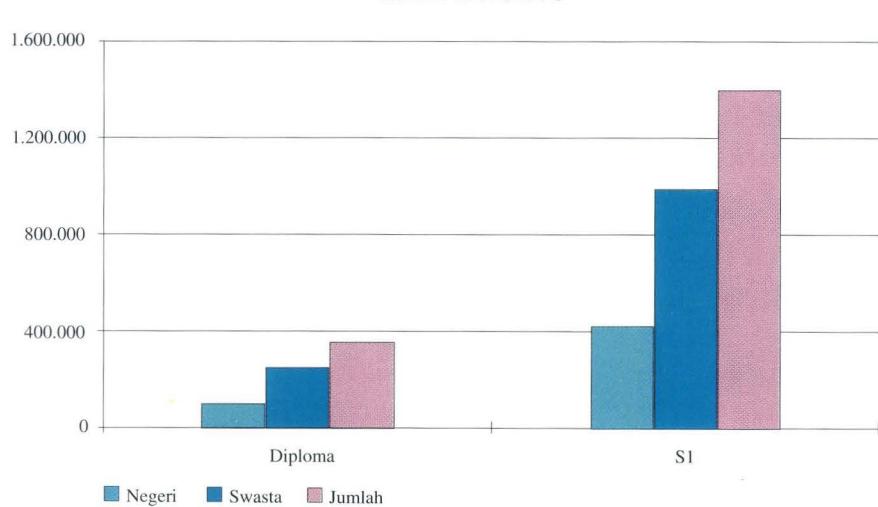
- (1) peningkatan kemampuan mengajar dan meneliti dari dosen-dosen melalui pendidikan tambahan;
- (2) peningkatan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan;
- (3) pengembangan kampus sebagai lingkungan ilmiah yang dinamis, berwawasan budaya bangsa, bermoral Pancasila, dan berkepribadian bangsa;

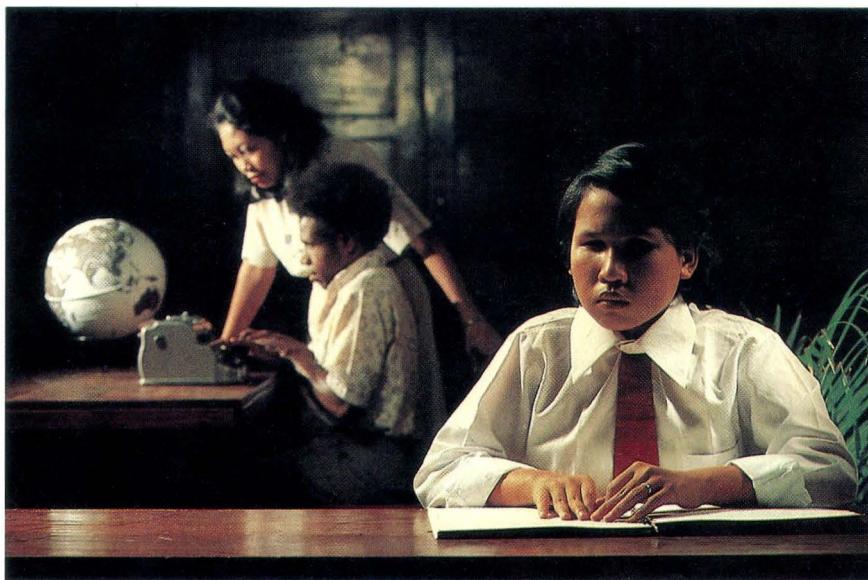
- (4) pengembangan wadah disiplin keilmuan bagi kegiatan mahasiswa dan ilmuwan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan profesi dan prestasinya untuk berperan serta dalam pembangunan;
- (5) pengembangan iklim kehidupan kampus yang demokratis, yang mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi perguruan tinggi sebagai lembaga keilmuan; dan
- (6) penyediaan fasilitas dan prasarana yang memungkinkan terlaksananya kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Jumlah Lulusan PT Menurut Status Perguruan Tinggi
Tahun 1992/1993**



**Jumlah Mahasiswa Terdaftar Menurut Status Perguruan Tinggi
Tahun 1992/1993**





- *Pendidikan Luar Biasa*

Pendidikan luar biasa (PLB) adalah pendidikan yang khusus diselenggarakan bagi peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental. PLB bertujuan membantu peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental, perilaku dan sosial agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal-balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau mengikuti pendidikan lanjutan.

Penyelenggaraan PLB dapat dilaksanakan oleh pemerintah, baik yang ada di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan maupun Departemen lain atau oleh lembaga swasta. Jenis-jenis kelainan peserta didik berupa kelainan fisik, mental, dan perilaku.

Kelainan fisik meliputi jenis-jenis ketunaan sebagai berikut.

- (1) tunanetra, yaitu kerusakan atau cacat mata yang mengakibatkan seseorang tidak dapat melihat (buta) atau kurang daya penglihatannya;
- (2) tuna rungu, yaitu kerusakan atau kelainan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat mendengar atau kurang daya pendengarannya;
- (3) tuna daksa, yaitu anak berkelainan/cacat tubuh yang mengakibatkan berkurangnya mobilitas fisik anak tersebut dibandingkan dengan anak-anak normal.

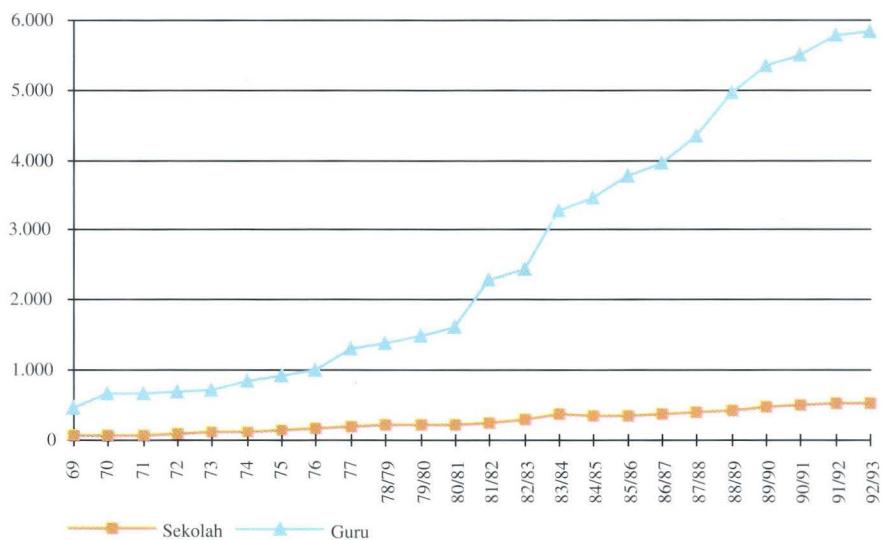
Keterbelakangan mental (tuna grahita) terdiri atas kelainan mental dan kelainan perilaku. Kelainan mental meliputi kelainan ringan dan sedang. Kelainan perilaku merupakan gangguan, hambatan atau kelainan tingkah

laku sehingga kurang dapat menyesuaikan dengan lingkungan seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Peserta didik dapat memiliki kelainan ganda yakni gangguan kelainan fisik dan mental.

Bentuk satuan pendidikan luar biasa terdiri atas :

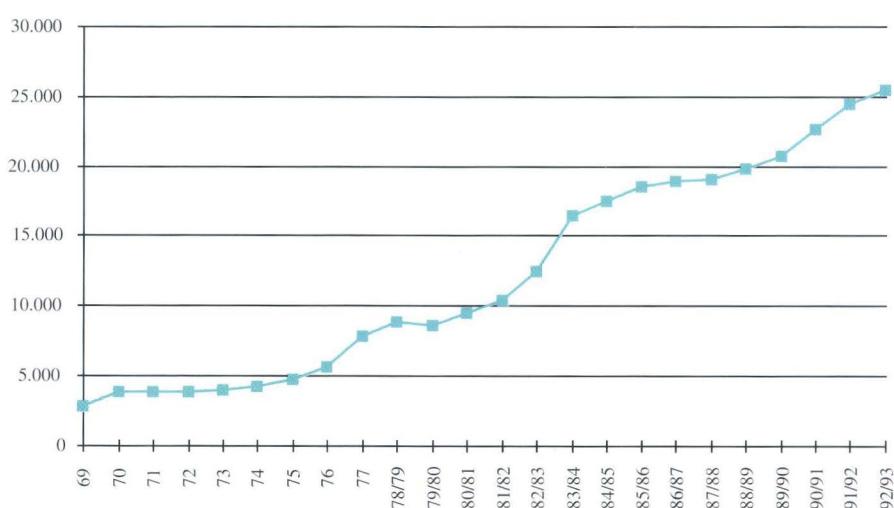
- (1) Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB) dengan lama pendidikan satu sampai tiga tahun;
- (2) Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dengan lama pendidikan sekurang-kurangnya enam tahun;
- (3) Sekolah Lanjutan Pertama Luar Biasa (SLPLB) dengan lama pendidikan sekurang-kurangnya tiga tahun;
- (4) Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB) dengan lama pendidikan sekurang-kurangnya tiga tahun.

**Perkembangan Jumlah Sekolah dan Guru SLB
Tahun 1969 - 1992/93**



Sumber : Pusat Informatika, Balitbang Dikbud.

**Perkembangan Jumlah Murid Sekolah Luar Biasa (SLB)
Tahun 1969 - 1992/93**



Sumber : Pusat Informatika, Balitbang Dikbud.



- *Pendidikan Luar Sekolah*

Pendidikan luar sekolah (PLS) adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar sistem persekolahan melalui kegiatan belajar-mengajar yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan. Ciri yang membedakan pendidikan luar sekolah dengan pendidikan sekolah adalah keluwesan program pendidikannya berkenaan dengan waktu dan lama belajar, usia peserta didik, isi pelajaran, cara penyelenggaraan, dan cara penilaian hasil belajar.

Satuan pendidikan luar sekolah meliputi keluarga, kelompok belajar, kursus, dan satuan pendidikan yang sejenis. Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral, dan keterampilan.

Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah bertujuan untuk:

- (1) melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya;
- (2) membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ke tingkat dan/atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
- (3) memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah.

PLS bisa dilembagakan dan bisa juga tidak, oleh karena itu dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, badan, kelompok/perorangan dan masyarakat. Masyarakat dapat menyelenggarakan semua jenis pendidikan luar sekolah kecuali pendidikan kedinasan.

Bentuk satuan pendidikan luar sekolah meliputi beberapa kursus, kelompok belajar dan bentuk satuan lainnya seperti bentuk kelompok bermain, penitipan anak dan satuan pendidikan sejenis.

- (1) Kursus diselenggarakan bagi warga belajar yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah, dan/atau melanjutkan ke

- jenjang yang lebih tinggi. Kursus dapat diselenggarakan dalam tiga tingkat kemampuan yaitu tingkat dasar, tingkat terampil dan tingkat mahir.
- (2) Kelompok belajar (Kejar) diselenggarakan bagi sekumpulan warga belajar untuk mengembangkan diri, bekerja dan/atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kelompok Belajar yang diselenggarakan oleh pemerintah terdiri atas Kejar Paket A dan Kejar Paket B. Kejar Paket A diselenggarakan bagi sekumpulan warga belajar untuk memperoleh pendidikan setara dengan sekolah dasar. Sedangkan Kejar paket B diselenggarakan bagi sekumpulan warga belajar untuk memperoleh pendidikan setara dengan sekolah lanjutan tingkat pertama.
 - (3) Bentuk Satuan Lainnya, seperti Penitipan Anak, Kelompok Bermain, atau sejenisnya diselenggarakan oleh Departemen Sosial di bawah koordinasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

KEBUDAYAAN NASIONAL

Ruang Lingkup

Dalam GBHN 1993 dan Repelita V, ruang lingkup kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan bidang Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Inventarisasi dan pembinaan nilai-nilai budaya yang dapat menanamkan dan memantapkan disiplin, pembauran bangsa, tanggung jawab, dan kesetiakawanan nasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia baik secara lisan maupun tulisan yang diarahkan untuk mengusahakan agar Bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa negara dan bahasa nasional tumbuh menjadi bahasa modern.
- (3) Pembinaan perpustakaan yang diarahkan pada usaha memantapkan sistem nasional perpustakaan, peningkatan layanan perpustakaan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sampai ke desa-desa.
- (4) Pembinaan kesenian yang dapat mendorong dan menumbuhkan kreatifitas dan daya cipta seniman untuk memperkuat integritas, identitas, dan kebanggaan nasional.
- (5) Pembinaan tradisi dan peninggalan sejarah yang diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran bersejarah, semangat perjuangan, dan cinta tanah air untuk mendukung usaha pengembangan kebudayaan nasional.
- (6) Pembinaan penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diarahkan pada usaha meningkatkan pengungkapan dan penanaman budi luhur budaya spiritual yang sesuai dengan Pancasila tanpa mengarahkan pada terbentuknya agama baru.

Langkah-langkah Strategis

Langkah-langkah strategis yang dilakukan dalam rangka melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional adalah melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat sebagai berikut. (1) memelihara dan melindungi, (2) menggali dan meneliti, (3) mengembangkan dan memperkaya, (4) menyebarluaskan, (5) memanfaatkan, (6) menanggulangi pengaruh asing yang negatif, dan (7) kerja sama.

Memelihara dan Melindungi

Upaya menanggulangi ancaman terhadap kelestarian warisan budaya bangsa, baik kebudayaan nonmaterial yang berupa nilai-nilai, norma sosial dan pandangan masyarakat, maupun kebudayaan material (benda seni dan benda cagar budaya) dimaksudkan agar kebudayaan itu tidak mengalami kerusakan, kehancuran, dan kepunahan. Ancaman pada kebudayaan nonmaterial terjadi karena makin derasnya arus pengaruh yang datang dari luar, sehingga mengakibatkan terjadinya pergeseran dan perubahan nilai-nilai, norma-norma sosial dan pandangan hidup masyarakat. Kegiatan yang dilakukan antara lain: inventarisasi, perekaman, penulisan, penerjemahan, transkripsi, pengungkapan nilai-nilai budaya bangsa dan penanaman kepada generasi penerus.

Ancaman kerusakan pada warisan benda cagar budaya disebabkan oleh proses alami, biologis maupun kimiawi sesuai hukum alam, sehingga perlu diupayakan agar usia benda tersebut dapat diperpanjang. Ancaman yang paling berbahaya justru datang dari manusia. Berbagai kasus pelanggaran berupa: pengrusakan, penggalian liar, penggelapan, pengiriman ke luar negeri dan pencurian benda cagar budaya cenderung makin meningkat.

Upaya yang dilakukan adalah mengadakan pemeliharaan dan perawatan, konservasi, pembersihan, pemugaran, penyimpanan, dan perlindungan benda warisan budaya dari berbagai gangguan. Untuk melindungi dan memelihara benda cagar budaya didasarkan pada perangkat peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan PP No. 10 tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU No. 5 tahun 1992.

Salah satu jalur yang efektif untuk memelihara dan melindungi kebudayaan di Indonesia, budaya material maupun nonmaterial adalah melalui jalur pendidikan, karena pendidikan dipandang sebagai suatu proses untuk membudayakan manusia. Proses itu berjalan dengan mentransfer nilai-nilai budaya esensial yang ada, dan mentrasformasikannya menjadi nilai-nilai budaya kekinian, dari generasi ke generasi baik melalui jalur sekolah maupun luar sekolah. Pendidikan tidak hanya berfungsi untuk menjaga kesinambungan, melainkan juga berfungsi preservatif, partisipatif dan preparatif bagi kehidupan kebudayaan bangsa.

*Upaya-upaya pembinaan
dan pengembangan
kebudayaan :
menanggulangi ancaman
pada kebudayaan
nonmaterial dan material,
penggalian dan
penanaman warisan
budaya, pembinaan
keragaman budaya untuk
memperkaya kebudayaan,
penyebarluasan kekayaan
budaya untuk
memperkuat persatuan
dan kesatuan*



Pendidikan berfungsi preservatif karena melalui pendidikan dilakukan upaya mempertahankan nilai-nilai budaya yang telah ada. Pendidikan juga berfungsi partisipatif, karena secara aktif meramu dan menggodok nilai-nilai budaya lama dengan nilai-nilai baru, sehingga terbentuk kebudayaan yang bersifat kekinian yang menjadi milik bangsa pada saat itu. Sedangkan pendidikan berfungsi preparatif, karena mempersiapkan kebudayaan masa depan. Fungsi yang terakhir ini dilakukan dengan jalan memperkenalkan nilai-nilai universal sesuai dengan perkembangan ilmu, teknologi dan komunikasi, sehingga kebudayaan nasional mampu mengantisipasi nilai-nilai yang mungkin muncul di masa mendatang.

Menggali dan Meneliti

Kegiatan penggalian dapat mengandung dua macam pengertian. Pertama, menggali dalam arti mengungkap, memilah-milah dan mengkaji warisan budaya nonmaterial yaitu tentang nilai-nilai, norma-norma sosial dan pandangan masyarakat guna ditawarkan dan di “pasar”kan dan selanjutnya ditanamkan pada generasi penerus. Arti yang kedua adalah menggali dalam arti mengadakan ekskavasi atau penggalian situs untuk mencari dan menemukan benda cagar budaya untuk dapat diteliti, dikaji dan diungkap latar belakang sejarahnya, sehingga dapat dipakai sebagai bahan penyusunan sejarah dan pengembangan ilmu.

Kegiatan penggalian dan penelitian yang dilakukan antara lain, penelitian di lapangan, penelitian di perpustakaan, ekskavasi, analisa laboratorium, revitalisasi, rekonstruksi (seni) yang hampir punah, seminar, diskusi dan penerbitan.

Mengembangkan dan Memperkaya

Dalam pertemuan budaya antarsuku dan antarbangsa tanpa disadari terjadi proses saling mempengaruhi dan saling mengambil alih satu dengan yang lain. Proses saling mempengaruhi ini akan dapat mengembangkan dan memperkaya kebudayaan yang bersangkutan. Kegiatan yang dilakukan antara lain adalah mengadakan diskusi, ceramah, sarasehan, bimbingan dan penyuluhan, pengiriman atau pertukaran kebudayaan, lomba, festival, pameran dan peragaan.

Menyebarluaskan

Dalam rangka pembinaan apresiasi budaya masyarakat dan mewujudkan pembangunan nasional yang berwawasan budaya, maka kekayaan budaya dan hasil penggalian dan penelitian kekayaan budaya masyarakat perlu diperkenalkan dan disebarluaskan kepada seluruh lapisan masyarakat. Melalui kegiatan penyebarluasan hasil penggalian dan penelitian ditawarkan dan dipasarkan untuk selanjutnya diserap dan mewujud dalam kehidupan sehari-hari, sehingga akan mendorong tumbuhnya pembauran bangsa dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Kegiatan yang dilakukan melalui berbagai media (television, radio, surat kabar/majalah) antara lain dengan: pembuatan rekaman film, video, gambar/foto, slide, penerbitan buku, pameran, pergelaran, ceramah, bimbingan dan penyuluhan.

Memanfaatkan

Budaya Indonesia yang berkembang sepanjang sejarah merupakan modal dasar dan faktor yang dominan untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Oleh karena itu, kebudayaan nasional perlu dimanfaatkan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dan bagi kelangsungan kebudayaan bangsa, antara lain memanfaatkan warisan budaya sebagai obyek pariwisata dan dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Khusus mengenai hubungan antara pendidikan dan kebudayaan, sesungguhnya mempunyai kaitan kemanfaatan yang erat. Suksesnya pendidikan antara lain ditunjang oleh potensi kebudayaan bangsa, dan sebaliknya hidup dan majunya kebudayaan karena berhasilnya pendidikan. Untuk membentuk manusia sadar budaya yang mampu memahami, menghayati dan mengembangkan kebudayaan nasional, pendidikan telah diselenggarakan dalam suasana penuh kebebasan untuk memilih dan terbuka untuk menerima. Dengan demikian siswa akan mampu meneliti, mengkaji, mengapresiasi dan mengembangkan kebudayaan nasionalnya serta mampu mengembangkan kreativitasnya. Kegiatan-kegiatan lomba, festival, sayembara, pelatihan dan pergelaran, pameran berbagai cabang seni di berbagai jenjang sekolah sangat efektif guna dimanfaatkan untuk

Hubungan pendidikan

dan kebudayaan :

Suksesnya pendidikan
ditunjang oleh potensi
kebudayaan, majunya
kebudayaan ditunjang
oleh berhasilnya
pendidikan



menumbuhkan kesadaran berbudaya, sehingga perlu diupayakan agar sekolah dapat menjadi pusat kegiatan kebudayaan.

Oleh karena itu, peran kurikulum dalam proses membentuk manusia yang berbudaya Indonesia melalui pendidikan, amat menentukan, baik kurikulum yang bersifat nasional maupun kurikulum muatan lokal. Unsur-unsur kebudayaan yang tertuang dalam mata pelajaran seperti: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, Sejarah Nasional dan Umum, Kerajinan Tangan dan Kesenian/Kebudayaan, pada hakikatnya merupakan upaya pemanfaatan kebudayaan dalam pembentukan jatidiri bangsa dan perekayaan untuk kesinambungan dan pengembangan kebudayaan. Di samping itu, kebudayaan harus menjadi acuan para pendidik seperti yang diamanatkan UU No. 2 tahun 1989, pasal 31 ayat 2 yang menyatakan bahwa: “tenaga kependidikan harus bersikap menjunjung tinggi kebudayaan bangsa”.

Dengan demikian jelas bahwa hubungan antara pendidikan dan kebudayaan atau sebaliknya kebudayaan dan pendidikan sulit untuk dipisahkan. Oleh karena itu, berbagai fasilitas kebudayaan yang berada di luar lingkungan pendidikan seperti: museum, taman budaya, art centre, art gallery, sanggar seni, padepokan, perpustakaan, obyek peninggalan sejarah dan purbakala dan sebagainya perlu dimanfaatkan untuk menunjang keberhasilan pendidikan dalam membentuk manusia Indonesia seutuhnya dalam arti sebagai manusia Indonesia yang berkualitas dan berbudaya Indonesia.

Menanggulangi pengaruh asing yang negatif

Masuknya pengaruh kebudayaan asing dapat terjadi dari arah mana saja, kapan saja dan dimana saja, baik terhadap kebudayaan material maupun nonmaterial. Sebagaimana dijelaskan di depan, sebagai akibat dari pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi serta keberhasilan pembangunan, menyebabkan kontak-kontak budaya tidak mungkin dihindari. Demikian gencarnya kontak tersebut, hampir-hampir kita tidak diberi kesempatan untuk memilih atau menolak mana yang cocok mana yang tidak. Kontak kebudayaan seolah-olah menjadi lebih bersifat “terpaksa” daripada kontak yang bersifat manasuka.

Pancasila di samping sebagai dasar dan falsafah bangsa Indonesia, juga merupakan perjanjian luhur bagi bangsa Indonesia, sehingga seluruh rakyat harus memahami, menghayati, mentaati dan mengamalkan perjanjian tersebut dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Dalam perjalanan sejarahnya hingga kini, Pancasila telah membuktikan keampuannya dalam menyaring dan menangkal masuknya kebudayaan asing yang mempunyai pengaruh negatif terhadap kelestarian kebudayaan bangsa. Lima sila yang mewujud dalam kehidupan sehari-hari telah tumbuh sebagai norma yang mengatur dapat diterima atau tidaknya kebudayaan asing, antara lain dilihat dari norma hukum, kesopanan, kesusilaan, tatakrama, dan norma-norma lain yang bersumber pada Pancasila. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah berupaya untuk:

- (1) menanamkan keyakinan bahwa kita memiliki kepribadian dan kedaulatan budaya sendiri;
- (2) menanamkan sikap keterbukaan dan kesediaan untuk mengakui dan menghargai kepribadian dan kedaulatan budaya bangsa lain;
- (3) menanamkan sikap kritis dan selektif terhadap masuknya kebudayaan asing.

Kerja sama

Sebagaimana diuraikan di muka, kontak budaya antarsuku dan antarbangsa sulit untuk dihindari. Oleh karena itu, kerja sama kebudayaan perlu diarahkan agar memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, yaitu dapat saling mengembangkan dan memperkaya. Bahkan hubungan kebudayaan antarbangsa dapat memberikan dampak positif bagi kepentingan hubungan diplomatik atau lebih dikenal dengan istilah diplomasi bermatra kebudayaan. Penyelenggaraan kerja sama baik secara bilateral, multilateral dan regional antara lain telah dilaksanakan dengan kegiatan pertukaran dan pengiriman misi kebudayaan/kesenian, pameran, peragaan, seminar, diskusi dan workshop.

*Dalam konteks
budaya, Pancasila
berfungsi sebagai alat
seleksi kebudayaan
asing*

Kerja sama bilateral dilakukan dengan mengadakan persetujuan kebudayaan timbal-balik, dengan dua cara: (1) kerja sama yang dilandasi dengan perjanjian dan (2) kerja sama yang tidak dilandasi dengan perjanjian dan diadakan atas dasar kebutuhan khusus dengan membuat perjanjian secara khusus untuk setiap kegiatan tertentu.

Kerja sama multilateral diselenggarakan dengan berbagai negara yang dalam hal ini dikoordinasikan oleh badan tertentu, misalnya UNESCO. Sedangkan kerja sama Regional dilakukan dengan negara-negara tetangga se-Asia dan Asia Tenggara, seperti: ASEAN, yakni Committee on Culture and Information (COCI), Seameo Project in Archaeology and Fine Arts (SPAFA), Asian Cultural Centre for Unesco (ACCU) dan sebagainya.

Di samping itu, juga dilakukan kerja sama dengan berbagai instansi/yayasan/lembaga asing (antara lain: the Japan Foundation, the Ford Foundation) dan dalam negeri baik tingkat pusat maupun daerah dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kebudayaan.



BAB III

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SELAMA PJP I

S

Strategi pokok pembangunan pendidikan selama PJP I ialah : peningkatan pemerataan kesempatan; peningkatan mutu pendidikan ; peningkatan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan; peningkatan efisiensi

PENDIDIKAN

esuai dengan prioritas dalam pembangunan lima tahun sejak awal PJP I, yaitu sejak Repelita I sampai dengan Repelita V, pembangunan pendidikan didasarkan 4 strategi pokok yaitu peningkatan pemerataan kesempatan, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan, dan peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan. Keadaan dan permasalahan pendidikan yang ada pada akhir pembangunan jangka panjang pertama, secara umum, dapat dikemukakan sebagai berikut.

Perluasan dan Pemerataan Kesempatan Belajar

Sesuai dengan GBHN-1993, pemerintah berupaya untuk memperluas kesempatan pendidikan baik pendidikan dasar, pendidikan kejuruan, maupun pendidikan profesional, melalui jalur sekolah dan jalur luar sekolah. Tujuan terpenting dari kebijakan pemerataan kesempatan belajar pada dasarnya ialah untuk mengurangi kesenjangan sosial yang selalu terjadi di dalam masyarakat apalagi menjelang era modernisasi dan industrialisasi. Pendidikan merupakan faktor yang dianggap paling menentukan terhadap tumbuhnya kesempatan kerja, peningkatan status dan kedudukan, serta hal-hal penting lainnya dalam kehidupan seseorang. Oleh karena itu, keadilan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat akan bisa dicapai melalui pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu.

Dalam rangka mencapai kesempatan pendidikan yang merata ini, kesenjangan dalam sarana-prasarana pendidikan, guru yang bermutu, serta faktor penunjang pendidikan lainnya, perlu diperkecil antara kelompok-kelompok sekolah yang berbeda karena perbedaan dalam: letak propinsi (Jawa dan luar Jawa), keadaan geografis (desa dan kota), bagian Indonesia (Indonesia bagian barat dan timur), faktor sosial-ekonomi, jenis program pendidikan (biasa dan luar biasa), dan pengaruh faktor lainnya.

**Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD + MI
dan Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP
Tiap Akhir Pelita**

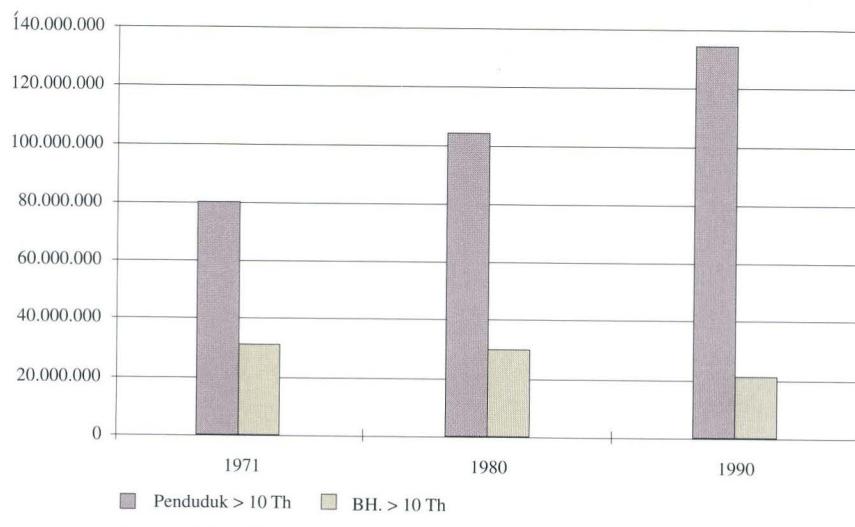


• Termasuk Mi dan MTs

Sumber : Pusat Informatika, Balitbang Dikbud.

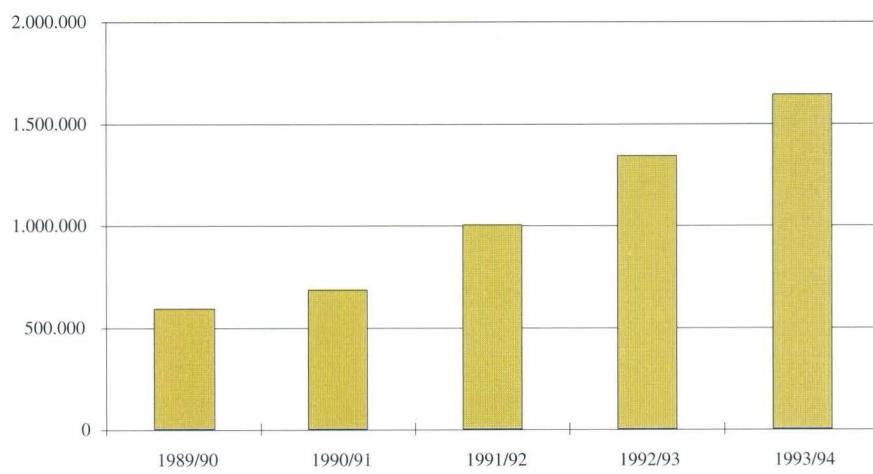
Perluasan kesempatan pendidikan dasar mulai meningkat sejak perluasan sekolah dasar yang dimulai pada tahun 1973. Hal ini ditunjukkan oleh angka partisipasi murni tingkat SD sebesar 41,36% sejak sebelum Repelita I (1968) dan mencapai 91,50% pada akhir Repelita V tahun 1992.

Jumlah Buta Huruf Penduduk Usia 10 Tahun atau Lebih



Sumber : Ditjen Diklusepora, Depdikbud

Perkembangan Jumlah Peserta Didik Program Kejar Paket A Selama Pelita V



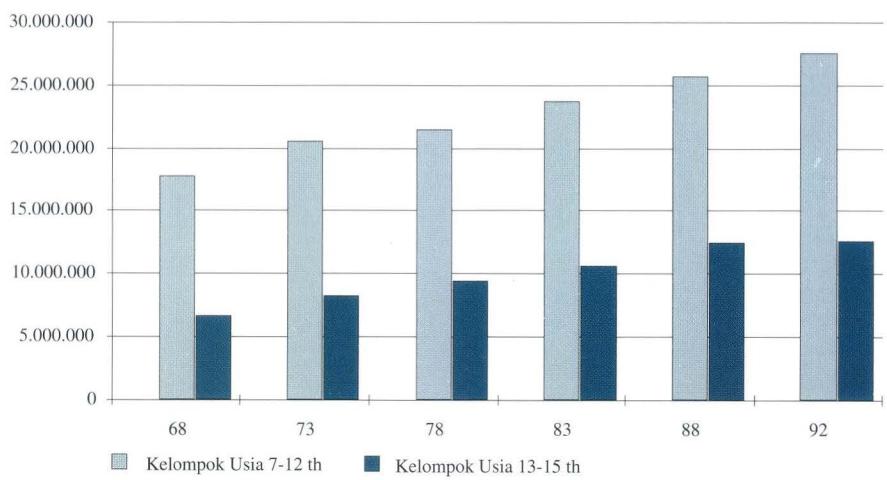
Sumber : Ditjen Diklusepora, Depdikbud

Tampak bahwa hampir selama satu periode pembangunan jangka panjang (PJP I) Depdikbud telah mampu melipatgandakan angka partisipasi sekolah dasar yang juga mengakibatkan penurunan angka buta huruf. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 1990 jumlah buta huruf menunjukkan penurunan, yaitu dari 31.464.860 atau 39,08% dari jumlah penduduk tahun 1971, menjadi 30.096.559 (28,8%) pada tahun 1980 untuk kemudian turun lagi menjadi 21.494.117 (15,92%) pada tahun 1990. Menurunnya jumlah buta huruf tersebut juga tidak lepas dari semakin meluasnya gerakan pemberantasan buta huruf melalui program kejar Paket A, yang pada akhir Pelita V tahun 1993/94 berhasil menjarang peserta sebesar 1.649.498 orang.

Angka partisipasi kasar penduduk usia 13-15 tahun pada sekolah lanjut tingkat pertama (SLTP) pun mengalami perkembangan yang cukup berarti sejak Repelita I (1968) sampai dengan tahun keempat Repelita V (1992). Walaupun demikian angka partisipasi SLTP masih harus ditingkatkan, mengingat masih relatif kecil sehubungan dengan Program Wajib Belajar 9 Tahun. Meskipun demikian, angka partisipasi kasar (Gross Enrolment Ratio) SLTP ini meningkat dari sebesar 16,87% pada tahun 1968 menjadi 18,47% pada tahun 1973, tahun 1990 masih mengalami peningkatan menjadi 54,96%, dan mengalami penurunan menjadi 53,01% pada tahun 1992/93.

Dalam rangka memperluas kesempatan belajar pendidikan dasar, mulai awal Repelita V pemerintah mulai memperluas SLTP sebagai langkah persiapan menuju dicanangkannya program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Namun demikian, hasil-hasil perluasan SLTP tersebut belum menggembirakan karena jumlah dan angka melanjutkan dari SD ke SLTP

**Perkembangan Jumlah Penduduk Usia 7-12 Th dan 13-15 Th
Tahun 1968-1992**



Sumber : Biro Pusat Statistik

Perkembangan Jumlah Murid SD dan SLTP

Repelita I — V (Tahun 1969—1993/94)

(dalam ribuan)

Repelita		Jumlah	Jumlah
		Murid SD	Murid SLTP
Repelita I	Th. 1969	12,802.4	1,127.2
	Th. 1970	12,821.6	1,292.2
	Th. 1971	12,895.9	1,400.8
	Th. 1972	13,030.5	1,444.0
	Th. 1973	13,069.4	1,518.1
Repelita II	Th. 1974/75	13,314.2	1,691.0
	Th. 1975/76	14,280.1	1,900.1
	Th. 1976/77	15,550.1	2,136.0
	Th. 1977/78	17,265.2	2,339.8
	Th. 1978/79	19,074.8	2,673.9
Repelita III	Th. 1979/80	21,165.7	2,982.5
	Th. 1980/81	22,551.8	3,412.1
	Th. 1981/82	23,862.4	3,809.3
	Th. 1982/83	24,700.0	4,272.8
	Th. 1983/84	25,804.3	4,757.6
Repelita IV	Th. 1984/85	26,567.6	5,188.9
	Th. 1985/86	26,550.9	5,669.9
	Th. 1986/87	26,444.7	6,131.4
	Th. 1987/88	26,649.8	6,422.4
	Th. 1988/89	26,725.3	6,446.9
Repelita V	Th. 1989/90	26,528.5	5,852.5
	Th. 1990/91	26,348.3	5,686.0
	Th. 1991/92	26,325.7	5,604.5
	Th. 1992/93	26,339.9	5,576.4
	Th. 1993/94 *)	26,231.7	5,746.3

Catatan: *) Angka Perkiraan

Sumber : *Pusat Informatika, Balitbang Dikbud.*

selama Pelita V masih relatif rendah bahkan menurun selama periode yang bersangkutan. Melalui upaya perluasan SLTP yang akan dilanjutkan secara lebih intensif dalam Repelita VI diharapkan, paling tidak dalam 15 tahun, seluruh lulusan sekolah dasar yang berjumlah sekitar 13 juta orang akan memiliki kesempatan belajar di SLTP.

Upaya perluasan dan pemerataan SLTP tersebut dilakukan melalui penambahan gedung baru, pengangkatan guru-guru baru, penyediaan sarana dan prasarana, dan perluasan SMP Terbuka bagi anak usia 13-15 tahun yang tidak dapat memasuki SLTP biasa.

**Angka Melanjutkan dari SD ke SLTP Repelita II - V
(1974/1975 -- 1993/1994)**



Sumber : Pusat Informatika, Balitbang Dikbud.

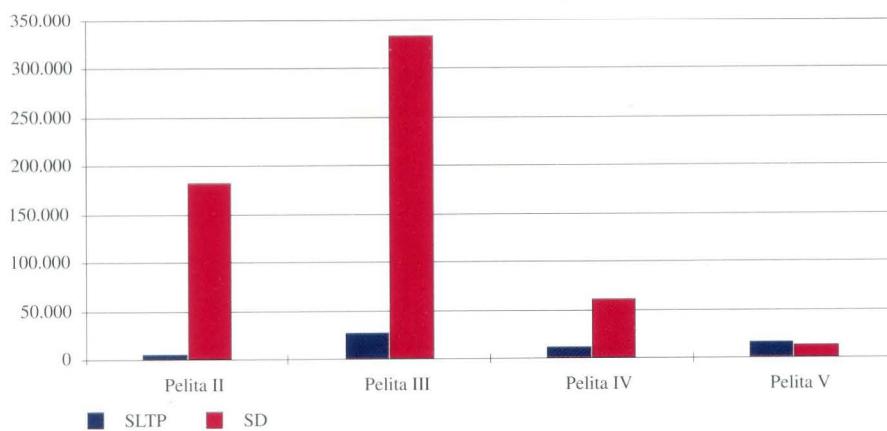
**Perkembangan Jumlah Guru SD dan SLTP
Repelita I — V (Tahun 1969—1993/94)**

Repelita	Tahun	Jumlah	
		Guru SD	Guru SLTP
Repelita I	1969	323.2	72.5
	1970	397.5	94.6
	1971	414.8	110.4
	1972	413.4	109.1
	1973	427.2	107.4
Repelita II	1974/75	444.2	109.9
	1975/76	472.7	117.5
	1976/77	514.9	123.5
	1977/78	551.9	134.0
	1978/79	592.4	149.3
Repelita III	1979/80	619.7	163.5
	1980/81	666.7	202.0
	1981/82	713.2	215.8
	1982/83	841.8	247.2
	1983/84	925.8	275.6
Repelita IV	1984/85	986.6	308.1
	1985/86	1,037.1	339.3
	1986/87	1,078.6	376.6
	1987/88	1,107.1	401.7
	1988/89	1,134.0	412.4
Repelita V	1989/90	1,141.4	467.1
	1990/91	1,136.9	409.7
	1991/92	1,141.0	389.5
	1992/93	1,153.8	365.0
	1993/94 *)	1,160.2	357.7

Catatan: *) Angka Perkiraan

Sumber : Pusat Informatika, Balitbang Dikbud.

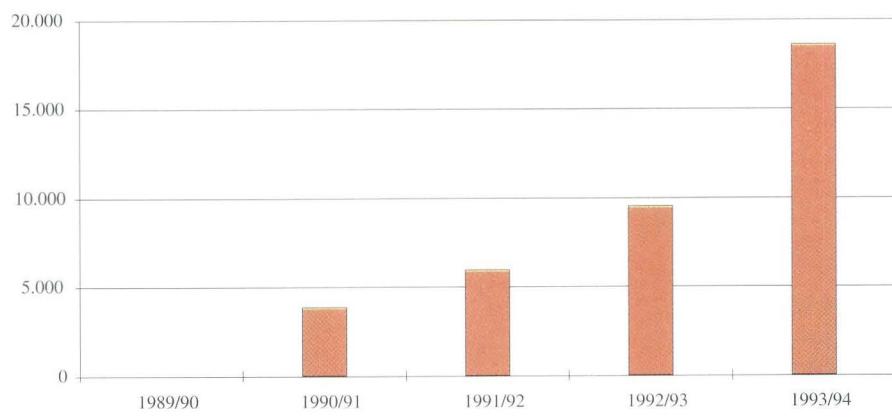
Pembangunan Ruang Kelas Baru Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tiap Pelita



Sumber : Pusat Informatika, Balitbang Dikbud

Pada jalur pendidikan luar sekolah, jumlah peserta Paket B sebagai program PLS setara SLTP nampak mengalami pertumbuhan yang pesat pada periode Repelita V. Upaya untuk meningkatkan perluasan kesempatan belajar pada pendidikan luar sekolah, melalui program Paket B, diarahkan untuk mendukung keberhasilan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang akan mulai dilaksanakan pada awal PJP II.

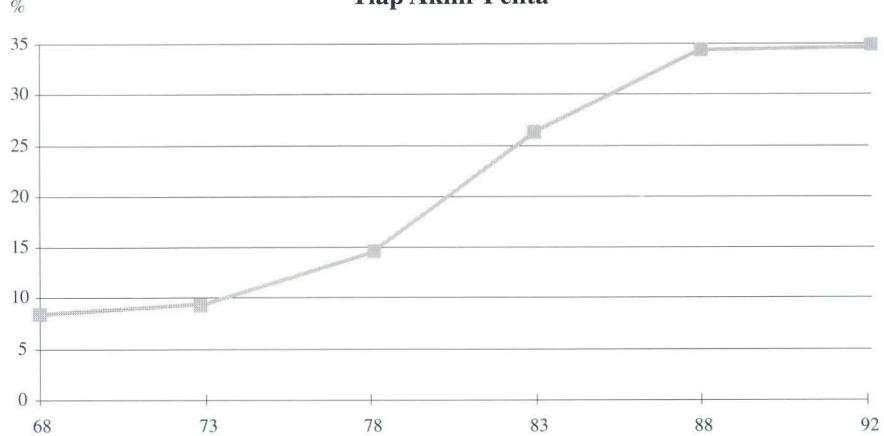
Hasil Pelaksanaan Program Kejar Paket B Selama Pelita V



Sumber : Ditjen Diklusepora, Depdikbud

Perluasan kesempatan belajar pendidikan menengah juga menunjukkan peningkatan. Hal ini tampak dari meningkatnya angka partisipasi baik SMU maupun SMK. Peningkatan angka partisipasi penduduk usia 16-18 tahun pada jenjang SLTA berjalan secara konsisten sejak awal Repelita I sampai dengan tahun 1992/93. Pada jenjang pendidikan menengah (SLTA), angka partisipasi tersebut terus meningkat yaitu 8,59%, pada tahun 1968 menjadi 34,61 pada tahun 1992/93.

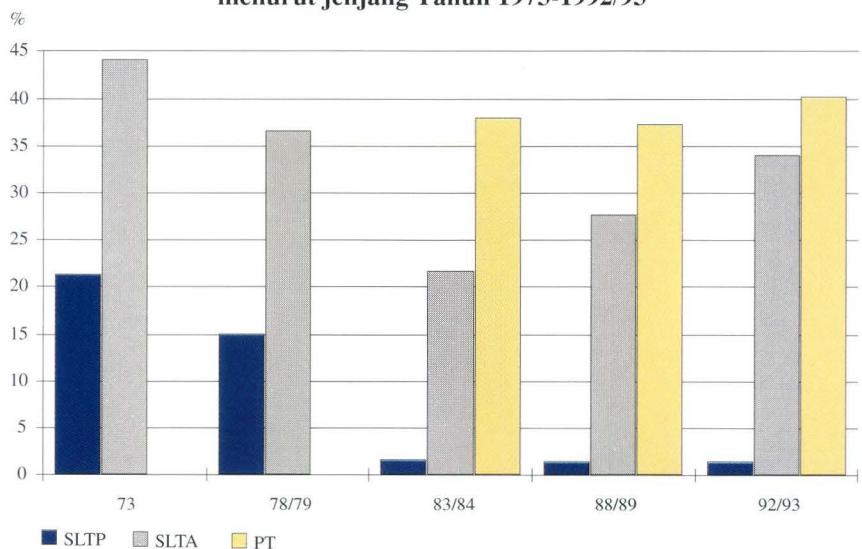
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SLTA Tiap Akhir Pelita



Sumber : Pusat Informatika, Balitbang Dikbud.

Perluasan pendidikan kejuruan (SMK) terus dilakukan oleh pemerintah, terutama sejak periode Repelita IV. Sejalan dengan pertumbuhan industri yang mulai marak sejak awal-awal tahun 1980-an, maka investasi sekolah-sekolah kejuruan di tingkat SLTA mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Jumlah peserta didik terus tumbuh dengan agak pesat yakni dari 21,81% menjadi 34,08% untuk SMK dari 37,44% menjadi 40,26%. Sedangkan pada tingkat SLTP menurun drastis dikarenakan adanya kebijakan untuk mengalihkan fungsi sekolah kejuruan tingkat SLTP menjadi SLTP Umum.

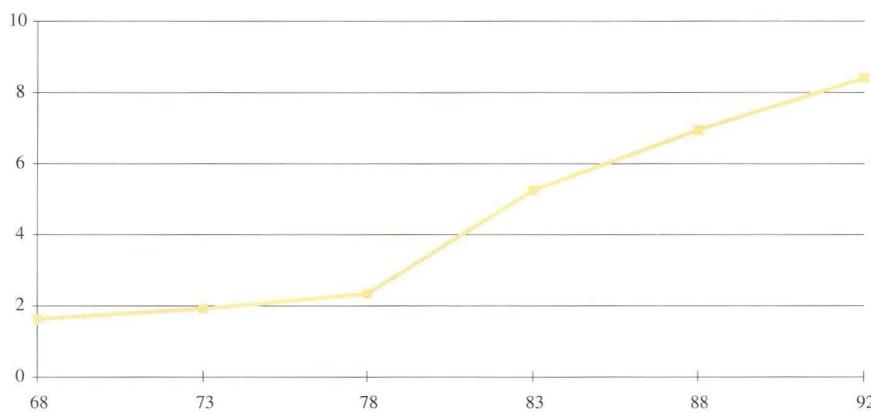
Jumlah Peserta Didik, Pendidikan Kejuruan dan Teknologi menurut jenjang Tahun 1973-1992/93



Sumber : Pusat Informatika, Balitbang Dikbud.

Perluasan kesempatan belajar pada pendidikan tinggi juga terus dilakukan baik melalui pendidikan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Peningkatan yang sangat tajam mulai terjadi sejak tahun 1978 yang mencapai sekitar 20% selama 3 periode Pelita terakhir. Angka partisipasi pada pendidikan tinggi juga mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Angka partisipasi kasar yang pada tahun 1968 sebesar 1,63%, meningkat secara konsisten menjadi 8,43% pada tahun 1992/93. Lonjakan pertumbuhan angka partisipasi mulai terjadi pada tahun 1978 sampai sekarang yang secara konsisten naik mencapai rata-rata pertumbuhan 6,1% selama 14 tahun terakhir.

**Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi
Tiap Akhir Pelita**



Sumber : Pusat Informatika, Balitbang Dikbud.

Beberapa studi menemukan bahwa salah satu sumber penting yang mempengaruhi terjadinya ketidak merataan dalam kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu ialah struktur penerimaan dan pengeluaran biaya pendidikan yang tidak merata. Jika demikian halnya, pemerataan kesempatan dan mutu pendidikan dapat ditingkatkan melalui upaya pembaharuan dalam struktur pembiayaan pendidikan. Setiap satuan lembaga pendidikan diharapkan memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengelola penerimaan dan pengeluaran biaya pendidikan di lingkungan sistemnya masing-masing. Untuk tujuan pemerataan dan keadilan ini, partisipasi pemerintah daerah, masyarakat, dan termasuk dunia usaha dalam pembiayaan pendidikan hendaknya terus digali sehingga tidak sepenuhnya membebani pemerintah pusat yang anggarannya semakin terbatas. Dalam kaitan ini, subsidi pemerintah akan memainkan peranan dalam menciptakan keseimbangan dalam pembiayaan pendidikan antara lembaga pendidikan satu dengan lainnya, dan antara daerah satu dengan daerah lainnya.

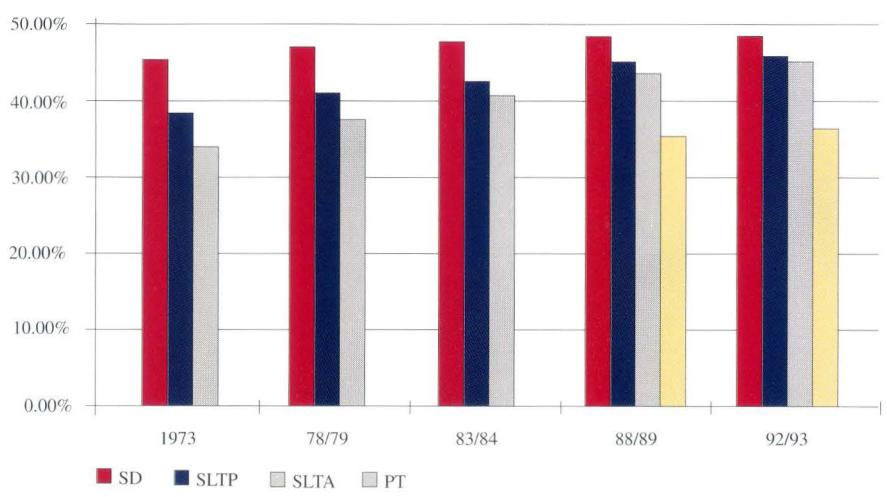
*Meningkatkan
pemerataan kesempatan
belajar dengan melibatkan
partisipasi pemerintah
daerah, masyarakat dan
dunia usaha dalam
pembiayaan pendidikan*

Pemerataan dan Keadilan pendidikan dapat diciptakan dengan jalan menghilangkan hambatan bagi peserta didik yang berbakat dan berprestasi luar biasa untuk memperoleh pendidikan dan keahlian

Pemerataan dan keadilan pendidikan tersebut juga perlu ditingkatkan dengan jalan menghilangkan hambatan bagi peserta didik yang berbakat dan berprestasi luar biasa untuk memperoleh pendidikan dan keahlian tertentu. Untuk itu mekanisme dalam penerimaan siswa/mahasiswa baru perlu dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu menjaring peserta didik secara adil sesuai dengan bakat dan prestasinya. Subsidi pemerintah juga perlu diberikan kepada peserta didik yang memiliki bakat dan prestasi luar biasa, tetapi secara ekonomis kurang mampu.

Walaupun demikian, terdapat kecenderungan bahwa, hampir di setiap propinsi proporsi murid laki-laki cenderung lebih besar dibandingkan dengan murid perempuan. Hal ini memberikan isyarat bahwa peluang untuk memasuki sekolah, terlepas dari faktor sosio-geografis, sedikit lebih besar dimiliki oleh murid laki-laki dibandingkan dengan murid perempuan. Secara nasional pada tahun 1992/93 jenjang sekolah dasar (SD) proporsi murid laki-laki ialah 51,63%, sedangkan murid perempuan 48,37%. Pada jenjang sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) murid laki-laki 54,27% sedangkan murid perempuan 45,73%. Demikian pula pada jenjang sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) murid laki-laki 55,76%, sedangkan murid perempuan 44,24%. Pada jenjang perguruan tinggi (PT) khususnya PT negeri, murid laki-laki 63,68% sedangkan perempuan 36,32%.

Perbandingan Peserta Didik Perempuan Terhadap Laki-laki untuk Jenjang SD, SLTP, SLTA, dan PT Tahun 1973, 1978/79, 1983/84, 1988/89, 1992/93



Sumber : Pusat Informatika, Balitbang Dikbud.

Berdasarkan data perkembangan tersebut, terdapat kecenderungan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin kecil proporsi murid perempuan, dan semakin besar proporsi murid laki-laki.

Peningkatan Mutu Pendidikan

Pada akhir abad 20, Indonesia digolongkan ke dalam jajaran negara-negara yang memiliki struktur ekonomi industri di kawasan Asia-Pasifik. Seperti dikemukakan di Bab I, Persaingan antar-bangsa di dunia untuk mengejar kekuatan ekonomi akan diwarnai oleh persaingan yang ketat dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar Indonesia mampu mengembangkan sektor-sektor industri yang dapat bersaing di dunia, maka kebutuhan akan ilmuwan dan teknokrat yang menguasai berbagai bidang ilmu dan teknologi harus dipenuhi, melalui pendidikan yang bermutu.

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak semata-mata merupakan tugas pendidikan tinggi. Pendidikan dasar dan pendidikan menengah juga dianggap sebagai bagian pendidikan yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian pendidikan iptek yang bermutu merupakan paduan yang tak terpisahkan antara pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dalam rangka pembangunan pendidikan, upaya peningkatan mutu pendidikan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan paling tidak dalam dua Repelita terakhir ini mendapatkan prioritas yang tinggi.

Upaya-upaya peningkatan mutu untuk pendidikan dasar telah dilakukan upaya-upaya antara lain melalui (1) pengembangan kurikulum, termasuk di dalamnya perencanaan materi pelajaran yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sejak dini; (2) peningkatan mutu dan kesejahteraan guru serta tenaga kependidikan lainnya; dan (3) penyediaan sarana-prasarana belajar yang memadai. Untuk pendidikan menengah umum, upaya-upaya peningkatan mutu dilakukan antara lain melalui pengembangan kurikulum baru yang bercirikan penyelenggaraan pendidikan per kuartal dengan penjurusan yang dilakukan mulai di kelas III, yang antara lain berisi kurikulum muatan lokal; sedangkan untuk pendidikan menengah kejuruan upaya ini dilakukan melalui pengembangan kurikulum, termasuk di dalamnya perencanaan, implementasi, penilaian mutu, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan mutu tenaga pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan.

Mutu Pendidikan pada Tingkat Sekolah dan LPTK

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi mutu pendidikan seperti guru, sarana-prasarana, kurikulum dan proses belajar, serta sistem penilaian. Walaupun demikian, faktor guru tidak dapat disamakan dengan faktor-faktor lainnya. Guru adalah SDM yang diharapkan mampu mengerahkan dan mendayagunakan faktor-faktor lainnya sehingga tercipta proses belajar

Pengembangan Iptek tidak semata-mata merupakan tugas perguruan tinggi; pendidikan dasar dan menengah memberikan landasan dalam penanaman dasar-dasar penguasaan iptek

yang bermutu. Tanpa mengabaikan peran faktor-faktor lain, guru dapat dianggap sebagai faktor tunggal yang paling menentukan terhadap meningkatnya mutu pendidikan.

Berdasarkan studi Pusat Informatika yang berjudul Improving the Educational Quality of Primary Education (Ace Suryadi, 1992) ditemukan bahwa guru yang bermutu memberikan pengaruh yang paling tinggi terhadap mutu pendidikan. Dalam studi ini, guru yang bermutu diukur dengan empat faktor utama yaitu kemampuan profesional, upaya profesional, kesesuaian waktu yang dicurahkan untuk kegiatan profesional dan kesesuaian antara keahlian dengan pekerjaannya.

Jumlah Guru menurut Kewenangan Mengajar Tahun 1992/93

Tingkat Pendidikan	Semi Berwenang	%	Tidak Berwenang	%	Berwenang	%	Jumlah
SD	90,454	7.84	997,347	86.44	66,015	5.72	1,153,816
SLTP	198,904	51.97	80,374	21.00	103,470	27.03	382,748
SLTA	60,534	20.28	128,171	42.95	109,746	36.77	298,451

Sumber : Pusat Informatika Balitbang Dikbud

*Guru yang bermutu
ditandai oleh :
kemampuan profesional ;
upaya profesional ; waktu
yang dicurahkan untuk
kegiatan profesional ; dan
kesesuaian antara
keahlian dengan
pekerjaannya*

Keempat faktor yang mempengaruhi mutu guru tersebut dikemukakan sebagai berikut.

Pertama, kemampuan profesional guru terdiri dari kemampuan intelegensi, sikap, dan prestasinya dalam bekerja.

Kedua, upaya profesional guru adalah upaya seorang guru dalam mentransformasikan kemampuan profesional yang dimilikinya ke dalam tindakan mengajar yang nyata. Dalam beberapa penelitian, upaya profesional guru tersebut ditunjukkan oleh kegiatannya baik dalam mengajar maupun dalam menambah serta meremajakan pengetahuan dan kemampuannya menguasai keahlian mengajarnya baik keahlian dalam menguasai materi pelajaran, penggunaan bahan-bahan pengajaran maupun mengelola kegiatan belajar murid.

Ketiga, waktu yang dicurahkan untuk kegiatan profesional (*teacher's time*) menunjukkan intensitas waktu yang digunakan oleh seorang guru untuk melaksanakan tugas-tugas profesionalnya. Teacher's time ini merupakan salah satu indikator penting dari mutu guru, karena konsepsi waktu belajar (*Time on Task*) yang diukur dalam belajar siswa secara perorangan, telah ditemukan, oleh studi tersebut di atas, sebagai salah satu prediktor terbaik dari mutu hasil belajar peserta didik.

Keempat, kesesuaian antara keahlian dengan pekerjaannya, dengan asumsi bahwa guru yang dipersiapkan untuk mengajar suatu bidang studi dianggap bermutu jika guru tersebut mengajar bidang studi yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, maka kesesuaian guru mengajar dengan bidang studi yang didalamnya di LPTK merupakan prasarat yang mutlak untuk menilai mutu profesional seorang guru.

Komposisi Guru Menurut Jurusan Pendidikan dan Bidang Studi yang Diajarkan Jenis Sekolah SMP

No.	Bidang Studi	Pend.	PMP	PSPB	Pend.	Pend.	Bhs.	Bhs.	Bhs.	IPS	Mate-	IPA	Ke-	
		Agama		Jasmani	Kese-	Ind.	Daerah	Inggris		matika		tram-	Jumlah	
1	Pend. Agama	91.55	0.86	0.60	0.89	0.52	1.75	0.19	0.52	0.89	0.71	0.37	1.15	100.00
2	PMP	1.12	77.83	5.43	0.33	1.38	3.53	0.35	0.81	4.91	1.07	0.74	2.50	100.00
3	PSPB	0.86	10.12	37.21	0.30	2.95	5.23	0.93	1.34	28.39	1.34	2.09	9.23	100.00
4	Pend. Jasmani	0.75	1.32	0.68	76.82	1.56	4.44	0.16	0.72	4.56	1.15	3.28	4.56	100.00
5	Pend. Kesenian	0.26	0.81	1.09	0.64	81.52	4.65	0.16	2.88	2.42	0.74	0.79	4.05	100.00
6	Bhs. Ind.	0.25	0.50	0.35	0.12	0.66	90.50	1.96	3.06	0.69	0.36	0.35	1.21	100.00
7	Bhs. Daerah	2.16	0.22	2.02	0.65	6.78	8.15	64.21	1.73	2.24	2.16	2.16	7.50	100.00
8	Bhs. Inggris	0.43	0.44	0.64	0.12	0.58	6.82	0.35	87.04	1.05	0.57	0.51	1.47	100.00
9	IPS	0.48	2.78	12.94	0.31	0.97	3.33	0.43	0.48	68.30	0.68	3.64	5.66	100.00
10	Matematika	0.13	0.44	0.48	0.13	0.38	1.26	0.13	0.53	0.68	91.38	3.22	1.25	100.00
11	IPA	0.14	0.61	0.97	0.72	0.92	2.16	0.18	0.51	3.98	4.56	80.98	4.27	100.00
12	Ketrampilan	0.10	1.68	0.19	0.50	3.19	3.32	0.13	0.24	2.01	1.02	0.81	86.80	100.00
Jumlah		3.49	6.54	3.35	5.75	6.26	16.84	1.64	10.19	9.28	13.96	12.23	10.47	100.00

Sumber : Pusat Informatika Balitbang Dikbud

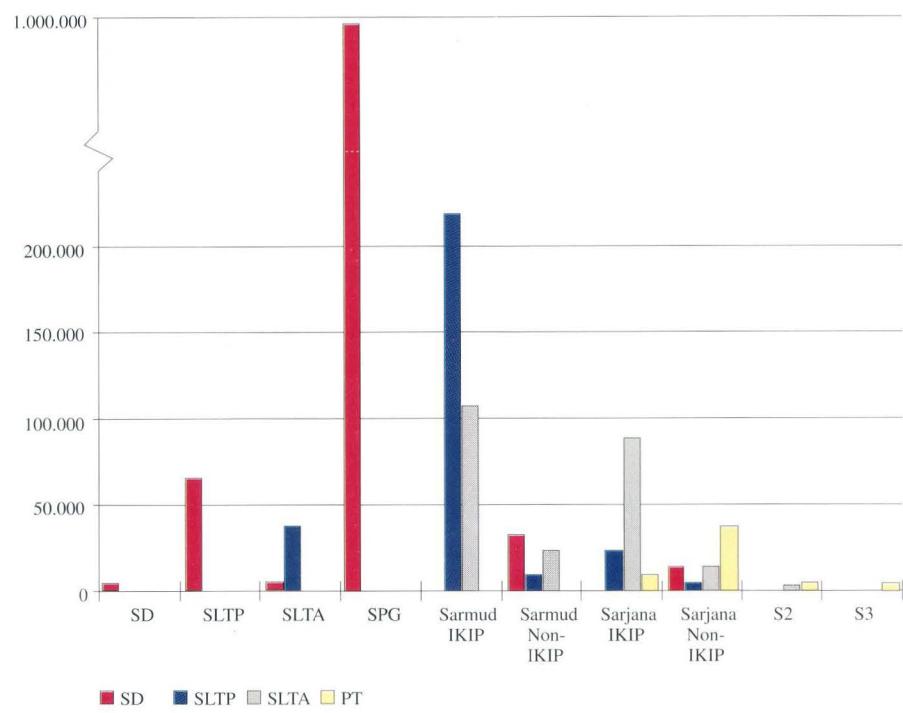
Kesesuaian keahlian dengan pekerjaan guru tersebut tidak terlepas dari peranan lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK). Dengan demikian mutu pendidikan pada tingkat sekolah (SD, SLTP, dan SLTA) memiliki kaitan yang erat dengan kemampuan LPTK dalam menghasilkan guru yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Namun oleh karena, sangat jarang penelitian tentang mutu guru yang dihasilkan oleh LPTK, dalam pambahasan ini hanya dikemukakan kemampuan LPTK dalam menghasilkan jumlah dan komposisi guru menurut bidang studi.

**Komposisi Guru Menurut Jurusan Pendidikan dan Bidang Studi yang Diajarkan
Jenis Sekolah SMA**

No.	Bidang Studi	Pend. Agama		PMP		PSPB		Sej. Nas.		Bhs. & Sastra		Eko- nomi		Geo- grafi		Pend. Jas- mani		Pend. Kese- nian		Pend. Ke- tramp		Bhs. Inggris		A1/ A2		A3		A4		Jumlah	
1	Pend. Agama	88.78	0.58	0.13	0.32	0.91	0.58	0.32	0.58	0.13	0.26	0.26	1.30	5.71	0.13	100.00															
2	PMP	0.62	80.11	2.98	0.62	0.83	1.20	1.08	0.25	0.37	0.50	0.33	0.91	9.61	0.58	100.00															
3	PSPB	0.49	4.14	62.93	18.47	1.50	2.31	0.97	0.85	0.49	0.49	0.73	0.69	4.02	1.91	100.00															
4	Sejarah Nas.	1.20	3.13	47.23	30.84	1.69	5.30	1.20	0.48	0.48	1.93	0.00	1.69	4.34	0.48	100.00															
5	Bahasa & Sastra	0.25	0.19	0.11	0.11	92.15	0.08	0.11	0.11	0.39	0.00	2.18	0.77	1.27	2.29	100.00															
6	Ekonomi	0.00	0.38	0.08	0.08	0.64	84.78	0.57	0.11	0.11	5.44	0.34	1.17	6.23	0.08	100.00															
7	Geografi	0.00	1.16	0.83	0.44	0.66	1.54	88.01	0.33	0.17	0.61	0.17	3.74	1.93	0.44	100.00															
8	Pend. Jasmani	1.63	0.43	0.82	0.48	0.96	0.14	0.91	91.22	0.34	0.48	0.24	1.30	0.96	0.10	100.00															
9	Pend. Kesenian	0.37	0.90	2.61	2.46	2.69	1.57	0.90	1.42	78.66	3.21	0.67	1.19	2.69	0.67	100.00															
10	Pend. Ketrampilan	0.77	2.03	0.21	0.21	2.58	3.49	1.89	0.91	2.37	78.49	0.56	3.35	2.37	0.77	100.00															
11	Bhs. Inggris	0.48	0.61	0.17	0.14	6.15	1.05	0.27	0.10	0.10	0.24	88.32	0.95	1.19	0.24	100.00															
12	A1/A2	0.26	0.45	0.12	0.11	0.47	0.59	0.30	0.27	0.15	0.81	0.32	95.78	0.35	0.03	100.00															
13	A3	2.33	10.17	4.84	1.18	3.54	21.92	4.03	0.66	0.98	2.16	2.82	3.98	41.00	0.37	100.00															
14	A4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00															
	Jumlah	4.34	7.04	5.72	1.98	10.70	9.12	5.26	5.60	3.27	4.21	7.90	28.03	6.23	0.60	100.00															

Sumber : Pusat Informatika Balitbang Dikbud

**Tenaga Pengajar Menurut Tingkat Sekolah dan Ijazah Tertinggi
Tahun 1992/93**



Sumber : Pusat Informatika, Balitbang Dikbud.

**Kebutuhan Guru SD dengan Alternatif
Guru Merangkap di Tingkat I dan II
Tahun 1992/93**

Klasifikasi yang ada	Kebutuhan	Lulusan	Guru	Atrisi	Persediaan	Kesenjangan
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (3)+(4)-(5)
1. Guru Kelas	823,187	5,971	795,731	15,915	785,787	(37,400)
2. Guru Olahraga	148,257		63,476	1,270	62,206	(86,051)
3. Guru Agama	148,257		152,235	3,045	149,190	933
4. Kepala Sekolah	148,257		142,375	2,848	139,527	(8,730)
Jumlah	1,267,958	5,971	1,153,817	23,078	1,136,710	(131,248)

Sumber : Pusat Informatika Balitbang Dikbud

Kebutuhan Guru SD

Tahun 1992/93

Alternatif Guru Kelas = Kelas

No. Bidang Studi	Guru	Kebutuhan Guru					
		(1)	(2)	Lulusan yg ada	Atrisi	Persediaan	Kesenjangan
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4+5-6)	(7)-(3)
1 Guru Kelas	994,597	5,971	795,731	15,915	785,787	(208,810)	
2 Guru Olahraga	148,257		63,475	1,270	62,205	(86,052)	
3 Guru Agama	148,257		152,235	3,045	149,190	933	
4 Kepala Sekolah	148,257		142,375	2,848	139,527	(8,730)	
Jumlah	1,439,368	5,971	1,153,816	23,078	1,136,709	(302,659)	

Sumber : Pusat Informatika Balitbang Dikbud

Kemampuan LPTK untuk menghasilkan guru SD (program D2) sampai saat ini mencapai 5.971 orang per tahun. Jumlah ini relatif kecil jika dibandingkan dengan kebutuhannya yang mencapai 280.439 orang secara nasional. Jumlah lulusan tersebut akan lebih kecil jika diperhitungkan dengan jumlah guru yang berkurang dikarenakan pensiun, meninggal, keluar, atau promosi ke jabatan nonguru setiap tahunnya yang mencapai 23.078 orang atau sekitar 2 % pada tahun 1992/93.

Namun demikian, kekurangan guru SD ini kemungkinan besar lebih diakibatkan oleh penyebaran guru yang kurang merata, karena secara nasional rasio murid berbanding guru ialah 23 orang murid per guru, yang jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan, misalnya, Korea yang rasionya 51 orang murid per guru.

Guru SLTP dan SLTA pada tahun 1992 berjumlah 379.478 orang yang mengajar berbagai bidang studi berdasarkan kurikulum yang berlaku sekarang, sedangkan jumlah lulusan LPTK menurut program studi tahun 1991/92 adalah seperti di bawah ini.

**Kesepadanan Antara Kebutuhan dan Persediaan Guru SLTP dan SLTA Umum
Tahun 1992/93
(Berdasarkan Kurikulum 1994)**

No.	Bidang Studi	Kebutuhan Lulusan yg ada			Guru	Atrisi	Kesenjangan
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Persediaan (7)=(4+5-6)
1	Pend. Pancasila & Kewarganegaraan	21,121	4,213	269,38	539	30,612	9,491
2	Pend. Agama	18,063	770	111,56	223	11,703	(6,360)
3	Bahasa & Sastra Indonesia	49,470	5,335	46,787	936	51,186	1,716
4	Matematika	51,935	3,798	39,343	787	42,354	(9,581)
5	IPA	36,812	42	28,714	574	28,182	(8,630)
6	IPS	36,812	119	75,885	1518	74,486	37,674
7	Kerajinan Tangan & Kesenian	14,199	1,164	19,794	396	20,562	6,363
8	Pend. Jasmani & Kesehatan	18,063	1,335	20,304	406	21,233	3,170
9	Bahasa Inggris	37,240	4,370	31,217	624	34,963	(2,277)
10	Muatan Lokal	36,812	2,609	17,643	353	19,899	(16,913)
11	Sejarah Nasional & Umum	8,951	2,044	17,824	356	19,512	10,561
12	IPA Fisika	12,756	1,579	6,391	128	7,842	(4,914)
13	IPA Biologi	10,853	2,522	6,391	128	8,785	(2,068)
14	IPA Kimia	8,487	1,340	6,391	128	7,603	(884)
15	IPS Ekonomi	10,808	3,656	6,474	129	10,001	(807)
16	IPS Sosiologi	4,937	-	8,595	172	8,423	3,486
17	IPS Geografi	3,807	934	4,838	97	5,675	1,868
18	Bahasa Asing lain	183	331	4,793	96	5,028	4,845
Jumlah		381,309	36,161	379,478	7,590	40,8049	26,740

Sumber : Pusat Informatika Balitbang Dikbud

Setiap tahunnya jumlah guru berkurang sekitar 7.590 orang atau sekitar 2% dari seluruh guru yang ada. Dengan pengurangan ini maka LPTK dituntut untuk menghasilkan guru baru paling tidak sebanyak 8.500 orang setiap tahunnya, yaitu jumlah guru yang berkurang ditambah dengan 10% mereka yang selama ini tidak menjadi guru. Keadaan ini menunjukkan bahwa LPTK adalah lembaga yang secara konsisten dibutuhkan untuk menghasilkan guru. Pada tahun ajaran 1991/92 jumlah lulusan yang dihasilkan oleh LPTK berjumlah sebesar 36.161 orang. Jumlah tersebut ternyata berlebih jika dibandingkan dengan kebutuhan guru setiap bidang studi pada tahun 1992/93. Jumlah kelebihan guru, setelah diperhitungkan guru yang berkurang, ialah sebesar 26.740 orang.

Jika struktur LPTK tetap seperti sekarang, maka kelebihan jumlah ini diperkirakan akan terus melebar setiap tahun pada waktu-waktu berikutnya. Namun demikian, kelebihan jumlah persediaan tersebut tampaknya tidak memperlihatkan adanya masalah secara keseluruhan. Pemecahan masalah kelebihan guru ini tidak semata-mata harus mengurangi lulusan sebanyak 26.740 orang, tetapi lebih kompleks dari itu. Kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa guru SLTP/A mengalami kelebihan sekaligus kekurangan guru. Berdasarkan klasifikasi guru sesuai dengan kurikulum 1994, pada tahun 1992/93 SLTP dan SLTA di Indonesia mengalami kelebihan guru sebanyak 79.174 orang dan sekaligus kekurangan guru sebanyak 52.434 orang.

Tabel di atas menunjukkan bahwa kelebihan guru sebanyak 79.174 orang terjadi pada guru-guru jurusan pendidikan ilmu sosial seperti PMP, Bahasa dan Sastra Indonesia, IPS, Kerajinan Tangan & Kesenian, Pend. Jasmani & Kesehatan, Sejarah Nasional, Sosiologi, Geografi, dan Bahasa Asing. Kekurangan guru sebanyak 52.434 terjadi pada jurusan-jurusan langka seperti Matematika, IPA, Bahasa Inggris, muatan lokal, dan sebagainya. Kekurangan guru muatan lokal disebabkan oleh kebutuhan guru yang menguasai keahlian baru yang muncul sebagai akibat dari kebijakan pemerintah dalam memperhitungkan keadaan dan kebutuhan masyarakat setempat di program pendidikan. Kekurangan guru agama diakibatkan oleh kenyataan bahwa LPTK memang dipersiapkan tidak untuk menghasilkan guru agama, karena guru agama dihasilkan oleh LPTK di luar Departemen Pendidikan dan kebudayaan.

Menyinggung masalah mutu pendidikan tinggi keguruan, LPTK tampaknya dihadapkan pada tantangan untuk menjadi lembaga pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan tenaga guru yang terus berkembang baik jumlah maupun mutunya. Salah satu alternatif pemikiran yang mungkin bisa ditelusuri lebih jauh ialah penataan struktur program LPTK yang luwes terhadap kebutuhan

Kekurangan guru lebih banyak disebabkan oleh persebaran yang belum merata, baik secara geografis maupun jenis keahlian dan bidang studi yang diajarkan

*Struktur program LPTK
perlu dikembangkan
berdasarkan basis
program studi agar selalu
dapat menyesuaikan diri
dengan kebutuhan*

guru yang terus berkembang. Salah satu alternatif untuk meningkatkan keluwesan tersebut ialah menyusun program LPTK dengan basis program studi, yaitu program yang dapat selalu disesuaikan dengan kebutuhan yang terus berubah. Pengalaman menunjukkan bahwa program LPTK yang masih berbasis jurusan sangat sulit dilakukan perubahan. Melalui alternatif ini, suatu program studi keguruan tertentu bisa berkembang pada saat-saat dibutuhkan, dan mungkin bisa diperkecil atau bahkan ditutup sama sekali jika memang bidang keguruan tersebut tidak dibutuhkan lagi oleh sekolah-sekolah. Melalui pembentukan program-program studi ini dimungkinkan agar suatu fakultas tidak terkotak-kotak menurut jurusan akan tetapi dipadukan dalam rangka melaksanakan beberapa program studi keguruan tertentu yang dibutuhkan pada suatu saat tertentu.

Tantangan lain bagi LPTK ialah melaksanakan studi perencanaan tentang kebutuhan guru dan tenaga kependidikan lain sesuai dengan kebutuhan lapangan. Kegiatan studi perencanaan ini sebaiknya merupakan suatu kegiatan rutin dari LPTK, khususnya pada daerah propinsi di mana LPTK tersebut berada. Kebutuhan guru tentu saja tidak semata-mata jumlah dan komposisinya menurut jurusan, tetapi juga menyangkut mutu guru yang dibutuhkan, baik berdasarkan konsep maupun apa yang terjadi di lapangan secara empiris. Dengan demikian kerja sama antara LPTK sebagai penghasil dengan Kanwil sebagai pemakai guru dan tenaga kependidikan lainnya perlu dilakukan secara terprogram. Jika kerja sama ini sudah dapat dilakukan, maka LPTK akan merupakan lembaga pendidikan yang tidak terpisahkan dari dunianya sendiri, yaitu kebutuhan para pemakai output pendidikannya.

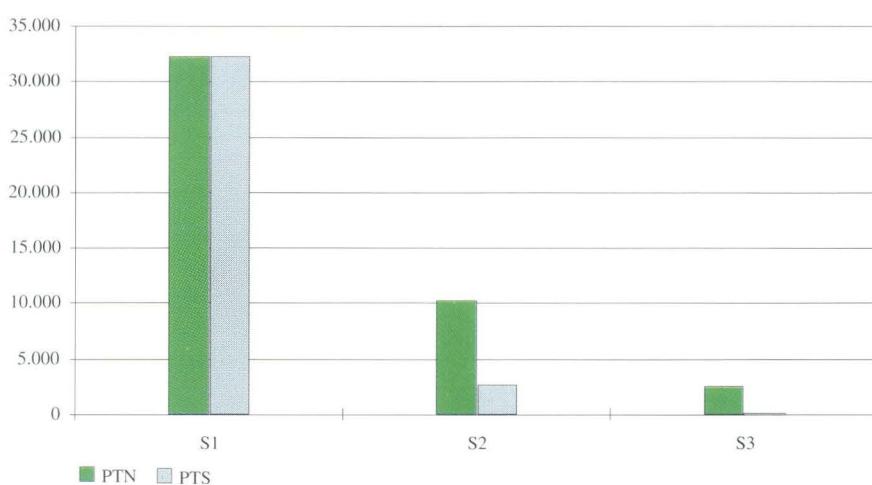
Mutu Perguruan Tinggi

Upaya-upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi antara lain dilakukan melalui kegiatan penelitian untuk menunjang pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam memenuhi kebutuhan pembangunan termasuk di dalamnya penyebarluasan dan publikasi hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembudayaan iptek. Upaya ini juga akan semakin meningkatkan peranan terpadu antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam meningkatkan proses belajar-mengajar.

Dalam pembahasan ini mutu pendidikan tinggi akan dilihat dari beberapa faktor yang cukup penting, yaitu mutu dosen, waktu yang dicurahkan oleh dosen, sarana-prasarana, dan fasilitas belajar pendukung. Faktor lain yang penting ialah komitmen para dosen terhadap profesi dan keahliannya, kemampuan penelitian, dan kegiatan untuk selalu menambah dan meremajakan kemampuan dan keahliannya.

Latar belakang pendidikan dosen di Indonesia adalah tergolong paling rendah dibandingkan dengan negara negara lain. Pada tahun 1992/93, dari 45.301 dosen tetap di Perguruan Tinggi Negeri, hanya terdapat 7% berpendidikan S3; dan 23% berpendidikan S2. Sebagian terbesar (70%) hanya berpendidikan S1. Keadaan tenaga pengajar di PTS tampaknya tidak lebih baik. Dari sebanyak 35.140 tenaga dosen tetap di perguruan tinggi swasta, hanya terdapat 8% yang berpendidikan S2 dan S3.

**Kualifikasi Dosen PTN dan PTS Menurut Pendidikan Tertinggi
Tahun 1992/93**



Sumber : Rakernas Dikti, 1992/93

Masalah lain yang cukup besar ialah kenyataan kurangnya waktu yang dicurahkan oleh para dosen tersebut pada proses belajar mengajar di Universitas. Pada tahun 1992/93 jumlah dosen paruh waktu (part time) tercatat 40%, jumlah ini dinilai terlalu tinggi dan perlu terus dikurangi sehingga setiap dosen dapat lebih banyak mencurahkan perhatian untuk mengajar di perguruan tinggi di mana ia ditugaskan. Hal ini penting dikemukakan karena banyak dosen tetap yang sebenarnya menjalankan tugasnya sebagai dosen paruh waktu di perguruan tinggi lain, khususnya PTS. Alasan utama adalah kurangnya penghasilan para dosen yang diperoleh dari PTN yang bersangkutan, dan banyak dibutuhkannya tenaga pengajar tersebut di PTS.

Faktor lain yang mempengaruhi mutu pendidikan tinggi adalah kurangnya ruang khusus untuk para dosen. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Ditjen Pendidikan Tinggi sepuluh tahun yang lalu (1984), di seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia, hanya tersedia ruang ruang dosen seluas 68.065 m², sedangkan jumlah dosen perguruan tinggi negeri tersebut

*Tugas utama dosen ialah
membelajarkan mahasiswa
dengan memanfaatkan
berbagai sumber belajar*

sebanyak 24.000 sehingga bila ditarik rata rata setiap dosen hanya mendapat ruang seluas 2,8 m² (padahal ruang dosen yang memadai minimal harus berukuran 2m x 2,5m = 5 m²). Perhitungan ini sebenarnya sangat kasar, karena pada kenyataannya banyak universitas negeri yang sama sekali tidak memiliki ruangan untuk staf pengajarnya. Di dalam kondisi kampus yang semacam ini sulit bagi dosen untuk memberikan konsultasi pada mahasiswa, mempersiapkan kuliah, membaca, memeriksa ujian dan paper atau melakukan penelitian.

Di dalam universitas modern, salah satu tugas utama dosen di ruang kuliah adalah menunjukkan buku-buku yang perlu dibaca mahasiswa sambil memberikan penjelasan singkat pada buku-buku tersebut. Selanjutnya proses belajar yang sesungguhnya terjadi di perpustakaan, ketika para mahasiswa membaca buku-buku yang ditunjukkan oleh dosenya. Di perguruan tinggi Indonesia saat ini kuliah adalah merupakan hal yang paling utama dalam proses belajar bagi mahasiswa; isi kuliah dosen sering menjadi bahan satu-satunya bagi para mahasiswa karena bahan itulah yang akan keluar dalam ujian. Keadaan ini menyebabkan sebagian besar mahasiswa merasa kurang perlu mencari tambahan pengetahuan dari buku-buku atau sumber-sumber lain. Lebih jauh lagi hal ini dapat menjadi salah satu tantangan penting untuk di kemudian hari meningkatkan kemandirian, kreativitas dan berpikir secara analitis bagi para mahasiswa.

Hambatan lain dari para dosen untuk membaca buku-buku di bidangnya adalah hambatan bahasa asing. Hambatan ini cukup mendasar karena menyangkut sebagian besar staf pengajar. Buku-buku terjemahan masih sangat kurang, itupun kebanyakan disponsori oleh penerbit swasta yang tidak terlalu memperhatikan mutu terjemahan sehingga seringkali buku-buku terjemahan tersebut justru membingungkan pembacanya. Sejak pada Repelita IV pemerintah telah mengadakan program penterjemahan buku-buku text, walaupun jumlah buku yang diterjemahkan masih sangat terbatas. Program penterjemahan buku ini terus dipacu selama Repelita V baik melalui program pemerintah maupun melalui para penerbit swasta.

Sering terdengar keluhan bahwa Perguruan Tinggi di Indonesia tidaklah menghasilkan ilmu, melainkan mengkonsumsi ilmu dari negara-negara yang telah maju. Hal ini memang sulit untuk dibuktikan secara empiris, namun keluhan tersebut sekurang-kurangnya menunjuk pada kenyataan kurangnya penelitian dasar (basic research) di perguruan tinggi dari segi jumlah, apalagi dari segi mutu. Seberapa banyak rata-rata seorang dosen mendapat kesempatan melakukan penelitian tiap tahun memang belum pernah diteliti, akan tetapi dari pengamatan sehari-hari telah nampak jelas bahwa penelitian yang dilakukan oleh para dosen kebanyakan adalah penelitian pesanan dari berbagai

departemen maupun pihak swasta. Penelitian -penelitian tersebut belum tentu sesuai dengan ilmunya. Dana yang disediakan oleh Ditjen Pendidikan Tinggi bagi dosen untuk mengadakan penelitian masih perlu terus ditingkatkan sehingga dapat menarik minat para pengajar untuk meneliti. Untuk memacu kegiatan penelitian para pengajar, di samping ketersediaan dana, perlu juga ditingkatkan minat mereka untuk memberikan kontribusi terhadap pengayaan ilmu pengetahuan tetapi yang jelas program itu sendiri memang masih harus dikomunikasikan secara baik di kalangan para dosen.

Di muka telah disinggung bahwa pada universitas modern, perpustakaan adalah “jantung” dari kehidupan kampus. Di perpustakaanlah segala jenis ilmu dan informasi dihimpun, sehingga bagi para mahasiswa perpustakaan adalah merupakan sumber ilmunya yang utama. Dosen hanyalah berperan sebagai pakar yang memberi petunjuk bagaimana memilih dan memanfaatkan sumber- sumber yang tertumpuk di perpustakaan tersebut secara sistematis dan efisien. Maka tidak mengherankan bila jumlah buku di dalam perpustakaan selalu menjadi indikator penting untuk menilai mutu suatu universitas.

Data yang dikumpulkan oleh Ditjen Pendidikan tinggi di 48 universitas negeri hampir 10 tahun yang lalu menunjukkan bahwa pada tahun 1984/85, pemanfaatan perpustakaan hanyalah sebesar 20% setiap minggu, rata- rata buku yang dipinjam setiap minggu hanya 9%; kursi yang disediakan di perpustakaan hanya dipakai oleh kurang dari 3% dari seluruh mahasiswa. Penelitian tersebut bahkan menunjukkan bahwa ada 19 universitas yang melaporkan tidak memiliki kursi di perpustakaan serta tidak ada buku- buku yang dipinjam.

Peningkatan Relevansi Pendidikan dengan Kebutuhan Pembangunan

Berbagai program pendidikan yang mengacu pada tema relevansi ini terus dilakukan sejak Pelita I sampai sekarang, walaupun sampai saat ini masih banyak permasalahan dan tantangan yang perlu mendapat perhatian. Salah satu masalah pendidikan yang berhubungan dengan relevansi adalah perlunya penyesuaian dan peningkatan materi program pendidikan agar secara lentur bergerak cepat sejalan dengan tuntutan dunia kerja serta tuntutan kehidupan masyarakat yang berubah secara terus menerus.

Kaitan pendidikan dasar dengan tuntutan dunia kerja sebagaimana hasil Studi Perencanaan Pendidikan dan Ketenagakerjaan (Bappenas, Depdikbud, Depnaker, dan BPS, 1992) adalah adanya perkiraan tentang kekurangan angkatan kerja berpendidikan rendah dan kelebihan angkatan kerja berpendidikan tinggi. Hal ini disebabkan oleh terjadinya kesenjangan struktur antara persediaan dan kebutuhan tenaga kerja terdidik. Pada saat

Untuk memacu kegiatan penelitian para dosen, perlu ditingkatkan minat mereka untuk memberikan kontribusi terhadap pengayaan ilmu pengetahuan

sistem pendidikan sudah mulai menghasilkan lulusan yang berpendidikan lebih tinggi, pada saat itu pula struktur kesempatan kerja masih didominasi oleh lapangan usaha tradisional, yang tidak membutuhkan tenaga kerja berpendidikan lebih tinggi.

Dalam kaitan dengan keadaan tersebut, studi ini menyarankan perlunya diberikan keterampilan yang lebih banyak terhadap program-program pendidikan di sekolah, khususnya SD dan SLTP, sehingga memperkecil angka pengangguran tingkat rendah. Oleh karena masih banyak lulusan SLTP yang tidak melanjutkan pendidikan, kebijakan pendidikan dalam awal era tinggal landas seyogyanya mengarahkan siswa SLTP kelompok ini mempunyai bekal kemampuan yang lebih baik untuk dapat terjun ke dunia kerja, salah satu upaya yang telah dilaksanakan adalah pengayaan kurikulum SLTP dengan keterampilan dasar.

Untuk pendidikan menengah, studi PSDM (1991) ini juga mengemukakan perkiraan angka pengangguran lulusan sekolah kejuruan yang lebih kecil dibandingkan dengan lulusan sekolah umum, akan tetapi secara konsisten menunjukkan bahwa “rate of return” untuk pendidikan menengah kejuruan lebih kecil dibandingkan dengan pendidikan menengah umum (McMahon, 1989). Kedua temuan tersebut diperkuat lagi dengan data lain yang menunjukkan bahwa lulusan pendidikan menengah kejuruan lebih banyak yang bekerja mandiri pada sektor-sektor informal. Di lain pihak, lulusan pendidikan menengah umum lebih banyak yang berstatus sebagai karyawan pada sektor-sektor formal.

Rata-rata penghasilan lulusan STM yang bekerja pada jabatan produksi yang memerlukan keterampilan teknik, lebih tinggi dibandingkan dengan lulusan SMEA dan SMA

Hasil penelitian terbaru menunjukkan suatu perkembangan yang menarik. Studi Pusat Informatika (1992) menemukan bahwa lulusan STM yang bekerja pada jabatan produksi, yang memerlukan keterampilan teknik, rata-rata berpenghasilan lebih tinggi dibandingkan dengan penghasilan lulusan SMA dan SMEA. Sedangkan rata-rata penghasilan lulusan SMEA lebih rendah dari penghasilan lulusan SMA walaupun bekerja pada jabatan-jabatan yang sesuai dengan kejuruan di SMEA seperti ketatausahaan dan pemasaran. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan kesesuaian program SMK (khususnya STM) dengan kebutuhan lapangan kerja.

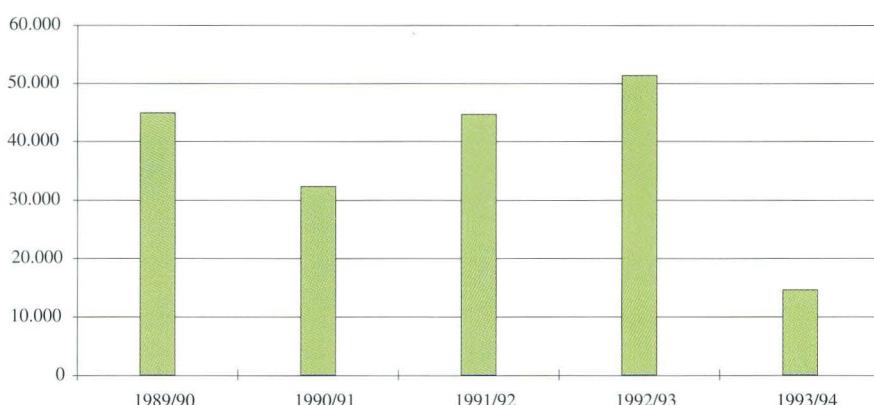
Melihat perkembangan keadaan empiris tersebut di atas, dijelaskan oleh studi tersebut bahwa peningkatan rata-rata penghasilan STM menunjukkan terjadinya peningkatan mutu dan kesesuaian keterampilan lulusan STM dengan kebutuhan lapangan kerja. Keadaan inilah yang menuntut agar isi program pendidikan menengah kejuruan perlu lebih ditingkatkan mutunya, diperluas ruang lingkupnya, dan diselaraskan program-programnya dengan kebutuhan dunia kerja agar para lulusannya memiliki kemampuan baik untuk bekerja secara mandiri maupun untuk dapat bekerja di sektor-sektor formal.

Pada jalur pendidikan luar sekolah, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki keterampilan bekerja pada sektor-sektorekonomi atau industri, relevansi program pendidikan luar sekolah dengan jenis-jenis keterampilan yang dibutuhkan perlu juga ditingkatkan. Dalam upaya meningkatkan kemampuan memperoleh mata pencaharian yang layak bagi masyarakat yang belum bekerja serta memberikan peluang kesempatan kerja bagi warga belajar, beberapa usaha telah dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan pada jalur pendidikan luar sekolah yaitu peningkatan program: kejar usaha, magang ataupun pendidikan keterampilan melalui kursus-kursus.

Jumlah peserta Kejar Usaha pada Pelita V mencapai 188,320 orang. Sedangkan jumlah peserta magang mencapai 28,868. Selain itu, saat ini semakin banyak angkatan kerja muda yang cenderung untuk meningkatkan keterampilan melalui kursus-kursus yang tersebar di Indonesia, saat ini berjumlah 19.669 buah kursus.

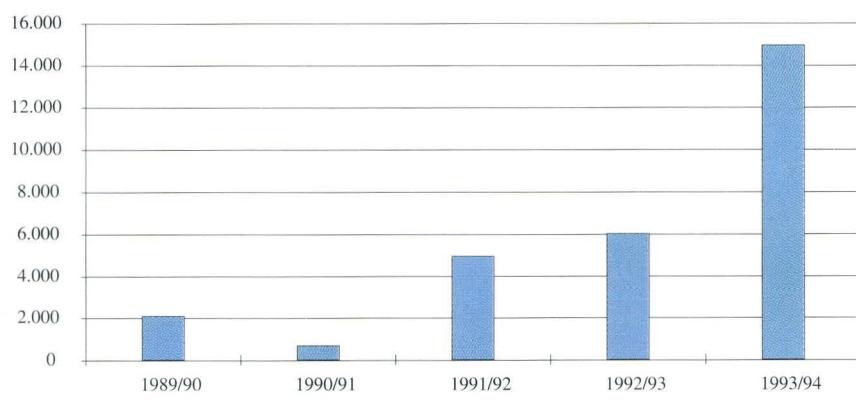
*Kejar usaha, magang, dan kursus-kursus
keterampilan ditujukan
untuk meningkatkan
kemampuan memperoleh
mata pencaharian*

Hasil Pelaksanaan Program Kejar Usaha Selama Pelita V



Sumber : Ditjen Diklusepora, Depdikbud

Hasil Pelaksanaan Program Magang Selama Pelita V



Sumber : Ditjen Diklusepora, Depdikbud

Berkenaan dengan relevansi pendidikan tinggi, temuan studi Kelompok Kerja PSDM Bappenas (1992) memperlihatkan bahwa penganggur lulusan program S1 sangat besar jumlahnya. Sedangkan lulusan program Diploma (D3) dapat diserap seluruhnya oleh dunia kerja. Keadaan ini terjadi karena jumlah penyediaan tenaga kerja lulusan S1 jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah lulusan pendidikan tinggi program Diploma dalam kaitannya dengan jumlah yang dibutuhkan oleh lapangan kerja.

Dilihat dari komposisi jumlah angkatan kerja yang disediakan oleh pendidikan tinggi dapatlah dikatakan bahwa kesepadanan program pendidikan tinggi dengan kebutuhan kesempatan kerjanya, masih perlu ditingkatkan.

Penyediaan tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi dihitung berdasarkan tingkat kelulusan dan jumlah mahasiswa terdaftar pada perguruan tinggi. Jumlah mahasiswa ini tergantung dari aspirasi masyarakat terhadap pendidikan tinggi dan ketersediaan lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Dalam mendirikan atau membuka jurusan-jurusan, suatu lembaga pendidikan tinggi akan memperhatikan paling tidak tiga faktor, yaitu (1) aspirasi masyarakat, (2) kebutuhan tenaga kerja dari dunia usaha, dan (3) kemampuan lembaga untuk menyelenggarakannya.

Aspirasi masyarakat terhadap pendidikan tinggi kerap kali bias terhadap tujuan memperoleh status kredensial dari pada tujuan penguasaan bidang iptek

Aspirasi masyarakat akan pendidikan tinggi adalah salah satu dasar untuk menentukan bidang-bidang studi yang mungkin perlu diselenggarakan, sebab aspirasi masyarakat tersebut akan menjadi permintaan (demand) masyarakat akan tempat di pendidikan tinggi. Dengan demikian, lembaga pendidikan tinggi akan membuka bidang-bidang studi disesuaikan dengan masyarakat peminatnya. Namun demikian, aspirasi masyarakat terhadap perguruan tinggi kerap kali bias terhadap tujuan-tujuan memperoleh status kredensial (misalnya gelar, ijazah, dan sejenisnya) daripada tujuan penguasaan bidang ilmu. Sifat akomodatif perguruan tinggi terhadap aspirasi masyarakat pada akhirnya dihadapkan pada kenyataan bahwa menjelang PJP II tenaga-tanaga kerja lulusan eksakta lebih banyak dibutuhkan oleh dunia usaha yang justru berbanding terbalik dengan jumlah lulusan perguruan tinggi yang lebih banyak mengeluarkan lulusan-lulusan noneksakta.

Konsep keterkaitan (link) dan kesepadan (match) antara persediaan dan kebutuhan tenaga kerja perlu dijadikan dasar untuk mengembangkan program-program di perguruan tinggi. Perguruan tinggi didorong untuk membina dan mengembangkan program studi yang lebih sesuai dan dibutuhkan di daerah setempat dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional. Kegiatan penelitian mengenai kebutuhan berbagai sektor pembangunan akan berbagai jenis keahlian dan keterampilan juga merupakan upaya yang sangat diperlukan dalam meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan tenaga kerja.

Kesepadanan Antara Persediaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja
Tamatian S1 Menurut Keahlian/Fakultas
(Perkiraan Selama Repelita V)

Fakultas	Persediaan	Kebutuhan	P - K	Kelebihan
	(P)	(K)		(%)
1. Ilmu Pendidikan dan Keguruan	260,537	172,143	88,394	0.34
2. Kesenian dan Seni Rupa	1,688	502	1,186	0.70
3. Humanisme	24,038	7,175	16,863	0.70
4. Ilmu Sosial/Perilaku	251,333	88,672	162,661	0.65
5. Administrasi Perusahaan/Keuangan	33,671	46,287	(12,616)	(0.37)
6. Hukum dan Kehakiman	130,728	14,435	116,293	0.89
7. Ilmu-ilmu Murni	3,207	146,012	(142,805)	(44.53)
8. Teknik	72,214	84,846	(12,632)	(0.17)
9. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	53,146	19,135	34,011	0.64
10. Komunikasi Massa dan Dokumentasi	3,607	1,403	2,204	0.61
Jumlah	834,169	580,610	253,559	0.30

Sumber : Studi Tenaga Kerja Lulusan Pendidikan Tinggi Bappenas, Depdikbud, Depnaker, BPS, 1990/1991

Kesepadanan Antara Persediaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja
Tamatian S0 Menurut Keahlian/Fakultas
(Perkiraan Selama Repelita V)

Fakultas	Persediaan	Kebutuhan	P - K	Kelebihan
	(P)	(K)		(%)
1. Ilmu Pendidikan dan Keguruan	195,460	197,956	(2,496)	(0.01)
2. Kesenian dan Seni Rupa	1,590	1,813	(223)	(0.14)
3. Humanisme	142,869	144,076	(1,207)	(0.01)
4. Ilmu Sosial/Perilaku	15,921	18,340	(2,419)	(0.15)
5. Administrasi Perusahaan/Keuangan	3,374	3,507	(133)	(0.04)
6. Hukum dan Kehakiman	7,700	7,709	(9)	(0.00)
7. Ilmu-ilmu Murni	8,031	8,349	(318)	(0.04)
8. Teknik	18,845	24,193	(5,348)	(0.28)
9. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	8,698	9,522	(824)	(0.09)
10. Komunikasi Massa dan Dokumentasi	713	777	(64)	(0.09)
Jumlah	403,201	416,242	(13,041)	(0.03)

Sumber : Studi Tenaga Kerja Lulusan Pendidikan Tinggi Bappenas, Depdikbud, Depnaker, BPS, 1990/1991

**Kesepadanant Antara Persediaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja
Tamatan S0 Menurut Keahlian/Fakultas
(Perkiraan Selama Repelita VI)**

Fakultas	Persediaan	Kebutuhan	P - K	Kelebihan
	(P)	(K)		(%)
1. Ilmu Pendidikan dan Keguruan	195,460	197,956	(2,496)	(0.01)
2. Kesenian dan Seni Rupa	1,590	1,813	(223)	(0.14)
3. Humanisme	142,869	144,076	(1,207)	(0.01)
4. Ilmu Sosial/Perilaku	15,921	18,340	(2,419)	(0.15)
5. Administrasi Perusahaan/ Keuangan	3,374	3,507	(133)	(0.04)
6. Hukum dan Kehakiman	7,700	7,709	(9)	(0.00)
7. Ilmu-ilmu Murni	8,031	8,349	(318)	(0.04)
8. Teknik	18,845	24,193	(5,348)	(0.28)
9. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	8,698	9,522	(824)	(0.09)
10. Komunikasi Massa dan Dokumentasi	713	777	(64)	(0.09)
Jumlah	403,201	416,242	(13,041)	(0.03)

Sumber : Studi Tenaga Kerja Lulusan Pendidikan Tinggi Bappenas, Depdikbud, Depnaker, BPS, 1990/91

**Kesepadanant Antara Persediaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja
Tamatan S1 Menurut Keahlian/Fakultas
(Perkiraan Selama Repelita VII)**

Fakultas	Persediaan	Kebutuhan	P - K	Kelebihan
	(P)	(K)		(%)
1. Ilmu Pendidikan dan Keguruan	724,460	617,413	107,047	0.15
2. Kesenian dan Seni Rupa	1,688	1,445	243	0.14
3. Humanisme	66,832	17,292	49,540	0.74
4. Ilmu Sosial/Perilaku	698,868	190,815	508,053	0.73
5. Administrasi Perusahaan/ Keuangan	93,625	72,326	21,299	0.23
6. Hukum dan Kehakiman	363,506	57,791	305,715	0.84
7. Ilmu-ilmu Murni	8,921	353,958	(345,037)	(38.68)
8. Teknik	170,610	185,646	(15,036)	(0.09)
9. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	147,780	33,222	114,558	0.78
10. Komunikasi Massa dan Dokumentasi	10,031	3,129	6,902	0.69
Jumlah	2,286,321	1,533,037	753,284	0.33

Sumber : Studi Tenaga Kerja Lulusan Pendidikan Tinggi Bappenas, Depdikbud, Depnaker, BPS, 1990/1991

**Kesepadanan Antara Persediaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja
Tamatan S0 Menurut Keahlian/Fakultas
(Perkiraan Selama Repelita VII)**

Fakultas	Persediaan	Kebutuhan	P - K	Kelebihan
	(P)	(K)		(%)
1. Ilmu Pendidikan dan Keguruan	507,408	512,012	(4,604)	(0.01)
2. Kesenian dan Seni Rupa	3,130	4,049	(919)	(0.29)
3. Humanisme	370,882	333,564	37,318	0.10
4. Ilmu Sosial/Perilaku	41,331	35,280	6,051	0.15
5. Administrasi Perusahaan/ Keuangan	8,761	7,973	788	0.09
6. Hukum dan Kehakiman	19,988	18,325	1,663	0.08
7. Ilmu-ilmu Murni	20,844	21,724	(880)	(0.04)
8. Teknik	48,929	65,237	(16,308)	(0.33)
9. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22,575	19,427	3,148	0.14
10. Komunikasi Massa dan Dokumentasi	1,052	1,738	(686)	(0.65)
Jumlah	1,044,900	1,019,329	25,571	0.02

*Sumber : Studi Tenaga Kerja Lulusan Pendidikan Tinggi Bappenas, Depdikbud, Depnaker,
BPS, 1990/1991*

Gejala ketidaksepadanan antara persediaan dan kebutuhan tenaga sarjana ini sangat menarik, sekaligus merupakan tantangan bagi pemerintah dalam meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan berbagai sektor pembangunan akan berbagai jenis tenaga ahli. Sejalan dengan kebijakan “link and match”, dalam rangka meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja perlu ditingkatkan kerjasama antara perguruan tinggi dengan dunia usaha/industri/organisasi yang relevan, secara sistematis dan terprogram.

Dalam rangka merealisasikan kerja sama antara perguruan tinggi dengan dunia usaha/industri/unit organisasi yang relevan tersebut, dalam pidato Mendikbud menegaskan pentingnya kerjasama tersebut dilakukan dalam berbagai tahap mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian termasuk penelitian dan pengembangan antara Departemen P dan K (lembaga pendidikan) dengan dunia industri dan usaha yang relevan. Penegaskan Mendikbud tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, kerja sama dalam tahap pengembangan kurikulum dan isi program pendidikan; dalam tahap ini para penyelenggara dan pengelola pendidikan

Kebijaksanaan Link and Match perlu didukung oleh kerjasama antara perguruan tinggi dengan dunia usaha/industri secara sistematis dan terprogram

tinggi perlu melakukan dialog yang terus menerus dengan para industriawan, pengusaha, dan manajer perusahaan/industri. Dialog ini sebaiknya tidak bersifat ad-hoc tetapi dilembagakan untuk menjamin bahwa kedua pihak tersebut memiliki satu kepentingan dalam rangka menghasilkan tenaga teknik yang bermutu tinggi dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Dengan demikian mereka merasa berkepentingan untuk melakukan interaksi secara fungsional dalam mengembangkan kurikulum dan isi program pendidikan.

Kedua, kerja sama dalam tahap pelaksanaan pengajaran; kerjasama dalam tahap ini pihak perguruan tinggi dan pihak pengusaha/industriawan melaksanakan kerja sama dalam mendidik mahasiswa. Orientasi proses pendidikan lebih menitikberatkan pada kepentingan industri itu sendiri karena hanya pihak industri atau pengusaha itulah yang mengetahui bagaimana seorang mahasiswa belajar dalam praktek-praktek industri. Proses pengajaran yang dilakukan sekolah sifatnya hanyalah melengkapi dan memperkaya dasar-dasar teori atau konsepsi yang mungkin sangat berguna bagi mahasiswa jika mereka dihadapkan pada suatu pekerjaan nyata.

Ketiga, kerja sama dalam tahap penilaian; kerjasama dalam tahap ini didasarkan pada anggapan bahwa pihak yang paling kompeten dalam melakukan penilaian terhadap keberhasilan pendidikan bukanlah sekolah semata-mata. Peran himpunan profesi perlu mulai dikongkritkan dalam menilai kemampuan dan keahlian yang telah diperoleh para mahasiswa setelah melewati masa pendidikan tertentu. Dengan demikian, perguruan tinggi selain harus bekerja sama dengan dunia usaha dan industri juga bekerja sama dengan berbagai himpunan profesi yang relevan untuk

Keempat, kerja sama Penelitian dan Pengembangan; dalam era industrialisasi kerja sama antara perguruan tinggi dengan dunia usaha/industri mutlak diperlukan. Bagi perguruan tinggi kerja sama dengan perusahaan/industri ini sangat menguntungkan karena informasi tentang permasalahan yang akan diteliti dan dikembangkan akan selalu relevan dengan kebutuhan, di samping dukungan dana yang bisa diperoleh dari perusahaan/industri. Bagi dunia usaha/industri, kerja sama dengan perguruan tinggi ini juga sangat menguntungkan terutama bagi perusahaan industri yang ingin memperluas usahanya. Untuk melakukan perluasan usaha ini para pengusaha/industriawan akan mendapat dukungan keahlian dari pihak perguruan tinggi, sehingga penelitian dan pengembangan yang mereka lakukan akan meningkatkan kualitasnya.

Prinsip-prinsip kerja sama tersebut di atas, sedikit sudah mulai beranjak kearah pelaksanaan pendekatan sistem dual dalam pendidikan keahlian dan profesi seperti yang sudah berkembang di negara-negara industri maju

seperti di Jerman dan beberapa negara Eropa lainnya. Pendekatan ini tentunya tidak perlu diadopsi sepenuhnya, tetapi prinsip-prinsip Dual System itu perlu diadaptasikan terlebih dahulu baru kemudian diterapkan pada sistem pendidikan, sehingga dunia pendidikan benar-benar berorientasi pada kebutuhan dunia usaha/industri di Indonesia. Untuk memulai mengarah pada pembinaan sistem pendidikan yang sepenuhnya berorientasi pada pasar di kemudian hari, maka kerjasama yang ditegaskan oleh Mendikbud tersebut di atas perlu dilakukan.

Kerja sama tersebut bisa bervariasi dalam jenis dan tingkatannya, dan hal ini sangat tergantung kepada wawasan dan sikap baik dari pihak perguruan tinggi maupun dari pihak industriawan atau pengusaha. Dengan demikian, keterbukaan dari berbagai pihak dalam memahami permasalahan pengembangan SDM industrial perlu terus ditingkatkan oleh berbagai pihak, termasuk oleh dunia perguruan tinggi itu sendiri. Sementara itu, pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, mulai merintis kerja sama secara antarsektor dan antardepartemen dalam rangka melaksanakan perencanaan, pengembangan, dan pemanfaatan sumberdaya manusia industrial.

Untuk melaksanakan pendidikan kejuruan yang relevan memerlukan biaya yang tidak kecil. Masalah keterbatasan anggaran pendidikan tersebut menjadi faktor terbesar mengapa pendidikan di sekolah-sekolah tidak mampu mengejar perkembangan teknologi. Dari anggaran yang dialokasikan untuk sektor pendidikan, hanya sebagian kecil (sekitar 45%) yang benar-benar dialokasikan untuk Depdikbud, sisanya untuk kegiatan sektor pendidikan yang tersebar di departemen-departemen dan lembaga lain. Walaupun pemikiran kearah penyesuaian pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja akan keahlian dan keterampilan sudah dilakukan secara intensif, namun karena anggaran terbatas maka pemikiran yang sudah ada belum dapat diwujudkan seluruhnya.

Dalam rangka meningkatkan pendidikan keahlian dan profesi yang dapat pengembangan SDM industrial, perlu ditetapkan kebijakan pemerintah jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, upaya perlu diarahkan pada perbaikan dan pembenahan yang tidak terlalu mendasar terhadap pendidikan keahlian/profesi yang ada sekarang melalui koordinasi antar departemen, dunia usaha-industri, Kadin, Himpunan profesi, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Namun, dalam jangka panjang perlu dilakukan upaya yang mendasar, termasuk penataan struktur pendidikan keahlian dan profesi yang sepenuhnya atau sebagian besar dilakukan oleh dunia industri-usaha, bahkan mungkin akan membawa implikasi terhadap pelimpahan kekuasaan untuk penyelenggaraan pendidikan keahlian kepada dunia usaha.

Efisiensi Pengelolaan Pendidikan

Pembinaan sistem pendidikan nasional tidak semata-mata ditentukan oleh peranan salah satu unit kerja, tetapi oleh semua unit kerja lingkungan Depdikbud. Setiap kebijaksanaan Depdikbud akan berhasil jika masing-masing unit kerja baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah bekerja sama dalam mencapai tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang telah ditetapkan dalam GBHN 1993.

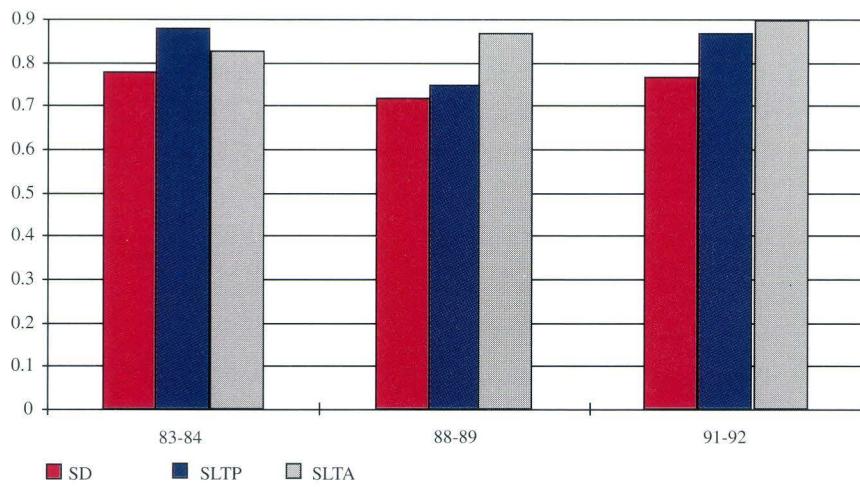
Keberhasilan dalam pelaksanaan kebijaksanaan Departemen tidak semata-mata ditentukan oleh penyediaan lembaga pendidikan sekolah, guru dan tenaga teknis lainnya, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, melainkan oleh berbagai faktor yang satu sama lain berkaitan. Setelah tempat belajar, guru dan tenaga teknis, serta sarana dan prasarana tersedia, tantangan lain masih cukup banyak dihadapi oleh Departemen P dan K agar pelaksanaan pendidikan di sekolah berjalan secara efisien.

Efisiensi internal pendidikan

Pengamatan selama ini menunjukkan bahwa pengelolaan sistem pendidikan nasional masih belum menunjukkan tingkat efisiensi yang memadai. Beberapa indikator efisiensi sistem pendidikan menunjukkan tingkat efisiensi yang bervariasi berdasarkan jenis dan jenjang pendidikannya. Dari indikator rasio masukan dan keluaran (input-output ratio) untuk masing-masing jenjang diperoleh gambaran bahwa pada periode 1983-84, 1988-89 dan 1991-92, SD memiliki tingkat efisiensi yang paling rendah, yaitu : 78%, 72% dan 77%, dibandingkan dengan SLTP (88%, 75%, 87%) dan SLTA (83%, 87%, 90%). Rasio masukan-keluaran adalah salah satu indikator efisiensi pendidikan yang tidak berdiri sendiri, karena merupakan perbandingan antara jumlah siswa yang masuk ke dalam sistem dan jumlah siswa yang berhasil keluar dari dalam sistem yang dalam prosesnya dipengaruhi langsung oleh adanya murid-murid yang tinggal kelas dan putus sekolah pada setiap tingkat.

Berdasarkan statistik, rata-rata angka putus sekolah di tingkat sekolah dasar relatif tinggi, yaitu mencapai 3,5% atau hampir sekitar 1 juta murid dan angka mengulang kelas mencapai 9% atau hampir sekitar 2,5 juta murid (dari populasi sekitar 27 juta siswa SD). Angka putus sekolah di SLTP dan SLTA dinilai masih cukup tinggi, yaitu sekitar 7% atau lebih dari 400 ribu siswa (dari populasi sekitar hampir 6 juta siswa SLTP) dan 6%, atau lebih dari 200.000 siswa (dari populasi sekitar 4 juta siswa SLTA) sedangkan angka mengulang kelas sekitar 1% atau sekitar 60 ribu dan 40 ribu siswa.

Rasio Masukan-Keluaran (dalam %)
Tahun 1983/84, 1988/89, 1991/92

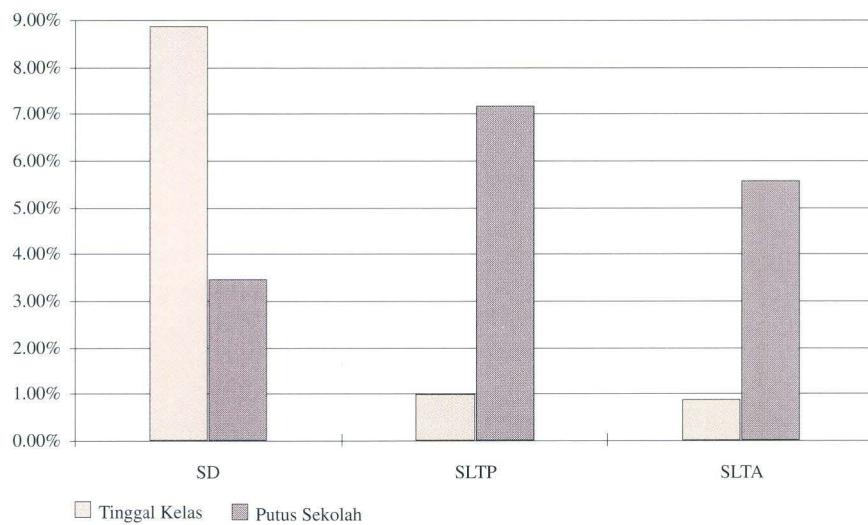


Sumber : Pusat Informatika, Balitbang Dikbud.

*Perbandingan masukan dan keluaran pada masing-masing jenjang sejak para siswa masuk pada tingkat pertama sampai menjadi lulusan

Perbandingan rata-rata angka putus sekolah untuk masing-masing jenjang pada tahun 1983-84 sampai 1991-92 menunjukkan bahwa mereka yang putus sekolah pada umumnya adalah mereka yang telah menempuh pendidikan pada awal kelas lima untuk SD, di akhir kelas dua untuk SLTP dan bahkan pada tahun 1988-89 di awal semester kelas tiga untuk SLTA. Hal ini tentunya perlu diteliti lebih lanjut, untuk mencari penyebabnya, mengapa putus sekolah pada umumnya terjadi pada mereka yang telah memasuki tahap-tahap akhir pendidikan

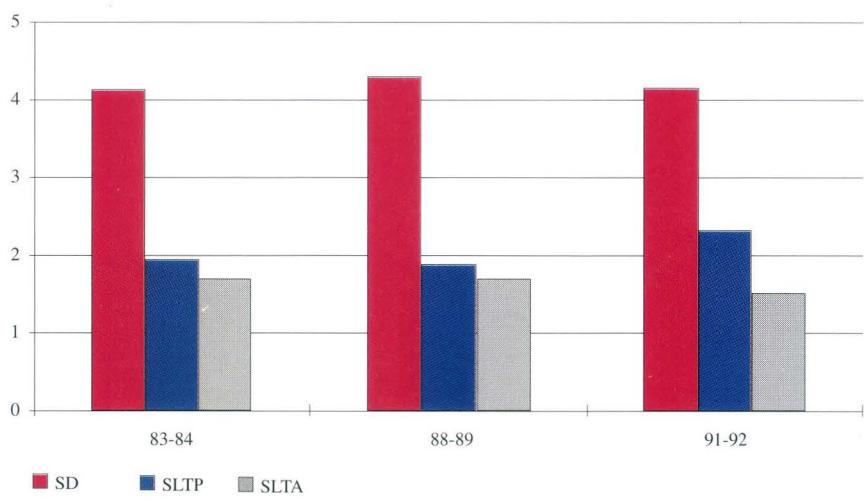
Rata-rata Angka Putus Sekolah dan Tinggal Kelas*



Sumber : Pusat Informatika, Balitbang Dikbud.

*Perbandingan jumlah siswa yang putus sekolah dan tinggal kelas terhadap jumlah siswa pada masing-masing jenjang sejak tingkat pertama sampai tingkat akhir

Rata-rata waktu putus sekolah*
Tahun 1983/84, 1988/89, 1991/92



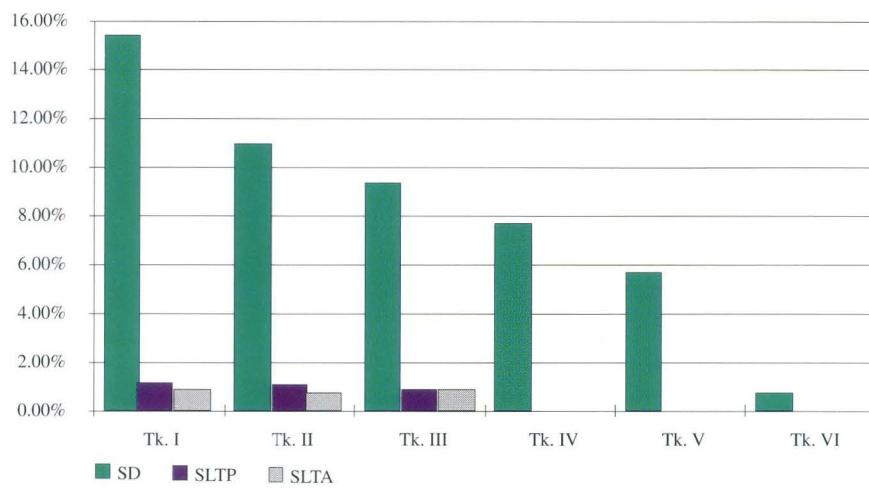
Sumber : Pusat Informatika, Balitbang Dikbud.

* Rata-rata waktu putus sekolah berdasarkan jumlah putus sekolah per tingkat untuk setiap jenjang Perbandingan angka mengulang kelas untuk tiap tingkat pada masing-masing jenjang pendidikan nampaknya juga perlu penanganan yang sangat serius terutama untuk sekolah dasar pada hampir semua tingkat, (kecuali untuk tingkat 6), yang mencapai 15,5% pada tingkat I, 11% pada tingkat 2, 9,4% pada tingkat 3, 7,7% pada tingkat 4, 5,7% pada tingkat 5, dan 0,8% pada tingkat 6. Sebagai perbandingan, angka mengulang kelas untuk SLTP adalah sekitar 1% pada semua tingkat, sedangkan untuk SLTA hampir mencapai 1 %. Meskipun ini merupakan salah satu aspek efisiensi dalam pengelolaan sistem pendidikan, namun hal ini juga harus merupakan perhatian para pelaku langsung penyelenggara pendidikan terutama di tingkat sekolah dasar untuk memperbaiki proses belajar-mengajar yang mampu meningkatkan efisiensi pendidikan tanpa mengabaikan sasaran-sasaran pendidikan yang harus dicapai.

Rata-rata lama belajar yang dibutuhkan lulusan SD, SLTP, dan SLTA secara berturut-turut ialah 7,76 tahun, 3,46 tahun, dan 3,35 tahun

Tingginya angka mengulang kelas akan mengakibatkan rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh setiap siswa untuk lulus menjadi semakin lama. Waktu yang dibutuhkan untuk lulus bagi murid-murid SD relatif lebih tinggi dibandingkan dengan waktu idealnya. Pada tahun 1983-84 mencapai 7,71 tahun, bahkan meningkat pada tahun 1988-89 menjadi 8,36 tahun untuk kemudian menurun lagi menjadi 7,76 tahun pada tahun 1991-92. Dengan demikian pemborosan waktu belajar untuk SD pada masing-masing periode mencapai 1,71 tahun 2,36 tahun dan 1,76 tahun. Dengan masih menggunakan periode yang sama, waktu yang dibutuhkan untuk tingkat SLTP adalah 3,41 tahun 3,97 tahun dan 3,46 tahun, sedangkan untuk SLTA adalah 3,61 tahun 3,47 tahun dan 3,35 tahun, yang berarti terdapat pemborosan waktu belajar kurang dari satu tahun untuk kedua jenjang tersebut

Angka Mengulang kelas* pada masing-masing tingkat

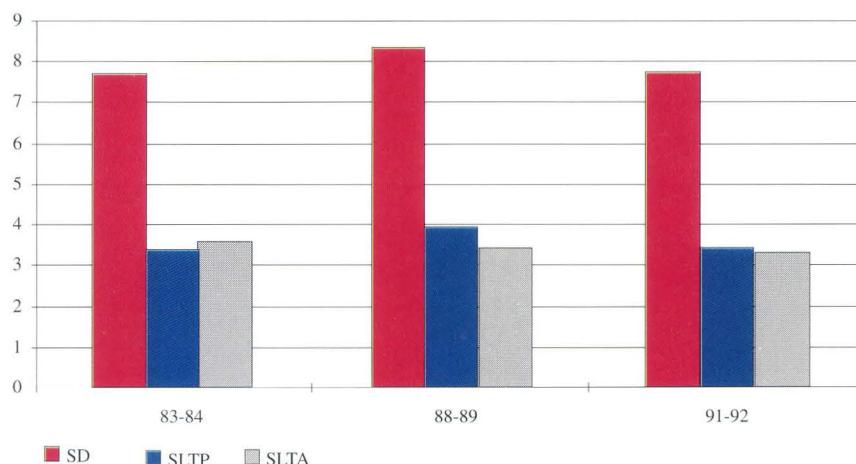


Sumber : Pusat Informatika, Balitbang Dikbud.

*Perbandingan jumlah siswa yang mengulang kelas dengan jumlah siswa pada masing-masing tingkat untuk setiap jenjang

Semakin lamanya rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk lulus pada setiap jenjang adalah merupakan indikator semakin rendahnya efisiensi pendidikan yang berarti semakin beratnya beban pembiayaan pendidikan yang harus dipikul pemerintah sebagai akibat semakin panjangnya rentang penyelesaian studi. Indikator efisiensi internal yang memperhitungkan kerugian waktu sebagai akibat adanya murid yang putus sekolah dan tinggal kelas disebut "tahun-siswa yang terbuang". Indikator ini diperoleh dengan mengkonversikan jumlah siswa pada tingkat I dengan indeks 1000, untuk kemudian diikuti perkembangannya sampai tingkat akhir pada masing-masing jenjang pendidikan untuk memperoleh angka tinggal kelas dan putus sekolah.

Perkembangan Rata-rata Waktu yang dibutuhkan sampai lulus* Tahun 1983/84, 1988/89, 1991/92

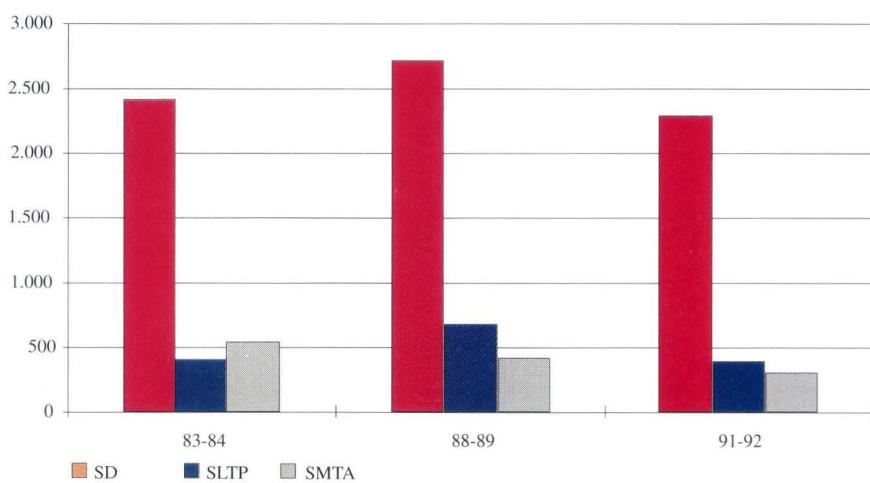


Sumber : Pusat Informatika, Balitbang Dikbud.

*Perbandingan jumlah waktu yang digunakan oleh seluruh siswa (dari tingkat pertama sampai tingkat akhir) dengan jumlah waktu yang digunakan oleh para lulusan untuk rombongan belajar yang sama.

Penjumlahan kedua angka ini berdasarkan waktu yang ditempuh oleh setiap siswa untuk tinggal kelas dan putus sekolah di sebut satuan "tahun-siswa yang terbuang". Tahun-siswa yang terbuang untuk tingkat sekolah dasar pada periode tahun 1983-84, 1988-89, 1991-92 mencapai 2428, 2730 dan 2301, sedangkan untuk SLTP pada periode yang sama adalah 411,682 dan 394, dan SLTA secara konsisten menurun dari 545, 429 kemudian 317.

**Perkembangan Tahun Siswa yang Terbuang
Tahun 1983/84, 1988/89, 1991/92**



Sumber : Pusat Informatika, Balitbang Dikbud.

*Jumlah siswa-tahun yang terbuang yang diakibatkan oleh adanya murid yang mengulang dan putus sekolah pada masing-masing jenjang sejak tingkat pertama sampai tingkat akhir

Keadaan ini menunjukkan perlunya suatu sistem pengendalian untuk meningkatkan efisiensi internal pendidikan yang secara komprehensif didukung oleh sistem informasi dan pendataan yang baik. Rendahnya efisiensi internal ini sangat ditentukan oleh faktor-faktor pendidikan lainnya yang tidak hanya berada dalam lingkup efisiensi semata-mata namun juga melibatkan mutu komponen-komponen sistem pendidikan yang meliputi antara lain : guru, buku, sarana-prasarana, proses belajar-mengajar.

Pada tingkat pendidikan tinggi, angka putus kuliah nampaknya juga merupakan masalah yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari persentase kelulusan yang masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah mahasiswa yang terdaftar di perguruan tinggi di Indonesia. Sampai saat ini angka kelulusan mahasiswa pada PTN ialah sekitar 13,98%, sedangkan angka kelulusan bagi mahasiswa PTS ialah 9,44%.

Upaya peningkatan efisiensi pendidikan, paling tidak, dapat ditentukan oleh dua hal, yaitu pengelolaan pendidikan yang profesional dan partisipasi dalam pengelolaan pendidikan yang meluas.

Pengelolaan pendidikan yang efisien merupakan salah satu strategi pokok kebijakan Departemen. Hal ini sangat ditentukan oleh kemampuan aparat dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengelolaan pendidikan. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa proses penetapan kebijaksanaan cenderung lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar pertimbangan yang rasional. Peran data dan informasi sebagai suatu sistem yang secara rutin mampu mendukung proses pengambilan keputusan nampaknya perlu dilembagakan, sehingga para pengambil keputusan mampu membuat keputusan yang cepat dan akurat. Kemampuan aparat-aparat Departemen dalam mengelola, mengolah, mengorganisir, menganalisa dan menyajikan data sesuai dengan kebutuhan pengambilan keputusan nampaknya mutlak dibutuhkan. Kemampuan sistem pendataan di tingkat departemen memerlukan fungsi koordinasi yang melibatkan semua unit sehingga mampu melayani kebutuhan data kebijakan secara terpadu.

Dalam jangka panjang, sistem pendataan yang akurat, tepat guna, dan tepat waktu perlu dibangun secara mendasar melalui peningkatan infrastruktur teknologi informasi pada tingkatan pusat dan daerah yang meliputi kemampuan staf, arus data yang melekat di dalam proses administrasi, pusat-pusat pelatihan pendataan, serta sarana dan prasarana pendukung. Dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan pendidikan, analisis dan pengkajian data dan informasi perlu dilakukan secara terus-menerus dan mendalam agar setiap unit kerja baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dapat melaksanakan proses pengelolaan yang efisien.

Kemampuan pengelolaan sistem pendidikan yang profesional perlu terus diciptakan dengan jalan meningkatkan kemampuan aparat setiap unit kerja, baik di pusat maupun di daerah, untuk dapat mengolah, menganalisis, dan mendayagunakan data dan informasi agar dapat mengenal dan memahami masalahnya sendiri, untuk kemudian membuat keputusan dalam pemecahan masalah, perencanaan, dan pengelolaan program-program pendidikan di daerahnya secara lebih efisien. Untuk itu perlu terus dikembangkan suatu sistem Informasi yang mampu menyediakan data dan informasi yang bermutu melalui pembangunan basis data di tingkat kabupaten yang akan menjadi satu-satunya sumber data bagi semua aparat di tingkat provinsi dan nasional.

Dengan semakin mapannya basis data di tingkat kabupaten, maka aparat Depdikbud dari tingkat kanwil sampai tingkat nasional akan berfungsi lebih baik lagi dalam menganalisis dan mendayagunakan data untuk pengelolaan pendidikan. Sesuai dengan tujuan peningkatan kemampuan aparat daerah dalam pengelolaan pendidikan, pusat dan daerah, pemetaan pendidikan dengan Sistem Informasi Geografik (Geographical Information System) perlu dilakukan. Melalui pemetaan pendidikan ini proses pengambilan

Kemampuan aparat setiap unit kerja perlu ditingkatkan dalam mengolah, menganalisis, dan mendayagunakan informasi agar dapat mengelola pendidikan secara efisien

keputusan, perencanaan, dan pengelolaan pendidikan selalu dapat disesuaikan dengan keadaan daerah yang paling mutakhir. Melalui peningkatan aparat daerah dalam pengelolaan pendidikan, maka peranan pemerintah pusat lebih banyak sebagai fasilitator yang akan memberikan dampak semakin tumbuhnya fungsi desentralisasi kelembagaan di tingkat provinsi ke bawah. Jika keadaan ini sudah dapat dicapai maka efisiensi pengelolaan pendidikan secara otomatis dapat ditingkatkan.

KEBUDAYAAN

Dalam rangka melaksanakan pembangunan kebudayaan nasional dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah dilakukan usaha-usaha yang berupa pembinaan dan pengembangan nilai-nilai budaya; pembinaan kebahasaan, kesastraan, dan kepustakaan; pembinaan kesenian; pembinaan tradisi, peninggalan sejarah, dan permuseuman; pembinaan terhadap penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Selama PJP I, pembangunan kebudayaan telah berhasil meningkatkan dan mengembangkan keserasian, keselarasan, serta keseimbangan kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia baik lahir maupun batin. Hal itu tercermin dalam kerukunan kehidupan bermasyarakat, beragama, bernegara, dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, makin berkembangnya kebudayaan nasional yang dijewi nilai-nilai luhur Pancasila, di samping melembaganya budaya dan semangat membangun di kalangan masyarakat serta mantapnya semangat kebudayaan yang berwawasan Nusantara. Secara lebih terperinci, hasil-hasil pembangunan kebudayaan nasional tersebut adalah sebagai berikut.

Pembinaan dan Pengembangan Nilai-nilai Budaya

Pengungkapan dan penanaman nilai-nilai budaya telah dilaksanakan dengan berpegang pada Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila di seluruh Indonesia melalui jalur sekolah dan luar sekolah, organisasi kemasyarakatan, termasuk organisasi dan lembaga kebudayaan. Sejalan dengan itu, telah dilaksanakan berbagai kegiatan inventarisasi, perekaman, penelitian, pengkajian, dan analisis, serta pengembangan kebudayaan daerah, termasuk penelitian dan pengkajian isi naskah-naskah kuno demi mantapnya kebudayaan nasional. Di samping itu telah diselenggarakan diskusi, seminar dan Kongres Kebudayaan IV tahun 1991.

Pembinaan Kebahasaan, Kesastraan, dan Kepustakaan

Hasil penelitian, pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah telah mendukung makin mantapnya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional serta makin berkembangnya sastra

Indonesia dan daerah. Sementara itu, penelitian, pembinaan dan pengembangan bahasa daerah dan sastra telah dapat memperkaya khasanah bahasa dan budaya Indonesia. Dalam rangka pembinaan bahasa telah dilakukan pembakuan ejaan, penyusunan tata bahasa baku, Kamus Besar Bahasa Indonesia, berbagai kamus bahasa daerah, dan berbagai kamus istilah dan glosarium. Guna mendorong minat baca dan minat belajar anggauta masyarakat, telah dikembangkan perpustakaan daerah di seluruh provinsi dan diadakan sekitar 1,87 juta eksemplar buku bacaan. Selain itu, jangkauan layanan perpustakaan telah sampai ke pedesaan dengan mengoperasikan mobil unit perpustakaan keliling.

Pembinaan Kesenian

Dalam PJP I, kreativitas dan daya cipta para seniman makin meningkat dengan didukung oleh peningkatan fasilitas Taman Budaya di 27 propinsi, kegiatan kesenian seperti pameran, pergelaran, lomba dan festival, sehingga berbagai kegiatan kesenian baik tradisional maupun kontemporer makin berkembang. Sementara itu, minat dan apresiasi seni masyarakat semakin meningkat sehingga memperkokoh ketahanan budaya masyarakat dalam menyaring pengaruh kebudayaan asing yang masuk. Berbagai kegiatan seni dan pertukaran seni yang diselenggarakan dalam rangka kerja sama kebudayaan dengan berbagai negara, terutama dengan negara-negara ASEAN telah menunjang program diplomasi bermatra kebudayaan, pengembangan pariwisata, dan program pendidikan.

Pembinaan Tradisi, Peninggalan Sejarah, dan Permuseuman

Kegiatan pengungkapan dan pengkajian nilai-nilai tradisi kesejarahan, penulisan biografi pahlawan dan tokoh nasional, serta penyusunan buku sejarah di 27 provinsi selama PJPI telah menunjang pengembangan kesadaran sejarah dan semangat perjuangan bangsa serta mempertebal jati diri bangsa. Berbagai peninggalan sejarah dan purbakala telah dipelihara dan disimpan di setiap museum daerah serta dimanfaatkan dalam rangka menumbuhkan rasa cinta tanah air, kebanggaan nasional, memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa. Berbagai bukti benda peninggalan sejarah dan purbakala telah dipelihara dan di pugar seperti Candi Borobudur, Prambanan, Sewu, Sambisari, Tikus, Bajang Ratu, Jawi, benteng Vredeburg, benteng La Galigo, masjid Demak, gereja Tugu, makam Pangeran Diponegoro, Kyai Mojo, kraton Surakarta, Mangkunegaran, kraton Yogyakarta, Kasepuhan dan Kanoman, situs Muara Jambi, serta beberapa situs lainnya yang bernilai sejarah dan purbakala. Selain itu, telah ditemukan beberapa situs baru dan temuan-temuan baru yang telah membuka dan memperkaya cakrawala dan wawasan keagungan budaya bangsa. Dalam rangka perawatan, penyimpanan dan pengenalan kepada masyarakat tentang kekayaan budaya bangsa, telah

didirikan 30 buah museum umum dan khusus, pengadaan koleksi, serta berbagai kegiatan pameran di dalam dan luar negeri antara lain di Amerika Serikat, Jepang, Belanda, Singapura dan Australia. Dalam upaya memperkokoh landasan perlindungan dan pemeliharaan kebudayaan bangsa telah ditetapkan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Rekaman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

Pembinaan Terhadap Penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Berkenaan dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam PJP I telah terdaftar dan terbina berbagai aliran, jenis, dan jumlah penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, dalam PJP I pembangunan kebudayaan telah berhasil meningkatkan dan mengembangkan keserasian, keselarasan, serta keseimbangan kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia baik lahir maupun batin. Hal itu tercermin dalam kerukunan kehidupan bermasyarakat, beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, makin berkembangnya kebudayaan nasional yang dijiwai nilai-nilai luhur Pancasila, di samping melembaganya budaya dan semangat membangun di kalangan masyarakat, serta mantapnya semangat kebangsaan yang berwawasan Nusantara.



BAB IV

PERSPEKTIF PEMBANGUNAN NASIONAL JANGKA

PANJANG KEDUA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pembangunan pendidikan dan kebudayaan harus dipandang sebagai proses perubahan yang berkelanjutan

embangunan nasional bidang pendidikan dan kebudayaan memainkan peranan yang sangat penting dalam proses transformasi masyarakat dari masyarakat tradisional menuju masyarakat industri yang makin mendekati tata-masyarakat yang dicita-citakan. Dalam proses transformasi perlu diciptakan keseimbangan yang dinamis antara keberlanjutan di satu pihak, dan perubahan di lain pihak. Jika keberlanjutan saja yang kita pertahankan, maka kebudayaan kita akan bersifat statis dan tidak berkembang, karena ia akan cenderung menolak perubahan dan bahkan tertutup terhadap gagasan-gagasan baru yang mungkin lebih baik. Bangsa-bangsa yang telah mencapai kemajuan lebih dari apa yang telah dicapai oleh Indonesia adalah bangsa-bangsa yang mampu menciptakan perimbangan dan keselarasan antara keduanya. Dalam konteks pembangunan bangsa Indonesia, perlu diciptakan keseimbangan dan keselarasan antara perubahan dan keberlanjutan, dan ini seharusnya merupakan inti dari strategi pembangunan nasional.

Telah disepakati bahwa industrialisasi merupakan tahapan pembangunan nasional kita, maka “budaya industri” merupakan strategi yang perlu dirumuskan, dikembangkan, dan dilembagakan di dalam sikap dan perilaku, seperti misalnya: penghargaan akan waktu, ketelitian, produktivitas, dan kewiraswastaan. “Budaya industri” sebagai strategi berkaitan dengan: wawasan, sikap, mentalitas dan nilai-nilai yang harus ada dalam masyarakat Indonesia agar proses industrialisasi dapat berlangsung dengan baik dan masyarakat juga siap untuk hidup dalam alam industri.

Dalam kaitannya dengan perubahan budaya tersebut di atas, beberapa bentuk pergeseran perlu dikaji lebih jauh sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan nasional. Di antara faktor-faktor yang penting untuk diperhatikan, perkembangan kebutuhan akan mutu tenaga kerja tampaknya memiliki kaitan langsung dengan proses transformasi tersebut.

PERKEMBANGAN KEBUTUHAN AKAN MUTU TENAGA KERJA

Jenis Pekerjaan dan Kualifikasi Jabatan

Dewasa ini dunia tengah ditandai dengan perubahan revolusioner dalam industri dan ekonomi dibarengi oleh berbagai bentuk transformasi dalam jenis-jenis pekerjaan dan kualifikasi jabatan. Perubahan terjadi dalam sebagian jenis pekerjaan yang ada sekarang, sementara itu sebagian jenis pekerjaan lainnya mulai menyusut dan akhirnya hilang. Perpaduan antara jenis-jenis pekerjaan dengan berkembangnya tuntutan akan pengetahuan

dan keterampilan terus terjadi dan hal tersebut mengakibatkan terjadinya transformasi yang sangat cepat. Berkembang dan berkurangnya jenis-jenis pekerjaan tersebut pada tingkatan mikro sangat ditentukan oleh kebijaksanaan perusahaan dalam mendayagunakan teknologi baru, pengorganisasian cara kerja, perluasan usaha, serta fluktuasi pasar barang-barang yang dihasilkan.

Perkembangan struktur ketenagakerjaan di Indonesia ditandai oleh terus berkurangnya kesempatan kerja pada sektor pertanian dan perlahan-lahan berganti dengan bertambahnya kesempatan kerja sektor-sektor industri. Tidak lama lagi, industri-industri berteknologi tinggi terus berkembang dan mengakibatkan menurunnya pertumbuhan kesempatan kerja pada sektor pertanian yang umumnya bersifat tradisional. Kecenderungan ini akan semakin kentara sejalan dengan pesatnya pertumbuhan industri jasa dalam berbagai sektor yang mampu menciptakan kesempatan kerja dengan pertumbuhan yang lebih pesat.

Pengaruh dari berkembangnya teknologi tinggi ialah perubahan komposisi angkatan kerja berdasarkan pendidikan. Proporsi pekerja berpendidikan rendah, misalnya tenaga tidak terampil, operator, pengrajin dsb., di negara-negara berkembang masih kelihatan dominan. Namun demikian, berkembangnya pendayagunaan teknologi baru dalam dunia produksi membutuhkan pekerja yang berpendidikan lebih tinggi sehingga jumlah dan kemampuan para teknisi akan semakin meningkat dan perlahan-lahan menggantikan para pekerja tidak terampil sehingga jumlahnya terus menurun.

Pertumbuhan kebutuhan akan tenaga-tenaga teknisi ini sudah tentu akan menunjukkan berkembangnya kebutuhan akan pekerja yang lebih tinggi pendidikannya. Hal ini terjadi terutama pada masyarakat yang mulai beranjak ke era industri yang sangat membutuhkan lebih banyak tenaga-tenaga teknisi yang terdidik. Di dalam masyarakat industri, terdapat kecenderungan bahwa batas antara pekerja teknisi dan tenaga profesional menjadi semakin kabur karena tenaga profesional dibentuk dari para teknisi yang berpengalaman. Dengan demikian, pengembangan sumberdaya manusia di tempat kerja—seperti pelatihan dalam jabatan—akan memainkan peranan yang sangat penting dalam menyiapkan para teknisi yang terampil agar menjadi tenaga profesional sebagai penggerak industri.

Pendayagunaan teknologi tinggi juga mempengaruhi berkembangnya desentralisasi dalam produksi dan distribusi. Hal ini akan menunjukkan tumbuhnya kesempatan kerja yang dibentuk oleh para pengusaha daerah dan lokal. Tumbuhnya industri jasa yang ditunjang oleh tersedianya teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan berkembangnya kesempatan kerja mandiri sebagai penunjang kegiatan industri

*Perkembangan
struktur ketenagakerjaan
berdasarkan pendidikan
dipengaruhi oleh
pendayagunaan
teknologi baru dalam
dunia industri*

setempat. Masalah-masalah yang berkaitan dengan biaya tinggi, kemacetan lalu lintas, bahaya polusi, dan sebagainya merupakan pendorong kearah berkembangnya desentralisasi tersebut.

Secara umum, akibat-akibat dari berkembangnya pemanfaatan teknologi tinggi ini maka pola-pola ketenagakerjaan akan berkembang dengan kecenderungan-kecenderungan sebagai berikut. Kecenderungan ini dikutip dari Laporan APEID (Asia and the Pacific Programme of Educational Innovation for Development), UNESCO yang berjudul “New Directions in Technical and Vocational Education”

- (1) Berkembang pesatnya kebutuhan akan tenaga insinyur, teknolog, spesialis dalam teknologi informasi, mekanik, dan tenaga-tenaga lainnya seperti bengkel dan juru pasang.
- (2) Tumbuhnya kebutuhan akan tenaga manajerial tingkat tinggi, teknisi dagang, dan pekerja jasa pendukung.
- (3) Menurunnya kebutuhan akan pekerja kasar, pengrajin, tenaga pelaksana yang tidak terampil, serta buruh.
- (4) Berkurangnya kebutuhan akan tenaga tata usaha, tata laksana, dan tenaga administratif lainnya.
- (5) Bertambahnya kebutuhan akan tenaga kerja industri jasa, khususnya akuntan, administrasi keuangan, distributor, transportasi, dan periklanan.
- (6) Tumbuh dan berkembangnya peranan para teknisi sejalan dengan menurunnya peranan pengrajin dan buruh kasar; sementara itu para pekerja teknisi mengantikan peranan para pengrajin dalam klasifikasi angkatan kerja industrial.

Secara umum, pergeseran ketenagakerjaan tersebut ditandai dengan berkurangnya jenis-jenis pekerjaan “kerah biru” pada sektor-sektor pertanian, dan bertambahnya jenis pekerjaan pada sektor industri pengolahan dalam komposisi angkatan kerja. Pada saat yang sama peranan jenis-jenis pekerjaan atau jabatan “kerah putih” akan terus berkembang dalam sektor-sektor industri dan jasa berteknologi tinggi atau bisa juga disebut teknologi padat pengetahuan (knowledge intensive technology).

Jenis Pengetahuan dan Keterampilan Kerja

Perubahan struktur pekerjaan dan jabatan tersebut di atas akan mengakibatkan terjadinya pergeseran kebutuhan akan jenis-jenis pengetahuan dan keterampilan pekerja. Di dalam era industri, jenis-jenis pekerjaan tradisional atau subsistensi yang mengandalkan keterampilan motoris akan terus berganti dengan jenis-jenis pekerjaan yang berlandaskan pada otomatisasi dan pengolahan informasi. Jenis-jenis pekerjaan dalam era teknologi yang diperkirakan akan berkembang ialah sebagai berikut.

Pertama, berkembangnya apa yang disebut mind worker yang lebih mengandalkan usaha manusia dalam mendayagunakan kemampuan intelektual dan daya inovasi. Dalam era industri, Jenis-jenis pekerjaan industri konvensional yang ditandai dengan repetisi, fragmentasi, dan dehumanisasi akan semakin tidak relevan dengan era teknologi tinggi. Sebaliknya, industri berteknologi tinggi menciptakan jenis-jenis pekerjaan besar yang dijabarkan menjadi satuan-satuan jenis pekerjaan kecil sebagai bagian dari pekerjaan besar tadi. Jenis-jenis pekerjaan tersebut lebih membutuhkan ketarampilan, keahlian dan kreativitas yang didukung oleh kemampuan profesional para pekerja. *Mind worker* disebut bersandarkan pada kemampuan berfikir, kemampuan mengabstraksikan, serta artikulasi dan estetika.

Kedua, berkembangnya kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan belajar mandiri (self-training skill) agar dapat ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan sesuai dengan tingkatannya. Mereka juga dituntut untuk dapat memadukan satuan-satuan pekerjaan yang bersifat fragmental ke dalam suatu kesatuan sistemnya. Dengan demikian, para pekerja industri tidak dituntut untuk menjadi para pelaksana yang hanya memiliki sifat penurut tetapi terdiri dari mereka yang mampu menunjukkan jiwa kreatifitas, bekerja secara mandiri, belajar terus, dan tidak menjadikan dirinya menjadi komponen dari mesin-mesin industri.

Ketiga, berkembangnya kompleksitas keahlian dan keterampilan yang diperlukan. Dalam era industri dengan teknologi tinggi, perubahan dalam jenis-jenis keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan oleh seorang pekerja akan semakin kompleks, yang tidak hanya menuntut keterampilan teknis semata-mata, namun juga menuntut kematangan mental, kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan setiap perubahan yang terjadi di lingkungan kerja.

Beberapa kemampuan yang dibutuhkan antara lain :

- (1) Pemahaman terhadap teknologi tinggi, pengetahuan matematik dan statistik, serta pengetahuan berpikir sistemik.
- (2) Kemampuan rasional dan intelektual, pengetahuan tentang mutu produksi, serta kemampuan pemecahan masalah.
- (3) Kemampuan berkomunikasi, bergaul dan kemampuan bekerja dalam kelompok.
- (4) Penguasaan dalam memanipulasi dan mengolah informasi serta mendayagunakannya untuk bekerja dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (5) Kemampuan yang tinggi di bidang elektronika, robot, kemampuan

Jenis-jenis pekerjaan dalam era teknologi akan mengakibatkan :
kebutuhan pada pekerja yang lebih mengandalkan kemampuan intelektual, kebutuhan pada pekerja yang lebih kreatif, kebutuhan pada pekerja yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan kebutuhan pada pekerja yang mampu mengolah dan mendayagunakan informasi

mendayagunakan peralatan teknologi dengan orientasi pada kepentingan para pemakai produk.

- (6) Kemampuan melakukan diagnosa permasalahan dan mampu menterjemahkannya menjadi kebutuhan latihan kerja yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi mutakhir.

Keempat, berkembangnya kebutuhan tenaga kerja yang mampu mengolah dan mendayagunakan informasi. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, angkatan kerja dalam era teknologi tinggi dituntut untuk memiliki kemampuan mengolah informasi teknis secara lebih mendalam, wawasan yang luas tentang jenis-jenis keterampilan, kemampuan menerapkan keahliannya secara meluas, serta kemampuan dalam melakukan diagnosa permasalahan teknis agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan.

Menghadapi pergeseran-pergeseran penting dalam dunia ketenagakerjaan tersebut di atas, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dituntut untuk menerapkan berbagai kebijaksanaan pembangunan pendidikan baik dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan industrialisasi masyarakat, maupun dalam peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencapai keunggulan daya saing. PJP II dikenal sebagai tahap memasuki proses kebangkitan nasional kedua, dalam tahap ini Indonesia ditantang untuk dapat membangun sistem pendidikan nasional yang lebih mampu menghasilkan manusia dan masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri serta tanggap menghadapi perkembangan zaman, perkembangan Iptek, dan tuntutan pembangunan nasional lainnya.

Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut beberapa prioritas kebijaksanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan telah tercermin dalam pidato-pidato Mendikbud, naskah Repelita VI, dan beberapa kebijaksanaan Unit-unit Utama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Arah pembangunan pendidikan dalam PJP II diprioritaskan pada :

- (1) penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun;
- (2) meningkatkan mutu semua jenis dan jenjang pendidikan;
- (3) perluasan dan peningkatan mutu pendidikan serta pelatihan kejuruan dan teknik untuk menghasilkan tenaga kerja terampil, luwes, dan memiliki dasar-dasar penguasaan teknologi; dan
- (4) meningkatkan kemampuan penguasaan iptek melalui peningkatan mutu pendidikan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan dan penelitian.

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

PJP II di bidang Pendidikan dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, seperti tersebut di dalam Bab II buku ini yang dikutip dari UU No.2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam rangka menciptakan manusia yang berkualitas yang memiliki ciri khas nasional Indonesia. Pembangunan pendidikan nasional, dengan kata lain, adalah wahana untuk mencapai tujuan pendidikan nasional itu. Agar pembangunan pendidikan menjadi wahana yang efektif dan efisien maka telah ditetapkan pula strategi pokok, rencana dan prioritasnya dengan memperhatikan isu dan tantangan yang dihadapi di masa kini dan kecenderungannya di masa depan.

Strategi Pokok Pembangunan Pendidikan Nasional

Menghadapi berbagai isu dan tantangan tersebut di atas dan dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sesuai dengan amanat GBHN 1993, maka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan empat strategi pokok pembangunan pendidikan nasional, yaitu peningkatan:

- (1) pemerataan kesempatan pendidikan,
- (2) relevansi pendidikan dengan pembangunan,
- (3) kualitas pendidikan, dan
- (4) efisiensi pengelolaan pendidikan.

Strategi pokok ***pertama*** ialah peningkatan pemerataan kesempatan pendidikan bertujuan untuk menciptakan keadaan di mana setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Berdasarkan UU No. 2/1989, kesempatan memperoleh pendidikan tersebut tidak dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial ekonomi, agama, dan lokasi geografis. Kebijakan pemerataan dan perluasan kesempatan ini menekankan bahwa setiap orang tanpa memandang asal usulnya mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada semua jenis, jenjang, maupun jalur pendidikan, sehingga diharapkan bahwa keadilan di dalam pelayanan pendidikan akan meningkat.

Strategi pokok ***kedua*** ialah peningkatan relevansi pendidikan dengan pembangunan, dimaksudkan agar proses dan hasil pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan industrialisasi akan tenaga terampil dan ahli. Dalam rangka meningkatkan relevansi antara pendidikan dengan kebutuhan pembangunan tersebut, Pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan Link and Match. Melalui kebijaksanaan ini perlu diperkuat keterkaitan antara pendidikan dan industri/dunia usaha dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan sertifikasi pendidikan dan pelatihan kejuruan yang relevan

dengan kebutuhan ekonomi. Kebijaksanaan ini bertujuan untuk menciptakan keadaan bahwa keluaran pendidikan sepadan dengan kebutuhan berbagai sektor pembangunan akan tenaga ahli dan terampil sesuai dengan jumlah, mutu, dan sebarannya. Secara khusus, arah yang dituju oleh kebijakan Link and Match ini adalah menciptakan keadaan yang menunjang agar program pendidikan selaras dengan kebutuhan industri dan dunia usaha akan tenaga terampil dan ahli yang terus berubah dan berkembang setiap saat.

Strategi pokok ***ketiga*** ialah peningkatan kualitas pendidikan menunjuk pada upaya peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan. Suatu sistem pendidikan disebut bermutu dari segi proses jika proses belajar-mengajar berlangsung secara efektif, dan peserta didik mengalami proses pembelajaran yang bermakna dan ditunjang oleh sumber daya (manusia, dana, sarana, prasarana) yang memadai. Proses pendidikan yang berkualitas akan membawa hasil pendidikan yang bermutu dan relevan dengan pembangunan. Oleh sebab itu, intervensi sistematis perlu diberikan terhadap input, proses, dan sistem ujiannya, sehingga akan dapat memberikan jaminan terciptanya kualitas hasil yang tinggi.

Strategi pokok ***keempat*** ialah peningkatan efisiensi pengelolaan Pendidikan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sistem pendidikan. Efisiensi itu sendiri dapat dicapai jika sistem pendidikan dapat mencapai sasarannya secara efektif. Untuk mencapai efektivitas pengelolaan sistem pendidikan, perlu diciptakan dan dikembangkan berbagai faktor penunjangnya seperti profesionalisme dalam manajemen nasional sistem pendidikan yang di dalamnya terkandung disiplin, kesetiaan, keahlian, etos kerja, dan efektivitas biaya. Implikasinya, untuk meningkatkan efisiensi perlu dikembangkan kebijakan yang memungkinkan terwujudnya efektivitas dengan pengelaran sumber sumber daya yang relatif lebih kecil akan tetapi dimanfaatkan secara optimal, sehingga dapat menghasilkan keluaran yang optimal pula.

Fungsi Dasar Sistem Pendidikan Nasional

Untuk melaksanakan keempat strategi pokok pembangunan pendidikan dimaksud, seyogyanya dilihat bagian-bagian sistem pendidikan nasional dalam kaitannya dengan fungsi dasarnya masing masing. Hal ini dimaksudkan agar kita dapat memandang sistem pendidikan secara lebih tajam terutama jika kita lihat dari misinya bagi pengembangan sumberdaya manusia.

Strategi-strategi pokok tersebut di atas selanjutnya perlu dijabarkan ke dalam rencana dan priotas pembangunan pendidikan dalam Repelita VI yang bertitik tolak pada pemikiran mengenai tiga fungsi yang mendasar dari sistem pendidikan nasional, yaitu: (1) untuk mencerdaskan kehidupan

bangsa; (2) untuk mempersiapkan tenaga kerja terampil dan ahli yang diperlukan dalam proses memasuki era industrialisasi, serta (3) membina dan mengembangkan penguasaan berbagai cabang keahlian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Fungsi pertama, pendidikan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat yang telah dituangkan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Dalam rangka mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut, fungsi pendidikan tercermin pada ketentuan pasal 31 bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran (ayat 1); dan Pemerintah mengusahakan satu sistem pendidikan nasional (ayat 2)”. Banyak pasal tersebut merupakan landasan yang sangat kuat bagi Pemerintah untuk mencanangkan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Program wajib belajar tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, paling tidak pendidikan sekolah dasar selama 6 tahun, dan SLTP atau yang setara selama 3 tahun. Program pendidikan dasar 9 tahun tersebut tidak selamanya harus terselenggara di lingkungan sekolah, tetapi juga pendidikan berkelanjutan seperti kursus-kursus, pelatihan kerja, pendidikan dalam jabatan, madrasah, pesantren, dan sejenisnya.

Fungsi kedua, pendidikan sebagai upaya menyiapkan tenaga kerja terdidik, terampil, dan terlatih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dalam masyarakat industri. Pendidikan dalam kaitannya dengan penyiapan tenaga kerja dapat diklasifikasikan menurut jalur (sekolah-luar sekolah), jenis keahlian (menurut cabang keahlian), jenjang keahlian (terampil, mahir, ahli), dan jenjang pendidikan. Program pendidikan persiapan kerja bisa melalui SLTP dengan muatan pendidikan keterampilan yang memadai, sekolah menengah kejuruan, pendidikan tinggi profesional, kursus-kursus keahlian/keterampilan, dan pelatihan kerja. Program ini harus lentur dan selalu berwawasan lingkungan agar pendidikan keterampilan dan keahlian dapat disesuaikan dengan kebutuhan akan jenis-jenis keterampilan dan keahlian profesi yang selalu berubah.

Dewasa ini pendidikan persiapan kerja merupakan salah satu program Departemen yang menempati prioritas tertinggi. Berbagai inovasi dalam kebijaksanaan mengenai pendidikan dalam fungsinya sebagai persiapan kerja terus dilakukan terhadap pendidikan kejuruan dan pendidikan profesional sehingga benar-benar berfungsi untuk menyiapkan tenaga kerja terampil dan ahli sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Berdasarkan GBHN 1993, pendidikan kejuruan dan profesi juga akan diperluas sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Dengan kesempatan memperoleh pendidikan kejuruan yang semakin meluas dan merata,

Fungsi dasar pendidikan nasional : pendidikan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan sebagai upaya menyiapkan tenaga kerja terdidik yang industrial dan pendidikan sebagai upaya untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi

diharapkan dapat dicapai pemerataan dalam memperoleh keterampilan dan keahlian sebagai landasan untuk meningkatkan pemerataan memperoleh pendapatan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Fungsi ketiga, pendidikan sebagai sarana untuk menyiapkan penguasaan ilmu dan teknologi yang dapat bersaing di dunia. Cakupan dari bagian sistem ini ialah semua program pendidikan yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap jenjang pendidikan sebagai sarana untuk mencapai keunggulan Indonesia dalam era industrialisasi. Program pendidikan yang berorientasi pengembangan iptek harus memiliki sifat elitis (keunggulan), yaitu dapat memilih siswa yang berbakat istimewa dan berprestasi luar biasa, tetapi tetap berideologi kerakyatan, yaitu yang memungkinkan semua peserta didik tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, agama, dan golongan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan.

Program pendidikan iptek dapat dikategorikan ke dalam tiga tingkatan yang integral, yaitu: (1) pendidikan IPTEK pada jenjang pendidikan dasar yang lebih mengarah pada pembentukan kemampuan dasar iptek yang secara umum paling tidak bertujuan untuk menanamkan dan mengembangkan kemampuan dasar untuk belajar (basic learning tools). Kemampuan dasar untuk belajar tersebut seperti penguasaan kemampuan membaca, berhitung, kemampuan memecahkan masalah, dan penguasaan kemampuan belajar lainnya; serta pendidikan nilai moral masyarakat industri (di antaranya: kerja keras, disiplin, menghargai waktu, etos kerja, sikap mandiri); (2) pendidikan IPTEK pada jenjang pendidikan menengah yang sudah mulai mengarah pada pendidikan penguasaan ilmu ilmu dasar IPTEK di samping pendidikan kemampuan dasar IPTEK; dan (3) pendidikan IPTEK pada pendidikan tinggi yang memiliki muatan lebih banyak pada penguasaan disiplin ilmu murni, serta penelitian dan pengembangan ilmu ilmu terapan.

Dalam menyongsong era teknologi, peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang diamanatkan oleh GBHN, ketiga fungsi dasar pendidikan tersebut di atas memiliki kaitan yang sangat erat dengan, dan sangat ditentukan oleh keberhasilan dalam perluasan dan pemerataan kesempatan belajar melalui program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

Prioritas Dalam Pembangunan Pendidikan

Bertitik tolak dari keempat strategi pokok dan ketiga fungsi dasar pendidikan di atas, selanjutnya ditetapkan rencana dan prioritas pembangunan pendidikan nasional dan PJP II. Sesuai dengan Naskah Repelita VI dan disimpulkan dari beberapa pidato Mendikbud pada beberapa kesempatan, prioritas

pembangunan pendidikan nasional ialah pada: (1) penuntasan pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun; (2) peningkatan mutu semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan; (3) pelaksanaan program keterkaitan dan kesepadan pendidikan kejuruan dan profesi serta pelatihan teknik melalui sistem ganda pendidikan kejuruan (dual system); dan (4) peningkatan kemampuan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan sistem pendidikan tinggi yang didukung dengan peningkatan kemampuan penguasaan matematika dan ilmu pengetahuan alam di dalam keseluruhan sistem pendidikan nasional.

Pertama: Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Prestasi Indonesia dalam mewujudkan wajib belajar bagi penduduk usia 7-12 tahun ternyata lebih cepat dibandingkan dengan sesama negara berkembang, bahkan juga dibandingkan dengan negara-negara industri maju sekalipun ketika mereka mengupayakan hal yang sama. Prestasi ini diakui oleh dunia internasional, sehingga UNESCO menganugerahkan Medali Avicenna (Ibnu Sina) kepada Presiden Soeharto bulan Juni 1993. Jika Indonesia hanya memerlukan waktu sekitar 20 tahun atau 4 periode Pelita untuk menuntaskan wajib belajar sekolah dasar, maka negara-negara industri maju memerlukan waktu sekitar rata-rata 60 sampai 100 tahun. Dalam risalah yang diterbitkan oleh International Institute for Educational Planning UNESCO, Jacques Hallak (1990) mencatat bahwa, “dengan tingkat industrialisasi yang lebih tinggi dan kondisi sosial-ekonomi yang lebih makmur, Amerika Serikat dan negara-negara maju di Eropa Barat seperti Perancis, Jerman dan Inggris, memerlukan waktu antara 60 sampai dengan 100 tahun untuk mewujudkan pendidikan dasar “universal”. Di samping itu, tingkat kecepatan negara-negara maju tersebut dalam memperluas pendidikan menengah dan tinggi ternyata lebih lamban dibandingkan dengan negara-negara sedang berkembang dewasa ini, khususnya Indonesia.

Keberhasilan itu didukung oleh program perluasan dan pemerataan kesempatan belajar sekolah dasar negeri secara besar-besaran yang dimulai pada tahun 1973 melalui program Instruksi Presiden No. 10 Tahun 1973. Perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan dasar 6 tahun ini telah memungkinkan Pemerintah untuk dapat mencanangkan program wajib sekolah dasar untuk semua anak umur 7-12 tahun pada tahun 1984.

Sepuluh tahun setelah kita mencanangkan dan melaksanakan program wajib sekolah dasar, Indonesia akan mencanangkan pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun meliputi Sekolah Dasar 6 tahun dan SLTP 3 tahun atau yang setara. Program ini merupakan kelanjutan dari persiapan yang telah dilaksanakan dalam Pelita V sebagaimana diamanatkan dalam

*Prioritas pembangunan
pendidikan :
wajib belajar pendidikan
dasar sembilan tahun;
peningkatan mutu
pendidikan; pelaksanaan
program keterkaitan (link)
dan kesepadan (match)
pendidikan dan
peningkatan kemampuan
untuk menguasai iptek;*

GBHN 1988, dan GBHN 1993. Menyadari pentingnya peranan pendidikan dasar, maka Pemerintah bertekad untuk mencanangkan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada tahun pertama Repelita VI mendatang, tepatnya tanggal 2 Mei 1994, dan mengupayakan untuk menuntaskannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Salah satu implikasi perlunya perluasan pendidikan dasar dari 6 tahun menjadi 9 tahun adalah menyediakan kesempatan memperoleh pendidikan bagi 6 juta tambahan penduduk usia pendidikan dasar yang saat ini belum memperoleh kesempatan pendidikan. Untuk mendukung upaya tersebut, maka daya jangkau Program PLS Paket A dan Paket B bagi penduduk usia 6-12 dan 13-15 tahun perlu diperluas.

Program pendidikan luar sekolah diarahkan pada usaha mendidik warga masyarakat agar memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan sehingga peserta didik makin mampu mengembangkan potensi pribadi, memiliki tugas dan tanggung jawab hidup bermasyarakat dan bernegara serta dapat mengembangkan usaha produktif guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Sasaran utama Pendidikan Luar Sekolah adalah pembebasan tiga buta yaitu buta aksara latin dan angka, buta bahasa Indonesia dan buta pengetahuan dasar yang akan dituntaskan dalam PJP II.

Presiden Suharto, dalam sidang paripurna MPR, tanggal 6 Januari 1994 dalam membahas tantangan PJP II, yang dikutip oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, menengaskan bahwa: “Kita harus memandang pendidikan itu dibangun kearah yang lebih adil dan merata (equitable) untuk dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dan dapat menghasilkan keluaran berupa sumber daya manusia yang lebih berkualitas: Suatu tahap penting dalam pembangunan pendidikan pada PJP II adalah meningkatkan wajib belajar pendidikan dasar dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Jika mungkin, diharapkan agar sasaran itu dapat dicapai dalam 10 tahun, dan selambat-lambatnya dalam 3 Pelita. Merupakan bagian penting dan tak terpisahkan dari perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, adalah perbaikan mutu pendidikan. Pendidikan juga lebih diarahkan kepada dan sesuai dengan kebutuhan akan angkatan kerja produktif di semua sektor, bidang dan kegiatan pembangunan.”

Implikasi yang sangat penting dari penegasan presiden tersebut adalah bahwa dalam PJP II harus diupayakan untuk perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan bersamaan dengan itu juga harus ditingkatkan mutu semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Perluasan dan pemerataan di satu sisi dan perbaikan mutu di sisi lain, bukanlah dua hal yang bersifat alternatif. Sehingga tidak mungkin untuk memilih memperluas dan

meratakan kesempatan memperoleh pendidikan saja pada tahap pertama, kemudian memperbaiki mutu pendidikan pada tahap berikutnya, atau sebaliknya memperbaiki mutu pendidikan terlebih dulu baru kemudian diikuti dengan perluasan dan pemerataan kesempatan belajar. Keduanya harus dilaksanakan secara simultan, ini merupakan tantangan utama bagi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama segenap jajarannya.

Berkenaan dengan itu direncanakan untuk melaksanakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan pada SLTP dengan mengutamakan pembangunan gedung dan ruang kelas SLTP secara efektif dan efisien dengan pengertian bahwa gedung dan ruang kelas tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun lingkungan belajar yang menarik bagi orang tua dan murid. Dengan demikian, yang diperoleh dari SLTP melebihi biaya kesempatan (opportunities cost) yang harus diperhitungkan di dalam mengikuti pendidikan di SLTP.

Dalam kondisi Indonesia dewasa ini, tantangan dalam rangka perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan sekaligus memperbaiki mutu pendidikan sekolah berlipat dua. Pertama, perluasan wajib belajar pendidikan dasar hingga menjadi pendidikan dasar 9 tahun dan perbaikan mutu semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan memerlukan dana yang jauh lebih besar dari yang biasa disediakan oleh anggaran pemerintah hingga saat ini. Kedua, perluasan wajib belajar pendidikan dasar hingga menjadi pendidikan dasar 9 tahun serta perbaikan mutu semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan itu merupakan tantangan berat untuk peningkatan kemampuan pengelolaan pendidikan khususnya dalam melaksanakan perubahan-perubahan yang perlu, sesuai dengan karakteristik geografis, institusional, dan angkatan kerja saat ini.

Perkiraan kebutuhan biaya yang diperlukan untuk menampung sejumlah besar murid baru ke dalam sistem SLTP, meliputi: biaya pembebasan tanah; biaya rehabilitasi gedung, pembangunan gedung dan ruang kelas baru; biaya pengangkatan, pelatihan, dan peningkatan kemampuan guru agar diperoleh kualitas guru yang memadai; biaya pengadaan buku teks dan buku perpustakaan; biaya pengadaan peralatan laboratorium, model alat praktik di sekolah dan bahan pengajaran lainnya; pembebasan SPP; dan biaya operasi dan perawatan sistem sekolah adalah sangat besar dan harus ditambahkan, tidak termasuk segala sesuatu yang telah ada.

Jika pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun harus tuntas dalam 2 Pelita atau 10 tahun, maka keseluruhan jumlah dana yang harus disediakan adalah 16,5 triliyun rupiah selama 10 tahun atau rata-rata 1,65 triliyun rupiah setiap tahun berdasarkan perkiraan menurut harga tahun 1993. Pengeluaran

biaya diperkirakan lebih rendah pada tahap awal dan akhir dasa warsa, tetapi lebih tinggi pada tahap-tahap pertengahan. Jumlah dana tambahan yang diperlukan untuk perluasan wajib belajar pendidikan dasar dari 6 menjadi 9 tahun, belum termasuk biaya untuk menghadapi kesulitan dan perubahan strategi yang mungkin timbul pada suatu saat bila pelaksanaan gerakan wajib belajar itu diberlakukan di seluruh Indonesia. Terlepas dari realisasinya nanti, namun perkiraan kebutuhan tambahan dana itu menjadi pedoman bagi upaya perluasan wajib belajar pendidikan dasar.

Untuk meletakkan perkiraan biaya itu di dalam suatu perspektif, ada baiknya bila mempertimbangkan bahwa keseluruhan jumlah pengeluaran untuk pendidikan, yang dibayarkan melalui berbagai Departemen dan Instansi Pemerintah adalah sebesar 9,4 triliyun rupiah pada tahun 1993-1994 atau sekitar 3,1 persen dari produksi domestik bruto (GDP), belum termasuk pengeluaran pendidikan oleh perguruan swasta. Oleh karena itu jelaslah bahwa tambahan pengeluaran yang diperkirakan 1,65 triliyun rupiah pertahun selama 10 tahun, hanya untuk pelaksanaan perluasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Hal ini merupakan kendala yang penting dan berat bagi kemampuan keuangan Pemerintah.

Apa yang ada di balik pelaksanaan perluasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, meskipun sudah disinggung di muka dan tersirat di dalam angka-angka tersebut diatas, ada manfaatnya bila diulang lagi. Pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun berarti: (1) upaya pembangunan lingkungan belajar di sekolah dan ruang kelas; (2) upaya pengadaan, pengangkatan, pembinaan dan pengembangan kemampuan guru; dan (3) upaya pengadaan perangkat laboratorium dan buku teks yang bermutu.

Untuk menampung 6 juta murid bari di SLTP diperlukan 150 ribu ruang kelas baru, atau rata-rata 15 ribu ruang kelas baru setiap tahun dalam sepuluh tahun. Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 1993/1994 kebutuhan itu jauh lebih besar, sebab dalam tahun anggaran itu hanya dapat dibangun 4,022 ribu ruang kelas baru. Oleh karena itu, untuk tahun anggaran yang akan datang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan merencanakan membangun 6,2 ribu ruang kelas baru dan secara bertahap ditingkatkan jumlahnya pada tahun-tahun berikutnya sesuai dengan kemampuan dalam menyediakan dana pembangunan ruang kelas baru. Namun demikian Departemen P dan K akan mempercepat pengadaan ruang kelas baru sejak sekarang.

Berkenaan dengan guru, setiap tahun diperlukan tambahan sekitar 34 ribu guru yang berkualitas atau berkelayakan mengajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, yang terdiri dari sekitar 8 ribu guru SD; 20 ribu guru SLTP; seribu guru SLB; dan 2 ribu guru untuk diperbantukan di sekolah

swasta serta 3 ribu guru untuk sekolah menengah. Meskipun LPTK memiliki kemampuan secara kuantitatif untuk memenuhi kebutuhan tersebut, namun untuk menghasilkan guru yang berkelayakan mengajar pada pendidikan dasar dan menengah masih menjadi masalah yang cukup berat. Dengan demikian penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di lihat dari sisi guru masih menjadi masalah besar yang harus dipecahkan dan merupakan tatangan berat dalam PJP II.

Selanjutnya, dalam upayanya menghapuskan secara bertahap berbagai kendala untuk perluasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun Departemen P dan K akan membuat suatu perencanaan yang mempertimbangkan perbedaan kemampuan daerah, karena dalam kenyataan banyak dijumpai suatu rencana yang dapat dilaksanakan di satu daerah dengan baik, ternyata tidak dapat dilaksanakan dengan baik pula di daerah lain. Untuk menyusun rencana yang mempertimbangkan kekhususan kondisi daerah, diupayakan untuk memperoleh bantuan teknis dari dalam dan luar negeri. Di dalam penyusunan rencana itu, perlu pula dipertimbangkan kemampuan aparat dalam pelaksanaannya, misalnya dimulai dari provinsi yang pelaksanaannya paling memungkinkan. Dengan cara itu diharapkan dapat diperoleh tambahan pengalaman dalam mengatasi masalah yang berat. Akhirnya, bila pelaksanaan program telah berjalan dalam kurun waktu tertentu, akan dilaksanakan penilaian terhadap kemajuan yang dicapai, baik dalam arti kuantitasnya maupun kualitasnya yang diukur dengan prestasi belajar murid.

Kedua: Peningkatan Mutu pada Semua Jenis dan Jenjang Pendidikan

Prioritas kedua pembangunan pendidikan dalam PJP II adalah perbaikan mutu semua jenis dan jenjang pendidikan (dasar, menengah, dan tinggi), dengan memusatkan perhatian pada tiga faktor utama, yaitu (1) kecukupan sumber-sumber pendidikan untuk menunjang proses pendidikan dalam arti kecukupan dalam penyediaan jumlah dan mutu guru; kecukupan penyediaan buku teks bagi murid dan perpustakaan; dan kecukupan penyediaan secara operasional peralatan dan laboratorium; (2) sifat dari proses pendidikan itu sendiri berdasarkan kurikulum dan (3) mutu output dari proses pendidikan dalam arti keterampilan dan pengetahuan yang telah diperoleh para siswa.

Berkenaan dengan mutu pendidikan, sering dinyatakan bahwa dalam kondisi paling baik mutu pendidikan tidak merata (uneven), dan dalam kondisi paling buruk mutu pendidikan tidak memadai (lacking). Mutu pendidikan merupakan konsep yang abstrak sehingga penentuan program-program peningkatan mutu pendidikan serta prioritasnya perlu didasarkan pada suatu konsepsi atau cara berpikir yang benar dan selaras dengan keadaan pendidikan di Indonesia dan masalah-masalahnya. Di samping itu,

*Perlunya pengembangan
sistem indikator mutu
pendidikan untuk tujuan-
tujuan penilaian mutu
pendidikan*

pemahaman terhadap status dan kedudukan Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain dalam berbagai indikator mutu pendidikan dasar, menengah dan tinggi perlu terus dikaji secara intensif. Untuk itu perlu dilakukan pengukuran yang dilakukan secara konsisten terhadap berbagai indikator mutu pendidikan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.

Pengembangan sistem penilaian mutu pendidikan yang handal perlu dilakukan sehingga sistem tersebut dapat menghasilkan seperangkat indikator mutu yang dapat digunakan untuk tujuan-tujuan penilaian mutu pendidikan dalam waktu-waktu yang teratur. Sistem penilaian ini harus didasarkan pada suatu baseline data yang diukur pada awal-awal periode pembangunan, sehingga perkembangannya dapat diikuti dengan cermat. Indikator-indikator mutu pendidikan tersebut perlu dikonsepsikan secara jelas dan menyeluruh sehingga dapat mengukur indikator mutu pendidikan dari mulai input, proses, hasil, sampai dengan dampak pendidikan terhadap pembangunan.

Di balik kelangkaan informasi hasil-hasil penilaian program pendidikan yang komprehensif di masa lalu, beberapa program peningkatan mutu telah dilaksanakan walaupun mungkin perlu dikaji lebih jauh lagi hasil-hasilnya. Sesungguhnya, beberapa upaya peningkatan mutu pendidikan telah dimulai sejak awal tahun tujuh puluhan, dan telah tumbuh dan berkembang ruang lingkupnya. Di antara program-program yang penting, penataran guru SD, SLTP, dan SLTA telah memakan waktu dan biaya yang sangat besar. Program-program peningkatan mutu lainnya juga telah dilaksanakan seperti peningkatan ketersediaan dan mutu buku paket, buku perpustakaan, dan alat-alat peraga pelajaran yang telah dilaksanakan akhir-akhir ini. Sebagian besar upaya-upaya tersebut memang sangat diperlukan dan memiliki dasar yang cukup jelas. Namun demikian masalah yang masih belum terpecahkan sampai saat ini ialah belum diketahuinya secara jelas apakah program-program tersebut memiliki dampak terhadap peningkatan mutu pendidikan seperti yang sudah dikonsepsikan selama ini.

Ada dua hal penting yang dapat dikemukakan berkenaan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan, yaitu: (1) program-program peningkatan mutu pendidikan seharusnya merupakan bagian dari rencana induk yang lebih besar dan jangka panjang didasarkan pada suatu konsepsi yang jelas dan dapat difahami oleh seluruh jajaran Depdikbud dan pihak-pihak lain yang berkepentingan; dan (2) dalam pelaksanaan program-program mutu pendidikan seharusnya memperhatikan situasi empiris dan kendala-kendalanya yang diperkirakan akan timbul sehingga bersifat inovatif dan tidak mengulangi upaya-upaya yang belum diketahui dampaknya. Atas dasar itu, maka program-program peningkatan mutu pendidikan bersifat realistik dan tetap berlandasan suatu konsep yang benar.

Secara konseptual, peningkatan mutu pendidikan harus merupakan upaya yang memiliki dampak jangka panjang. Peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan akan dapat diciptakan jika mutu tersebut diperoleh melalui upaya lembaga pendidikan itu sendiri dalam menyelenggarakan program-program pendidikan. Peranan pemerintah diusahakan untuk tidak merupakan pelaku langsung dari upaya peningkatan mutu, akan tetapi hanya sebagai pemacu dan fasilitator. Upaya pemerintah dalam menetapkan prioritas dalam alokasi anggaran masih akan terus dilakukan dengan maksud agar dapat lebih memberikan landasan bagi lembaga-lembaga pendidikan untuk berupaya meningkatkan mutu pendidikan mereka masing-masing.

Dijelaskan bahwa konsep mutu pendidikan merupakan suatu yang abstrak yang untuk memahaminya diperlukan definisi operasional yang berkaitan dengan komponen-komponen dan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap mutu pendidikan. Dengan demikian, mutu pendidikan dapat diartikan sebagai: "Kemampuan sekolah sebagai lembaga untuk menyediakan dan mendayagunakan sumber-sumber daya pendidikan guna meningkatkan kemampuan belajar" *). Yang dimaksud dengan sumber daya pendidikan ialah komponen pendidikan yang dapat mendorong terciptanya situasi yang kondusif untuk meningkatkan mutu proses belajar-mengajar, yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan kemampuan belajar murid. yaitu komponen input manajemen, komponen proses pendidikan, komponen murid, dan komponen hasil belajar. Komponen-komponen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Komponen input manajemen; input manajemen sering ditunjukkan oleh sumber-sumber pendidikan, baik berbentuk sumberdaya manusia (guru dan tenaga kependidikan lainnya), berbentuk sarana dan prasarana pendidikan, substansi pendidikan, waktu belajar, maupun teknik dan metode pendidikan itu sendiri. Untuk menjadikan suatu sistem pendidikan yang bermutu, input manajemen tersebut harus tersedia walaupun belum tentu digunakan dalam pelaksanaan pendidikan. Dengan demikian, tersedianya input-input pendidikan tersebut hanya merupakan indikator mutu pendidikan dalam derajat pertama, sehingga kajian berikutnya harus ditujukan pada pendayagunaan input-input tersebut baik dalam proses manajemen maupun dalam proses pengajaran.

Komponen proses pendidikan; sekolah yang bermutu secara langsung dapat ditunjukkan oleh kemampuannya dalam menciptakan proses pendidikan yang bermutu. Proses pendidikan merupakan komponen inti dari sistem pendidikan karena sejumlah sumberdaya pendidikan didayagunakan secara efisien di dalam proses tersebut. Komponen proses pendidikan terdiri dari proses manajemen sekolah dan proses pengajaran. Proses manajemen sekolah

*Program peningkatan
mutu harus dilakukan
sebagai bagian dari
rencana induk yang
berorientasi pada keadaan
empiris yang memiliki
dampak jangka panjang*

*) *Sistem Indikator Mutu dan Efisiensi Pendidikan Sekolah Dasar di Indonesia, Pusat Informatika, Depdikbud, 1991.*

yang bermutu ialah yang mampu mendayagunakan faktor-faktor input sehingga memungkinkan bagi terciptanya proses pengajaran yang bermutu. Sedangkan, proses pengajaran yang bermutu ialah proses yang secara langsung dikelola oleh guru sehingga memungkinkan murid untuk dapat belajar sebanyak mungkin untuk memperoleh kemampuan belajar yang pada gilirannya dapat mencapai prestasi belajar yang tinggi. Jika sistem pendidikan sudah memiliki kemampuan mendayagunakan input pendidikan dalam proses manajemen dan pengajaran, maka sekolah tersebut sudah dapat dikategorikan memiliki indikator mutu pendidikan dalam derajat kedua.

Komponen murid; murid merupakan komponen pendidikan yang paling erat kaitannya dengan mutu pendidikan, karena murid merupakan sasaran pendidikan paling akhir. Komponen murid yang paling penting dalam pendidikan ialah kemampuan belajar, karena kemampuan belajar ialah potensi yang harus dikembangkan di dalam diri individu. Namun demikian kemampuan belajar masih merupakan komponen pendidikan yang abstrak karena kemampuan belajar tumbuh dan berkembang di dalam diri peserta didik. Untuk meningkatkan kemampuan belajar seorang murid yang tinggi perlu didasarkan pada beberapa indikator yang relevan baik dilihat secara fisik maupun sosial. Secara fisik dapat ditunjukkan dengan kesehatan, gizi, usia, dan kematangan biologis sebagai akibat dari pengaruh keluarga sosial-ekonomi keluarga murid. Secara sosial dapat ditunjukkan dengan pengaruh pendidikan pra-sekolah baik di dalam keluarga maupun di lingkungan pendidikan taman kanak-kanak, di mana murid-murid memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan sejak dini.

Komponen Hasil Belajar; prestasi belajar murid sering digunakan sebagai indikator kemampuan belajar, yaitu semakin tinggi prestasi belajar siswa di dalam suatu bidang tertentu, dianggap semakin tinggi pula tingkat kemampuan siswa dalam rangka mempelajari bidang studi yang bersangkutan. Indikator prestasi belajar ini sering digunakan sebagai indikator tunggal dalam mengukur mutu pendidikan. Namun demikian, prestasi belajar tidak dipengaruhi oleh faktor sekolah semata-mata melainkan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor luar sekolah. Jika faktor luar sekolah yang lebih banyak mempengaruhi prestasi belajar, maka tingginya prestasi belajar bukan merupakan indikator mutu pendidikan di sekolah, tetapi indikator lingkungan sekolah. Dengan demikian, untuk melihat mutu pendidikan sekolah perlu dilakukan analisis lebih lanjut tentang efek independen dari faktor-faktor sekolah terhadap prestasi belajar.

Berdasarkan landasan konsepsi mutu pendidikan di atas, berapa langkah penting perlu dilakukan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan pada

setiap jenis dan jenjang pendidikan di Indonesia. Di dalam naskah Repelita VI, upaya-upaya peningkatan mutu pada setiap jenis dan jenjang pendidikan dapat dikemukakan sebagai berikut.

Pertama, Peningkatan mutu guru terutama guru-guru SD dan MI paling tidak setara D2, SLTP dan SLTA paling tidak S1, dan proporsi dosen berkualifikasi S2 dan S3 harus sekurang-kurangnya 80%. Diperlukan juga peningkatan keserasian proporsi mahasiswa program-program ilmu sosial termasuk kependidikan dan humaniora dengan ilmu-ilmu dasar, ilmu pengetahuan alam dan eksakta . Mutu pendidikan dasar ditingkatkan melalui pengembangan kurikulum yang berorientasi pada perbaikan metoda belajar-mengajar dalam rangka pengembangan iptek, dan peningkatan mutu serta kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya. Untuk pendidikan menengah upaya peningkatan mutu dilakukan melalui pengembangan kurikulum yang meliputi pengembangan materi pendidikan, perbaikan metoda belajar-mengajar, peningkatan mutu tenaga pendidikan, serta pengembangan dan penyediaan sarana-prasarana pendidikan yang mampu menunjang mata pelajaran dasar umum (MPDU) dan muatan lokal bagi pendidikan menengah umum dan mata pelajaran dasar umum dan kejuruan (MPDU dan MPDK) bagi pendidikan menengah kejuruan.

Kedua, untuk pendidikan tinggi, kegiatan-kegiatan penelitian ditingkatkan untuk menunjang pendidikan dan pengembangan iptek, untuk kemudian hasil-hasilnya disebarluaskan melalui wahana pengabdian masyarakat, sehingga manfaat hasil-hasil penelitian tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Upaya peningkatan mutu juga dilaksanakan dengan mengembangkan iklim perguruan tinggi yang mendukung terciptanya kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik agar tata kehidupan kampus perguruan tinggi menjadi lingkungan ilmiah yang dinamis. Upaya lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan otonomi perguruan tinggi menjadi lembaga mandiri yang tidak tergantung pada subsidi pemerintah dalam penyelenggarannya. Peningkatan mutu kelembagaan pendidikan tinggi juga dilaksanakan dengan menyempurnakan sistem akreditasi yang dilaksanakan baik untuk perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta.

Ketiga, pengembangan sistem pengendalian dan penilaian mutu pendidikan yang *valid, reliable*, dan terus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Terdapat dua jenis sistem pengendalian mutu pendidikan yang perlu dikembangkan dan disebarluaskan pendayagunaannya, yaitu sebagai berikut. (1) Sistem Indikator mutu pendidikan yang didasarkan pada pengukuran secara teratur (tidak bersifat ad-hoc) terhadap berbagai indikator mutu pendidikan, dengan penekanan pada input, proses, output, dan dampak

pendidikan. Pengukuran indikator-indikator mutu tersebut harus didasarkan pada konsep mutu pendidikan yang telah disepakati berbagai pihak. (2) Sistem ujian nasional yang dapat mengukur mutu pendidikan khususnya terhadap hasil-hasil belajar peserta didik. Kedua sistem tersebut harus secara teratur memberikan masukan bagi pemerintah tentang status, variasi, dan faktor-faktor yang menentukan terhadap tinggi rendahnya mutu pendidikan.

Ketiga: Perluasan, Peningkatan Mutu, dan relevansi Pendidikan Kejuruan dan Teknologi

Pendidikan kejuruan dan teknologi, baik yang diselenggarakan oleh sekolah maupun oleh pendidikan luar sekolah, merupakan bagian yang sangat penting dari sistem pendidikan nasional. Pendidikan kejuruan tersebut memiliki kaitan yang langsung dengan proses industrialisasi, terutama jika dikaitkan dengan fungsinya dalam menyediakan tenaga kerja yang terampil, luwes dan menguasai teknologi.

Meskipun tidak hanya terjadi di Indonesia, masalah lulusan pendidikan kejuruan dan pendidikan profesional yang belum siap untuk dipekerjakan mendapat perhatian yang cukup besar dari pemerintah. Menyangkut kesiapan lulusan pendidikan kejuruan tersebut, Indonesia saat ini memiliki situasi yang agak berbeda dengan negara-negara lain. Hasil survei angkatan kerja nasional yang terbaru (1992) menunjukkan bahwa kalangan penerima kerja (industri dan dunia usaha) saat ini pada kenyataannya menuntut untuk memperoleh tenaga kerja yang terlatih dan siap bekerja. Di dalam kenyataan sehari-hari, dijumpai bahwa investasi untuk pendidikan dan pelatihan di sebagian besar industri menerima prioritas yang relatif rendah. Ini dapat dipahami, tetapi sekaligus merupakan pandangan yang kurang tepat, sebab infrastruktur industri di Indonesia secara perlahan tapi pasti terus tumbuh dan berkembang. Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan infrastruktur industri itu permintaan akan tenaga kerja yang terampil, luwes, dan menguasai teknologi akan terus meningkat. Peningkatan permintaan itu akan lebih besar lagi pada saat output industri bergeser secara besar-besaran dari produk padat karya, ke padat modal, dan selanjutnya ke produk industri yang padat pengetahuan dan teknologi.

Tuntutan akan tenaga kerja terampil yang berorientasi pada industri akan terus meningkat sehingga harus menjadi salah satu prioritas utama.

Atas dasar alasan-alasan tersebut, pemerintah Indonesia menempatkan pendidikan dan pelatihan kejuruan dan teknologi pada posisi prioritas utama. Selanjutnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, atas dasar alasan-alasan yang sama menerima instruksi secara eksplisit dari GBHN, 1993 untuk memperluas dan meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan kejuruan dan teknologi secara besar-besaran dengan maksud untuk dapat mendorong

pengembangan sumberdaya manusia yang terampil, luwes, dan menguasai teknologi.

Secara umum arah perluasan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dan pelatihan kejuruan di Indonesia adalah untuk menyelenggarakan pendidikan kejuruan yang pelaksanaannya menggunakan prosedur yang biasa dilakukan dalam sistem dual (dual system). Memang benar, jika penerapan pendidikan kejuruan dengan sistem dual ini ingin disamakan dengan sistem yang diterapkan di Jerman atau di negara-negara Eropa Barat lainnya mungkin sangat tidak proporsional. Pemerintah tidak bermaksud meniru sistem Jerman ini secara utuh, tetapi paling tidak ingin menerapkan konsep sistem dual ini sesuai dengan keadaan dan permasalahan yang ada di Indonesia. Pemerintah meyakini bahwa dalam kenyataannya memang tidak mungkin, dalam waktu singkat, dapat menerapkan seutuhnya sistem dual dalam pendidikan kejuruan di Indonesia. Dengan demikian upaya yang paling tepat ialah mengadopsi konsep ini dengan menyelenggarakan pendidikan kejuruan yang tidak terpisah dari dunia nyata melalui pengikutsertaan tanggungjawab industri dan dunia usaha.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah memutuskan untuk menerapkan sistem dual ini karena didasarkan pada keyakinan bahwa sistem dual ini merupakan suatu model yang bermanfaat untuk dijadikan pedoman dalam perluasan dan peningkatan mutu pendidikan kejuruan dan teknologi di Indonesia kini dan masa yang akan datang. Indonesia memiliki kesamaan pandangan dengan Jerman bahwa alternatif pemilihan sistem dual sebagai salah satu upaya peningkatan relevansi pendidikan kejuruan dengan dunia kerja adalah dengan pemahaman bahwa pada akhirnya tanggung jawab pengembangan tenaga kerja yang terampil, luwes, dan menguasai teknologi harus dipikul bersama oleh pemerintah dan dunia/usaha industri. Sistem pendidikan kejuruan sebaiknya diselenggarakan di dalam sistem pendidikan persekolahan dan bekerjasama dengan badan-badan usaha/industri yang dianggap paling mengetahui akan kebutuhan dan jumlah serta mutu keterampilan para pekerja. Pandangan itu mengacu pada dua hal yang mendasar, yaitu (1) bahwa sistem pendidikan dan pelatihan dengan basis sekolah, tidak seluruhnya mampu melaksanakan fungsi yang diperlukan untuk memberikan suatu pelatihan yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan dan (2) insentif untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil, luwes, dan menguasai teknologi secara nyata dimiliki oleh dunia usaha/industri baik pemerintah maupun swasta.

Untuk menjamin bahwa angkatan kerja di masa yang akan datang lebih berkualitas, perlu dilakukan kerja sama antara berbagai lembaga, badan dan organisasi yang berbeda-beda. Berkenaan dengan itu, banyak perubahan

*Sistem pendidikan
kejuruan melalui
"dual system" akan
mengintegrasikan
kepentingan dunia
pendidikan dan
dunia industri*

yang harus dilakukan untuk memperluas dan memperbaiki sistem pendidikan melalui pengenalan dan penerapan sistem yang lebih memadai, yaitu sistem dual yang melibatkan dunia usaha dan industri dalam pelaksanaan pendidikan itu seutuhnya. Salah satu di antara perangkat lunak yang diperlukan untuk melibatkan dunia usaha/industri dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan adalah mengembangkan dan mengadopsi sistem klasifikasi dan sertifikasinya. Disamping itu, untuk memberikan kerangka kerja dasar bagi pendidikan kejuruan perlu disusun undang-undang tentang pendidikan dan pelatihan kejuruan yang melibatkan dunia usaha/industri. Pengembangan sistem pendidikan kejuruan di dalam sistem dual memerlukan waktu yang cukup panjang, namun situasi Indonesia saat ini tidak dapat menunggu sampai seluruh prakondisi dan infrastruktur yang diperlukan terpenuhi. Oleh karena itu pemerintah telah mengambil inisiatif memulainya pada Repelita VI dan secara bertahap meningkatkan pelaksanaannya dalam periode-periode selanjutnya.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan sistem dual ini, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan memiliki modal dasar yang dinilai menguntungkan, sebab pada saat ini pada jenjang pendidikan menengah telah beroperasi sistem pendidikan kejuruan yang jumlahnya ratusan, dan pada jenjang pendidikan tinggi sekurang-kurangnya telah beroperasi 26 politeknik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Sementara arah pendidikan dan pelatihan kejuruan di masa depan akan dikembangkan secara lebih rinci, pada saat yang sama diperlukan upaya untuk memperluas dan memperbaiki sekolah menengah kejuruan dan politeknik untuk menghasilkan keluaran yang lebih berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja di masa mendatang. Untuk mendukung upaya tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menginstruksikan kepada pejabat terkait di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan jam pelajaran praktek dari 8 jam menjadi 32 jam per minggu pada awal tahun ajaran baru, khususnya di 200 sekolah menengah kejuruan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Untuk menunjang kebijaksanaan itu, telah dirintis kerjasama, dengan sekitar 2000 badan usaha industri kecil dan menengah dalam menyediakan tempat pelatihan bagi para siswa. Kerjasama tersebut juga meliputi pengembangan kurikulum dan penyusunan sistem uji profesi yang sesuai dengan keperluan untuk mengukur keterampilan dan keahlian yang dimiliki oleh peserta didik setelah melewati jenjang pendidikan menengah kejuruan.

Jelaslah, bahwa untuk beberapa waktu mendatang Indonesia masih berada dalam taraf belajar untuk menyesuaikan kebutuhan pendidikan dan pelatihan kejuruan dan teknologi yang menjurus ke industri. Meskipun demikian, berbagai langkah maju sedang diupayakan dan Pemerintah Indonesia telah

mengimbau agar lembaga atau badan-badan donor mempertimbangkan secara cermat dan hati-hati dalam memberikan dukungan terhadap upaya pengembangan pendidikan dan pelatihan kejuruan. Pemerintah akan terus melanjutkan langkah-langkah pengenalan dan pelaksanaan sistem dual pada sejumlah sekolah yang lebih banyak lagi, sehingga secara perlahan-lahan dapat dilakukan penyesuaian peranan dan fungsi sekolah menengah kejuruan dan teknologi yang tepat guna.

Sistem dual juga akan diterapkan pada pendidikan luar sekolah. Dalam rangka pelaksanaan sistem dual ini peran serta masyarakat diharapkan menjadi lebih aktif dan terarah dalam upaya peningkatan relevansi dan perluasan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan kemampuan memperoleh penghasilan. Kerja sama antara lembaga pendidikan dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pendidikan luar sekolah diharapkan dapat diselenggarakan. Untuk menunjang pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut, akan dilakukan pengangkatan dan pelatihan tenaga pendidikan masyarakat di berbagai jenis dan jenjang sesuai dengan kebutuhan, pengadaan buku serta sarana dan prasarana pendidikan lainnya.

Keempat: Memperkuat Kemampuan Menguasai Iptek Melalui Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi

Peningkatan mutu pendidikan tinggi, khususnya upaya penguatan kemampuan bangsa Indonesia menguasai bidang iptek untuk menunjang pengembangan industri Indonesia di masa depan, adalah sama pentingnya dengan upaya-upaya penunjang wajib belajar, peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan kejuruan dan teknologi, serta peningkatan mutu jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Saat ini di Indonesia terdapat 51 perguruan tinggi negeri (PTN) dan lebih dari 1000 perguruan tinggi swasta (PTS). Terlepas dari adanya kesan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki cukup kemampuan menampung mahasiswa di perguruan tinggi negeri dan swasta, sudah tiba saatnya bagi Indonesia untuk lebih menekankan pada peningkatan mutu pendidikan dan penelitian pada perguruan tinggi. Alasannya ialah bahwa pada akhirnya perluasan dan perkembangan sistem pendidikan tinggi di Indonesia akan sangat tergantung pada kualitas outputnya. Mutu pendidikan tinggi juga sangat tergantung pada mutu pendidikan dan penelitian yang dihasilkan, khususnya pada jenjang pasca sarjana. Lebih dari itu, mutu pendidikan tinggi harus dipandang dari sisi mutu lulusan dengan seperangkat kemampuannya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang kehidupan. Yang perlu difahami ialah bahwa pembangunan pendidikan merupakan suatu investasi jangka panjang. Dengan kata lain bahwa upaya yang dilakukan saat ini baru akan dapat diketahui

*Sistem dual
pada pendidikan luar
sekolah (PLS) juga perlu
diperhitungkan*

Peningkatan mutu Perguruan Tinggi dilakukan melalui : peningkatan mutu pendidikan pasca sarjana, peningkatan mutu penelitian perguruan tinggi, Peningkatan dana penelitian, pembinaan kegiatan penelitian

hasilnya setelah melewati masa 10-15 tahun mendatang. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka membangun sistem pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, perlu dilakukan secara cermat, sistematis, dan terarah karena kegagalan dalam membangun mutu pendidikan tinggi berarti kehilangan kesempatan selama 10-15 tahun.

Di dalam pembangunan PTN penekannya terutama diletakkan pada peningkatan kualitas pendidikan pasca sarjana, yaitu melalui perluasan secara besar-besaran program master dan doktor. Sejalan dengan itu, akan dilaksanakan pula konsolidasi dan perbaikan mutu pada tingkat pendidikan sarjana. Dalam rangka peningkatan mutu tersebut, bidang studi akan diorientasikan ke arah pemenuhan kebutuhan pembangunan masa depan Indonesia, yaitu mencakup antara lain, bidang-bidang pertanian dan agrobisnis, serta teknologi. Misalnya, pengembangan di bidang bioteknologi dan elektronika, dan bidang-bidang teknik lainnya yang berhubungan langsung dengan keadaan khusus Indonesia, seperti ilmu pengetahuan kelautan dan lingkungan hidup.

Kunci untuk memperbaiki mutu pendidikan tinggi program pasca sarjana dititikberatkan pada peningkatan mutu penelitian yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Penelitian di perguruan tinggi mempunyai fungsi (1) meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan baik sebagai Sarjana (S1) maupun sebagai peneliti/dosen lulusan Magister dan Doktor (S2/S3); (2) membantu memecahkan masalah pembangunan melalui produk yang bermanfaat; dan (3) mengembangkan iptek.

Ada dua faktor yang dapat memacu pelaksanaan program-program penelitian yaitu dana dan tenaga. Berdasarkan pendapatan nasional bruto, anggaran yang dialokasikan untuk program penelitian dan pengembangan di Indonesia relatif masih kecil (hanya 0,2%). Alokasi dana penelitian dan pengembangan di Amerika Serikat, Jerman, Prancis dan Jepang pada dekade '70-an telah lebih dari 1,5% dari pendapatan nasional bruto. Jumlah ini belum dicapai oleh Indonesia pada awal dekade '90-an.

Bila dana penelitian yang dialokasikan Bappenas melalui kantor MENRISTEK mencapai Rp 650 miliar pada tahun 1993/1994, maka untuk perguruan tinggi dana penelitian melalui Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Ditbinlitabnas) DIKTI baru mencapai sekitar Rp 21,5 miliar. Dana sebesar itu merupakan peningkatan tajam dibandingkan dengan tahun 1988/1989 yang jumlahnya hanya Rp 3,8 miliar. Peningkatan dana penelitian ini terutama karena mulai tersedianya dana pinjaman dari Bank Dunia (RPLN) dan mulai disetujuinya penelitian jangka panjang Hibah Bersaing (HB) melalui rupiah murni. Dari persentase

penggunaan dana 81,4% untuk operasional penelitian, sedangkan sisanya terbagi untuk pengabdian pada masyarakat 3,4%, pembinaan (penataran, seminar) 6,8%, studi pengembangan 1,6% dan pengelolaan (evaluasi, monitoring dan review) 6,8%.

Mengingat dana penelitian yang berkesinambungan baru dimulai 5 - 6 tahun yang lalu, maka bagi banyak perguruan tinggi strategi pembinaan lebih ditekankan pada peningkatan kegairahan dan mutu penelitian. Bidang ilmu yang ditawarkan bagi seluruh bidang. Pada program penelitian jangka panjang kegiatan yang dibiayai juga yang berkaitan dengan orientasi produk.

Keterbatasan dana penelitian di perguruan tinggi termasuk kesinambungannya menyebabkan pada masa yang lalu kegiatan penelitian pada umumnya masih diarahkan untuk menunjang proses belajar-mengajar, kum kenaikan pangkat, dan melaksanakan penelitian “pesanan”. Dengan tersedianya dana berkesinambungan, strategi penelitian diarahkan pula bagi peneliti-peneliti kelompok, berjangka panjang, berorientasi pada produk baik untuk inovasi dan pengembangan iptek maupun untuk membantu memecahkan masalah-masalah pembangunan. Program-program berikut ini merupakan pembinaan kegiatan penelitian yang dapat diikuti oleh dosen di perguruan tinggi.

- (1) Berbagai Bidang Ilmu (BBI). Sesuai judulnya BBI diarahkan untuk dapat membina kemampuan meneliti para dosen dari berbagai bidang ilmu. Kegiatan meningkat tajam, dari usul penelitian yang masuk kurang dari 1000 judul pada tahun 1988/89, pada tahun 1994/95 meningkat menjadi sekitar 3200 judul, sehingga jumlah usul penelitian selama enam tahun mencapai hampir 15000 judul. Pada tingkatan pembinaan ini secara khusus disediakan juga program penelitian bidang Masalah Lingkungan dan Ilmu-ilmu Dasar (Basic Sciences). Dalam pelaksanaannya penelitian masalah lingkungan dikaitkan dengan proyek pengembangan Pusat Studi Lingkungan, dan penelitian Ilmu-ilmu Dasar dikaitkan dengan proyek pengembangan MIPA. Keberhasilan lolos seleksi pada umumnya masih sekitar 30 persen. Seluruh perguruan tinggi memanfaatkan program ini.
- (2) Hibah Bersaing (HB). Program penelitian melalui sumber pendanaan HB dimulai pada tahun 1992/1993 dan ditujukan bagi para dosen perguruan tinggi yang sudah menjadi peneliti produktif. Lama waktu penelitian berjangka panjang (2-5 tahun). Dari penelitian HB diharapkan hasil nyata baik yang berupa inovasi iptek maupun pemecahan masalah pembangunan. Penelitian dasar dan pengembangan ilmu diberi wadah pada program HB. Selama tiga tahun berturut-turut usul-usul penelitian yang masuk berjumlah hampir 2000 judul dengan 344 judul (17%) direkomendasikan untuk dibiayai. Komposisi kegiatan yang dibiayai

8% S1, 28% S2, dan 64% S3. Mengingat HB I sudah berjalan hampir 2 tahun, sudah ada beberapa hasil yang dinilai menonjol dan diharapkan dalam waktu dekat akan berdampak ekonomi maupun akademis.

- (3) Riset Unggulan Terpadu (RUT). Program yang dimulai 1993/94 memberikan kesempatan kepada peneliti yang mampu melaksanakan kegiatan penelitian yang berjangka panjang (2 - 4 tahun). Pendekatannya multi disiplin, dan untuk lebih meningkatkan efisiensi dapat dilaksanakan oleh lebih dari satu lembaga penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah pembangunan sesuai dengan PUNA RISTEK. Hasil dari penelitian dapat berupa bahan, proses, program perangkat lunak, perangkat keras, dan metode analisa yang mempunyai prospek komersial atau dapat dipatenkan, atau produk yang sudah termasuk katagori di atas tetapi merupakan produk yang bersifat strategis, atau pun berupa kebijaksanaan yang dapat diaplikasikan untuk memecahkan masalah nasional. Keterlibatan dosen diperguruan tinggi dalam penelitian RUT mencapai 60 - 70% dari total peneliti. Pendanaan program RUT langsung dikoordinasikan dikantor MENRISTEK.
- (4) Pusat Antar Universitas (PAU). PAU yang dimulai tahun 1986 dikembangkan dalam rangka pembinaan dan pengembangan di dalam bidang tertentu yang memerlukan investasi tinggi baik SDM maupun sarana dan prasarana. PAU meliputi antara lain bidang bio teknologi, ilmu hayati, pangan dan gizi, elektronika, ilmu bahan, sosial, ekonomi. Pembinaannya dikaitkan dengan program Pascasarjana dan ditempatkan di UI, IPB, ITB dan UGM. Biaya yang ditawarkan untuk program penelitian PAU relatif cukup besar dan dapat dilanjutkan untuk tahun-tahun berikutnya. Program penelitian khusus PAU berakhir tahun 1994.
- (5) Program penelitian lain. Pada berbagai proyek pengembangan di DIKTI komponen penelitian pada umumnya mendapat jatah meskipun tidak besar, misalnya proyek pengembangan Indonesia Timur (kerjasama dengan pemerintah Kanada), Proyek Six University Development and Rehabilitation (SUDR), proyek pengembangan sembilan universitas (Outer Islands) pusat rehabilitasi hutan tropika (PUSREHUT), dan lain-lain. Selain itu dalam kerjasama Dikti dengan Balitbang Departemen Pertanian ada kegiatan Applied Agricultural Research Project (AARP) dan Agricultural Management Project (ARMP). Di perguruan tinggi sendiri sering ada penelitian kerja sama dengan institusi lain atau ada pula penelitian “pesanan”. Besar dana biasanya tergantung pada potensi perguruan tinggi, bidang yang diteliti, pihak pemberi dana maupun lama penelitian.

Bantuan Pemerintah kepada PTS diarahkan untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi itu sendiri. PTS harus dapat memainkan peran kemitraan agar dapat memenuhi permintaan lapangan kerja akan lulusan perguruan tinggi yang bermutu. Di samping bantuan langsung dalam arti, misalnya, tenaga dosen merupakan salah satu dari bentuk bantuan Pemerintah yang paling efektif dalam upaya memperbaiki mutu PTS. Bantuan juga diberikan melalui penyediaan informasi yang memadai untuk memberi arahan kepada para mahasiswa dan orangtua mereka dalam menetapkan pilihan untuk memasuki PTS. Pemberian informasi itu dimaksudkan agar memungkinkan mekanisme pasar dapat bekerja lebih efektif dan efisien serta menciptakan insentif bagi PTS untuk meningkatkan usaha mereka dalam meningkatkan mutu pendidikan masing-masing. Hal ini sekaligus mencegah terjadinya gejala yang terjadinya sebaliknya bahwa sebagian besar PTS cenderung lebih berkonsentrasi pada upaya memperbesar daya tampungnya.

Dalam jangka pendek, penekanan juga dilakukan pada upaya mewujudkan suatu perguruan tinggi yang melaksanakan kebijaksanaan Link and Match, dengan cara yang sama seperti yang diuraikan di muka. Untuk itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah mendiskusikannya dengan sejumlah rektor agar mereka melangkah keluar kampus dan ikut serta membangun kehidupan lingkungan sekitar mereka dan memberikan bantuan teknis kepada sejumlah badan usaha industri kecil dan menengah dalam memecahkan permasalahan yang sering dihadapi oleh sejumlah badan usaha. Kemampuan penelitian yang perlu dikembangkan pada perguruan tinggi diarahkan pada kajian-kajian terhadap permasalahan tingkat regional dan lokal. Oleh karena itu setiap usulan penelitian harus dievaluasi, khususnya untuk bagian yang menunjukkan sumbangannya kepada dan kesesuaianya dengan kebutuhan pembangunan daerah yang bersangkutan.

Pembangunan Kebudayaan

Memasuki era tinggal landas yang akan terjadi dalam PJP II, budaya bangsa sebagai perwujudan cipta, rasa, karsa, dan karya bangsa Indonesia yang dilandasi nilai luhur bangsa berdasarkan Pancasila, bercirikan Bhineka Tunggal Ika dan berwawasan Nusantara, harus diupayakan agar senantiasa menjawai perilaku masyarakat dan pelaksanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta membangkitkan sikap kesetiakawanan dan tanggungjawab sosial dan disiplin serta semangat pantang menyerah.

Kebudayaan nasional yang merupakan puncak-puncak kebudayaan daerah harus mengangkat nilai kebudayaan daerah yang luhur, menyaring dan menyerap nilai budaya dari luar yang positif sekaligus menolak nilai-nilai budaya yang merugikan pembangunan dalam upaya menuju ke arah kemajuan adab dan mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Bersamaan

dengan itu pembinaan dan pengembangan Bahasa Indonesia terus ditingkatkan sehingga mampu menjadi wahana komunikasi sosial dan wahana iptek serta seni dalam rangka meningkatkan kualitas manusia, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta memantapkan kepribadian bangsa.

PJP II di bidang kebudayaan dilaksanakan untuk mewujudkan amanat UUD 1945, pasal 32, yaitu untuk mengembangkan kebudayaan nasional, seperti tersebut di dalam Bab II buku ini dan amanat UU No.2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pendidikan nasional berakar pada kebudayaan bangsa. Pembangunan kebudayaan nasional seperti halnya pembangunan pendidikan nasional dilaksanakan dalam rangka menciptakan manusia yang berkualitas yang memiliki ciri khas nasional Indonesia. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan kebudayaan telah ditetapkan pula strategi pokok, rencana dan prioritasnya dengan memperhatikan isu dan tantangan yang dihadapi di masa kini dan kecenderungannya di masa depan yang secara rinci dipaparkan di dalam bagian-bagian berikut ini.

Isu dan Tantangan Pembangunan Kebudayaan

PJP II di bidang kebudayaan nasional Indonesia sebagai kelanjutan upaya mewujudkan amanat konstitusional yang dituangkan dalam UUD 1945, GBHN, dan peraturan perundangan lainnya menghadapi berbagai isu dan tantangan sebagai akibat dari adanya pergeseran yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di balik berbagai keberhasilan, pembangunan kebudayaan nasional dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa masih menghadapi sejumlah masalah yang harus dipecahkan dalam perkembangan dan tuntutan pembangunan dalam PJPT II yang diawali dengan Repelita VI.

Berbagai kecenderungan masa depan, serta masalah yang akan timbul seiring dengan terjadinya perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara nasional, regional maupun global, membangkitkan tantangan yang harus dijawab dalam pembangunan kebudayaan nasional dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tantangan, kendala dan peluang serta kebijaksanaan pembangunan kebudayaan dalam PJPT II adalah sebagai berikut.

Secara umum isu dan tantangan yang dihadapi adalah mewujudkan sistem pembinaan dan pengembangan budaya bangsa yang dapat menunjang pembangunan nasional yang semakin meningkat. Bertolak dari itu, timbul berbagai tantangan yang lebih khusus, yaitu untuk: (1) memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia agar memiliki ketahanan sosial

budaya yang tangguh; (2) meningkatkan dan memperkuat jiwa kesatuan dan persatuan bangsa sebagai prasarat utama menjalankan pembangunan; (3) menciptakan iklim yang mendorong seluruh masyarakat mampu menghargai senibudaya bangsa, menjaga kelestariannya, serta mendorong lahirnya karya seni baru yang bermutu; (4) menumbuhkan dan mengembangkan budaya iptek guna mewujudkan kualitas bangsa Indonesia yang maju dan mandiri serta berkepribadian Indonesia; (5) mengembangkan bahasa Indonesia sehingga mampu menjadi bahasa iptek dan meningkatkan kegiatan penulisan dan penerbitan berbagai ragam buku bermutu, dan (6) mengarahkan pembinaan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pertama, Memperkuat Jati Diri dan Kepribadian Bangsa Agar Memiliki Ketahanan Sosial Budaya yang Tangguh. Sejak Pelita IV dunia dilanda oleh gejolak yang mendasar dalam berbagai aspek kehidupan dan masih akan berlangsung dalam PJPT II mendatang. Interaksi antarbangsa yang didorong oleh pesatnya kemajuan iptek terutama teknologi komunikasi dan transportasi mengakibatkan derasnya arus informasi dan masuk nilai-nilai budaya asing dari luar negeri yang tidak selalu sesuai dengan nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Masuknya nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila dan nilai-nilai luhur lainnya melalui siaran televisi dari luar, film, dan bahan bacaan dari media lain, merupakan ancaman bagi pembangunan budaya nasional. Hal itu dapat mengakibatkan terjadinya pendangkalan nilai-nilai moral dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang pada gilirannya dikuatirkan mengakibatkan terjadinya krisis jati diri dan kepribadian bangsa. Di sisi lain, masyarakat Indonesia belum sepenuhnya mempunyai daya tangkal yang handal dan kemampuan untuk memilih dan memilih berbagai pengaruh dari luar sehingga dampak negatif globalisasi senantiasa dapat dihindari. Dalam kaitan itu, tantangan pertama yang dihadapi dalam pembangunan kebudayaan nasional bagaimana memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia sehingga mempunyai ketahanan sosial budaya yang tangguh dan handal.

Kedua, Meningkatkan dan Memperkuat Jiwa Kesatuan dan Persatuan Bangsa Sebagai Prasarat Utama Menjalankan Pembangunan. Sementara itu, proses pembangunan belum sepenuhnya mampu mengikis dan menangkal paham kedaerahan yang sempit, sikap feudal dan ekslusif serta individualistik. Derasnya urbanisasi yang mengakibatkan padatnya penduduk di perkotaan antara lain menumbuhkan gejala persaingan yang tidak sehat dan budaya negatif lainnya yang pada gilirannya dapat mengakibatkan pertikaian paham dan perpecahan antar anggota dan kelompok masyarakat. Nilai-nilai tersebut tidak sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang menjunjung tinggi gotong royong, kebersamaan, serta silih-asih, silih-asuh, dan silih-asih.

Sementara itu, pembauran sebagai proses pembudayaan bangsa belum sepenuhnya terwujud secara positif dan dijawi sikap mawas diri, tahu diri, tenggang rasa, tanggungjawab dan kesetiakawanan sosial.

Ketiga, Menciptakan Iklim yang Mendorong Seluruh Masyarakat Mampu Menghargai Senibudaya Bangsa, Menjaga Kelestariannya, serta Mendorong Lahirnya Karya Seni Baru yang Bermutu. Masalah lain yang dihadapi dalam pengembangan kebudayaan bangsa adalah masih rendahnya penghayatan masyarakat terhadap kekayaan dan keluhuran nilai seni budaya bangsa terutama seni tradisional. Dewasa ini, bahkan terdapat kecenderungan makin derasnya arus masuk seni budaya asing yang kurang sesuai dengan kepribadian bangsa ke dalam masyarakat. Selain itu, belum meratanya penghargaan terhadap karya cipta seni dan seniman yang mendorong semangat untuk mengembangkan kreativitas seni. Hal itu menyebabkan pula terbatasnya karya seni yang bermutu termasuk karya sastra besar yang dilahirkan. Dalam pembinaan kesenian ini tantangan yang dihadapi sebagai tantangan ketiga adalah menciptakan iklim yang mendorong seluruh masyarakat agar lebih menghargai seni budaya bangsa dan menjaga kelestariannya serta mendorong lahirnya karya seni baru yang bermutu.

Keempat, Menumbuhkan dan Mengembangkan Budaya iptek Guna Mewujudkan Kualitas Bangsa Indonesia yang Maju dan Mandiri serta Berkepribadian Indonesia. Dalam pada itu, dengan semangat kebangkitan nasional kedua dalam masa PJPT II yang pada tingkat global ditandai dengan semakin pesatnya perkembangan iptek diperlukan manusia dan masyarakat Indonesia yang berkualitas, yang mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai iptek dengan tetap mengindahkan nilai nilai agama dan nilai nilai luhur budaya bangsa. Namun, kenyataan menunjukan bahwa sebagian masyarakat Indonesia masih terikat oleh nilai nilai tradisional yang tidak selalu mendukung kesiapan dan kematangan berpikir, bersikap dan bertindak secara terbuka dan maju, menghargai waktu, dan berani bersaing secara sehat. Budaya menulis, membaca, belajar, dan mengakrabkan diri dengan iptek belum tumbuh dengan subur pada sebagian besar masyarakat Indonesia.

Kelima, Mengembangkan Bahasa Indonesia Sehingga Mampu Menjadi Bahasa iptek dan Meningkatkan Kegiatan Penulisan dan Penerbitan Berbagai Ragam Buku Bermutu . Penggunaan dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan cerminan dari berpikir logis dan sistematis sehingga dapat medukung upaya menumbuhkembangkan budaya iptek. Kenyataan menunjukan bahwa bahasa Indonesia belum sepenuhnya digunakan masyarakat dengan baik dan benar serta dengan penuh rasa bangga. Menurut sensus penduduk tahun 1990, dari penduduk usia lima

tahun ke atas hanya sekitar 15% yang telah menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari hari, sekitar 17% yang tidak memahami bahasa Indonesia, dan 68% yang telah memahami tetapi tidak menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari hari. Selain itu juga ada keterbatasan dalam penerjemahan dan penulisan buku ilmiah, baik jumlah maupun mutunya.

Keenam, Mengarahkan Pembinaan Penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pembinaan kehidupan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah berhasil meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan telah dapat membina kerukunan antar dan antara sesama umat beragama dan antar dan antara sesama penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Namun demikian, masih terdapat kesulitan dalam membina para penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar bersikap tertutup dan tidak mengarah kepada pembentukan agama baru serta sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Strategi Pokok Pembangunan Kebudayaan Dalam PJP II

Dengan memperhatikan isu dan tantangan tersebut di atas, telah ditetapkan dua strategi pokok pembangunan kebudayaan dalam PJP II sebagai perwujudan amanat UUD 1945 dan GBHN 1993, yaitu (1) pelestarian; dan (2) pengembangan yang saling berkait satu dengan yang lainnya. Pelestarian dilakukan terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa yang terkandung dalam kesenian, tradisi, bahasa, sastra, serta peninggalan sejarah dan purbakala. Semuanya itu adalah kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu perlu dilestarikan sehingga dapat menumbuhkan dan memperkuat rasa cinta tanah air dan kebanggaan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa, serta sekaligus memberikan warna jati diri dan kepribadian bangsa. Pelestarian mencakup serangkaian fungsi, yaitu memelihara, membina dan mengembangkan nilai-nilai positif dan mengikis nilai-nilai negatif dengan menggunakan acuan Pancasila sebagai falsafah hidup bermasyarakat dan berbangsa bagi rakyat Indonesia.

Selanjutnya pengembangan nilai-nilai baru yang tidak bertentangan dengan Pancasila perlu dilakukan sebagai upaya memperkaya budaya bangsa dan memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa. Pelestarian dan pengembangannya dalam kenyataannya harus dilaksanakan secara serasi dan seimbang. Salah satu bentuk ramuan dari upaya pelestarian dan pengembangan budaya bangsa menuju kualitas bangsa yang maju dan mandiri bercirikan kepribadian Indonesia yang mampu menjawab tantangan gerak pembangunan adalah dalam pengembangan: iptek; budaya baca, tulis, belajar, dan bersaing dengan sehat yang dilandasi

Prioritas pembangunan kebudayaan dalam PJP II meliputi pembinaan nilai-nilai budaya; kebahasaan, kesastraan dan kepustakaan; kesenian; tradisi, peninggalan sejarah, dan permuseuman; serta penganut kepercayaan terhadap Tuhan YM.E

oleh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kesetiakawanan sosial, dan rasa kebersamaan, taat azas, serta kedisiplinan.

Atas landasan strategi pokok tersebut, diupayakan untuk menghadapi berbagai tantangan dan kendala dengan menyusun rencana dan prioritas pembangunan kebudayaan dalam PJP II seperti digambarkan pada bagian berikut ini.

Prioritas Pembangunan Kebudayaan Dalam PJP II

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kebudayaan sesuai dengan arahan GBHN, maka dalam PJPT II disusun prioritas yang mengarah pada upaya yang bersifat pelestarian dan pengembangan, yang meliputi bidang-bidang: (1) pembinaan dan pengembangan nilai-nilai budaya; (2) pembinaan kebahasaan, kesastraan, dan kepustakaan; (3) pembinaan kesenian; (4) pembinaan tradisi, peninggalan sejarah, dan permuseuman; dan (5) pembinaan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang diuraikan sebagai berikut.

Pembinaan dan Pengembangan Nilai-nilai Budaya.

Upaya pembinaan dan pengembangan nilai-nilai luhur budaya bangsa terus ditingkatkan dalam rangka memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa antara lain melalui identifikasi peranan budaya sebagai pembentuk jati diri bangsa dan pengembangan nilai-nilai budaya yang melandasi kreativitas, keberadaban, budi pekerti dan akhlak mulia, tata krama, disiplin nasional, serta tanggungjawab dan kesetiakawanan sosial. Selain itu, terus ditingkatkan upaya membentuk masyarakat yang mempunyai sikap menghargai waktu disiplin dan etos kerja produktif, mampu bekerja keras, dan berpikir kreatif melalui pendidikan sejak dulu, baik di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai budaya bangsa, dilakukan upaya memperkaya pengetahuan budaya peserta didik terutama pada tingkat pendidikan dasar melalui pengkajian dan penerapan materi bahan pengajaran, disertai dengan pengadaan buku pegangan bagi guru dan bahan bacaan untuk peserta didik yang bersumber pada adat istiadat, norma-norma, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Penyebarluasan informasi kebudayaan yang didukung dengan suatu sistem pengolahan informasi yang andal terus dilakukan sehingga mampu menyediakan informasi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien sehingga setiap saat dapat memberikan layanan informasi kebudayaan untuk berbagai kepentingan nasional, regional dan internasional. Dalam penyebarluasan informasi kebudayaan tersebut juga

dikembangkan komunikasi pemikiran budaya yang diarahkan untuk mempersiapkan pengembangan suatu pranata budaya masyarakat industri bagi warga negara Indonesia. Dalam hal itu, peran lembaga komunikasi baik pemerintah maupun masyarakat terus didorong dan ditingkatkan sehingga dapat menjalankan fungsinya secara sungguh-sungguh dalam memelihara dan mengembangkan peradaban bangsa sebagai pembentuk jati diri bangsa.

Kerjasama dan koordinasi antar lembaga baik pemerintah maupun swasta secara nasional, regional, dan internasional ditingkatkan terutama untuk meningkatkan citra budaya bangsa yang luhur dengan meningkatkan fungsi berbagai kekayaan budaya bangsa untuk mendukung pembangunan.

Pembauran bangsa yang dilakukan melalui segenap bidang kehidupan dalam rangka memperluas cakrawala dan aspirasi budaya bangsa dan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa terus dibina dan dipacu ke arah yang positif dan dijuluki sikap mawas diri, tahu diri, tenggang rasa, solidaritas sosial ekonomi serta tanggungjawab yang tinggi terhadap kebersamaan dan kesetiakawanan dalam upaya memajukan dan menyejahterakan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Pelaksanaannya terus diarahkan untuk mencegah dan menghilangkan melebaran kesenjangan ekonomi dan sikap eksklusif serta untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka memantapkan perwujudan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Pembinaan Kebahasaan, Kesastraan, dan Kepustakaan

Bahasa Indonesia sebagai pembentuk jati diri bangsa, baik sebagai bahasa resmi maupun sebagai bahasa nasional yang merupakan sarana komunikasi serta sarana pengembangan ilmu pengetahuan dibina dan dikembangkan. Masalah yang dihadapi dalam pembinaan kebahasaan, kesastraan dan kepustakaan adalah kurangnya tenaga teknis kebudayaan dan perpustakaan baik jumlah maupun mutunya, berikut sarana dan prasarana untuk mengembangkan kebudayaan dan perpustakaan.

Untuk memecahkan masalah yang masih kendala tersebut dalam PJP II dilaksanakan upaya yang dilakukan antara lain: pemasyarakatan pemakaian bahasa Indonesia dengan baik dan benar di berbagai lapisan masyarakat dan Instansi baik pemerintah maupun swasta. Di samping itu, penggunaan bahasa dan sastra daerah sebagai bagian dari pengetahuan budaya dilestarikan guna memperkaya khasanah budaya bangsa. Sehubungan dengan itu, diupayakan pengembangan mata ajaran bahasa dan sastra daerah dalam kurikulum pendidikan terutama pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Pembinaan dan pengembangan sastra Indonesia sebagai salah satu sumber falsafah bangsa dalam rangka meningkatkan penghargaan masyarakat

terhadap nilai budaya luhur lama dan baru demi pengembangan kebudayaan nasional terus ditingkatkan. Pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra daerah ditingkatkan untuk memperkaya perbendaraan bahasa dan sastra Indonesia dan khasanah kebudayaan nasional sebagai salah satu unsur jati diri dan kepribadian bangsa. Dalam rangka itu, didorong dan ditingkatkan partisipasi tenaga ahli dan masyarakat dalam usaha pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah.

Kemampuan penguasaan bahasa asing sebagai wahana penyerapan dan penguasaan iptek serta untuk memperluas cakrawala pandang bangsa sejalan dengan kebutuhan pembangunan ditingkatkan melalui jalur sekolah dan luar sekolah. Dampak negatif penggunaan bahasa asing terhadap pembinaan bahasa Indonesia dihindari antara lain dengan cara menghindarkan pemakaian kata ataupun istilah asing yang telah mempunyai padanan bahasa Indonesia dan menertibkan pemakaian bahasa asing agar sesuai dengan tempat dan kebutuhan.

Kesempatan membaca buku bagi masyarakat diperluas sehingga mendukung upaya mewujudkan masyarakat yang gemar membaca dan belajar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa menuju terwujudnya masyarakat yang makin berbudaya tinggi, maju, dan mandiri. Sehubungan dengan itu, kepustakaan dan perpustakaan terus ditingkatkan agar lebih merata dan bermutu dan menjangkau segenap lapisan masyarakat termasuk masyarakat dipedesaan. Upaya meningkatkan mutu perpustakaan dilakukan untuk semua jenis perpustakaan antara lain dengan meningkatkan jumlah dan mutu perpustakaan dan mengembangkan kerjasama antar perpustakaan serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan perpustakaan. Selain itu, diversifikasi fungsi perpustakaan dikembangkan dalam rangka mewujudkan perpustakaan sebagai tempat yang menarik terutama bagi anak dan remaja untuk belajar dan mengembangkan kreativitas.

Sehubungan dengan kegiatan-kegiatan di atas, maka penerjemahan berbagai buku kebudayaan dan iptek berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia serta penerjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa asing ditingkatkan guna meningkatkan wawasan budaya dan penguasaan iptek serta memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada negara lain.

Pembinaan dan Pengembangan Kesenian

Pembinaan dan pengembangan kesenian diarahkan pada upaya menumbuhkan daya cipta kreatif yang dapat memperkaya khasanah kebudayaan nasional dalam rangka memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa, meningkatkan kebanggaan nasional, mengungkapkan kehalusan perasaan dan keindahan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Masalah besar yang

masih menjadi kendala dalam pembinaan kesenian Indonesia adalah masih rendahnya apresiasi anak dan remaja termasuk sebagai masyarakat dewasa pada umumnya terhadap kesenian tradisional Indonesia. Masyarakat cenderung lebih mencintai kesenian asing ketimbang kesenian bangsa sendiri.

Kesenian daerah terutama yang hampir punah dibina dengan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kesenian daerah dalam rangka melestarikan dan mengembangkan seni budaya bangsa. Dalam pada itu, pembinaan dan pengembangan kesenian masa kini diarahkan agar berakar kuat pada budaya luhur bangsa.

Pendidikan kesenian sebagai wahana untuk menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan menanamkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan nasional dilakukan melalui pendidikan sekolah, pameran dan pementasan karya-karya seni dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat secara aktif dan kreatif. Peran serta masyarakat termasuk dunia usaha dalam membina dan mengembangkan kesenian didorong dan ditingkatkan.

Dalam pada itu, pembinaan terhadap organisasi dan lembaga kesenian yang tumbuh di masyarakat ditingkatkan dan diarahkan untuk menghasilkan karya seni bermutu dalam rangka memperkaya budaya bangsa. Upaya meningkatkan citra kesenian Indonesia sebagai penunjang program kepariwisataan dan diplomasi bermatra kebudayaan dilakukan antara lain melalui penyebarluasan informasi kesenian ke luar negeri dan tukar menukar misi kesenian dengan negara lain.

Pembinaan Tradisi, Peninggalan Sejarah, dan Permuseuman

Upaya melestarikan dan melindungi berbagai bukti peninggalan sejarah dan kepurbakalaan sebagai kekayaan budaya dan kebanggaan nasional ditingkatkan antara lain melalui pengamalan dan perlindungan benda cagar budaya dari kemungkinan pengrusakan, pencurian, penyelundupan dan perdagangan benda tersebut. Masalah yang masih menjadi kendala adalah sulitnya upaya penggalian, pengkajian, dan pelestarian benda cagar budaya, untuk benda cagar budaya dan situs yang berada di daerah pedalaman yang terpencil. Untuk itu, mengatasi masalah itu kerjasama antar lembaga pemerintah dan swasta di dalam dan di luar negeri terus dikembangkan.

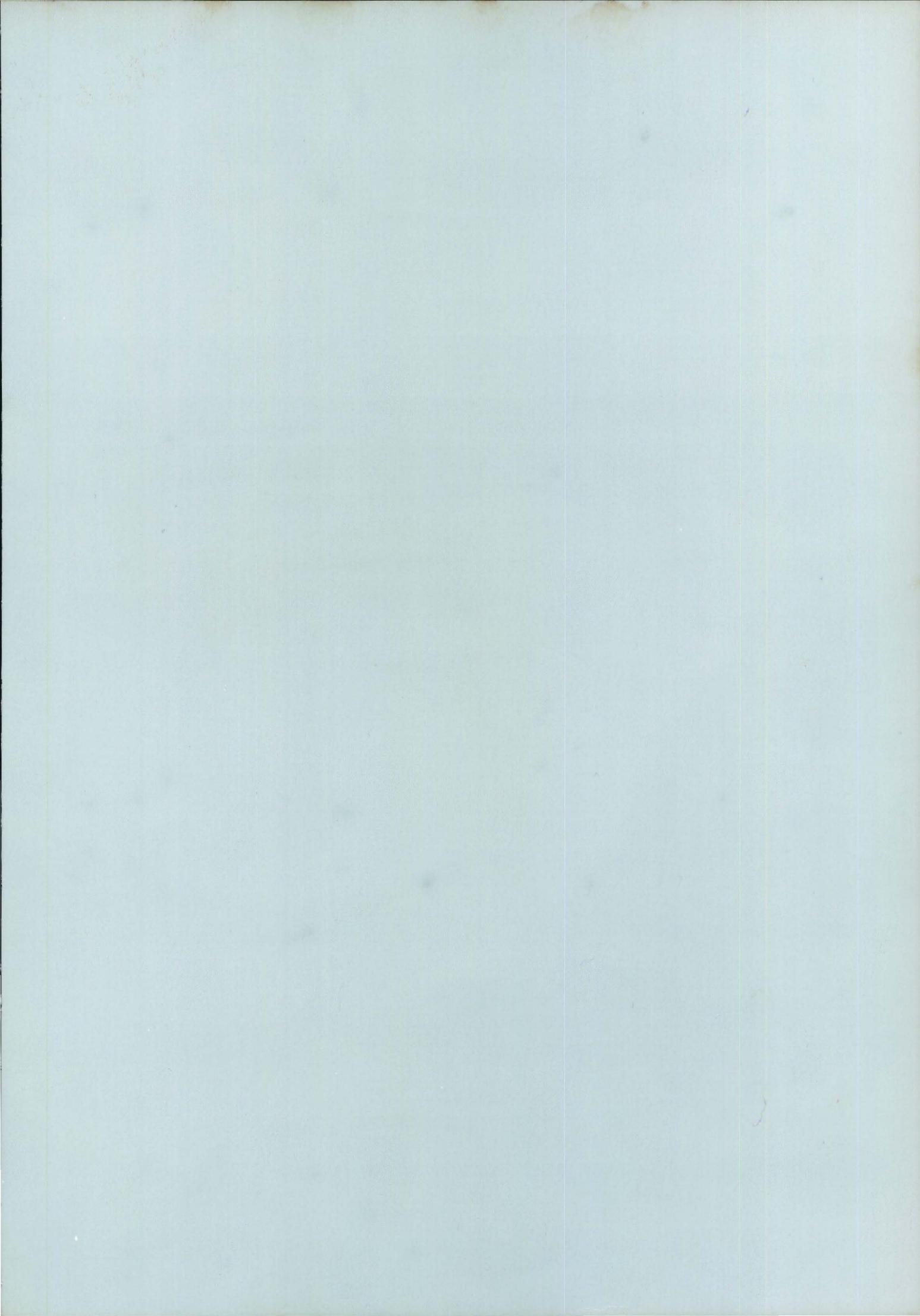
Fungsi dan peranan museum dikembangkan tidak hanya menjadi tempat penyimpan benda peninggalan sejarah dan kepurbakalaan, tetapi juga sebagai wahana penelitian dan pendidikan budaya serta pengenalan dan pemahaman mengenai jati diri bangsa terutama bagi generasi muda. Museum iptek juga dikembangkan dalam rangka penanaman dan pengembangan budaya iptek sejak dulu.

Guna mengembangkan jiwa kejuangan dan kebanggaan naional serta semangat cinta tanah air dilakukan perekaman, penulisan, dan penyebarluasan peristiwa perjuangan dalam sejarah dan biografi para tokoh sejarah serta penulisan bahan ajaran sejarah yang mencerminkan nilai-nilai perjuangan untuk keperluan pendidikan baik di sekolah maupun luar sekolah.

Pembinaan Terhadap Penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ditujukan agar tidak mengarah kepada pembentukan agama baru dan untuk mengefektifkan pengambilan langkah-langkah agar pelaksanaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berlangsung menurut dasar-dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Masalah yang menjadi kendala dalam pembinaan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masih terdapat sikap ketertutupan untuk memberikan informasi guna keperluan pembinaan.

Oleh karena itu pembinaan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan dalam rangka upaya peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemeliharaan kerukunan antar dan antara penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta lebih meningkatkan kesadaran dan peran aktif penganut akan tanggungjawabnya untuk secara bersama-sama memperkuat landasan spiritual, moral, dan etik bagi pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.







DAFTAR PUSTAKA

- APEID. 1992. **New Directions in Technical and Vocational Education**, Unesco Principal Regional Office for Asia and The Pasific. Bangkok.
- Ananta, Aris. 1991. **"Projection of Indonesia Population: 1990-2020"**. Jakarta: Lembaga Demografi FE-UI.
- Biro Pusat Statistik. 1991. **"Sensus Penduduk 1990"**
- Cahyana, Ade. 1991. **Quality and Efficiency of Vocational Education in Indonesia**, EPP-USAID.
- Djojonegoro, Wardiman.
1992. "Pendidikan dan Produktivitas Industri".
Makalah Utama di Medan, Konvensi Nasional Pendidikan di Indonesia.
- 1993. Referensi Kumpulan Pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, April - Desember.*
- 1994. "Strategi Pendidikan Kejuruan dalam Pengembangan Dunia Usaha Kecil dan Menengah yang Kompetitif".* Makalah pada Seminar Nasional The 21st International Small Busines Congres. Jakarta.
- 1994. " Piorities in Human Resource Development: An education perspective"* A presentation made at meeting with Mr. Lewis T. Preston, President of the World Bank at the National Development Planning Agency (BAPPENAS). Jakarta.
- 1993. "Human Resources and Education Policy"*, at the Second Economics Conferences' Roundtable with the Government of the Republic of Indonesia. Jakarta.
- 1994. Welcome Addres at Opening Ceremony of the 29th SEAMEC Conferences Indonesia, 2-4 February 1994.* Jakarta.
- 1994. "Issues and Challenges in Educational Development: Cooperation and Linkages"*, at the Thematic Symposium, 29th Conference of the Southeast Asian Ministers of Education Council (SEAMEC) Indonesia, February 2-4, 1994. Yogyakarta.
- 1993. "Ministry of Education and Culture Republic of Indonesia"*, at the Plenary Session 27th General Conference of UNESCO. Paris.
- 1994. "Plans and Priorities for Educational Development"*, at the Donor Coordination Meeting on Education Jakarta, February 15-16, 1994.
- 1993. Kebijakan dan Strategi Pendidikan dan Kebudayaan (disampaikan pada Rapat Pleno BPPN, 1 Juli 1993).* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Depdikbud. 1993 **Link and Match**. Seri Kebijaksanaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Departemen P dan K.

Hasibuan, Sayuti. 1988. **"Population, Human Resource, and Development : A Policy Perspectives"**. Jakarta, Bappenas Kertas Kerja 23 September 1988.

1992. **"Strategi Pendidikan Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Manusia"**. Ceramah pada Simposium Nasional tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia Memasuki Abad XXI di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 19 November 1992.

Ortleb, Rainer. 1992. **Vocational Training in the Dual System: An Investment in the Future**. The Federal Minister for Education and Science.

1992. **Vocational Training Promotion Act**. The Federal Minister for Education and Science.

PT. Pindad. 1988. **Masterplan Training Program for PT. PINDAD (Persero) Bandung**. Bandung: PT. Pindad Persero.

Pusat Informatika. (beberapa tahun). **Statistik Persekolahan**. Jakarta: Balitbang Dikbud.

Schielbein, Ernesto, Joseph Farrel. 1982. **"Eight Years of their Life; Through Schooling to the Labor Market in Chile"**. Ottawa. Canada. IDRC.

Suryadi, Ace. 1992. **"Ekonomi, Ketenagakerjaan, dan Pengangguran Tenaga Kerja Terdidik"**. Makalah pada Seminar Dua Hari Perkembangan Ekonomi dan Kualitas Penduduk yang diselenggarakan oleh ISEI-LDUI.

1993. **Keterkaitan dan Keselarasan antara Struktur Angkatan Kerja Keluaran Pendidikan dengan Struktur Kesempatan Kerja Menurut Pendidikan**. Jakarta: Pusat Informatika, Balitbang-Dikbud.

Depdikbud. 1994. **Rancangan Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam 1994/95 - 1998/99**, Buku IV. Jakarta.

LAMPIRAN TABEL BAB I

Tabel 1.1
Perubahan Struktur Ekonomi dan Lapangan Kerja
Tahun 1980-1990

Sektor	<i>(dalam %)</i>					
	1980		1985		1990	
	Ekonomi	L. Kerja	Ekonomi	L. Kerja	Ekonomi	L. Kerja
1. Pertanian	23.10	56.30	22.68	54.72	19.58	50.01
2. Pertambangan	26.16	00.76	18.19	00.67	15.19	1.03
3. Industri Pengolahan	12.41	9.14	15.79	9.29	19.30	11.60
4. Listrik, Gas dan Air	00.26	00.13	00.42	00.11	00.63	00.21
5. Bangunan	5.42	3.24	5.30	3.36	5.82	4.01
6. Perdagangan	13.60	13.04	14.57	14.98	16.15	14.95
7. Pengangkutan	4.42	2.87	5.27	3.14	5.54	3.76
8. Lembaga Keuangan	4.91	00.59	6.44	00.40	6.74	00.76
9. Jasa-jasa	9.72	13.93	11.34	13.33	11.05	13.67
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

*Sumber : Kelompok PSDM (1992) Studi Profil Pendidikan dan Pengembangan Sumber daya Manusia
 Kelompok Kerja PSDM Bappenas, Depdikbud, Depnaker dan BPS.*

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Usia Sekolah di Indonesia
Tahun 1990 - 2020

Umur	Pendidikan	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020
1. 7-12 th.	SD	26063296	25390263	25422075	25395270	24517473	23629216	22982925
2. 13-15 th.	SLTP	12797954	12906180	12623384	12687429	12658942	12128872	11793922
3. 16-18 th.	SLTA	10503517	12107320	12775497	12559712	12532059	12601488	12273927
4. 19-24 th.	PT	20662968	23922582	25657293	25139558	25005594	25186464	24708537
Jumlah	-	70027735	74326345	76478249	75781969	74714068	73546040	71759311

Sumber : Lembaga Demografi UI, 1991

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Menurut Umur di Indonesia
Tahun 1990 - 2020

Umur	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020	(dalam ribuan)
1. < 5 th.	21552	21696	21391	20451	18970	17255	15457	
2. 5-9 th.	21408	21147	21353	21105	20220	18786	17111	
3. 10-14 th.	21761	21262	21022	21242	21010	20138	18717	
4. 15-19 th.	19919	21584	21109	20888	21120	20901	20044	
5. 20-24 th.	16910	19683	21355	20908	20709	20956	20754	
6. 25-29 th.	14793	16665	19427	21106	20687	20510	20774	
7. 30-34 th.	13098	14551	16422	19172	20854	20464	20309	
8. 35-39 th.	10801	12845	14300	16165	18898	20583	20221	
9. 40-44 th.	8868	10541	12564	14015	15868	18576	20258	
10. 45-49 th.	7677	8584	10231	12221	13657	15486	18154	
11. 50-54 th.	6628	7335	8225	9829	11767	13173	13523	
12. 55-59 th.	5508	6205	6889	7748	9283	11142	11430	
13. 60-64 th.	4360	4993	5648	6292	7099	8533	9028	
14. 65-69 th.	3213	3754	4321	4910	5493	6220	6343	
15. 70-74 th.	2172	2546	2996	3469	3962	4452	5042	
16. 75 atau >	1714	2271	2809	3396	4030	4704	5399	
Jumlah	180382	195662	210062	222917	233627	241879	242564	

Sumber : Lembaga Demografi UI, 1991

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Umur di Indonesia
Tahun 1990 - 2020

Umur	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020	(dalam ribuan)
1. < 5 th.	10,591	10,651	10,493	10,025	9,293	8,448	7,564	
2. 5-9 th.	10,461	10,402	10,492	10,360	9,918	9,208	8,381	
3. 10-14 th.	10,588	10,393	10,344	10,441	10,317	9,881	9,177	
4. 15-19 th.	9,786	10,507	10,324	10,284	10,387	10,270	9,841	
5. 20-24 th.	8,605	9,681	10,407	10,237	10,207	10,317	10,208	
6. 25-29 th.	7,754	8,490	9,566	10,297	10,139	10,119	10,237	
7. 30-34 th.	6,813	7,633	8,372	9,446	10,180	10,035	10,024	
8. 35-39 th.	5,455	6,688	7,507	8,247	9,317	10,053	9,921	
9. 40-44 th.	4,399	5,334	6,552	7,368	8,105	9,169	9,905	
10. 45-49 th.	3,837	4,275	5,195	6,392	7,199	7,930	8,982	
11. 50-54 th.	3,362	3,690	4,121	5,018	6,185	6,976	7,695	
12. 55-59 th.	2,842	3,180	3,500	3,919	4,782	5,906	6,673	
13. 60-64 th.	2,281	2,616	2,938	3,244	3,642	4,456	5,516	
14. 65-69 th.	1,690	2,004	2,309	2,605	2,887	3,253	3,992	
15. 70-74 th.	1,157	1,374	1,639	1,899	2,153	2,397	2,711	
16. 75 atau >	951	1,267	1,583	1,937	2,310	2,690	3,068	
Jumlah	90,572	98,185	105,342	111,719	117,021	121,108	123,895	

Sumber : Lembaga Demografi UI, 1991

Tabel 1.5
Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Umur di Indonesia
Tahun 1990 - 2020

Umur	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020	(dalam ribuan)
1. < 5 th.	10,961	11,045	10,898	10,426	9,677	8,807	7,893	
2. 5-9 th.	10,947	10,745	10,861	10,745	10,302	9,578	8,730	
3. 10-14 th.	11,173	10,869	10,678	10,801	10,693	10,257	9,540	
4. 15-19 th.	10,133	11,077	10,785	10,604	10,733	10,631	10,203	
5. 20-24 th.	8,305	10,002	10,948	10,671	10,502	10,639	10,546	
6. 25-29 th.	7,039	8,175	9,861	10,809	10,548	10,391	10,537	
7. 30-34 th.	6,285	6,918	8,050	9,726	10,674	10,429	10,285	
8. 35-39 th.	5,346	6,157	6,793	7,918	9,581	10,530	10,300	
9. 40-44 th.	4,469	5,207	6,012	6,647	7,763	9,407	103,53	
10. 45-49 th.	3,840	4,309	5,036	5,829	6,458	7,556	9,172	
11. 50-54 th.	3,266	3,645	4,104	4,811	5,582	6,197	7,265	
12. 55-59 th.	2,666	3,025	3,389	3,829	4,501	5,236	5,828	
13. 60-64 th.	2,079	2,377	2,710	3,048	3,457	4,077	4,757	
14. 65-69 th.	1,523	1,750	2,012	2,305	2,606	2,967	3,512	
15. 70-74 th.	1,015	1,172	1,357	1,570	1,809	2,055	2,351	
16. 75 atau >	763	1,004	1,226	1,459	1,720	2,014	2,331	
Jumlah	89,810	97,477	104,720	111,198	116,606	120,771	123,603	

Sumber : Lembaga Demografi UI, 1991

Tabel 1.6
**Struktur Angkatan Kerja Indonesia Menurut
Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan (%)**

Tingkat Pendidikan	1980 1)	1982 2)	1985 3)	1986 4)	1987 5)	1990 6)	1992 7)
1. Tidak Sekolah	29.48	26.46	21.32	18.48	16.94	17.23	12.95
2. Tidak Tamat SD	37.51	32.73	33.92	29.93	28.15	27.50	24.65
3. Tamat SD	21.26	27.18	27.41	33.26	34.43	31.54	36.65
4. Tamat SMP	4.02	4.69	5.79	6.82	7.62	8.30	9.48
5. SLTP Kejuruan	1.15	1.47	1.43	1.32	1.32	0.87	1.49
6. Tamat SMU	2.47	2.7	4.04	6.67	6.81	6.55	6.78
7. Tamat SMK	3.28	3.9	4.77	6.76	6.94	5.63	5.72
8. PT Prog. Diploma	0.43	0.51	0.78	1.12	1.19	2.21	1.23
9. PT Prog. S1	0.38	0.35	0.54	0.48	0.77	1.17	1.05
Total (%)	100.00						

Sumber: 1) Sensus Penduduk, 1980; 2) SUSENAS, 1982; 3) SUPAS, 1985; 4) SAKERNAS, 1986; 5) SAKERNAS, 1987; 6) Sensus Penduduk, 1990; 7) SAKERNAS, 1992.

Tabel 1.7
Risiko Ketergantungan di Indonesia
Tahun 1990 - 2020

Tahun	Jumlah Penduduk (dalam ribuan)			Rasio Ketergantungan (%)		
	0 - 14	15 - 64	65 >	Total	Muda	Tua
1990	64,721	108,564	7,099	66.15	59.61	6.54
1995	64,058	123,098	8,599	59.02	52.03	6.99
2000	63,574	136,482	10,207	54.06	46.58	7.48
2005	62,500	148,946	11,937	49.84	41.83	8.01
2010	60,547	160,813	13,751	46.20	37.65	8.55
2015	58,228	171,382	15,778	43.18	33.97	9.21
2020	55,779	179,339	18,549	41.45	31.11	10.34

Sumber : Lembaga Demografi FEUI, 1992

LAMPIRAN TABEL BAB II

Tabel 2.1
Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Taman Kanak-Kanak
Tahun 1969—1992/93

Tahun	Sekolah	Murid	Guru	Rasio		
				M/S	M/G	G/S
69	6,072	343,466	10,523	56.57	32.64	1.73
70	9,220	394,100	15,030	42.74	26.22	1.63
71	9,779	387,490	16,780	39.62	23.09	1.72
72	10,345	410,409	16,825	39.67	24.39	1.63
73	10,482	392,016	16,868	37.40	23.24	1.61
74	12,429	506,913	21,202	40.78	23.91	1.71
75	12,795	525,775	22,203	41.09	23.68	1.74
76	13,575	579,876	24,503	42.72	23.67	1.81
77	14,840	674,292	27,223	45.44	24.77	1.83
78/79	16,026	754,497	29,356	47.08	25.70	1.83
79/80	17,688	894,915	33,030	50.59	27.09	1.87
80/81	18,986	983,307	36,471	51.79	26.96	1.92
81/82	20,259	984,406	39,578	48.59	24.87	1.95
82/83	22,056	1,141,215	42,688	51.74	26.73	1.94
83/84	23,836	1,220,686	46,228	51.21	26.41	1.9
84/85	25,372	1,233,793	56,489	48.63	21.84	2.23
85/86	26,419	1,258,468	58,341	47.63	21.57	2.21
86/87	28,444	1,268,470	68,333	44.60	18.56	2.40
87/88	33,593	1,510,321	79,953	44.96	18.89	2.38
88/89	36,190	1,544,541	81,426	42.68	18.97	2.25
89/90	37,756	1,568,450	91,714	41.54	17.10	2.43
90/91	39,121	1,604,208	92,367	41.01	17.37	2.36
91/92	39,284	1,614,715	93,429	41.10	17.28	2.38
92/93	40,257	1,660,295	94,416	41.24	17.58	2.35

Sumber: Pusat Informatika, Balitbang Dikbud.

Tabel 2.2a
**Jumlah Sekolah, Murid Baru Tingkat I, Murid, Lulusan, Guru dan
Ruang Kelas Sekolah Dasar (SD)
Tahun 1969—1992/93**

Tahun	Sekolah	Murid Baru			R. Kelas		
		Tingkat I	Murid	Lulusan	Guru	Milik	
69	63,056	2,405,475	12,802,415	...	323,200	...	
70	64,040	2,431,984	12,819,840	...	397,500	...	
71	64,335	2,472,660	12,896,147	...	4147,99	...	
72	65,227	2,489,094	13,030,548	994,117	413,413	...	
73	65,910	2,510,511	13,069,456	1,221,013	427,211	...	
74	72,122	2,722,369	13,707,866	1,139,050	444,241	..	
75	73,589	2,973,602	14,280,157	1,180,055	472,698	...	
76	80,261	3,435,375	15,550,124	1,242,761	514,912	...	
77	83,590	3,730,935	17,265,291	1,358,262	551,927	...	
78/79	92,499	4,078,477	19,074,819	1,453,213	592,439	407,504	
79/80	98,248	4,930,739	21,165,724	1,569,814	619,772	459,519	
80/81	105,645	4,350,750	22,551,870	1,795,778	666,779	498,248	
81/82	110,050	4,482,050	23,862,488	2,027,754	713,222	551,391	
82/83	120,162	4,313,433	24,742,275	2,300,372	841,833	625,390	
83/84	129,388	4,490,319	25,804,380	2,508,102	925,834	701,645	
84/85	136,706	4,470,807	26,567,688	2,924,003	986,638	755,375	
85/86	139,511	4,192,764	26,550,915	3,289,390	1,037,174	785,817	
86/87	142,966	4,321,264	26,444,756	3,359,183	1,078,597	813,808	
87/88	144,561	4,538,855	26,649,890	3,340,715	1,107,100	829,941	
88/89	145,571	4,542,234	26,725,364	3,389,548	1,134,089	846,562	
89/90	146,558	4,378,219	26,528,590	3,355,733	1,141,486	842,813	
90/91	147,066	4,254,678	26,348,376	3,336,590	1,136,907	846,173	
91/92	147,683	4,247,301	26,325,701	3,213,780	1,141,032	849,423	
92/93	148,257	4,238,663	26,339,995	3,283,931	1,153,816	851,174	

Catatan: ... Data tidak tersedia

Sumber: *Pusat Informatika, Balitbang Dikbud.*

Tabel 2.2b
Perkembangan Sekolah, Murid, dan Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI)
Tahun 1989/90—1992/93

Tahun	Sekolah			Murid			Guru		
	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah
1989/90	535	20,829	21,364	107,427	2,660,097	2,767,524	15,777	75,480	91,257
1990/91	558	21,593	22,151	119,472	2,940,930	3,060,402	16,639	102,118	118,757
1991/92	598	22,499	23,097	130,042	3,121,961	3,252,003	17,212	102,845	120,057
1992/93	599	22,599	23,198	130,313	3,128,482	3,258,795	17,547	104,854	122,401

Sumber : Pusat Informatika Balitbang Dikbud

**Tabel 2.3
Perkembangan Sekolah, Murid, dan Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs)
Tahun 1989/90—1992/93**

Tahun	Sekolah			Murid			Guru		
	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah
1989/90	580	6,030	6,610	221,388	705,091	926,479	13,265	57,916	71,181
1990/91	609	6,660	7,269	232,006	753,520	985,526	13,396	61,594	74,990
1991/92	636	6,740	7,376	241,449	811,082	1,052,531	15,356	60,982	76,338
1992/93	647	6,879	7,526	267,229	897,671	1,164,900	15,851	62,950	78,801

Sumber : Pusat Informatika Balitbang Dikbud

Tabel 2.4
**Susunan Program Pengajaran pada Kurikulum Pendidikan Dasar
 (SD dan SLTP)**

No.	Mata Pelajaran	SD						SLTP		
		I	II	III	V	V	VI	I	II	III
1.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.	Pendidikan Agama	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3.	Bahasa Indonesia	10	10	10	8	8	8	6	6	6
4.	Matematika	10	10	10	8	8	8	6	6	6
5.	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	-	-	3	6	6	6	6	6	6
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	-	-	3	5	5	5	6	6	6
7.	Kerajinan Tangan dan Kesenian	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8.	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9.	Bahasa Inggris	-	-	-	-	-	-	4	4	4
10.	Muatan Lokal (sejumlah mata pelajaran)	2	2	4	5	7	7	6	6	6
Jumlah		30	30	38	40	42	42	42	42	42

Sumber : Pusat Pengembangan Kurikulum Balitbang Dikbud

Tabel 2.5a
Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)
Tahun 1969—1992/93

Tahun	Sekolah	Murid	Guru	Rasio		
				M/S	M/G	G/S
69	2,072	462,777	38,757	223.35	11.94	18.71
70	2,668	598,110	49,725	224.18	12.03	18.64
71	2,699	651,671	55,756	241.45	11.69	20.66
72	2,820	664,612	60,790	235.68	10.93	21.56
73	2,843	683,945	61,043	240.57	11.20	21.47
74	2,891	723,643	61,566	250.31	11.75	21.30
75	3,030	795,423	64,514	262.52	12.33	21.29
76	3,192	933,033	69,288	292.30	13.47	21.71
77	3,360	1,108,079	75,772	329.79	14.62	22.55
78/79	3,681	1,290,044	85,939	350.46	15.01	23.35
79/80	4,534	1,573,594	102,754	347.07	15.31	22.66
80/81	4,901	1,751,015	127,114	357.28	13.78	25.94
81/82	5,733	2,022,085	139,628	352.71	14.48	24.36
82/83	5,973	2,261,242	157,620	378.58	14.35	26.39
83/84	6,774	2,588,100	179,947	382.06	14.38	26.56
84/85	7,337	2,855,502	195,627	389.19	14.60	26.66
85/86	8,101	3,130,844	217,822	386.48	14.37	26.89
86/87	9,265	3,498,989	250,896	377.66	13.95	27.08
87/88	10,065	3,817,893	277,128	379.32	13.78	27.53
88/89	10,683	3,918,920	291,587	366.84	13.44	27.29
89/90	11,550	4,030,864	347,425	348.99	11.60	30.08
90/91	11,490	3,900,667	327,383	339.48	11.91	28.49
91/92	11,248	3,840,983	307,495	341.48	12.49	27.34
92/93	10,668	3,715,478	292,006	348.28	12.72	27.37

Sumber : Pusat Informatika, Balitbang Dikbud

Tabel 2.5b
Perkembangan Sekolah, Murid, dan Guru Madrasah Aliyah (MA)
Tahun 1989/90—1992/93

Tahun	Sekolah			Murid			Guru		
	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah
1989/90	271	1,883	2,154	1193,68	1881,54	3075,22	5,695	205,46	262,41
1990/91	300	2,371	2,671	1284,80	2039,42	3324,22	6,385	230,96	294,81
1991/92	344	2,199	2,543	1373,46	2235,50	3608,96	6,990	242,80	312,70
1992/93	367	2,349	2,716	1517,32	2469,68	3987,00	7,106	246,93	317,99

Sumber : Pusat Informatika, Balitbang Dikbud

Tabel 2.6
**Susunan Program Pengajaran
 Sekolah Menengah Umum
 Kelas I dan II**

Mata Pelajaran	Jumlah Jam Pelajaran	
	Kelas I	Kelas II
1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2
2. Pendidikan Agama	2	2
3. Bahasa dan Sastra Indonesia	5	5
4. Sejarah Nasional dan Sejarah Umum	2	2
5. Bahasa Inggris	4	4
6. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	2	2
7. Matematika	6	6
8. IPA	5	5
a. Fisika	4	4
b. Biologi	3	
c. Kimia		
9. IPS	3	3
a. Ekonomi		
b. Sosiologi	-	2
c. Geografi	2	2
10. Pendidikan Seni	2	-
Jumlah	42	42

Sumber : Pusat Pengembangan Kurikulum Balitbang Dikbud

Tabel 2.7
**Susunan Program Pengajaran
 Sekolah Menengah Umum
 Kelas III**

Mata Pelajaran	Jumlah Jam Pelajaran	
	Kelas III	
<i>Umum</i>		
1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan		2
2. Pendidikan Agama		2
3. Bahasa dan Sastra Indonesia		3
4. Sejarah Nasional dan Sejarah Umum		2
5. Bahasa Inggris		5
6. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan		2
<i>Khusus</i>		
1. Bahasa dan Sastra Inggris		8
2. Bahasa Inggris		6
3. Bahasa Asing Lain		9
4. Sejarah Budaya		5
Jumlah	42	42

Tabel 2.8
**Susunan Program Pengajaran
 Sekolah Menengah Umum
 Kelas III**

Program Ilmu Pengetahuan Alam	Jumlah Jam Pelajaran	Kelas III
Mata Pelajaran		
<i>Umum</i>		
1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
2. Pendidikan Agama	2	2. Pendidikan Agama
3. Bahasa dan Sastra Indonesia	3	3. Bahasa dan Sastra Indonesia
4. Sejarah Nasional dan Sejarah Umum	2	4. Sejarah Nasional dan Sejarah Umum
5. Bahasa Inggris	5	5. Bahasa Inggris
6. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	2	6. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan
<i>Khusus</i>		
1. Fisika	7	1. Ekonomi
2. Biologi	7	2. Sosiologi
3. Kimia	6	3. Tata Negara
4. Matematika	8	4. Antropologi
Jumlah	42	Jumlah

Tabel 2.9
**Susunan Program Pengajaran
 Sekolah Menengah Umum
 Kelas III**

Program Ilmu Pengetahuan Sosial	Jumlah Jam Pelajaran	Kelas III
Mata Pelajaran		
<i>Umum</i>		
1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
2. Pendidikan Agama	2	2. Pendidikan Agama
3. Bahasa dan Sastra Indonesia	3	3. Bahasa dan Sastra Indonesia
4. Sejarah Nasional dan Sejarah Umum	2	4. Sejarah Nasional dan Sejarah Umum
5. Bahasa Inggris	5	5. Bahasa Inggris
6. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	2	6. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan
<i>Khusus</i>		
1. Fisika	7	1. Ekonomi
2. Biologi	7	2. Sosiologi
3. Kimia	6	3. Tata Negara
4. Matematika	8	4. Antropologi
Jumlah	42	Jumlah

Tabel 2.10
Jumlah Mahasiswa dan Lulusan PT
Menurut Status Perguruan Tinggi
Tahun 1992/1993

Jenjang	Mhs. Terdaftar					Lulusan				
	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri (%)	Swasta (%)	Jumlah (%)				
1. Strata 0 (S0)	93,059	273,329	366,388	20,894 22.45	43,081 15.76	63,997 17.47				
2. Strata 1 (S1)	427,042	1,000,626	1,427,668	51,821 12.13	77,154 7.71	128,987 9.03				
Jumlah	520,101	1,273,955	1,794,056	72,715 13.98	120,235 9.44	192,964 10.7				

Sumber : Pusat Informatika, Balitbang Dikbud, 1992/1993

Tabel 2.11
Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Sekolah Luar Biasa
Tahun 1969—1992/93

Tahun	Sekolah	Murid	Guru	Rasio		
				M/S	M/G	G/S
69	67	2,883	456	43.03	6.32	6.81
70	79	3,790	670	47.97	5.66	8.48
71	84	3,803	677	45.27	5.62	8.06
72	94	3,874	698	41.21	5.55	7.43
73	119	3,917	719	32.92	5.45	6.04
74	138	4,245	860	30.76	4.94	6.23
75	150	4,767	928	31.78	5.14	6.19
76	172	5,627	1,002	32.72	5.62	5.83
77	193	7,872	1,302	40.79	6.05	6.75
78/79	217	8,878	1,395	40.91	6.36	6.43
79/80	230	8,565	1,497	37.24	5.72	6.51
80/81	241	9,575	1,617	39.73	5.92	6.71
81/82	253	10,376	2,300	41.01	4.51	9.09
82/83	308	12,421	2,441	40.33	5.09	7.93
83/84	376	16,464	3,289	43.79	5.01	8.75
84/85	350	17,550	3,479	50.14	5.04	9.94
85/86	368	18,570	3,778	50.46	4.92	10.27
86/87	378	18,970	3,978	50.19	4.77	10.52
87/88	421	19,106	4,342	45.38	4.40	10.31
88/89	447	19,859	4,959	44.43	4.00	11.09
89/90	479	20,752	5,353	43.32	3.88	11.18
90/91	519	22,628	5,520	43.60	4.10	10.64
91/92	526	24,508	5,783	46.59	4.24	10.99
92/93	536	25,514	5,835	47.60	4.37	10.89

Sumber : Pusat Informatika, Balitbang Dikbud, 1992/1993

LAMPIRAN TABEL BAB III

Tabel 3.1a
**Jumlah Murid SD+MI 7-12, Penduduk Usia 7-12 Tahun
dan APM (Angka Partisipasi Murni)**

Periode	Tahun	Murid SD+MI		
		7-12 th	P7-12 th	APM
Sbl Repelita	68	7,403,000	17,897,000	41.36
Akhir Rep. I	73	13,344,000	20,649,000	64.62
Akhir Rep. II	78	17,037,000	21,484,000	79.30
Akhir Rep. III	83	20,153,000	23,809,000	84.64
Akhir Rep. IV	88	23,498,300	25,802,000	91.07
Th. 4 Rep. V	92	25,215,218	27,558,097	91.50

Sumber : Pusat Informatika, Balitbang Dikbud.

Tabel 3.1b
**Jumlah Murid SLTP, Penduduk Usia 13-15 Tahun
dan APK (Angka Partisipasi Kasar)**

Periode	Tahun	Murid SLTP	P13-15 th	APK
Sbl Repelita	68	1,150,000	6,818,000	16.87
Akhir Rep. I	73	1,535,701	8,314,000	18.47
Akhir Rep. II	78	2,673,976	9,541,000	28.03
Akhir Rep. III	83	4,757,608	10,709,400	44.42
Akhir Rep. IV	88	6,446,966	12,512,000	51.53
Th. 4 Rep. V	92*)	6,741,300	12,715,998	53.01

Catatan: Termasuk Madrasah Tsanawiyah

Tabel 3.2
Jumlah Buta Huruf Penduduk Usia 10 Tahun atau Lebih dan Usia 10—44 tahun
Tahun 1971, 1980, 1990

No. Variabel	Sensus		
	1971	1980	1990
1. BH. > 10 Th	31,464,860	30,096,559	21,494,177
2. Pend. > 10 Th	80,507,076	104,501,940	135,039,581
3. Angka BH > 10 Th	39.08%	28.80%	15.92%
4. BH 10—44 Th	20,416,747	16,274,202	8,568,430
5. Pend. > 10—44 Th	64,445,648	81,403,369	104,672,662
6. Angka BH > 10—44 Th	31.68%	19.99%	8.19%

Sumber : Ditjen Diklusepora, Depdikbud

Tabel 3.3
**Perkembangan Jumlah Peserta didik Program Kejar Paket A
Selama Pelita V**

Tahun	Peserta didik
1989/90	600,000
1990/91	693,000
1991/92	1,010,154
1992/93	1,346,126
1993/94	1,649,498

Sumber : Ditjen Diklusepora, Depdikbud

Tabel 3.4
Perkembangan Jumlah Murid SD dan SLTP
Repelita I — V (Tahun 1969—1993/94)

		<i>(dalam ribuan)</i>	
		Jumlah	Jumlah
Repelita		Murid SD	Murid SLTP
Repelita I	Th. 1969	12,802.4	1,127.2
	Th. 1970	12,821.6	1,292.2
	Th. 1971	12,895.9	1,400.8
	Th. 1972	13,030.5	1,444.0
	Th. 1973	13,069.4	1,518.1
Repelita II	Th. 1974/75	13,314.2	1,691.0
	Th. 1975/76	14,280.1	1,900.1
	Th. 1976/77	15,550.1	2,136.0
	Th. 1977/78	17,265.2	2,339.8
	Th. 1978/79	19,074.8	2,673.9
Repelita III	Th. 1979/80	21,165.7	2,982.5
	Th. 1980/81	22,551.8	3,412.1
	Th. 1981/82	23,862.4	3,809.3
	Th. 1982/83	24,700.0	4,272.8
	Th. 1983/84	25,804.3	4,757.6
Repelita IV	Th. 1984/85	26,567.6	5,188.9
	Th. 1985/86	26,550.9	5,669.9
	Th. 1986/87	26,444.7	6,131.4
	Th. 1987/88	26,649.8	6,422.4
	Th. 1988/89	26,725.3	6,446.9
Repelita V	Th. 1989/90	26,528.5	5,852.5
	Th. 1990/91	26,348.3	5,686.0
	Th. 1991/92	26,325.7	5,604.5
	Th. 1992/93	26,339.9	5,576.4
	Th. 1993/94 *)	26,231.7	5,746.3

Catatan: *) Angka Perkiraan

Sumber : Pusat Informatika, Balitbang Dikbud.

Tabel 3.5
Perkembangan Jumlah Penduduk Usia 7-12 Th. dan 13-15 Th.
Tahun 1968—1992

Periode	Tahun	P7-12 th	P13-15 th
Sbl Repelita	68	17,897,000	6,818,000
Akhir Rep. I	73	20,649,000	8,314,000
Akhir Rep. II	78	21,484,000	9,541,000
Akhir Rep. III	83	23,809,000	10,709,400
Akhir Rep. IV	88	25,802,000	12,512,000
Th. 4 Rep. V	92	27,558,097	12,715,998

Sumber : Biro Pusat Statistik.

Tabel 3.6
Angka Melanjutkan dari SD ke SLTP
Repelita II - V (1974/75—1993/94)

Repelita		Melanjutkan (%)
Repelita II	1974/75	59.07
	1975/76	63.58
	1976/77	66.60
	1977/78	65.35
	1978/79	72.34
Repelita III	1979/80	73.66
	1980/81	73.77
	1981/82	71.55
	1982/83	69.44
	1983/84	70.80
Repelita IV	1984/85	66.83
	1985/86	64.76
	1986/87	64.93
	1987/88	66.99
	1988/89	64.66
Repelita V	1989/90	59.87
	1990/91	60.32
	1991/92	62.21
	1992/93	61.37
	1993/94 *)	62.10

Catatan: Angka Melanjutkan= Murid Baru Tingkat I SLTP/Lulusan SD
*) Angka Perkiraan

Sumber : Pusat Informatika, Balitbang Dikbud.

Tabel 3.7
Perkembangan Unit Gedung Baru dan Ruang Kelas Baru SD dan SMP
Repelita II—V (Tahun 1974/75—1993/94)

Repelita	SD		SMP	
	Unit Gedung	R.Kelas	Unit Gedung	R.Kelas
1. Repelita II	62,000	183,000	352	6,562
2. Repelita III	74,170	334,920	2,429	28,767
3. Repelita IV	8,025	61,169	791	12,191
4. Repelita V	2,666	13,493	1,640	16,786
Jumlah Rep. II—V	146,861	592,582	5,212	64,306

Sumber : Pusat Informatika, Balitbang Dikbud.

Tabel 3.8
Perkembangan Jumlah Guru SD dan SLTP
Repelita I — V (Tahun 1969—1993/94)

Repelita	Tahun	Jumlah	
		Guru SD	Guru SLTP
Repelita I	1969	323.2	72.5
	1970	397.5	94.6
	1971	414.8	110.4
	1972	413.4	109.1
	1973	427.2	107.4
Repelita II	1974/75	444.2	109.9
	1975/76	472.7	117.5
	1976/77	514.9	123.5
	1977/78	551.9	134.0
	1978/79	592.4	149.3
Repelita III	1979/80	619.7	163.5
	1980/81	666.7	202.0
	1981/82	713.2	215.8
	1982/83	841.8	247.2
	1983/84	925.8	275.6
Repelita IV	1984/85	986.6	308.1
	1985/86	1,037.1	339.3
	1986/87	1,078.6	376.6
	1987/88	1,107.1	401.7
	1988/89	1,134.0	412.4
Repelita V	1989/90	1,141.4	467.1
	1990/91	1,136.9	409.7
	1991/92	1,141.0	389.5
	1992/93	1,153.8	365.0
	1993/94 *)	1,160.2	357.7

Catatan: *) Angka Perkiraan

Sumber : Pusat Informatika, Balitbang Dikbud.

Tabel 3.9

**Jumlah Peserta Didik Program Kejar Paket B
Selama Pelita V**

Tahun	Peserta didik
1989/90	-
1990/91	3,930
1991/92	6,000
1992/93	9,613
1993/94	186,99

Sumber : Ditjen Diklusepora Depdikbud.

Tabel 3.10
**Jumlah Murid SLTA, Penduduk Usia 16-18 Tahun
 dan APK (Angka Partisipasi Kasar)**

Periode	Tahun	Murid	P16-18 th	APK
Sbl Repelita	68	482,000	5,608,000	8.59
Akhir Rep. I	73	696,185	7,382,000	9.43
Akhir Rep. II	78	1,289,744	8,776,000	14.70
Akhir Rep. III	83	2,653,819	9,923,800	26.74
Akhir Rep. IV	88	3,918,920	11,342,000	34.55
Th. 4 Rep. V	92*)	4,114,178	11,886,000	34.61

Catatan: Termasuk Madrasah Aliyah

Sumber : *Pusat Informatika, Balitbang Dikbud.*

Tabel 3.11
**Persentase Jumlah Peserta Didik, Pendidikan Kejuruan dan Teknologi
Terhadap Jumlah Peserta Didik SLTP, SLTA, dan PT
Tahun 1973—1992/93**

Tingkat Pendidikan	1973	1978/79	1983/84	1988/89	1992/93	(%)
1. SLTP	21.42	15.08	1.71	1.57	1.52	
2. SLTA	44.2	36.74	21.81	27.8	34.08	
3. PT	38.13	37.44	40.26	

Sumber : Pusat Informatika Balitbang Dikbud

Tabel 3.12
Jumlah Mahasiswa PT, Penduduk Usia 19-24 Tahun
dan APK (Angka Partisipasi Kasar)

Periode	Tahun	Murid	P16-18 th	APK
Sbl Repelita	68	156,500	9,705,000	1.61
Akhir Rep. I	73	231,000	11,962,000	1.93
Akhir Rep. II	78	342,166	14,747,000	2.32
Akhir Rep. III	83	823,925	15,667,600	5.26
Akhir Rep. IV	88	1,356,756	19,464,700	6.97
Th. 4 Rep. V	92	1,795,500	21,288,100	8.43

Sumber : Pusat Informatika, Balitbang Dikbud.

Tabel 3.13
Perbandingan Peserta Didik Perempuan Terhadap Laki-laki
Untuk Jenjang SD, SLTP, SLTA, dan PT
Tahun 1973, 1978/79, 1983/84, 1988/89, 1992/93

Tingkat Pendidikan	(%)				
	1973	1978/79	1983/84	1988/89	1992/93
1. SD	45.28	46.95	47.64	48.32	48.37
2. SLTP	38.33	40.94	42.47	45.03	45.76
3. SLTA	33.88	37.45	40.61	43.49	45.06
4. PTN	35.29	36.32

Catatan : ... tidak ada data

Sumber : *Pusat Informatika, Balitbang Dikbud.*

Tabel 3.14
Jumlah Guru menurut Kewenangan Mengajar Tahun 1992/93

Tingkat Pendidikan	Semi Berwenang	%	Tidak Berwenang	%	Berwenang	%	Jumlah
SD	90,454	7.84	997,347	86.44	66,015	5.72	1,153,816
SLTP	198,904	51.97	80,374	21.00	103,470	27.03	382,748
SLTA	60,534	20.28	128,171	42.95	109,746	36.77	298,451

Sumber : Pusat Informatika Balitbang Dikbud

Tabel 3.15

Komposisi Guru Menurut Jurusan Pendidikan dan Bidang Studi yang Diajarkan
Jenis Sekolah SMP

No.	Bidang Studi	Pend. Agama		Pend. Jasmani		Pend. Kesenian		Bhs. Ind.	Bhs. Daerah	Bhs. Inggris	IPS	Mate- matika	IPA	Ke- tram- pilan	Jumlah
		Pend.	Agama	Pend.	Jasmani	Pend.	Kesenian	Ind.	Daerah	Inggris					
1	Pend. Agama	91.55	0.86	0.60	0.89	0.52	1.75	0.19	0.52	0.89	0.71	0.37	1.15	100.00	
2	PMP	1.12	77.83	5.43	0.33	1.38	3.53	0.35	0.81	4.91	1.07	0.74	2.50	100.00	
3	PSPB	0.86	10.12	37.21	0.30	2.95	5.23	0.93	1.34	28.39	1.34	2.09	9.23	100.00	
4	Pend. Jasmani	0.75	1.32	0.68	76.82	1.56	4.44	0.16	0.72	4.56	1.15	3.28	4.56	100.00	
5	Pend. Kesenian	0.26	0.81	1.09	0.64	81.52	4.65	0.16	2.88	2.42	0.74	0.79	4.05	100.00	
6	Bhs. Ind.	0.25	0.50	0.35	0.12	0.66	90.50	1.96	3.06	0.69	0.36	0.35	1.21	100.00	
7	Bhs. Daerah	2.16	0.22	2.02	0.65	6.78	8.15	64.21	1.73	2.24	2.16	2.16	7.50	100.00	
8	Bhs. Inggris	0.43	0.44	0.64	0.12	0.58	6.82	0.35	87.04	1.05	0.57	0.51	1.47	100.00	
9	IPS	0.48	2.78	12.94	0.31	0.97	3.33	0.43	0.48	68.30	0.68	3.64	5.66	100.00	
10	Matematika	0.13	0.44	0.48	0.13	0.38	1.26	0.13	0.53	0.68	91.38	3.22	1.25	100.00	
11	IPA	0.14	0.61	0.97	0.72	0.92	2.16	0.18	0.51	3.98	4.56	80.98	4.27	100.00	
12	Ketrampilan	0.10	1.68	0.19	0.50	3.19	3.32	0.13	0.24	2.01	1.02	0.81	86.80	100.00	
Jumlah		3.49	6.54	3.35	5.75	6.26	16.84	1.64	10.19	9.28	13.96	12.23	10.47	100.00	

Sumber : Pusat Informatika Balitbang Dikbud

Tabel 3.16

**Komposisi Guru Menurut Jurusan Pendidikan dan Bidang Studi yang Diajarkan
Jenis Sekolah SMA**

No.	Bidang Studi	Pend. Agama		PMP		PSPB		Sej. Nas.		Bhs. & Sastra		Eko- nomi		Geo- grafi		Pend. Jas- mani		Pend. Kese- nian		Pend. Ke- tramp		Bhs. Inggris		A1/ A2		A1/ A3		A1/ A4		Jumlah	
1	Pend. Agama	88.78	0.58	0.13	0.32	0.91	0.58	0.32	0.58	0.13	0.26	0.26	1.30	5.71	0.13	100.00															
2	PMP	0.62	80.11	2.98	0.62	0.83	1.20	1.08	0.25	0.37	0.50	0.33	0.91	9.61	0.58	100.00															
3	PSPB	0.49	4.14	62.93	18.47	1.50	2.31	0.97	0.85	0.49	0.49	0.73	0.69	4.02	1.91	100.00															
4	Sejarah Nas.	1.20	3.13	47.23	30.84	1.69	5.30	1.20	0.48	0.48	1.93	0.00	1.69	4.34	0.48	100.00															
5	Bahasa & Sastra	0.25	0.19	0.11	0.11	92.15	0.08	0.11	0.11	0.39	0.00	2.18	0.77	1.27	2.29	100.00															
6	Ekonomi	0.00	0.38	0.08	0.08	0.64	84.78	0.57	0.11	0.11	5.44	0.34	1.17	6.23	0.08	100.00															
7	Geografi	0.00	1.16	0.83	0.44	0.66	1.54	88.01	0.33	0.17	0.61	0.17	3.74	1.93	0.44	100.00															
8	Pend. Jasmani	1.63	0.43	0.82	0.48	0.96	0.14	0.91	91.22	0.34	0.48	0.24	1.30	0.96	0.10	100.00															
9	Pend. Kesenian	0.37	0.90	2.61	2.46	2.69	1.57	0.90	1.42	78.66	3.21	0.67	1.19	2.69	0.67	100.00															
10	Pend. Ketrampilan	0.77	2.03	0.21	0.21	2.58	3.49	1.89	0.91	2.37	78.49	0.56	3.35	2.37	0.77	100.00															
11	Bhs. Inggris	0.48	0.61	0.17	0.14	6.15	1.05	0.27	0.10	0.10	0.24	88.32	0.95	1.19	0.24	100.00															
12	A1/A2	0.26	0.45	0.12	0.11	0.47	0.59	0.30	0.27	0.15	0.81	0.32	95.78	0.35	0.03	100.00															
13	A3	2.33	10.17	4.84	1.18	3.54	21.92	4.03	0.66	0.98	2.16	2.82	3.98	41.00	0.37	100.00															
14	A4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	87.50	100.00															
	Jumlah	4.34	7.04	5.72	1.98	10.70	9.12	5.26	5.60	3.27	4.21	7.90	28.03	6.23	0.60	100.00															

Sumber : Pusat Informatika Balitbang Dikbud

Tabel 3.17
Tenaga Pengajar Menurut Tingkat Sekolah dan Ijazah Tertinggi
Tahun 1992/93

No.	Ijazah Tertinggi	SD	SLTP	SLTA	PT
1	SD	877	-	-	-
2	SLTP	83,733	-	-	-
3	SLTA	5,844	493,15	-	-
4	SPG	997,347	-	-	-
5	Sarmud IKIP	-	270,819	135,637	-
6	Sarmud Non-IKIP	42,209	18,921	31,201	-
7	Sarjana IKIP	-	34,141	109,327	15,987
8	Sarjana Non-IKIP	23,806	9,367	21,867	48,728
9	S2	-	185	419	13,077
10	S3	-	-	2,649	
Jumlah		1,153,816	382,748	298,451	80,441

Sumber : Pusat Informatika Balitbang Dikbud

Tabel 3.18
Kebutuhan Guru SD dengan Alternatif
Guru Merangkap di Tingkat I dan II
Tahun 1992/93

Klasifikasi yang ada (1)	Kebutuhan (2)	Lulusan (3)	Guru (4)	Atrisi (5)	Persediaan	Kesenjangan
					(6)= (3)+(4)-(5)	(7)
1. Guru Kelas	823,187	5,971	795,731	15,915	785,787	(37,400)
2. Guru Olahraga	148,257		63,476	1,270	62,206	(86,051)
3. Guru Agama	148,257		152,235	3,045	149,190	933
4. Kepala Sekolah	148,257		142,375	2,848	139,527	(8,730)
Jumlah	1,267,958	5,971	1,153,817	23,078	1,136,710	(131,248)

Sumber : Pusat Informatika Balitbang Dikbud

Tabel 3.19
Kebutuhan Guru SD
Tahun 1992/93
Alternatif Guru Kelas = Kelas

No. Bidang Studi (1)	Studi (2)	Kebutuhan (3)	Lulusan yg ada (4)	Guru (5)	Atrisi (6)	Persediaan	Kesenjangan
						(7)=(4+5-6)	(7)-(3)
1 Guru Kelas		994,597	5,971	795,731	15,915	785,787	(208,810)
2 Guru Olahraga		148,257		63,475	1,270	62,205	(86,052)
3 Guru Agama		148,257		152,235	3,045	149,190	933
4 Kepala Sekolah		148,257		142,375	2,848	139,527	(8,730)
Jumlah		1,439,368	5,971	1,153,816	23,078	1,136,709	(302,659)

Sumber : Pusat Informatika Balitbang Dikbud

Tabel 3.19

Kebutuhan Guru SD**Tahun 1992/93****Alternatif Guru Kelas = Kelas**

		Guru				
No.	Bidang Studi	Kebutuhan	Lulusan yg ada	Atrisi	Persediaan	Kesenjangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4+5-6)
1	Guru Kelas	994,597	5,971	795,731	15,915	785,787 (208,810)
2	Guru Olahraga	148,257		63,475	1,270	62,205 (86,052)
3	Guru Agama	148,257		152,235	3,045	149,190 933
4	Kepala Sekolah	148,257		142,375	2,848	139,527 (8,730)
Jumlah		1,439,368	5,971	1,153,816	23,078	1,136,709 (302,659)

Sumber : Pusat Informatika Balitbang Dikbud

Tabel 3.20
Jumlah Lulusan Program Tenaga Kependidikan PT
Menurut Bidang Studi
Tahun 1991/1992

No.	Bidang Studi	Program		
		Diploma	Sarjana	Jumlah
1	Pend. Pancasila & Kewarganeg.	1,294	2,919	4,213
2	Pend. Agama	304	466	770
3	Bahasa & Sastra Indonesia	2,102	3,233	5,335
4	Matematika	2,155	1,643	3,798
5	IPA	42	0	42
6	IPS	51	68	119
7	Kerajinan Tangan & Kesenian	744	420	1,164
8	Pend. Jasmani & Kesehatan	583	752	1,335
9	Bahasa Inggris	1,966	2,404	4,370
10	Muatan Lokal	333	2,276	2,609
11	Sejarah Nasional & Umum	916	1,128	2,044
12	IPA Fisika	942	637	1,579
13	IPA Biologi	1,051	1,471	2,522
14	IPA Kimia	570	770	1,340
15	IPS Ekonomi	243	3,413	3,656
16	IPS Sosiologi	-	-	-
17	IPS Geografi	334	600	934
18	Bahasa Asing lain	54	277	331
19	Kesejahteraan Keluarga	411	447	858
20	Pend Teknik Otomotif/Mesin	15	563	578
21	Pend Teknik Bangunan	16	402	418
22	Pend Teknik Elektro	10	249	259
23	Pend Teknik Elektronika	0	85	85
24	PGSD	5,971	-	5,971
Jumlah		20,107	24,223	44,330

Sumber : Pusat Informatika, Balitbang Dikbud.

Tabel 3.21

Kesepadanhan Antara Kebutuhan dan Persediaan Guru SLTP dan SLTA Umum
Tahun 1992/93
(Berdasarkan Kurikulum 1994)

No.	Bidang Studi	Kebutuhan Lulusan yg ada		Persediaan			Kesenjangan
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4+5-6)	
1	Pend. Pancasila & Kewarganegaraan	21,121	4,213	269,38	539	30,612	9,491
2	Pend. Agama	18,063	770	111,56	223	11,703	(6,360)
3	Bahasa & Sastra Indonesia	49,470	5,335	46,787	936	51,186	1,716
4	Matematika	51,935	3,798	39,343	787	42,354	(9,581)
5	IPA	36,812	42	28,714	574	28,182	(8,630)
6	IPS	36,812	119	75,885	1518	74,486	37,674
7	Kerajinan Tangan & Kesenian	14,199	1,164	19,794	396	20,562	6,363
8	Pend. Jasmani & Kesehatan	18,063	1,335	20,304	406	21,233	3,170
9	Bahasa Inggris	37,240	4,370	31,217	624	34,963	(2,277)
10	Muatan Lokal	36,812	2,609	17,643	353	19,899	(16,913)
11	Sejarah Nasional & Umum	8,951	2,044	17,824	356	19,512	10,561
12	IPA Fisika	12,756	1,579	6,391	128	7,842	(4,914)
13	IPA Biologi	10,853	2,522	6,391	128	8,785	(2,068)
14	IPA Kimia	8,487	1,340	6,391	128	7,603	(884)
15	IPS Ekonomi	10,808	3,656	6,474	129	10,001	(807)
16	IPS Sosiologi	4,937	-	8,595	172	8,423	3,486
17	IPS Geografi	3,807	934	4,838	97	5,675	1,868
18	Bahasa Asing lain	183	331	4,793	96	5,028	4,845
Jumlah		381,309	36,161	379,478	7,590	40,8049	26,740

Sumber : Pusat Informatika Balitbang Dikbud

Tabel 3.22
Kualifikasi Dosen PTN dan PTS
Menurut Pendidikan Tertinggi
Tahun 1992/1993

Tingkat				
No.	Pendidikan	PTN	PTS	Jumlah
1.	S1	32,386	32,329	64,715
2.	S2	10,336	2,741	13,077
3.	S3	2,579	70	2,649
	Jumlah	45,301	35,140	80,441

Sumber : Rakernas Dikti, 1992/1993

Tabel 3.23

**Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang Dilaksanakan oleh Masyarakat
Selama Repelita V (1989/90—1993/94)**

No.	Provinsi	Kejar Usaha					Magang					Jumlah	
		1989/90	1990/91	1991/92	1992/93	1993/94	Jumlah	1989/90	1990/91	1991/92	1992/93	1993/94	
1.	DI Aceh	1,700	1,150	1,250	1,050	400	5,550	70	20	100	200	620	1,010
2.	Sumut	2,250	1,150	1,630	1,850	700	7,580	100	40	300	340	820	1,600
3.	Sumbar	1,750	1,100	1,470	1,150	400	5,870	80	20	200	280	640	1,220
4.	Riau	1,100	1,070	850	1,050	400	4,470	70	20	100	140	380	710
5.	Jambi	1,100	1,050	850	450	260	3,710	70	20	100	120	300	610
6.	Sumsel	1,700	1,020	1,050	1,550	350	5,670	80	20	150	200	500	950
7.	Bengkulu	1,100	1,050	950	350	250	3,700	70	20	100	80	260	530
8.	Lampung	1,200	1,100	850	1,050	450	4,650	80	20	100	80	260	540
9.	Jakarta	1,150	1,110	850	1,140	1,000	5,250	100	40	300	170	140	750
10.	Jabar	4,000	2,070	5,150	7,550	1,200	19,970	150	40	700	480	960	2,330
11.	Jateng	4,500	4,170	7,210	7,600	1,250	24,730	150	70	700	720	1,160	2,800
12.	DI Yogyka	2,150	1,100	2,600	3,050	1,000	9,900	60	30	300	100	140	630
13.	Jatim	4,500	1,150	6,160	10,050	1,320	23,180	150	40	700	740	1,420	3,050
14.	Bali	1,150	1,100	1,250	1,050	300	4,850	60	20	100	160	420	760
15.	NTB	1,150	1,020	1,010	650	200	4,030	60	20	80	120	420	700
16.	NTT	1,150	1,050	1,100	1,050	650	5,000	60	20	80	240	900	1,300
17.	Tim-tim	1,100	1,050	720	650	400	3,920	50	20	70	260	720	1,120
18.	Kalbar	1,150	920	1,000	1,550	600	5,220	70	10	80	140	560	860
19.	Kalteng	1,100	1,050	1,010	950	450	4,560	70	40	80	120	240	550
20.	Kalsel	1,150	1,050	1,050	1,850	600	5,700	80	30	80	200	680	1,070
21.	Kaltim	1,100	1,100	1,050	720	400	4,370	70	20	80	120	420	710
22.	Sulut	1,150	1,020	950	830	400	4,350	60	20	100	140	320	640
23.	Sulteng	1,100	770	970	730	400	3,970	60	20	100	80	320	580
24.	Sulsel	2,200	1,100	1,250	1,950	600	7,100	80	40	100	460	1,360	2,040
25.	Sultra	1,100	1,120	980	730	200	4,130	50	20	100	80	320	570
26.	Maluku	1,100	1,050	850	550	200	3,750	60	20	50	100	160	390
27.	Irja	1,100	800	570	250	420	3,140	60	10	50	180	540	840
Jumlah		45,000	32,490	44,630	51,400	14,800	188,320	2,120	710	5,000	6,050	14,980	28,860

Sumber : Direktorat Pendidikan Masyarakat, Ditjen Diklusepora

Tabel 3.24
Kesepadanan Antara Persediaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja
Tamatan S1 Menurut Keahlian/Fakultas
(Perkiraan Selama Repelita V)

Fakultas	Persediaan	Kebutuhan	P - K	Kelebihan
	(P)	(K)		(%)
1. Ilmu Pendidikan dan Keguruan	260,537	172,143	88,394	0.34
2. Kesenian dan Seni Rupa	1,688	502	1,186	0.70
3. Humanisme	24,038	7,175	16,863	0.70
4. Ilmu Sosial/Perilaku	251,333	88,672	162,661	0.65
5. Administrasi Perusahaan/Keuangan	33,671	46,287	(12,616)	(0.37)
6. Hukum dan Kehakiman	130,728	14,435	116,293	0.89
7. Ilmu-ilmu Murni	3,207	146,012	(142,805)	(44.53)
8. Teknik	72,214	84,846	(12,632)	(0.17)
9. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	53,146	19,135	34,011	0.64
10. Komunikasi Massa dan Dokumentasi	3,607	1,403	2,204	0.61
Jumlah	834,169	580,610	253,559	0.30

Sumber : Studi Tenaga Kerja Lulusan Pendidikan Tinggi Bappenas, Depdikbud, Depnaker, BPS, 1990/1991

Tabel 3.25
Kesepadanan Antara Persediaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja
Tamatkan S0 Menurut Keahlian/Fakultas
(Perkiraan Selama Repelita V)

Fakultas	Persediaan	Kebutuhan	P - K	Kelebihan
	(P)	(K)		(%)
1. Ilmu Pendidikan dan Keguruan	195,460	197,956	(2,496)	(0.01)
2. Kesenian dan Seni Rupa	1,590	1,813	(223)	(0.14)
3. Humanisme	142,869	144,076	(1,207)	(0.01)
4. Ilmu Sosial/Perilaku	15,921	18,340	(2,419)	(0.15)
5. Administrasi Perusahaan/Keuangan	3,374	3,507	(133)	(0.04)
6. Hukum dan Kehakiman	7,700	7,709	(9)	(0.00)
7. Ilmu-ilmu Murni	8,031	8,349	(318)	(0.04)
8. Teknik	18,845	24,193	(5,348)	(0.28)
9. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	8,698	9,522	(824)	(0.09)
10. Komunikasi Massa dan Dokumentasi	713	777	(64)	(0.09)
Jumlah	403,201	416,242	(13,041)	(0.03)

Sumber : Studi Tenaga Kerja Lulusan Pendidikan Tinggi Bappenas, Depdikbud, Depnaker, BPS, 1990/1991

Tabel 3.26
Kesepadan Antara Persediaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja
Tamat S0 Menurut Keahlian/Fakultas
(Perkiraan Selama Repelita VI)

Fakultas	Persediaan	Kebutuhan	P - K	Kelebihan
	(P)	(K)		(%)
1. Ilmu Pendidikan dan Keguruan	195,460	197,956	(2,496)	(0.01)
2. Kesenian dan Seni Rupa	1,590	1,813	(223)	(0.14)
3. Humanisme	142,869	144,076	(1,207)	(0.01)
4. Ilmu Sosial/Perilaku	15,921	18,340	(2,419)	(0.15)
5. Administrasi Perusahaan/ Keuangan	3,374	3,507	(133)	(0.04)
6. Hukum dan Kehakiman	7,700	7,709	(9)	(0.00)
7. Ilmu-ilmu Murni	8,031	8,349	(318)	(0.04)
8. Teknik	18,845	24,193	(5,348)	(0.28)
9. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	8,698	9,522	(824)	(0.09)
10. Komunikasi Massa dan Dokumentasi	713	777	(64)	(0.09)
Jumlah	403,201	416,242	(13,041)	(0.03)

Sumber : Studi Tenaga Kerja Lulusan Pendidikan Tinggi Bappenas, Depdikbud, Depnaker, BPS, 1990/91

Tabel 3.27
Kesepadanan Antara Persediaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja
Tamatkan S1 Menurut Keahlian/Fakultas
(Perkiraan Selama Repelita VII)

Fakultas	Persediaan	Kebutuhan	P - K	Kelebihan
	(P)	(K)		(%)
1. Ilmu Pendidikan dan Keguruan	724,460	617,413	107,047	0.15
2. Kesenian dan Seni Rupa	1,688	1,445	243	0.14
3. Humanisme	66,832	17,292	49,540	0.74
4. Ilmu Sosial/Perilaku	698,868	190,815	508,053	0.73
5. Administrasi Perusahaan/ Keuangan	93,625	72,326	21,299	0.23
6. Hukum dan Kehakiman	363,506	57,791	305,715	0.84
7. Ilmu-ilmu Murni	8,921	353,958	(345,037)	(38.68)
8. Teknik	170,610	185,646	(15,036)	(0.09)
9. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	147,780	33,222	114,558	0.78
10. Komunikasi Massa dan Dokumentasi	10,031	3,129	6,902	0.69
Jumlah	2,286,321	1,533,037	753,284	0.33

Sumber : Studi Tenaga Kerja Lulusan Pendidikan Tinggi Bappenas, Depdikbud, Depnaker, BPS, 1990/1991

Tabel 3.28
Kesepadan Antara Persediaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja
Tamatan S0 Menurut Keahlian/Fakultas
(Perkiraan Selama Repelita VII)

Fakultas	Persediaan	Kebutuhan	P - K	Kelebihan
	(P)	(K)		(%)
1. Ilmu Pendidikan dan Keguruan	507,408	512,012	(4,604)	(0.01)
2. Kesenian dan Seni Rupa	3,130	4,049	(919)	(0.29)
3. Humanisme	370,882	333,564	37,318	0.10
4. Ilmu Sosial/Perilaku	41,331	35,280	6,051	0.15
5. Administrasi Perusahaan/ Keuangan	8,761	7,973	788	0.09
6. Hukum dan Kehakiman	19,988	18,325	1,663	0.08
7. Ilmu-ilmu Murni	20,844	21,724	(880)	(0.04)
8. Teknik	48,929	65,237	(16,308)	(0.33)
9. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22,575	19,427	3,148	0.14
10. Komunikasi Massa dan Dokumentasi	1,052	1,738	(686)	(0.65)
Jumlah	1,044,900	1,019,329	25,571	0.02

*Sumber : Studi Tenaga Kerja Lulusan Pendidikan Tinggi Bappenas, Depdikbud, Depnaker,
BPS, 1990/1991*

Tabel 3.29

Efisiensi Internal Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 1983/84—1984/85, 1988/89—1989/90, dan 1991/92—1992/93

No.	Komponen	SD			SLTP			SLTA		
		83-84	88-89	91-92	83-84	88-89	91-92	83-84	88-89	91-92
1.	Jumlah Masukan	780	701	766	849	669	801	783	843	841
2.	Jumlah Tahun									
	Siswa	6012	5861	5944	2893	2658	2769	2828	2923	2815
3.	Jumlah Putus									
	Sekolah	220	299	234	151	331	199	217	157	159
4.	Jumlah Mengulang	560	542	504	55	29	29	47	29	24
5.	Rata-rata									
	Penyelesaian									
	Studi									
	a. Lulusan	6.54	6.52	6.49	3.06	3.03	3.03	3.05	3.03	3.03
	b. Putus Sekolah	4.15	4.31	4.17	1.96	1.9	1.71	2.02	2.34	1.70
	c. Kohort	6.01	5.86	5.94	2.89	2.66	2.77	2.83	2.92	2.82
6.	Tahun Siswa									
	Yang Terbuang									
	a. Jumlah	2428	2730	2301	411	682	394	545	429	317
	b. Mengulang	1515	1442	1325	116	51	54	106	62	48
	c. Putus Sekolah	913	1288	976	295	631	340	439	367	269
7.	Lamanya Waktu									
	Yang digunakan									
	per Lulusan	7.71	8.36	7.76	3.41	3.97	3.46	3.61	3.47	3.35
8.	Rasio Masukan-Keluaran									
	Ratios	0.78	0.72	0.77	0.88	0.75	0.87	0.83	0.87	0.90

Sumber : Pusat Informatika Balitbang Dikbud

Tabel 3.30

Efisiensi Internal Berdasarkan Model Kohort Murid**Jenis Sekolah : SD****Tahun 1991/92--1992/93**

Tahun	Tk.I	Tk.II	Tk.III	Tk.IV	Tk.V.	Tk.VI	Jumlah	Lulusan
1991/92 Murid	5,056,351	4,739,811	4,697,306	4,382,542	4,007,413	3,442,278	26,325,701	3,283,742
1992/93 Murid	5,008,587	4,701,202	4,546,697	4,358,654	4,090,878	3,633,977	26,339,995	
Mengulang	781,232	519,168	440,941	336,329	229,286	27,461	2,334,417	
1991/92 Naik Tk.	82.7%	86.6%	85.6%	88.1%	90.0%	95.4%	87.6%	
Repeater	15.5%	11.0%	9.4%	7.7%	5.7%	0.8%	8.9%	
Putus Sek.	1.8%	2.4%	5.0%	4.2%	4.3%	3.8%	3.5%	

Jumlah output	= 766	Rata-rata lama belajar			Murid tahun terbuang		
		Lulusan	Putus Sek.	Kohort	Jumlah	Mengulang	Putus Sek.
Jumlah	= 5944	6.49	4.17	5.94	2301	1325	976
Jumlah Putus	= 234	Input tahun per lulusan			Rasio input-output		
		7.76			0.77		

Jumlah mengulang = 504

Sumber : Pusat Informatika Balitbang Dikbud

Tabel 3.31
Efisiensi Internal Berdasarkan Model Kohort Murid
Jenis Sekolah : SD Tahun 1991/92—1992/93

Tahun	Tk.I	Tk.II	Tk.III	Tk.IV	Tk.V	Tk.VI	Jumlah
-	-	18	-	-	-	-	18
1991	1000	-	-	-	-	-	1000
-	155	-	-	-	-	-	115
-	-	3	827	20	-	-	23
1992	155	-	827	91	-	-	982
-	24	-	-	-	-	-	115
-	-	4	128	5	716	-	45
1993	24	-	219	716	-	-	959
-	-	20	24	67	-	-	91
-	-	-	6	190	13	-	45
1994	-	44	-	257	613	-	914
-	-	-	-	24	47	-	71
-	-	-	38	-	12	540	-
1995	-	-	62	267	540	-	869
-	-	-	-	20	31	-	51
-	-	-	-	53	9	235	-
1996	-	-	-	73	266	486	464
-	-	-	-	-	15	4	19
-	-	-	-	-	8	239	-
1997	-	-	-	79	243	-	332
-	-	-	-	-	2	-	2
-	-	-	-	-	71	3	-
1998	-	-	-	-	-	73	73
Murid	25	31	58	47	43	30	-
bertahan	-	-	-	-	-	-	234
menurut	1000	975	944	886	839	796	5944
tingkat	179	115	91	67	46	6	504
%	17,9%	11,8%	9,6%	7,6%	5,5%	0,8%	8,9%

mengulang menurut kohort dan tingkat

Sumber : Pusat Informatika, Balitbang Dikbud

Tabel 3.32

Efisiensi Internal Berdasarkan Model Kohort Murid**Jenis Sekolah : SLTP****Tahun 1991/92--1992/93**

Tahun		Tk.I	Tk.II	Tk.III	Jumlah
1991	Murid	2023956	1848460	1732099	5604515
1992	Murid	2037844	1822943	1716253	5577040
	Mengulang	23520	19650	14911	58081
91/92	Naik Tk.	89.1%	92.0%	94.7%	91.8%
	Mengulang	1.2%	1.1%	0.9%	1.0%
	Putus Sek.	9.7%	6.9%	4.4%	7.2%

Jumlah output	= 801	Rata-rata lama belajar			Murid tahun terbuang		
		Lulusan	Putus Sek.	Kohort	Jumlah	Mengulang	Putus Sek.
Jumlah	= 2769	3,03	1,71	2,77	365	25	340

Jumlah Putus	= 199	Masukan tahun per lulusan		Rasio masukan-keluaran	
		3,46			0,87
Jumlah mengulang	= 29				

Sumber : Pusat Informatika Balitbang Dikbud

Tabel 3.33
Kohort Murid SLTP

Tahun	Tk.I	Tk.II	Tk.III	Jumlah
-	- 97 -	- - -	- - -	- 97 -
1984	1000	-	-	1000
-	12	-	-	12
-	- 1 -	891	- 61 -	- 63 -
1985	12	891	-	Keluaran 903
-	0	9	-	10
-	- 0 -	10	- 1 -	- 38 -
1986	0	20	820	840
-	0	0	7	7
-	- 0 -	0	- 1 -	- 1 -
1987	0	0	25	26
-	0	0	0	0
-	- 0 -	0	- 0 -	- 0 -
1988	-	0	1	1
-	-	-	0	0
-	-	-	0	0
1989	-	-	0	0
-	-	-	0	0
Murid	- 99 -	- 63 -	- 37 -	- 199 -
bertahan	1000	901	944	2769
menurut	12	10	91	29
tingkat	-	-	-	-
%	1,2%	1,1%	9,6%	8,9%

mengulang menurut kohort dan tingkat

Sumber : Pusat Informatika, Balitbang Dikbud

Tabel 3.34
Efisiensi Internal Berdasarkan Model Kohort Murid
Jenis Sekolah : SLTA
Tahun 1991/92--1992/93

Tahun		Tk.I	Tk.II	Tk.III	Jumlah	Lulusan
1991	Murid	1,388,177	1,242,527	1,210,279	3,840,983	1,169,382
1992	Murid	1,323,304	1,286,446	1,156,900	3,766,650	
	Mengulang	12,553	10,461	10,370	33,384	
91/92	Naik Tk.	91.9%	92.3%	96.9%	93.5%	
	Mengulang	0.9%	0.8%	0.9%	0.9%	
	Putus Sek.	7.2%	6.9%	2.5%	5.6%	

Jumlah keluaran	= 841	Rata-rata lama belajar			Murid tahun terbuang		
		Lulusan	Putus Sek.	Kohort	Jumlah	Mengulang	Putus Sek.
Jumlah	= 2815	3,03	1,70	2,82	292	22	269
Jumlah Putus	= 159	Masukan tahun per lulusan			Rasio masukan-keluaran		
		3,35			0,90		
Jumlah mengulang	= 24						

Sumber : Pusat Informatika Balitbang Dikbud

Tabel 3.35
EKohort Murid SLTA
Tahun 1984—1989

Tahun	Tk.I	Tk.II	Tk.III	Jumlah
-	- 72	-	-	- 72
1984	1000	-	-	1000
-	9	-	-	9
-	- 1	919	- 61	- 64
1985	9	919	-	Keluaran 928
-	0	8	-	8
-	- 0	8	- 1	- 23
1986	0	16	848	864
-	0	0	- 7	7
-	- 0	0	- 15	1
1987	0	0	22	22
-	0	0	0	0
-	- 0	0	- 0	0
1988	-	0	0	1
-	-	0	0	0
-	-	- 0	- 0	0
1989	-	-	0	0
-	-	-	0	0
Murid	- 72	- 64	- 22	- 159
bertahan	1000	928	863	2815
menurut	9	8	7	24
tingkat	-	-	-	-
KMP%	0,9%	0,8%	0,9%	-

(Kohort Mengulang Per tingkat)

Sumber : Pusat Informatika, Balitbang Dikbud

DAFTAR FOTO

No.	Halaman	Fotografi
0	-	Dokumentasi Humas Depdikbud
1.	5	Dicky WP
2.	10	Edwin Rahardjo
3.	11	Edwin Djuanda
4.	17	Fendi Siregar
5.	19	Tara Sosrowardoyo
6.	23	Dokumentasi dan Riset, Majalah TEMPO
7.	24	Dokumentasi Humas Depdikbud
8.	26	Dokumentasi Humas Depdikbud
9.	28	Dokumentasi Humas Depdikbud
10.	34	Dokumentasi Humas Depdikbud
11.	35a	Dokumentasi dan Riset, Majalah TEMPO
12.	35b	Dokumentasi dan Riset, Majalah TEMPO
13.	36	Dokumentasi Humas Depdikbud
14.	40	Dokumentasi Humas Depdikbud
15.	43	Fendi Siregar
16.	45	Dokumentasi Humas Depdikbud
17.	48	Etno Data
18.	50	Dokumentasi TMII

Perpustakaan
Jenderal Soedirman

ISBN 979-401-191-6